BADAN POM

kata BPOM

SETARA BERDAYA BADAN POM

BERANI JUJUR! HEBAT!

NO Gratifikasi

LAPORAN KINERJA INTERIM

TRIWULAN III TAHUN 2026

BALAI POM DI BANYUMAS







Jalan A. Yani No. 24, Sokanegara | 0811-2602-011 | banyumas.pom.go.id

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Balai POM di Banyumas senantiasa diberikan kekuatan dan kelancaran dalam melaksanakan tugas pengawasan Obat dan Makanan hingga Triwulan III Tahun 2026. Perjalanan kinerja sampai dengan September 2026 menjadi momentum bagi kami untuk terus memperkokoh komitmen dalam menghadirkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, responsif, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat.

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2026 merupakan wujud komitmen Balai POM di Banyumas dalam menjaga transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas. Laporan ini menggambarkan perkembangan capaian kinerja sekaligus berbagai upaya perbaikan yang dilakukan dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Banjarnegara, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap. Setiap capaian yang tersaji merupakan hasil kerja bersama seluruh jajaran Balai POM di Banyumas dengan dukungan pemerintah daerah, mitra kerja, pelaku usaha, dan masyarakat.

Menghadapi dinamika kebijakan, perkembangan peredaran produk, dan tantangan pengawasan di lapangan, kami terus mendorong penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, peningkatan kualitas pengawasan, serta pengembangan budaya kerja yang adaptif dan berintegritas. Upaya tersebut merupakan bagian dari tanggung jawab bersama untuk memastikan Obat dan Makanan yang beredar memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan manfaat, sekaligus memberikan perlindungan yang optimal bagi masyarakat.

Memasuki periode akhir Tahun 2026, hasil evaluasi Triwulan III menjadi pijakan untuk mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan serta memperkuat langkah pencapaian target kinerja. Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan tugas pengawasan Obat dan Makanan. Semoga laporan ini dapat menjadi bahan pertanggungjawaban, refleksi, dan pembelajaran untuk terus meningkatkan kinerja, memperkuat kolaborasi, dan menghadirkan inovasi demi mewujudkan masyarakat yang sehat, produktif, dan terlindungi.

Banyumas, 20 Oktober 2026
Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan
di Banyumas,

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BADAN POM
DI BANYUMAS

Gidion, S.Si., M.Sc.
NIP. 19810717 200604 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
DAFTAR ISI II
DAFTAR TABEL III
DAFTAR GAMBAR VIII
HIGHLIGHT KINERJA XIV
BAB I PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Gambaran Umum Organisasi 2
1.3. Struktur Organisasi 11
1.4. Isu Strategis 16
BAB II PERENCANAAN KINERJA 18
2.1. Uraian Singkat Renstra 18
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 21
2.3. Perjanjian Kinerja (PK) 24
2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) 29
2.5. Metode Pengukuran 33
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 38
3.1. Capaian Kinerja Organisasi 38
3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya 169
3.3. Realisasi Anggaran 187
BAB IV PENUTUP 198
4.1 Kesimpulan 198
4.2 Saran 199

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 RKT Tahun 2026 Balai POM di Banyumas 24
Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2026 29
Tabel 2. 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Target per Triwulan 2026 33
Tabel 2. 4 Predikat Berdasarkan Kriteria NKO 36
Tabel 2. 5 Tingkat Efisiensi 37
Tabel 3. 1 Capaian NKO 42
Tabel 3. 2 Capaian kinerja Balai POM di Banyumas pada Triwulan III Tahun 2026 36
Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 39
Tabel 3. 4 Capaian IKSS 1 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 40
Tabel 3. 5 Perbandingan IKSS 1 dengan Target Tahunan 2026 40
Tabel 3. 6 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 1 41
Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja KTD/ESO Triwulan III Tahun 2026 43
Tabel 3. 8 Capaian IKSS 2 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 43
Tabel 3. 9 Perbandingan IKSS 2 dengan Target Tahunan 2026 44
Tabel 3. 10 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 2 46
Tabel 3. 11 Capaian Indikator Kinerja Sampel Pangan Olahan Triwulan III Tahun 2026 48
Tabel 3. 12 Capaian IKSS 3 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 48
Tabel 3. 13 Perbandingan IKSS 3 dengan Target Tahunan 2026 49
Tabel 3. 14 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 3 50
Tabel 3. 15 Capaian Indikator Kinerja KLB Triwulan III Tahun 2026 51
Tabel 3. 16 Capaian IKSS 4 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 52
Tabel 3. 17 Perbandingan IKSS 4 dengan Target Tahunan 2026 53
Tabel 3. 18 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 4 54
Tabel 3. 19 Capaian Indikator Kinerja Sampel PIRT Triwulan III Tahun 2026 55
Tabel 3. 20 Capaian IKSS 5 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 55
Tabel 3. 21 Perbandingan IKSS 5 dengan Target Tahunan 2026 56
Tabel 3. 22 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 5 57
Tabel 3. 23 Capaian Indikator Kinerja Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan III Tahun 2026 58

Tabel 3. 24 Capaian IKSS 6 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 59
Tabel 3. 25 Perbandingan IKSS 6 dengan Target Tahunan 2026 60
Tabel 3. 26 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 6 61
Tabel 3. 27 Capaian Indikator Kinerja Sarana Produksi Sediaan Farmasi Triwulan III Tahun 2026 62
Tabel 3. 28 Capaian IKSS 7 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 63
Tabel 3. 29 Perbandingan IKSS 7 dengan Target Tahunan 2026 64
Tabel 3. 30 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 7 65
Tabel 3. 31 Capaian Indikator Kinerja Sarana Produksi Pangan Olahan Triwulan III Tahun 2026 67
Tabel 3. 32 Capaian IKSS 8 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 67
Tabel 3. 33 Perbandingan IKSS 8 dengan Target Tahunan 2026 68
Tabel 3. 34 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 8 69
Tabel 3. 35 Capaian Indikator Kinerja Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Triwulan III Tahun 2026 71
Tabel 3. 36 Capaian IKSS 9 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 72
Tabel 3. 37 Perbandingan IKSS 9 dengan Target Tahunan 2026 73
Tabel 3. 38 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 9 74
Tabel 3. 39 Capaian Indikator Kinerja Sarana Distribusi Pangan Olahan Triwulan III Tahun 2026 75
Tabel 3. 40 Capaian IKSS 10 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 76
Tabel 3. 41 Perbandingan IKSS 10 dengan Target Tahunan 2026 76
Tabel 3. 42 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 10 78
Tabel 3. 43 Perubahan Realisasi IKU Iklan Januari-Agustus 2026 79
Tabel 3. 44 Jumlah Pengawasan Iklan TW III 2026 80
Tabel 3. 45 Capaian Indikator Kinerja Iklan Triwulan III Tahun 2026 80
Tabel 3. 46 Capaian IKSS 11 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 81
Tabel 3. 47 Perbandingan IKSS 11 dengan Target Tahunan 2026 81
Tabel 3. 48 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 11 82
Tabel 3. 49 Perubahan Realisasi IKU Label Tembakau Januari-Juli 2026 84
Tabel 3. 50 Capaian Indikator Kinerja Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik Triwulan III Tahun 2026 85
Tabel 3. 51 Capaian IKSS 12 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 85
Tabel 3. 52 Perbandingan IKSS 12 dengan Target Tahunan 2026 86

Tabel 3. 53 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 12 87
Tabel 3. 54 Capaian Indikator Kinerja Pengendalian AMR Triwulan III Tahun 2026 89
Tabel 3. 55 Capaian IKSS 13 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 89
Tabel 3. 56 Perbandingan IKSS 13 dengan Target Tahunan 2026 90
Tabel 3. 57 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 13 92
Tabel 3. 58 Capaian Indikator Kinerja Laboratorium Pengujian Triwulan III Tahun 2026 93
Tabel 3. 59 Capaian IKSS 14 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 94
Tabel 3. 60 Perbandingan IKSS 14 dengan Target Tahunan 2026 94
Tabel 3. 61 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 14 96
Tabel 3. 62 Capaian Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Pangan Aman Triwulan III Tahun 2026 98
Tabel 3. 63 Capaian IKSS 15 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 99
Tabel 3. 64 Perbandingan IKSS 15 dengan Target Tahunan 2026 100
Tabel 3. 65 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 15 101
Tabel 3. 66 Capaian Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Pangan Aman Triwulan III Tahun 2026 104
Tabel 3. 67 Capaian IKSS 16 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026 105
Tabel 3. 68 Perbandingan IKSS 16 dengan Target Tahunan 2026 106
Tabel 3. 69 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 16 107
Tabel 3. 70 Capaian Indikator Kinerja KIE Triwulan III Tahun 2026 110
Tabel 3. 71 Capaian IKSS 17 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 110
Tabel 3. 72 Perbandingan IKSS 17 dengan Target Tahunan 2026 111
Tabel 3. 73 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 17 112
Tabel 3. 74 Capaian Indikator Kinerja Sekolah Keamanan Pangan Triwulan III Tahun 2026 113
Tabel 3. 75 Capaian IKSS 18 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 114
Tabel 3. 76 Perbandingan IKSS 18 dengan Target Tahunan 2026 115
Tabel 3. 77 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 18 117
Tabel 3. 78 Capaian Indikator Kinerja Desa Pangan Aman Triwulan III Tahun 2026 119
Tabel 3. 79 Capaian IKSS 19 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 120
Tabel 3. 80 Perbandingan IKSS 19 dengan Target Tahunan 2026 121
Tabel 3. 81 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 19 122
Tabel 3. 82 Capaian Indikator Kinerja Pasar Aman Triwulan III Tahun 2026 125

Tabel 3. 83 Capaian IKSS 20 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 125
Tabel 3. 84 Perbandingan IKSS 20 dengan Target Tahunan 2026 126
Tabel 3. 85 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 20 127
Tabel 3. 86 Capaian Indikator Kinerja UMKM yang Didampingi Triwulan III Tahun 2026 ... 131
Tabel 3. 87 Capaian IKSS 21 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 131
Tabel 3. 88 Perbandingan IKSS 21 dengan Target Tahunan 2026 132
Tabel 3. 89 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 21 133
Tabel 3. 90 Capaian Indikator Kinerja Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Triwulan III Tahun 2026 136
Tabel 3. 91 Capaian IKSS 22 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2025 137
Tabel 3. 92 Perbandingan IKSS 22 dengan Target Tahunan 2026 137
Tabel 3. 93 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 22 138
Tabel 3. 94 Capaian Indikator Kinerja Laporan Analisis Kejahatan yang Didampingi Triwulan III Tahun 2026 141
Tabel 3. 95 Capaian IKSS 23 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 142
Tabel 3. 96 Perbandingan IKSS 23 dengan Target Tahunan 2026 142
Tabel 3. 97 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 23 143
Tabel 3. 98 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Triwulan III Tahun 2026 ... 146
Tabel 3. 99 Capaian IKSS 24 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 146
Tabel 3. 100 Perbandingan IKSS 24 dengan Target Tahunan 2026 147
Tabel 3. 101 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 24 148
Tabel 3. 102 Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI Triwulan III Tahun 2026 150
Tabel 3. 103 Capaian IKSS 25 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 150
Tabel 3. 104 Perbandingan IKSS 25 dengan Target Tahunan 2026 151
Tabel 3. 105 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 25 153
Tabel 3. 106 Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Triwulan III Tahun 2026 155
Tabel 3. 107 Capaian IKSS 26 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 155
Tabel 3. 108 Perbandingan IKSS 26 dengan Target Tahunan 2026 156
Tabel 3. 109 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 26 158
Tabel 3. 110 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Triwulan III Tahun 2026 159
Tabel 3. 111 Capaian IKSS 27 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 160
Tabel 3. 112 Perbandingan IKSS 27 dengan Target Tahunan 2026 160
Tabel 3. 113 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 27 162

Tabel 3. 114 Capaian Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2026 164
Tabel 3. 115 Capaian IKSS 28 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026 165
Tabel 3. 116 Perbandingan IKSS 28 dengan Target Tahunan 2026 165
Tabel 3. 117 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 28..... 167
Tabel 3. 118 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Tiap Indikator Kinerja 186
Tabel 3. 119 Capaian Kinerja dan Efisiensi tiap Capaian Output Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Banyumas..... 189
Tabel 3. 120 Capaian Kinerja dan Efisiensi tiap Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2026 Balai POM di Banyumas 193
Tabel 3. 121 Perhitungan Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis 196

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Nilai Core Value Ber-AKHLAK 6
Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Banyumas 12
Gambar 1. 3 Profil SDM Balai POM di Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan 13
Gambar 1. 4 Profil SDM Balai POM di Banyumas Berdasarkan Gender 13
Gambar 1. 5 Profil SDM Balai POM di Banyumas Berdasarkan Usia 14
Gambar 1. 6 Peta Provinsi Jawa Tengah 15
Gambar 3. 1 Capaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT 37
Gambar 3. 2 Grafik Capaian Sasaran Strategis 1 38
Gambar 3. 3 Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Balai POM di Banyumas 103
Gambar 3. 4 Grafik Capaian Sasaran Strategis 2 103
Gambar 3. 5 Capaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT 108
Gambar 3. 6 Grafik Capaian Sasaran Strategis 3 109
Gambar 3. 7 Capaian Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu 129
Gambar 3. 8 Grafik Capaian Sasaran Strategis 4 130
Gambar 3. 9 Capaian Sasaran Strategis 5: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT 140
Gambar 3. 10 Grafik Capaian Sasaran Strategis 6 140
Gambar 3. 11 Capaian Sasaran Strategis 7: Layanan Publik Balai POM di Banyumas yang Prima 145
Gambar 3. 12 Capaian Sasaran Strategis 8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal 149

RINGKASAN EKSKLUSIF

Berdasarkan dengan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun 2026 dimaksudkan untuk memberikan gambaran atas kemajuan pencapaian target kinerja. Laporan ini memuat hasil evaluasi internal per triwulan, termasuk kendala yang dihadapi serta rencana tindak lanjut yang disiapkan. Dengan demikian, dokumen ini berfungsi sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja pada periode berikutnya sekaligus sebagai penyempurna bagi perencanaan, pelaksanaan program, kegiatan, dan kebijakan yang diperlukan. Laporan Kinerja Interim Triwulan III Balai POM di Banyumas Tahun 2026 ini menjadi modal evaluasi atas pencapaian kinerja dan anggaran yang diukur berdasarkan:

1. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2026
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2026
3. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026

Laporan Kinerja ini disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2026 dengan total sebanyak 28 Indikator Kinerja Utama (IKU). Seluruh capaian program terangkum dalam 8 Sasaran Strategis yang menjadi arah utama pelaksanaan tugas. Setiap program yang dijalankan juga berlandaskan pada Rencana Strategis Balai POM di Banyumas untuk periode lima tahun, yang kemudian dijabarkan lebih rinci dalam Rencana Kinerja Tahunan.

Melalui Evaluasi Kinerja yang dilakukan dari 8 Sasaran Kegiatan, berikut dapat terlihat capaian setiap sasaran strategis yang dimiliki oleh Balai POM di Banyumas pada Triwulan III Tahun 2026:

Sasaran Strategis		**% Capaian terhadap Target Triwulan III Tahun 2026**	**Kriteria**
Capaian Sasaran Strategis 1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	103,31	SANGAT BAIK

Sasaran Strategis		% Capaian terhadap Target Triwulan III Tahun 2026	Kriteria
Capaian Sasaran Strategis 2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100	BAIK
Capaian Sasaran Strategis 3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,31	SANGAT BAIK
Capaian Sasaran Strategis 4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	106,67	SANGAT BAIK
Capaian Sasaran Strategis 5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100	BAIK
Capaian Sasaran Strategis 6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100	BAIK
Capaian Sasaran Strategis 7	Layanan Publik UPT yang Prima	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE
Capaian Sasaran Strategis 8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE
Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Balai POM di Banyumas		**101,72**	

Dari hasil Sasaran kegiatan yang dapat diukur capaiannya sebagai berikut:

1. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 1** sebesar 103,31% dengan kriteria SANGAT BAIK. Capaian tersebut mencerminkan bahwa kegiatan pengawasan dalam memastikan

keamanan, mutu, dan kepatuhan produk yang beredar di wilayah kerja UPT telah dilaksanakan secara efektif dan mampu menghasilkan kinerja yang lebih tinggi dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

2. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 2** sebesar 100% dengan kriteria BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas mampu melakukan pelaksanaan pengawasan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi telah memenuhi seluruh target yang ditetapkan untuk Triwulan III Tahun 2026.

3. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 3** sebesar 100,31% dengan kriteria SANGAT BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas melaksanakan kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi di wilayah kerjanya yakni Kabupaten Banyumas, Purbalingga, Banjarnegara, dan Cilacap. Hasil ini mendukung peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat mengenai keamanan, mutu, dan manfaat produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

4. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 4** sebesar 106,67% dengan kriteria SANGAT BAIK. Hal ini menggambarkan tingginya pelaksanaan fasilitasi dan pendampingan kepada pelaku UMKM dalam memenuhi persyaratan dan standar keamanan serta mutu produk. Balai POM di Banyumas mampu secara efektif dalam meningkatkan kapasitas dan kepatuhan UMKM terhadap ketentuan yang berlaku.

5. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 5** sebesar 100% dengan kriteria BAIK. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan penindakan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target kinerja yang ditetapkan. Pelaksanaan penindakan tersebut merupakan bagian penting dalam mendukung perlindungan masyarakat dari peredaran produk yang tidak memenuhi ketentuan, sehingga sasaran strategis ini memperoleh kriteria baik.

6. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 6** sebesar 100% dengan kriteria BAIKCapaian ini menunjukkan bahwa upaya deteksi dan identifikasi potensi pelanggaran atau kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan telah dilaksanakan secara optimal sesuai dengan perencanaan.

7. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 7** sebesar 0%. Namun, capaian tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa kinerja pelayanan publik UPT tidak terlaksana atau berkinerja buruk, karena indikator sasaran ini ditetapkan sebagai capaian akhir periode. Dengan demikian, pengukuran terhadap sasaran strategis ini belum menjadi dasar penilaian capaian kinerja pada Triwulan III dan akan dinilai secara menyeluruh pada akhir periode sesuai dengan mekanisme pengukuran yang telah ditetapkan.

8. **Capaian Indikator Sasaran Strategis 8** sebesar 0% atau capaian akan didapatkan pada akhir periode tahun 2026. Oleh karena itu, angka 0% belum dapat diinterpretasikan sebagai tidak tercapainya sasaran, melainkan menunjukkan bahwa pengukuran kinerja untuk sasaran tersebut belum dilakukan secara final pada periode Triwulan III. Sasaran strategis ini mencakup tata kelola pemerintahan Balai POM di Banyumas yang mencakup nilai pembangunan ZI, nilai AKIP, nilai kinerja anggaran, dan indeks daripada manajemen risiko yang telah terimplementasikan.

Secara keseluruhan, **rata-rata dari capaian sasaran strategis** Balai POM di Banyumas yang dapat terhitung pada Triwulan III Tahun 2026 yaitu **101,72%** dengan kategori "**Sangat Baik"**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka pencapaian sasaran strategis secara umum telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi bahkan melampaui target yang telah ditetapkan.

Sebagaimana pada Triwulan II Tahun 2026, pada Triwulan III Tahun 2026 ini terhadap 6 (enam) sasaran strategis dari 8 (delapan) sasaran strategis yang telah dilakukan pengukuran dan diperhitungkan capaiannya. Enam sasaran strategis tersebut meliputi efektivitas pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi, efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE), pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu, pelaksanaan penindakan kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, serta pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Empat sasaran strategis memperoleh kategori "Sangat Baik" dan dua sasaran lainnya memperoleh kategori "Baik".

Dalam pelaksanaan seluruh sasaran strategis sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, Balai POM di Banyumas tidak menemukan kendala yang berarti dalam menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan lingkup tanggung jawabnya. Pelaksanaan kegiatan dapat dilakukan secara efektif dengan dukungan koordinasi internal, kerja sama dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan, serta pelaksanaan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Keberhasilan ini juga mencerminkan komitmen Balai POM di Banyumas dalam menjaga kualitas pengawasan yang transparan, akurat, dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat di wilayah tersebut.

Program pengawasan obat dan makanan dan dukungan manajemen Balai POM di Banyumas awal Triwulan III Tahun 2026 di *catchment* area pengawasan obat dan makanan di 4 (empat) kabupaten yang telah dilakukan dengan jumlah anggaran DIPA sebesar Rp 7.763.760.000,-. Per Agustus 2026, terdapat penambahan anggaran Gaji dan Tunjangan

menjadi Rp 8.247.972.000,- . Target realisasi anggaran per Triwulan III Tahun 2026 adalah Rp 3.545.239.087,- dan capaian anggaran yang terserap adalah Rp 3.641.339.658,- atau dengan kata lain telah menyerap anggaran 44,15% dari target yang direncanakan. Kini, anggaran yang tersisa sebesar Rp 4.606.632.342,- atau 65,24% dari total anggaran dan akan terus dioptimalkan demi mencapai tujuan instansi Balai POM di Banyumas.

Apabila didasarkan pada perhitungan efisiensi anggaran hingga Triwulan III Tahun 2026, Balai POM di Banyumas menunjukkan capaian yang bervariasi sesuai perspektif pengukuran. Dari sisi *output* berupa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), tingkat efisiensi tercatat sebesar 0,26 dengan kategori Efisien (95%). Dari sisi *output* berupa capaian kegiatan, tingkat efisiensi mencapai 0,09 dengan kategori Efisien (100%). Sementara itu, dari sisi capaian sasaran strategis, tingkat efisiensi juga berhasil mencapai angka Efisien 100% atau 0,18 menunjukkan bahwa penggunaan anggaran telah memberikan kontribusi yang optimal terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi. Hal ini juga sejalan dengan rata-rata capaian sasaran strategis yang telah dapat dihitung sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 sebesar 101,72%, sehingga dapat dilihat bahwa capaian kinerja yang dihasilkan telah mampu memenuhi bahkan melampaui target yang ditetapkan dengan tetap memperhatikan efisiensi penggunaan sumber daya.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan Balai POM di Banyumas sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 telah didukung oleh pemanfaatan anggaran yang efisien, yaitu dengan penggunaan sumber daya anggaran yang tetap mampu menghasilkan *output* dan capaian kinerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini tercermin dari tingkat efisiensi pada seluruh perspektif pengukuran yang berada dalam kategori Efisien, baik berdasarkan capaian IKU, capaian kegiatan, maupun capaian sasaran strategis.

Secara keseluruhan, kondisi tersebut menggambarkan bahwa Balai POM di Banyumas tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja, tetapi juga pada efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Dengan demikian, pelaksanaan anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 telah memberikan dukungan yang memadai terhadap pencapaian kinerja organisasi. Efisiensi yang telah dicapai perlu dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya melalui perencanaan kegiatan dan anggaran yang lebih tepat, optimalisasi pemanfaatan sumber daya, penguatan monitoring dan evaluasi, serta memastikan bahwa setiap penggunaan anggaran memberikan kontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi.

.

HIGHLIGHT KINERJA

1. **Perluas Penyampaian Informasi Obat dan Makanan, Balai POM di Banyumas Berpartisipasi Pada Kegiatan Non Fisik TMMD Sengkuyung III Kabupaten Banyumas**





Bertempat di Balai Desa Cirahab Kecamatan Lumbir Kabupaten Banyumas Balai POM di Banyumas melaksanakan kegiatan Komunikasi Informasi dan Edukasi Keamanan Pangan dengan materi 5 Kunci Mengolah Pangan dan 5 Kunci Memilih Pangan Aman. Kegiatan yang dilaksanakan oleh TNI bersama dengan Pemerintah Kabupaten Banyumas digelar pada Senin 10 Agustus 2026 merupakan kegiatan Non Fisik TMMD (TNI Manunggal Masuk Desa) Sengkuyung III Kabupaten Banyumas.

Dilakukan 2 kegiatan utama yaitu pemberian KIE kepada 21 (dua puluh satu) warga Desa Cirahab, peserta KIE terdiri dari kelompok kader PKK, kader Posyandu dan karang taruna. Kegiatan berikutnya adalah pengambilan dan pengujian sampel Pangan Jajanan Anak Sekolah. Sebanyak 16 (enam belas) sampel yang diambil dari SDN 01 Cirahab dan SDN 02 Cirahab antara lain terdiri dari basreng, sosis, jelly, kembang gula, minuman disampling dan diuji parameter boraks, formalin, rhodamin B dan methanil yellow dengan hasil pengujian tidak ditemukan sampel yang positif mengandung bahan berbahaya tersebut.

2. Edukasi Bahaya Bahan Kimia Obat pada Siswa SMAN 2 Kroya



Bekerjasama dengan SMAN 2 Kroya Kabupaten Cilacap, Balai POM di Banyumas pada Selasa 1 September 2026 bertempat di Sekolah SMAN 2 Kroya Kabupaten Cilacap yang beralamat di Jl. Sandinama No. 1 Tinggarjati Lor Gentasari Kec. Kroya Kabupaten Cilacap telah dilaksanakan Komunikasi Informasi Edukasi (KIE). KIE dengan tema seputar Obat Bahan Alam dengan judul materi Ancaman Senyap di Balik Khasiat Instan dibawakan oleh Kepala Balai POM di Banyumas Gidion, S.Si., M.Sc. Materi yang mengupas keamanan Obat Bahan Alam, Bahaya BKO pada Obat Bahan Alam serta sistem pengawasan yang dilaksanakan oleh BPOM.

Kegiatan yang diikuti oleh 180 siswa siswi kelas XI SMAN 2 Kroya berjalan sangat menarik diselingi dengan tanya jawab interaktif dengan peserta KIE. Kegiatan ini sangat penting dilaksanakan sebab untuk dapat memutus mata rantai produksi dan peredaran Obat Bahan Alam yang mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang marak di

Kabupaten Cilacap khususnya di Gentasari Kecamatan Kroya yang merupakan salah satu basis produksi Obat Bahan Alam mengandung BKO.

Setelah kegiatan ini diharapkan para remaja/siswa SMA memahami bahaya dai Bahan Kimia Obat yang ditambahkan pada Obat Bahan Alam sehingga akan tumbuh kesadaran pada diri masing-masing untuk dapat disampaikan kepada lingkungan keluarga ataupun lingkungan terdekat sehingga kedepannya akan timbul kesadaran kolektif bahaya BKO pada Obat Bahan Alam.

3. Tingkatkan Pengetahuan Keamanan dan Bahaya KLB KP BPOM di Banyumas Edukasi Masyarakat Melalui Radio RRI



Menyikapi maraknya kejadian luar biasa keracunan pangan (KLB KP) di wilayah Banyumas Raya, Balai POM di Banyumas berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Banyumas dan Radio RRI Purwokerto pada Selasa 1 September 2026 mengadakan Talkshow/dialog dalam acara Dialog Kentongan RRI Pro 1 dengan tema Menjaga Pangan Mencegah Keracunan. Talkshow dengan presenter Kiki Rizky di Radio RRI Pro 1 FM 98.60 MHZ dilaksanakan dengan dua orang narasumber yaitu Gidion S.Si., M.Sc. Selaku Kepala Balai POM di Banyumas dan Harjanti, S.Tr. KL selaku Fungsional Ahli Madya Tenaga Sanitasi Lingkungan Dinas Kesehatan dan KB Kabupaten Banyumas.

Materi yang dibahas seputar Keamanan Pangan dan Kejadian Luar Biasa Keracunan Pangan (KLB KP). Materi ini penting untuk diketahui oleh masyarakat dikarenakan beberapa waktu terakhir timbul kejadian KLB KP di wilayah Banyumas Raya.

Masyarakat harus paham dan mampu melaksanakan prinsip-prinsip dasar Keamanan Pangan dan harus dapat memilah memilih pangan yang akan dikosumsi untuk dapat terhindar dari bahaya KLB KP.

Diharapkan setelah masyarakat menerima informasi yang disiarkan secara langsung melalui gelombang radio FM 98.60 MHZ dan kanal youtube RRI Purwokerto akan terjadi peningkatan pengetahuan serta pemahaman terkait Keamanan Pangan guna dapat melindungi diri pribadi dan lingkungan sekitar dari bahaya apabila terjadi pelanggaran Keamanan Pangan.

4. BPOM Banyumas Dorong Keberlanjutan Pasar Pangan Aman di Kabupaten Cilacap



Balai POM di Banyumas terus mendorong keberlanjutan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) di Kabupaten Cilacap. Salah satu upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan Pengawalan Pasar di Pasar Tanjungsari, Kabupaten Cilacap, yang merupakan pasar intervensi tahun 2025, pada Selasa (22/9/2026). Kegiatan pengawalan dilakukan melalui Bimbingan Teknis kepada Kader Keamanan Pangan dan Pengelola Pasar, serta pengambilan sampel dan pengujian pangan menggunakan rapid test kit. Kegiatan ini juga melibatkan koordinator UPTD Pasar Gede, Koordinator Pasar Palemgading, dan Koordinator Pasar Saliwangi sebagai bagian dari upaya memperluas pemahaman dan komitmen pengelola pasar dalam mendukung penyediaan pangan yang aman bagi masyarakat.

Pengawalan Pasar Tanjungsari menjadi bagian dari upaya Balai POM di Banyumas dalam membangun kemandirian komunitas pasar untuk menjaga keamanan pangan secara berkelanjutan. Sinergi antara Balai POM, pengelola pasar, kader keamanan

pangan, dan para pedagang diharapkan dapat menciptakan lingkungan pasar yang bersih, sehat, aman, dan terpercaya. Dengan penguatan edukasi dan pengawasan yang dilakukan secara berkelanjutan, masyarakat diharapkan semakin yakin dalam memilih pangan yang aman, sementara para pedagang dapat semakin memahami pentingnya menjaga mutu dan keamanan pangan yang mereka jual

5. SAKA Balai POM di Banyumas Sosialisasikan Perekrutan Anggota SAKA POM Tahun 2026 Tingkat Racana

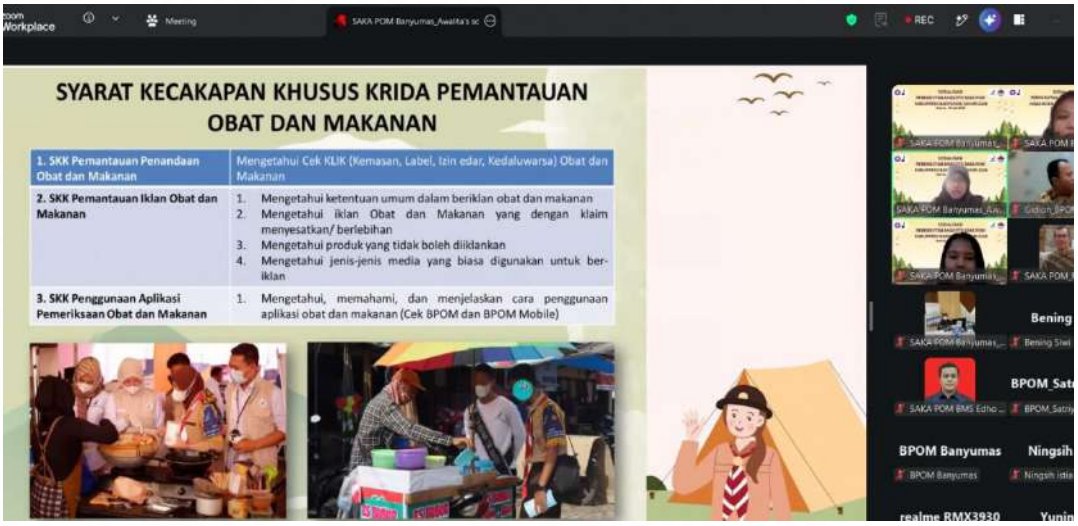

Balai POM di Banyumas melaksanakan Sosialisasi Perekrutan Anggota Satuan Karya Pramuka Pengawasan Obat dan Makanan (SAKA POM) Tahun 2026 Tingkat Racana secara daring melalui Zoom Meeting pada Kamis (30/7/2026). Kegiatan ini bertujuan memperkenalkan SAKA POM kepada mahasiswa sebagai wadah pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan kepedulian generasi muda dalam mendukung pengawasan Obat dan Makanan.

Melalui kegiatan sosialisasi ini, Balai POM di Banyumas berharap semakin banyak generasi muda yang berperan aktif sebagai pelopor keamanan obat dan makanan. Keikutsertaan dalam SAKA POM diharapkan dapat memperkuat kapasitas anggota Pramuka dalam menyebarluaskan informasi yang benar mengenai obat dan makanan serta mendukung terwujudnya masyarakat yang lebih sadar akan pentingnya keamanan, mutu, dan manfaat produk yang dikonsumsi.

6. Balai POM di Banyumas Perkuat Kemandirian Pengawasan Keamanan Pangan di Pasar Tradisional



Upaya mewujudkan pasar tradisional yang aman dan sehat memerlukan keterlibatan aktif seluruh pihak, mulai dari pengelola pasar, pedagang, hingga kader keamanan pangan. Untuk memperkuat peran tersebut, Balai Pengawas Obat dan Makanan (Balai POM) di Banyumas melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) di Pasar Banyumas pada Selasa (21/7). Melalui kegiatan ini, Balai POM di Banyumas terus memperkuat kapasitas kader keamanan pangan dan pengelola pasar agar mampu menjalankan pengawasan secara mandiri. Sinergi yang terbangun melalui Program PPABK diharapkan dapat menciptakan budaya keamanan pangan yang berkelanjutan, sehingga masyarakat memperoleh jaminan pangan yang aman, bermutu, dan layak dikonsumsi.

7. Balai POM di Banyumas Lakukan Pengujian Pangan pada Banyumas *Kidsphoria* 2026



Dalam rangka memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya anak-anak dan keluarga, Balai POM di Banyumas melaksanakan pengawasan keamanan pangan pada kegiatan Banyumas *Kidsphoria* 2026 yang diselenggarakan di Hetero Space Purwokerto pada Rabu, 23 Juli 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Anak Nasional. Pengawasan dilakukan melalui pengambilan sampel pangan dari sejumlah pelaku usaha yang berpartisipasi dalam kegiatan tersebut, dilanjutkan dengan pengujian cepat (*rapid test*) terhadap empat parameter bahan berbahaya yang berpotensi disalahgunakan pada pangan, yaitu formalin, boraks, rhodamin B, dan metanil yellow.

Kegiatan ini merupakan upaya pencegahan Balai POM di Banyumas dalam memastikan keamanan pangan yang dijual pada kegiatan publik sekaligus memberikan rasa aman kepada masyarakat dalam mengkonsumsi pangan. Selain melakukan pengujian, Balai POM di Banyumas juga mendorong pelaku usaha untuk menerapkan praktik produksi dan penjualan pangan sesuai dengan ketentuan keamanan pangan serta mengajak masyarakat berperan aktif dalam pengawasan Obat dan Makanan melalui penyampaian informasi dan pengaduan apabila ditemukan dugaan pelanggaran.

8. Fasilitasi Produk Unggulan Daerah, Balai POM di Banyumas dampingi pelaku usaha carica di Dieng, Kab. Banjarnegara









Bekerja sama dengan Dinas Perindustrian, Perdagangan. Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kab. Banjarnegara, Balai POM di Banyumas melakukan pendampingan terhadap produsen minuman buah carica yang merupakan produk unggulan dari dataran tinggi Dieng, salah satunya Kab. Banjarnegara yang menjadi wilayah pengawasan Balai POM di Banyumas pada 06 Agustus 2026. Pendampingan dilakukan dengan memberikan materi CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik) dan registrasi produk pangan. Pendampingan kemudian dilanjutkan dengan kunjungan ke sebagian sarana produksi untuk memberikan saran perbaikan secara konkret. Kegiatan ini diharapkan dapat menepis anggapan pelaku usaha mengenai sulit dan mahalnya proses perizinan produk dan mendorong pelaku usaha untuk memiliki izin edar.

9. Percepat penerbitan izin edar, Balai POM di Banyumas mengadakan *One Stop Service* (OSS) Registrasi OBA, SK dan Kosmetik









Pada tanggal 27-28 Agustus 2026, Balai POM di Banyumas bekerjasama dengan Direktorat Registrasi Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik mengadakan kegiatan *One Stop Service* (OSS) Registrasi OBA, SK dan Kosmetik. Kegiatan ini diadakan secara serentak di Kab. Banyumas dan Kab. Surakarta untuk mempercepat penerbitan izin edar bagi pelaku usaha dengan mempertemukan pelaku usaha dengan evaluator registrasi secara langsung. Pada kegiatan ini, waktu penerbitan izin edar dipangkas menjadi 1 hari asalkan pelaku usaha sudah memiliki dokumen registrasi yang

lengkap dan benar. Dari kegiatan ini berhasil diterbitkan 30 nomor notifikasi kosmetik, 2 SK NIE OBA, 8 SK variasi OBA.

10. GETHUK CAPA (Gerakan Methuk CAPA) Bantu Pelaku Usaha Tindak Lanjuti Hasil Pemeriksaan





Balai POM di Banyumas terus mendorong peningkatan kepatuhan pelaku usaha melalui pendampingan penyusunan Corrective Action and Preventive Action (CAPA). Pendampingan ini bertujuan membantu pelaku usaha menyusun langkah perbaikan dan pencegahan atas temuan hasil pemeriksaan, sehingga pengelolaan obat dan makanan dapat memenuhi ketentuan serta menjamin mutu, keamanan, dan manfaat produk yang beredar di masyarakat. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan Gethuk CAPA (Gerakan Methuk CAPA) yang diselenggarakan pada akhir Juli dan diikuti oleh penanggung jawab sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi, serta sarana produksi obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Banyumas.

Pengawasan obat dan makanan terus dilakukan secara berkelanjutan. Hasil pemeriksaan masih menunjukkan adanya sarana yang perlu meningkatkan kepatuhan

terhadap ketentuan yang berlaku. Oleh karena itu, pendampingan CAPA menjadi salah satu upaya untuk membantu pelaku usaha menyelesaikan tindak lanjut hasil pemeriksaan secara tepat dan mencegah terulangnya ketidaksesuaian di kemudian hari.

Dalam kegiatan tersebut, peserta memperoleh pembaruan informasi mengenai Pengelolaan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian sesuai Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026, serta ketentuan Label Pangan Olahan dan Pemenuhan Komitmen Registrasi Pangan Olahan Risiko Rendah. Materi tersebut diharapkan dapat memperkuat pemahaman pelaku usaha dalam menerapkan regulasi secara konsisten pada setiap tahapan kegiatan usahanya.

Sebagai bagian dari pendampingan, Balai POM di Banyumas juga membuka layanan konsultasi (desk) bagi peserta yang masih menghadapi kendala dalam menyusun CAPA. Melalui sesi ini, peserta dapat berdiskusi secara langsung dengan petugas mengenai identifikasi akar penyebab temuan, penyusunan langkah perbaikan (corrective action), serta upaya pencegahan (preventive action) agar ketidaksesuaian yang sama tidak kembali terjadi.

Melalui pendampingan ini, Balai POM di Banyumas berharap pelaku usaha semakin mampu menindaklanjuti hasil pemeriksaan secara mandiri dan meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi. Kepatuhan tersebut diharapkan berdampak pada terwujudnya sarana pelayanan kefarmasian, distribusi, dan produksi obat serta makanan yang memenuhi standar, sehingga masyarakat memperoleh produk obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.

11. Perkuat Peran Apoteker, Balai POM di Banyumas Dorong Pencegahan AMR dan Penguatan Farmakovigilans





Balai POM di Banyumas mendukung penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Obat di Apotek yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga pada Rabu, 22 Juli 2026 di PM Collaboration Purbalingga. Kegiatan ini dihadiri oleh 80 Apoteker Penanggung Jawab (APJ) se-Kabupaten Purbalingga dengan tujuan meningkatkan kompetensi tenaga kefarmasian dalam pengelolaan obat yang baik, pencegahan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR), serta penguatan pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) atau Efek Samping Obat (ESO) sebagai bagian dari penguatan sistem farmakovigilans nasional di Indonesia.

Dalam kegiatan tersebut, Balai POM di Banyumas hadir sebagai narasumber untuk menyampaikan dua materi utama. Materi pertama mengenai kewaspadaan dan kebijakan penanggulangan AMR disampaikan oleh Albert Christy, S.Farm., Apt., yang menitikberatkan pada kepatuhan penyerahan antibiotik serta edukasi penggunaan yang bijak kepada pasien. Materi kedua mengenai farmakovigilans disampaikan oleh Apt. Miyanto, S.Farm., yang menekankan pentingnya peran tenaga kesehatan dalam mengawal keamanan obat beredar melalui tata cara pelaporan digital via aplikasi e-MESO 2.0 Badan POM. Melalui bimtek ini, para APJ diharapkan dapat terlibat aktif dalam pencegahan AMR serta meningkatkan kepatuhan pelaporan KTD/ESO demi keselamatan pasien.

12. Balai POM di Banyumas Perkuat Kesiapan Purbalingga Hadapi Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman 2026





Upaya Pemerintah Kabupaten Purbalingga dalam mewujudkan keamanan pangan yang berkelanjutan terus diperkuat melalui sinergi dengan Balai POM di Banyumas. Salah satu langkah yang dilakukan adalah pendampingan pemenuhan data dukung Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman (KKPA) Tahun 2026 yang berlangsung di Kantor Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Purbalingga, Kamis (23/7/2026).

Pendampingan tersebut mempertemukan berbagai perangkat daerah yang berperan dalam penyelenggaraan program keamanan pangan, di antaranya BAPPERIDA, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DINKESPPKB), serta Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan (DPP) Kabupaten Purbalingga. Melalui forum ini, seluruh pemangku kepentingan menyamakan langkah untuk memastikan setiap indikator penilaian dapat dipenuhi secara optimal.

Rapat dibuka oleh Sekretaris BAPPERIDA Kabupaten Purbalingga, Jupri Santoso, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan teknis yang dipandu oleh Kepala Bidang

Infrastruktur Kewilayahan, Perekonomian, dan Sumber Daya Alam (IKPSDA) BAPPERIDA, Hadi Santoso, bersama Penanggung Jawab Program KKPA Balai POM di Banyumas, Widodo Wahyu Negara. Pembahasan difokuskan pada evaluasi kelengkapan data dukung, penyelarasan dokumen administrasi, pemutakhiran data, serta penguatan bukti pelaksanaan program keamanan pangan yang telah dijalankan oleh masing-masing perangkat daerah.

Selain menelaah dokumen, peserta juga mengidentifikasi sejumlah aspek yang masih perlu diperkuat, mulai dari dokumentasi kegiatan, publikasi program, hingga bukti pelaksanaan pengawasan pangan. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas data dukung sekaligus mencerminkan implementasi program keamanan pangan yang telah berjalan di Kabupaten Purbalingga.

Pada kesempatan yang sama, Balai POM di Banyumas menyerahkan Sertifikat Penghargaan Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2025 kepada Pemerintah Kabupaten Purbalingga. Penghargaan tersebut menjadi bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah dalam membangun sistem keamanan pangan yang melibatkan berbagai sektor secara terpadu.

Melalui pendampingan ini, kesiapan Kabupaten Purbalingga dalam menghadapi Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman Tahun 2026 semakin diperkuat. Sinergi antara Balai POM di Banyumas dan pemerintah daerah diharapkan tidak hanya mendukung pencapaian indikator penilaian, tetapi juga memperkuat tata kelola keamanan pangan sehingga masyarakat memperoleh jaminan pangan yang aman, bermutu, dan layak dikonsumsi.

13. BPOM Banyumas menghadiri Focus Group Discussion (FGD): Persiapan *Pilot Project Multicenter* Farmakovigilans Obat Bahan Alam (OBA) UMKM



Direktorat Pengawasan Obat Tradisional dan Suplemen Kesehatan Badan POM menyelenggarakan Focus Group Discussion (FGD) Persiapan Pilot Project Multicenter Farmakovigilans Obat Bahan Alam (OBA) UMKM di BBPOM di Yogyakarta pada Kamis, 24 September 2026. Pertemuan yang dibuka oleh Agus Yudi Prayudana, S.Farm., Apt., M.M. ini bertujuan merumuskan solusi atas tingginya fenomena under reporting (kurangnya pelaporan efek samping) OBA oleh pelaku UMKM yang saat ini tingkat kepatuhannya baru mencapai 10%. Provinsi DI Yogyakarta dipilih sebagai lokasi proyek percontohan karena memiliki jejaring UMKM jamu yang aktif dalam program Orang Tua Angkat serta didukung penuh oleh komunitas akademisi setempat untuk mematangkan persiapan teknis dan pemanfaatan aplikasi e-meso 2.0.

Dalam diskusi tersebut, perwakilan Balai POM di Banyumas menyoroti tantangan di lapangan di mana dokumen mutu UMKM umumnya mencantumkan klausul keluhan namun laporan efek sampingnya selalu nihil, ditambah maraknya temuan jamu mengandung Bahan Kimia Obat (BKO) yang mempersulit identifikasi kausalitas. Merespons kendala ini, para pakar merekomendasikan pendekatan farmakovigilans OBA berbasis risiko (risk-based approach) yang disesuaikan dengan kapasitas UMKM serta penyusunan instrumen nasional yang mudah direplikasi. Melalui proyek ini, Badan POM berharap dapat mengurai kendala pemantauan, mendeteksi sinyal keamanan secara dini, dan memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat tanpa mematikan pertumbuhan UMKM jamu lokal.

14. BPOM Banyumas Dukung Pengendalian Mutu Alokon melalui Forum Koordinasi KB



Balai POM di Banyumas bersama Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara dan lintas sektor terkait menggelar kegiatan Penggerakan Tata Kelola Alat dan Obat Kontrasepsi (Alokon) di Gedung PLUT Lantai II pada Rabu, 9 September 2026.

Pertemuan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Keputusan Bersama (SKB) 4 Kementerian/Lembaga Tahun 2025 yang berfokus pada rencana pembentukan Forum Koordinasi Pengendalian Mutu Pelayanan Keluarga Berencana (KB) demi menjamin keamanan pelayanan di daerah. Forum koordinasi dan evaluasi lintas sektor ini direncanakan akan dilaksanakan secara berkala, dengan frekuensi pertemuan minimal empat kali dalam setahun.

Dalam pembahasan draf SK forum tersebut, perwakilan Balai POM di Banyumas, Miyanto, S.Farm., Apt., menekankan pentingnya pengawasan sarana distribusi sesuai ketentuan Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB), serta mengusulkan sampling, pengujian berkala, dan penguatan pelaporan efek samping melalui sistem e-MESO Badan POM. Usulan tersebut direspons positif oleh BKKBN dan Dinkes Provinsi Jawa Tengah. Sebagai wujud dukungan nyata, Balai POM di Banyumas telah menyiapkan rencana aksi tahun 2027 yang meliputi pengawasan sarana penyimpanan alokon, pengujian mutu lapangan, serta bimbingan teknis farmakovigilans bagi tenaga kesehatan demi menjamin pelayanan KB yang aman bagi masyarakat.

15. Sinergi DAK: BPOM Banyumas dan Dinkes Banjarnegara Perkuat Pengawasan PIRT



Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara menggelar pertemuan koordinasi strategis bersama Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banyumas pada Rabu, 9 September 2026. Pertemuan lintas instansi ini diadakan untuk membahas optimalisasi penggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik di sektor kesehatan. Sinergi ini bertujuan memastikan operasionalisasi layanan publik di bidang pengawasan produk Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT) dapat berjalan dengan lebih efektif dan tepat sasaran.

Fokus utama pemanfaatan DAK ini diproyeksikan untuk mendukung capaian layanan dasar keamanan pangan serta menjamin mutu produk UMKM yang beredar di wilayah Banjarnegara. Melalui alokasi dana tersebut, pengawasan PIRT akan dioptimalkan melalui tiga program utama: perluasan jangkauan pembinaan dan verifikasi berkala pelaku usaha, pendampingan teknis higiene sanitasi agar sesuai standar BPOM, serta penguatan alur perizinan edar untuk memudahkan legalitas usaha lokal.

Pertemuan koordinasi ini dihadiri oleh Lilik Suprihatin (Adminkes Ahli Muda) dan Maharjantie Nugrahestiani perwakilan dari Dinkes Banjarnegara, serta Miyanto (PFM Ahli Muda) dan Happy Hapsari dari pihak Balai POM di Banyumas. Melalui tata kelola DAK yang selaras, kedua belah pihak berkomitmen tinggi untuk membangun ekosistem industri rumah tangga yang berdaya saing tinggi sekaligus menjamin keselamatan konsumen secara berkelanjutan.

16. Pelaksanaan Monitoring dan Supervisi Farmakovigilans di Kabupaten Cilacap





Balai POM di Banyumas melaksanakan kegiatan monitoring dan supervisi implementasi Program Farmakovigilans di Puskesmas Cilacap Selatan I dan RSIA Annisa Kabupaten Cilacap pada Rabu, 5 Agustus 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi pelaksanaan sistem pelaporan, mengidentifikasi kendala teknis di lapangan, serta memperkuat koordinasi dengan tenaga kesehatan dalam mengelola laporan Efek Samping Obat (ESO), Kejadian Tidak Diinginkan (KTD), dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Dalam pertemuan tersebut, tim Balai POM di Banyumas menekankan pentingnya membangun budaya pelaporan aktif di fasilitas pelayanan kesehatan. Laporan yang berkualitas dari sarana pelayanan kesehatan sangat krusial untuk mendukung deteksi dini potensi risiko penggunaan obat pasca-edar (post-marketing surveillance). Hasil dari supervisi ini diharapkan dapat mengoptimalkan sistem pengawasan obat yang berorientasi pada mutu pelayanan dan keselamatan pasien di wilayah Kabupaten Cilacap.

17. Koordinasi Sinergi Penguatan Farmakovigilans Obat Program di Kabupaten Cilacap



Balai POM di Banyumas bersama Dinkes KB Kabupaten Cilacap melaksanakan koordinasi strategis untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI) pada obat program pemerintah. Pertemuan lintas instansi ini berfokus mengidentifikasi kendala utama di lapangan, seperti rendahnya angka pelaporan sarana kesehatan, perbedaan pemahaman kriteria medis, serta tingginya beban administrasi pelaporan. Tim Pharmacovigilance (PV)-AMR Balai POM menegaskan bahwa pelaporan ini murni ditujukan untuk deteksi dini risiko keamanan produk demi perlindungan pasien, bukan untuk mencari kesalahan fasilitas pelayanan kesehatan.

Sebagai tindak lanjut konkret, kedua instansi menyepakati sejumlah langkah strategis bersama untuk mengoptimalkan pengawasan obat program di wilayah Kabupaten Cilacap. Langkah-langkah tersebut meliputi rencana keterlibatan aktif Balai POM di Banyumas dalam Kelompok Kerja (Pokja) KIPI Kabupaten Cilacap, penerbitan Surat Edaran bersama mengenai kewajiban pelaporan KTD/ESO/KIPI secara daring, serta penguatan edukasi berkala bagi tenaga kesehatan melalui aplikasi e-MESO Badan POM. Sinergi ini diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pelaporan fasilitas kesehatan demi mutu pelayanan yang berorientasi pada keselamatan pasien.

18. e-MESO: Solusi Kilat Lapor Efek Samping Obat di Apotek



Balai POM di Banyumas memperkenalkan sistem pelaporan digital e-MESO 2.0 kepada apoteker penanggung jawab apotek dan toko obat di Kabupaten Cilacap pada Rabu, 1 Juli 2026. Langkah ini diambil sebagai solusi atas fenomena *under reporting* atau rendahnya tren pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD) dan Efek Samping Obat (ESO) dari sarana pelayanan kefarmasian akibat kendala pemahaman mekanisme pelaporan manual. Padahal, berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73 Tahun 2016, Monitoring Efek Samping Obat (MESO) merupakan bagian dari standar pelayanan farmasi klinik yang wajib diselenggarakan oleh apotek.

Melalui e-MESO 2.0 yang dapat diakses via e-meso.pom.go.id, pelapor kini dapat menyampaikan data pasien, kronologi kejadian, dan detail obat secara daring dalam waktu kurang dari lima menit. PFM Ahli Muda Balai POM di Banyumas, Miyanto, menjelaskan bahwa kemudahan digitalisasi ini menggantikan metode Formulir Kuning manual yang tidak efisien. Seluruh data yang masuk akan dievaluasi oleh Badan POM sebagai dasar deteksi dini risiko obat sebelum diteruskan ke sistem farmakovigilans internasional WHO. Aktivitas ini diharapkan mampu mengoptimalkan pengawasan post-marketing demi keselamatan pasien.

19. Penghargaan dalam Pengelolaan Kinerja Anggaran



Dalam implementasi pengelolaan anggaran Semester 1 TA 2026, Balai POM di Banyumas mendapatkan 2 Piagam Penghargaan Kepala KPPN Tipe A1 Purwokerto yang diserahkan secara langsung di kantor KPPN Purwokerto pada tanggal 6 Agustus 2026 oleh Kepala KPPN Purwokerto Bpk. Tri Ananto Putro.

Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Semester 1 tahun anggaran 2026 Terbaik II


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR: KEP-74/KPN.1408/2026

Diberikan kepada :

BALAI POM DI BANYUMAS
(672844)

Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Semester I Tahun Anggaran 2026
Terbaik III
UP KKP Kategori Kecil (Rp20 Juta ke Bawah)

Purwokerto, 31 Juli 2026
Kepala KPPN Tipe A1 Purwokerto

Tri Ananto Putro

Piagam Penghargaan Kepala KPPN Tipe A1 Purwokerto Nomor: KEP-74/KPN.1408/2026 tanggal 31 Juli 2026 diberikan kepada Balai POM di Banyumas (672844) atas Implementasi Kartu Kredit Pemerintah Semester 1 tahun anggaran 2026 Terbaik III.

Akurasi Dokumen Pencairan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2026 Terbaik III


KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR: KEP-77/KPN.1408/2026

diberikan kepada :

BALAI POM DI BANYUMAS
(672844)

Akurasi Dokumen Pencairan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2026

TERBAIK III

Kategori Jumlah SPM yang Diajukan di Atas 100 s.d. 400

Purwokerto, 31 Juli 2026
Kepala KPPN Tipe A1 Purwokerto

Tri Ananto Putro

Piagam Penghargaan Kepala KPPN Tipe A1 Purwokerto Nomor: KEP-77/KPN.1408/2026 tanggal 31 Juli 2026 diberikan kepada Balai POM di Banyumas (672844) atas Akurasi Dokumen Pencairan Anggaran Semester I Tahun Anggaran 2026 Terbaik III.

20. SUMRINGAH Dorong Kolaborasi dan Kepercayaan Pegawai



Kemampuan mengelola emosi dan memahami cara pandang orang lain menjadi bagian penting dalam membangun hubungan kerja yang sehat. Dari hal sederhana tersebut, kepercayaan dan kolaborasi dalam tim dapat tumbuh lebih kuat. Pesan inilah yang dibangun melalui kegiatan SUMRINGAH (Support Mental dan Religi Untuk Gapai Harmoni) Balai POM di Banyumas, Jumat (28/8/2026).

Mengusung tema “Merajut Harmoni, Membangun Sinergi”, kegiatan yang dilaksanakan secara daring melalui Zoom Meeting ini diikuti oleh seluruh pegawai Balai POM di Banyumas. SUMRINGAH menjadi ruang bagi pegawai untuk merefleksikan cara berkomunikasi, merespons tekanan, dan menyikapi perbedaan yang ditemui dalam keseharian di lingkungan kerja. Lingkungan kerja yang saling mendukung menjadi salah satu fondasi untuk menjaga kualitas kinerja organisasi. Dengan kolaborasi yang semakin kuat, pegawai diharapkan dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung tugas pengawasan obat dan makanan serta memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

21. **Koordinasi PPNS Balai POM di Banyumas dengan *Criminal Justice System* dalam rangka penyelesaian pemberkasan berkas perkara tindak pidana memproduksi obat bahan alam yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu**







Pada triwulan III ini sudah dilaksanakan koordinasi antara PPNS Balai POM di Banyumas dengan Seksi Korwas PPNS Ditreskrimsus Polda Jateng, Korwas PPNS

Satreskrim Polresta cilacap, dan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri cilacap dalam rangka penyelesaian berkas perkara tindak pidana memproduksi obat bahan alam yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat, dan mutu.

22. Siswa MI Ma'arif 1 Langgongsari Siap Menjadi Generasi Emas dengan PJAS Aman



Sebagai tindak lanjut Program Desa Pangan Aman dalam Gerakan Masyarakat Sadar Pangan Aman (GERMAS SAPA) Tahun 2026, Balai POM di Banyumas mendampingi Kader Keamanan Pangan Desa Langgongsari melaksanakan kegiatan edukasi dan pengawasan keamanan pangan di MI Langgongsari, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas, pada Rabu (15/7/26). Kegiatan di sekolah ini merupakan salah satu bentuk implementasi Program Desa Pangan Aman yang menyasar komunitas sekolah sebagai upaya membangun budaya keamanan pangan sejak usia dini.

23. BPOM Banyumas Edukasi Warga Dusun 4 Desa Karangkemiri Pekuncen Cegah Penyalahgunaan Obat



Balai POM di Banyumas terus memperkuat literasi masyarakat dalam penggunaan obat yang aman dan rasional melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) bertema Penggunaan Obat yang Tepat (OOT) dan Pencegahan Penyalahgunaan Obat-Obat Tertentu di Dusun 4, Desa Karangkemiri, Kecamatan Pekuncen, Kabupaten Banyumas, Minggu (2/8/2026). Kegiatan ini merupakan bentuk dukungan Balai POM di Banyumas terhadap pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tahun 2026 Universitas Ibnu Sina Ajibarang.

Sebanyak 75 peserta yang terdiri atas bapak-bapak, ibu-ibu, serta remaja dan pemuda mengikuti kegiatan yang diselenggarakan pada malam hari untuk menyesuaikan dengan aktivitas masyarakat. Melalui kegiatan ini, masyarakat memperoleh edukasi mengenai pentingnya penggunaan obat secara benar, aman, dan rasional sebagai upaya mencegah dampak kesehatan akibat kesalahan penggunaan maupun penyalahgunaan obat.

24. Balai POM di Banyumas Inisiasi Program PJAS Aman di SDN 02 Sokaraja Kulon Melalui Kegiatan MPLS



Banyumas – Balai POM di Banyumas bersama SD Negeri 02 Sokaraja Kulon mengawali pelaksanaan Program Pangan Jajanan Anak Usia Sekolah (PJAS) Aman Tahun 2026 melalui kegiatan Upacara Bendera dalam rangka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) dan Kick Off Program PJAS Aman yang diselenggarakan pada Senin (13/7/2026) di SD Negeri 02 Sokaraja Kulon, Kabupaten Banyumas.

Kegiatan ini diikuti oleh 55 peserta didik baru kelas I serta seluruh siswa kelas II hingga kelas VI, didampingi oleh guru, orang tua murid, dan perwakilan pedagang kantin

sekolah. Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Balai POM di Banyumas, Gidion, serta Kepala SD Negeri 02 Sokaraja Kulon, Esti Anas Wahyuni.

Melalui kegiatan ini, Balai POM di Banyumas bersama SD Negeri 02 Sokaraja Kulon secara resmi menginisiasi pelaksanaan Program PJAS Aman Tahun 2026 yang akan berlangsung mulai Juli hingga Desember 2026. Program ini diharapkan mampu mewujudkan sekolah yang membudayakan keamanan pangan, sehingga keamanan pangan di lingkungan sekolah dapat terjamin, baik pada penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) maupun pangan jajanan anak sekolah yang dikonsumsi setiap hari.

25. Sosialisasi Keamanan Pangan di SMPN 7 Purwokerto Untuk Generasi Sehat Prestasi Hebat



Banyumas – Senin (13/07/2026) Balai POM di Banyumas bekerjasama dengan SMP Negeri 7 Purwokerto menyelenggarakan sosialisasi keamanan pangan bagi para siswa. Kegiatan ini menjadi salah satu upaya meningkatkan pengetahuan dan kesadaran generasi muda khususnya di lingkungan sekolah mengenai pentingnya memilih pangan yang aman sebagai bagian dari perlindungan kesehatan masyarakat.

Dalam kegiatan tersebut, pegawai Balai POM di Banyumas menyampaikan materi mengenai pentingnya penerapan gizi seimbang, mengenali ciri-ciri pangan yang aman, mewaspadai pangan yang mengandung bahan berbahaya, serta mengajak siswa menerapkan prinsip Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, dan Kedaluwarsa) sebelum membeli atau mengonsumsi pangan.

Tri Wandiro, Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda Balai POM di Banyumas, menekankan pentingnya konsumsi pangan yang aman terutama bagi anak-anak yang masih berada pada masa pertumbuhan. Menurutnya, pemilihan pangan yang tepat tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan, tetapi juga mendukung tumbuh kembang, daya tahan tubuh, serta kemampuan belajar siswa di sekolah.

Melalui kegiatan ini, Balai POM di Banyumas berharap para siswa semakin memahami pentingnya keamanan pangan dan mampu menerapkan pengetahuan yang diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, para siswa diharapkan dapat menjadi agen perubahan di lingkungan keluarga maupun sekolah dengan mengajak teman dan orang tua untuk lebih cermat dalam memilih pangan yang aman untuk dikonsumsi.

26. Balai POM di Banyumas Perkuat Peran Tenaga Kefarmasian Cilacap dalam Pencegahan Resistensi Antimikroba



Cilacap – Upaya menekan laju resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR) memerlukan keterlibatan seluruh tenaga kesehatan, termasuk tenaga kefarmasian yang berinteraksi langsung dengan masyarakat. Untuk memperkuat peran tersebut, Balai POM di Banyumas berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pencegahan Resistensi Antimikroba bagi tenaga kefarmasian di Kabupaten Cilacap.

Bimbingan teknis yang berlangsung pada Rabu (1/7/2026) di Aston Inn Cilacap ini diikuti oleh 240 Apoteker Penanggung Jawab (APJ) Apotek serta 13 Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK) Penanggung Jawab Toko Obat dari seluruh Kabupaten Cilacap. Forum ini menjadi wadah untuk memperkuat pemahaman sekaligus menyamakan

persepsi mengenai pentingnya penggunaan antibiotik secara rasional dalam mencegah meningkatnya kasus resistensi antimikroba.

Dalam pemaparannya dijelaskan bahwa penggunaan antibiotik yang tidak sesuai indikasi, termasuk penyerahan antibiotik tanpa resep dokter, berpotensi mempercepat munculnya bakteri yang kebal terhadap pengobatan. Kondisi tersebut dapat menyebabkan terapi menjadi kurang efektif, meningkatkan risiko komplikasi, bahkan memperpanjang masa perawatan pasien.

27. Wali Murid Baru SDN 2 Sokaraja Kulon Menerima Sosialisasi Keamanan Pangan dari Balai POM di Banyumas



Banyumas – Sebanyak 50 wali murid siswa baru SDN 2 Sokaraja Kulon mengikuti kegiatan Sosialisasi Keamanan Pangan yang diselenggarakan oleh SDN 2 Sokaraja Kulon bersama dengan Balai POM di Banyumas pada 1 Juli 2026. Kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran orang tua dalam menjaga Keamanan Pangan yang dikonsumsi oleh anak-anak.

Materi yang disampaikan petugas Balai POM di Banyumas meliputi Keamanan Pangan, Lima Kunci Keamanan Pangan, Cek KLIK (Kemasan, Label, Izin Edar, Kedaluwarsa) serta pengenalan bahan berbahaya yang sering disalahgunakan pada pangan, seperti Formalin, Boraks, Rhodamin B, dan Methanil Yellow, agar wali murid lebih waspada dalam menyiapkan dan memilih makanan yang aman untuk anak.

28. Perkuat Peran Apoteker, Balai POM di Banyumas Dorong Pencegahan AMR dan Penguatan Farmakovigilans



Purbalingga – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Banyumas mendukung penyelenggaraan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Obat di Apotek yang diselenggarakan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Cilacap pada Rabu, 22 Juli 2026 di PM Collaboration Purbalingga.

Kegiatan ini diikuti oleh 80 Apoteker Penanggung Jawab (APJ) apotek yang tersebar di Kabupaten Purbalingga. Kegiatan bertujuan untuk meningkatkan kompetensi tenaga kefarmasian dalam pengelolaan obat yang baik, pencegahan resistensi antimikroba (Antimicrobial Resistance/AMR), serta penguatan pelaporan Kejadian Tidak Diinginkan (KTD)/ Efek Samping Obat (ESO) sebagai bagian dari sistem farmakovigilans nasional.

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan, disebutkan bahwa Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disebut sebagai BPOM adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan urusan atau tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan. Yang dimaksud dengan obat dan makanan dalam peraturan tersebut mencakup obat, bahan obat, narkotika, psikotropika, prekursor, zat adiktif, obat tradisional, suplemen Kesehatan, kosmetik, dan pangan olahan. BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan, dengan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai pimpinan tertinggi.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPOM tidak bekerja sendiri. Diperlukan kerja sama dan kemitraan dengan pemangku kepentingan lainnya, baik di tingkat pusat maupun daerah. Di era otonomi daerah, khususnya yang berkaitan dengan bidang kesehatan, peran daerah dalam perencanaan pembangunan dan pengambilan kebijakan sangat menentukan pencapaian tujuan bidang kesehatan nasional. Pengawasan obat dan makanan memiliki karakteristik khusus karena kebijakan ditetapkan secara terpusat, namun pelaksanaannya dilakukan oleh Balai di seluruh Indonesia. Kondisi ini tentu menjadi tantangan tersendiri dalam melaksanakan tugas pengawasan, sebab tindakan yang diambil harus konsisten dan selaras dengan yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar pengawasan menjadi efektif dan efisien.

Untuk mengatasi tantangan tersebut, BPOM perlu memperkuat koordinasi dengan pemerintah daerah melalui pembentukan mekanisme kerja sama yang jelas dan terstruktur. Selain itu, pemanfaatan teknologi informasi, seperti sistem pelaporan digital dan basis data terintegrasi, menjadi instrumen penting dalam memastikan konsistensi, transparansi, dan akuntabilitas pengawasan obat dan makanan di seluruh wilayah Indonesia. Dengan demikian, BPOM dapat menjalankan fungsinya secara optimal dalam menjamin keamanan, mutu, dan kemanfaatan obat serta makanan yang beredar di masyarakat, sekaligus mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

1.2. Gambaran Umum Organisasi

Dalam RPJPN 2025-2045, BPOM khususnya mendukung kebijakan Transformasi Sosial Kesehatan Untuk Semua, yaitu pembangunan kesehatan yang bertujuan agar setiap penduduk dapat hidup sehat, mencakup semua penduduk, pada seluruh siklus hidup, di seluruh wilayah, dan bagi seluruh kelompok masyarakat. Dalam kebijakan tersebut, penguatan sistem pengawasan obat dan makanan dengan perluasan cakupan produk termasuk pengawasan siber dan farmakovigilans menjadi salah satu strategi yang difokuskan dalam mewujudkan sistem kesehatan yang tangguh dan responsif. Sejalan dengan arah Pembangunan RPJPN 2025-2045, BPOM telah menetapkan Keputusan Kepala BPOM Nomor 434 Tahun 2023 Tentang Perencanaan Jangka Panjang Pengawasan Obat dan Makanan Dalam Rangka Mendukung Transformasi Nasional Menuju Indonesia Emas 2045. Perencanaan Jangka Panjang (PJP) POM disusun dengan memperhatikan dinamika lingkungan strategis nasional dan global serta megatrend yang akan berdampak pada pengawasan Obat dan Makanan, dalam konteks transformasi nasional. PJP POM menjabarkan aspek-aspek yang relevan dalam rangka memastikan keamanan, efektivitas, dan kualitas Obat dan Makanan yang beredar di Indonesia dan menyesuaikan kerangka kerja regulasi yang inovatif dan inklusif untuk menanggapi perubahan pasar dan kebutuhan masyarakat yang dinamis.BPOM utamanya mendukung Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden yang keempat yakni “Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas”, namun demikian BPOM juga mendukung pada Asta Cita lainnya.

Sesuai Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan nomor 1 Tahun 2026 tentang perubahan kedua atas peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan nomor 19 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Badan POM memiliki 83 Unit Pelaksana Teknis yang terdiri dari 26 Balai Besar POM, 37 Balai POM, dan 20 Loka di Kabupaten/Kota dan tersebar di seluruh Indonesia. Keberadaan jaringan UPT ini menjadi tulang punggung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan secara nasional, sekaligus memastikan standar mutu dan keamanan produk dapat dijaga hingga ke tingkat daerah. Dengan dukungan organisasi yang luas dan terintegrasi, Balai POM di Banyumas juga berperan aktif dalam melaksanakan fungsi pengawasan di wilayah kerjanya.

Sebelum menjadi sebuah Balai Pengawas Obat dan Makanan, kami merupakan Loka POM di Kabupaten Banyumas. Melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 tahun 2025 tentang perubahan atas peraturan Badan Pengawas Obat Dan Makanan nomor 19 tahun 2023 tentang organisasi dan tata kerja unit pelaksana teknis

pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan, Loka POM di Kabupaten Banyumas berubah menjadi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas dengan wilayah kerja sebanyak 4 (empat) kabupaten di Provinsi Jawa Tengah.

Kedudukan, Tugas Pokok, dan Fungsi

1. Kedudukan

Balai POM di Banyumas merupakan UPT BPOM yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi Bidang Pengawasan Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor, dan Zat Adiktif serta secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Balai POM di Banyumas memiliki lingkup pengawasan di 4 (empat) Kabupaten yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banjarnegara, dan Kabupaten Cilacap.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas merupakan Unit Pelaksana Teknis di lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan yang selanjutnya disingkat UPT BPOM. UPT BPOM merupakan satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. UPT BPOM dipimpin oleh Kepala Balai. Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023, tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat dan Makanan, adalah sebagai berikut:

a) Tugas

Melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b) Fungsi

Dalam melaksanakan tugas, UPT BPOM menyelenggarakan fungsi berikut:

- Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian.

- Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan.
- Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber.
- Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan.
- Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.
- Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

Visi dan Misi Badan POM Tahun 2025-2029

- Dalam penyusunan visi, BPOM berpedoman pada Visi Presiden terpilih yang tertuang dalam RPJMN 2025-2029 yaitu: “Bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Oleh karena itu, Visi yang diusung oleh BPOM 2025-2029 adalah “Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045”. Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

- Misi:
  1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing.
3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.
4. Pengelolaan pemerintah yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.

Tujuan BPOM Tahun 2025-2029

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.
2. Terwujudnya masyarakat yang cerdas memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman dan bermutu.
3. Terwujudnya pertumbuhan dunia usaha yang mendukung daya saing industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta kemandirian bangsa dengan dukungan kuat terhadap UMKM.
4. Terwujudnya perlindungan masyarakat dari kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan.
5. Terwujudnya organisasi yang profesional, adaptif, efektif, dan efisien serta layanan publik yang prima.

Pada tanggal 27 Juli 2021, Presiden Joko Widodo resmi meluncurkan *core value* Aparatur Sipil Negara (ASN) yaitu BerAKHLAK. Nilai-nilai inti Ber-AKHLAK berada di balik perbedaan penjabaran nilai-nilai inti, serta Kode Etik dan Kode Etik ASN, sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Alat Perdata Negara No. 5/2014. Oleh karena itu, Kemenpan RB telah menetapkan nilai inti baru untuk menciptakan persepsi yang sama dengan nilai inti ASN. Nilai inti moralitas juga merupakan peleburan dan

penyempitan nilai-nilai ASN yang ada di berbagai instansi pemerintah. Berikut penjelasan secara ringkas mengenai nilai Ber-AKHLAK itu sendiri.



Gambar 1.1 Nilai Core Value Ber-AKHLAK

Kegiatan Utama

Arah Kebijakan Utama BPOM 2025-2029

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan *pre-post market* Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG;
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara *online* dan *offline*;
3. Peningkatan *regulatory assistance* dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM;

4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Banyumas menetapkan program dan kegiatan dalam menjalankan perannya, yaitu:

a. Kegiatan-kegiatan utama untuk melaksanakan pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia:
    1) Sertifikasi sarana produksi dan distribusi Obat dan Makanan;
    2) Perkuatan strategi dan pemantapan teknis pengawasan mutu Obat dan Makanan;
    3) Pengawasan sarana distribusi Obat dan pelayanan kefarmasian;
    4) Pengawasan sarana produksi Obat Bahan Alam dan Kosmetik;
    5) Pengawasan sarana distribusi Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan dan Kosmetik;
    6) Pengawasan sarana produksi Pangan Olahan;
    7) Pengawasan peredaran Pangan Olahan dan KLB KP;
    8) Pengawasan *post market* iklan dan penandaan Obat dan Makanan;
    9) Pelaksanaan desk registrasi bersama dengan Direktorat Registrasi Obat Tradisional Suplemen Kesehatan dan Direktorat Registrasi Kosmetik.
    10) Pemberdayaan Masyarakat dan pelaku usaha;
    11) Sosialisasi dan desk registrasi Pangan Olahan;
    12) Audit surveilans penerapan SMKPO;
    13) Pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha Pangan Olahan;
    14) Pencegahan kejahatan Obat dan Makanan;
    15) Intelijen Obat dan Makanan;
    16) Pemantauan pelanggaran hukum di bidang peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
    17) Penyidikan tindak pidana di bidang Obat dan Makanan;

18) Pengujian Obat dan Makanan.

b. Kegiatan strategis program dukungan manajemen:
   1. Koordinasi implementasi peraturan perundang-undangan, advokasi hukum, serta organisasi dan tata laksana ditambahkan dan pengelolaan pengaduan masyarakat serta reformasi birokrasi;
   2. Peningkatan penyelenggaraan kerja sama dan hubungan masyarakat Balai POM di Banyumas;
   3. Koordinasi perumusan renstra dan rencana tahunan, penyusunan dokumen anggaran, keuangan serta pengelolaan kinerja dan pelaporan;
   4. Pengelolaan sumber daya manusia;
   5. Pengelolaan sarana dan prasarana Balai POM di Banyumas;
   6. Pengembangan SDM Aparatur Balai POM di Banyumas;
   7. Pengelolaan teknologi informasi komunikasi, data, dan informasi Obat dan Makanan;
   8. Pengawasan dan peningkatan akuntabilitas aparatur.

Kegiatan Prioritas

Strategi BPOM Tahun 2025-2029

1. Penguatan pengawasan *pre-market* dan *post-market* sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.

2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.

3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.

4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.

5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.

6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan

berbasis data.

7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Penguatan pengawasan *pre-market* dan *post-market* Obat dan Makanan yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, perluasan cakupan pengawasan dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT merupakan salah satu implementasi Pembangunan Kesehatan Nasional di Provinsi Jawa Tengah yang secara otomatis berdampak juga terhadap seluruh proses bisnis pengawasan oleh Balai POM di Banyumas. Peningkatan terhadap jaminan peredaran Obat dan Makanan yang aman dan bermutu menjadi tujuan yang melekat dengan pelaksanaan pengawasan Balai POM di Banyumas. Berikut beberapa strategi Balai POM di Banyumas Tahun 2025-2029 diantaranya.

1) Peningkatan sarana dan prasarana laboratorium dan pelayanan publik yang didukung oleh kompetensi teknis pengawasan obat dan makanan yang kompeten serta adaptif terhadap dinamika regulasi dan inovasi teknologi sesuai dengan standar. Dengan berubahnya status Loka POM menjadi Balai POM, Balai POM di Banyumas akan meningkatkan kapabilitas salah satunya dalam hal laboratorium dan pelayanan publik. Hal ini untuk memastikan tersedianya fasilitas laboratorium dan pelayanan publik yang modern, aman, dan sesuai standar. Peningkatan ini akan didukung oleh SDM yang memiliki kompetensi teknis dalam pengawasan obat dan makanan, serta mampu beradaptasi dengan perubahan regulasi dan perkembangan teknologi terkini.

2) Memperkuat Reformasi Birokrasi dalam pengawasan obat dan makanan dengan mengoptimalkan kompetensi teknis yang kompeten dan adaptif terhadap dinamika regulasi dan inovasi teknologi serta dikelola secara profesional berbasis merit. Sebagaimana yang diamanatkan pada Reformasi Birokrasi yang memfokuskan pada peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur melalui pengelolaan berbasis merit. Kompetensi teknis yang unggul dan adaptif menjadi fondasi dalam mewujudkan tata kelola pengawasan yang efisien, transparan, dan akuntabel. Pengoptimalan kompetensi melalui sistem merit juga dapat meningkatkan transparansi lingkungan kerja dan meningkatkan daya saing antar pegawai agar mengikuti perkembangan zaman melalui peningkatan kapabilitas. Kapabilitas pegawai yang terus meningkat akan bersamaan dengan peningkatan kapabilitas balai dalam menjawab tantangan publik.

3) Kerja sama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi publik yang efektif dengan dukungan teknologi informasi yang optimal. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, menjadi kunci dalam memperluas jangkauan pengawasan. Dukungan teknologi informasi akan dimanfaatkan untuk menyampaikan informasi secara efektif dan membangun kesadaran publik terhadap keamanan obat dan makanan.

4) Memperkuat kerja sama lintas sektor dan pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan hilirisasi produk obat dan makanan. Hal ini mendorong sinergi antara sektor pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam memperkuat rantai nilai produk obat dan makanan. Tujuannya adalah meningkatkan daya saing produk lokal yang aman dan bermutu di tingkat nasional maupun internasional.

5) Sistem layanan perizinan yang responsif, adaptif, dan kolaboratif dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam mendukung implementasi SPBE BPOM. Sistem perizinan akan dikembangkan agar lebih cepat, fleksibel, dan terintegrasi, dengan memanfaatkan teknologi digital dan inovasi. Hal ini mendukung pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang efisien dan ramah pengguna.

6) Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Balai POM Banyumas dalam rangka peningkatan laboratorium dan infrastruktur pelayanan yang optimal sesuai standar. Penyediaan fasilitas yang memadai dan sesuai standar menjadi prioritas untuk mendukung kegiatan laboratorium dan pelayanan publik. Hal ini mencakup peralatan, ruang kerja, serta infrastruktur pendukung lainnya yang menunjang efektivitas operasional.

7) Memperkuat pengawasan obat dan makanan lintas sektor dalam mendukung Reformasi birokrasi dan pengawasan internal secara kuat dan terukur untuk mengoptimalkan struktur organisasi dan kelembagaan. Pengawasan yang terintegrasi antar sektor dan penguatan pengawasan internal akan dilakukan secara sistematis dan terukur. Tujuannya adalah untuk memperkuat struktur organisasi dan kelembagaan agar lebih adaptif dan responsif terhadap tantangan pengawasan.

8) Pengawasan obat dan makanan yang makin dinamis didukung dengan kompetensi teknis pengawasan obat dan makanan yang kompeten serta adaptif. Pengawasan akan terus dikembangkan agar mampu merespons dinamika pasar, regulasi, dan teknologi. SDM pengawas dituntut untuk memiliki kompetensi teknis yang tinggi

serta kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan.

9) Mengatasi Keterbatasan dan Dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) Inklusif dengan adanya kerja sama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi publik yang efektif. Melalui kerja sama lintas sektor, pemberdayaan masyarakat, dan komunikasi publik yang efektif, keterbatasan jumlah dan distribusi PFM akan diatasi secara inklusif. Pendekatan ini memastikan pengawasan tetap berjalan optimal di seluruh wilayah kerja.

10) Risiko serangan siber dan kebocoran data diatasi dengan pemanfaatan teknologi dan inovasi dalam mendukung implementasi SPBE BPOM. Pemanfaatan teknologi dan inovasi akan difokuskan pada penguatan sistem keamanan informasi. Hal ini penting untuk mendukung pelaksanaan SPBE BPOM yang aman, terpercaya, dan berkelanjutan.

11) Pengembangan kompetensi manajerial dan sosiokultural untuk mendukung kompetensi SDM pengawasan obat dan makanan yang makin dinamis. Selain kompetensi teknis, pengembangan kapasitas manajerial dan pemahaman sosiokultural menjadi bagian penting dalam membentuk SDM yang tangguh dan berdaya saing. Strategi ini mendukung pengawasan yang lebih humanis, inklusif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.

1.3. Struktur Organisasi

Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan (UPT BPOM) adalah satuan kerja yang bersifat mandiri yang melaksanakan tugas teknis operasional tertentu dan/atau tugas teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan obat dan makanan. UPT BPOM berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan, yang secara teknis dibina oleh Deputi dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Utama. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Adapun di Provinsi Jawa Tengah, terdapat 5 (lima) UPT Badan POM antara lain Balai Besar POM di Semarang, Balai POM di Surakarta, Balai POM di Banyumas, Loka POM di Kabupaten Tegal, dan Loka POM di Kabupaten Grobogan.

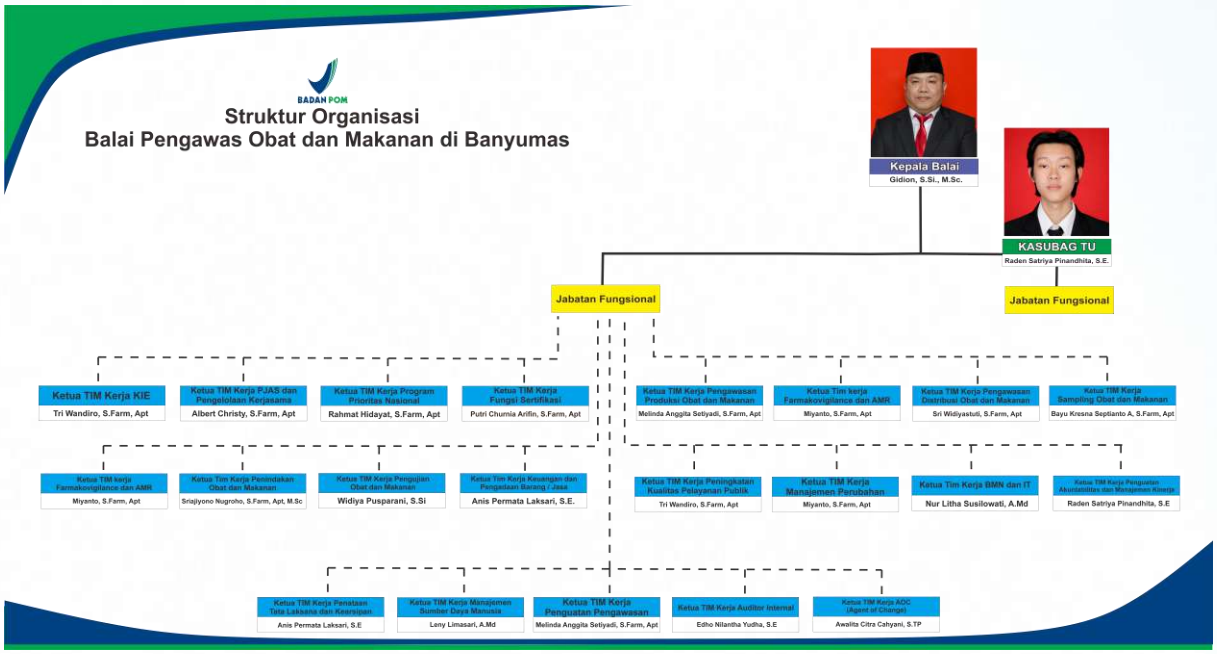

Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Banyumas

Analisis Lingkungan Strategis

a. Sumber Daya Manusia

Jumlah SDM yang dimiliki Balai POM di Banyumas sampai dengan September Tahun 2026 adalah sebanyak 50 orang, terdiri dari 41 orang ASN (dengan rincian 37 PNS dan 4 PPPK) serta 9 orang *outsourcing* yang terdiri dari 3 orang satpam, 3 *office boy*, 2 orang driver dan 1 orang sekretaris.

Berdasarkan hasil perhitungan Analisis Beban Kerja Tahun 2026 yang telah diperbarui dengan adanya perubahan status Loka menjadi Balai, pemenuhan SDM masih kurang dari target yang ditetapkan yaitu sejumlah 72 pegawai, sedangkan jumlah ASN existing baru dipenuhi 41 pegawai. Sehingga untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Banyumas belum didukung dengan SDM yang memadai baik dalam hal jumlah maupun proporsi jabatan fungsional, dimana secara keseluruhan masih terdapat kekurangan SDM sejumlah 31 orang. SDM Balai POM di Banyumas sampai dengan September Tahun 2026, Apoteker dan S2 lain 12 orang, S1 20 orang, D3 9 orang. Dengan komposisi tenaga tersebut terlihat tenaga dengan pendidikan S1 51% dan S2 21% yang paling banyak. Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, Balai POM di Banyumas melakukan optimalisasi agar beban kerja yang ada dapat diselesaikan oleh tenaga yang ada. Berikut data yang menunjukkan jumlah SDM berdasarkan tingkat pendidikan, gender dan usia Tahun 2026.

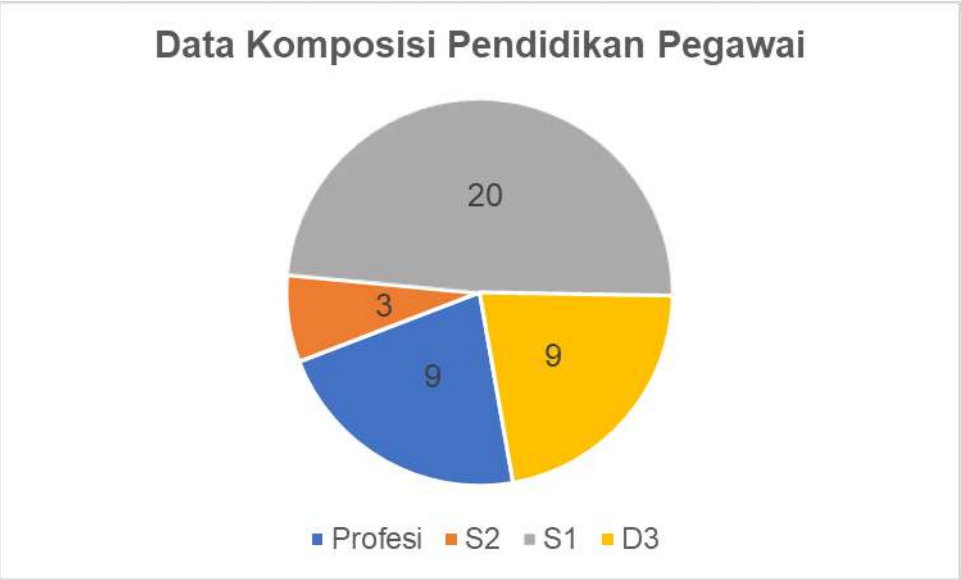

Gambar 1. 3 Profil SDM Balai POM di Banyumas Berdasarkan Tingkat Pendidikan

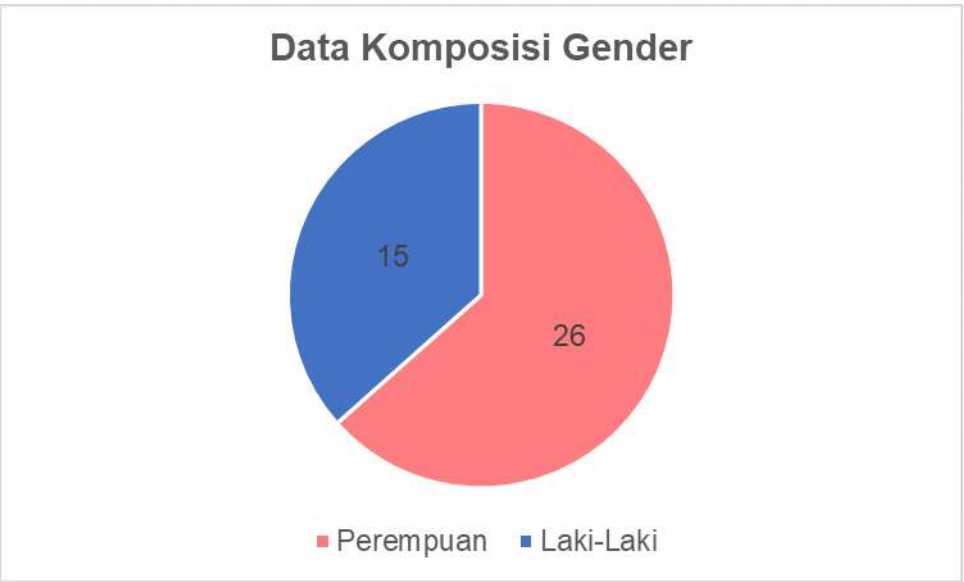

Gambar 1. 4 Profil SDM Balai POM di Banyumas Berdasarkan Gender

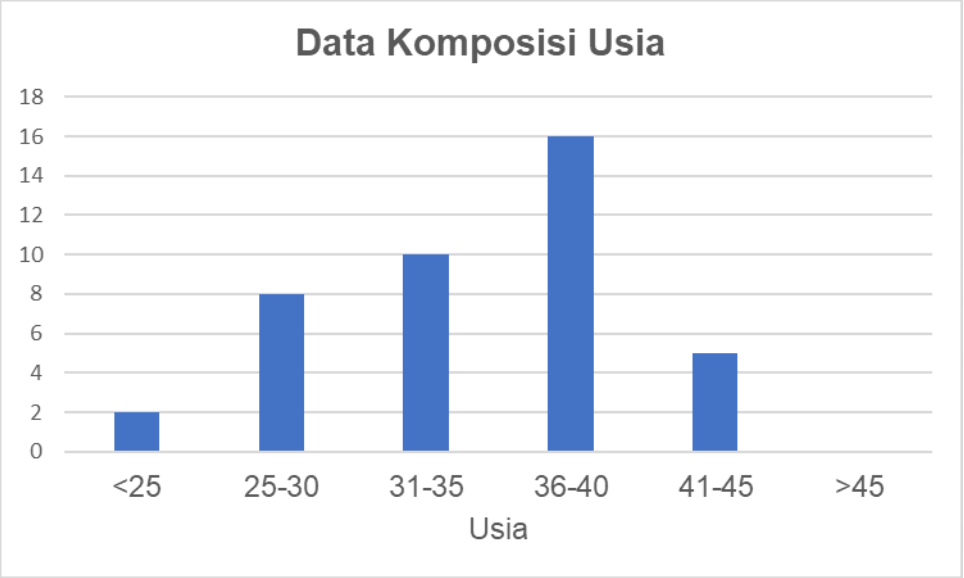

Gambar 1. 5 Profil SDM Balai POM di Banyumas Berdasarkan Usia

b. Sumber Daya Lain (Tim BMN)

Kantor Balai POM di Banyumas saat ini berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 24, Karangjengkol, Keluruhan Sokanegara, Kecamatan Purwokerto Timur, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah 53115 dengan bangunan gedung seluas 1.000 meter persegi berstatus sewa. Mulai ditempati dan digunakan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Banyumas sejak 5 Januari 2026. Kantor ini menjadi kantor baru Balai POM di Banyumas yang sebelumnya beralamat di Jalan Gunung Singgalang Nomor 14, Bancarkembar, Kecamatan Purwokerto Utara, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah, 53121. Pada kantor saat ini ditempati, seluruh operasional Balai POM di Banyumas dilaksanakan, meliputi fungsi perkantoran, fungsi pemeriksaan, fungsi penyidikan serta pelayanan publik. Adapun fungsi pengujian laboratorium masih dilaksanakan dengan menginduk pada Balai Besar POM di Semarang. Sejalan dengan upaya peningkatan kapasitas organisasi, sejak akhir Tahun 2025 hingga Tahun 2026 Balai POM di Banyumas terus mengembangkan sarana dan prasarana laboratorium agar memenuhi standar kapasitas laboratorium pada unit kerja setingkat Balai. Sumber tenaga Listrik yang digunakan Gedung Balai POM di Banyumas berasal dari Perusahaan Listrik Negara (PLN) dengan daya terpasang sebesar 23.000 VA, yang didukung oleh generator set (genset) berkapasitas 250 kVA sebagai sumber listrik cadangan.

Sumber air yang digunakan di Balai POM di Banyumas pada saat ini dipenuhi melalui air sumur sebagai sumber utama penyediaan air. Dalam mendukung pelaksanaan Tugas dan Fungsi Balai POM di Banyumas memiliki 6 unit kendaraan, yang terdiri dari:

- 2 (dua) unit motor operasional kantor;
- 1 (satu) unit mobil operasional kantor;
- 1 (satu) unit mobil fungsional laboratorium keliling;
- 1 (satu) unit mobil fungsional KIE berstatus sewa;
- 1 (satu) unit mobil Dinas Jabatan berstatus sewa.

c. Luas Wilayah Kerja dan Jumlah Kabupaten

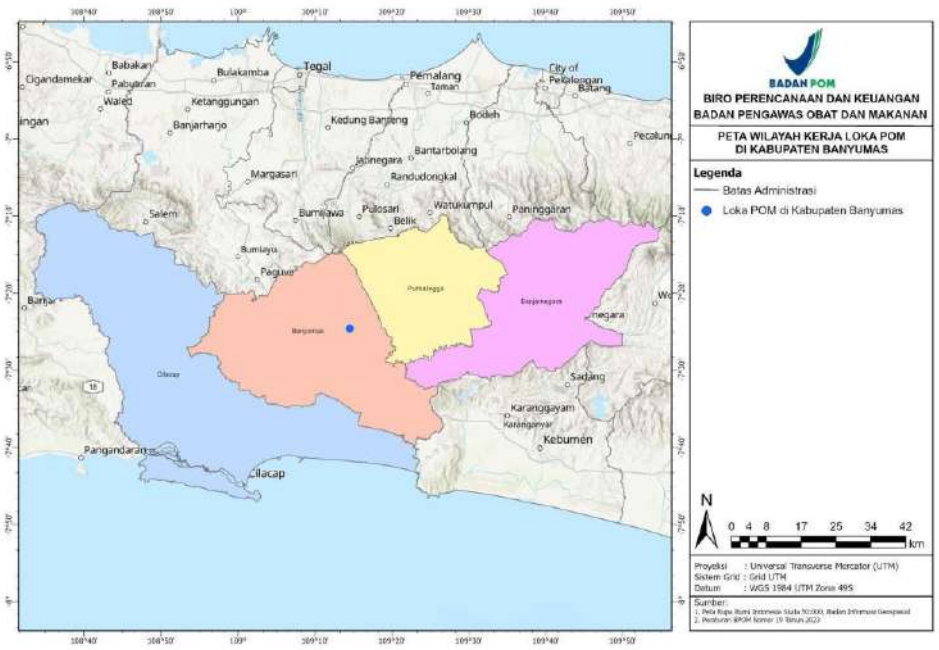

Gambar 1. 6 Peta Provinsi Jawa Tengah

Wilayah pengawasan Balai POM di Banyumas terdiri atas 4 wilayah Kabupaten/Kota yaitu Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banjarnegara. Luas wilayah Kabupaten Banyumas adalah 1.328 km^2, Kabupaten Cilacap 2.252 km^2, Kabupaten Purbalingga 777,6 km^2, dan Kabupaten Banjarnegara 1.070 km^2, yang mana keempat Kabupaten tersebut apabila dijumlahkan memiliki total luas wilayah 5.427,6 km^2 atau sekitar 16,55% dari luas Provinsi Jawa Tengah.

Jumlah Kabupaten / Kota yang menjadi wilayah kerja Balai POM di Banyumas dengan 4 (empat) Kabupaten tersebut, diantaranya:

1) Kabupaten Banyumas, dengan ibukota terletak di Kecamatan Purwokerto Timur. Kabupaten ini memiliki 27 Kecamatan, 30 Kelurahan, dan 301 Desa.
2) Kabupaten Cilacap dengan ibukota terletak di Kecamatan Cilacap Tengah. Kabupaten ini memiliki 24 Kecamatan, 15 Kelurahan, dan 269 Desa.
3) Kabupaten Purbalingga dengan ibukota terletak di Kecamatan Purbalingga. Kabupaten ini memiliki 18 Kecamatan, 15 Kelurahan, dan 224 Desa.

4) Kabupaten Banjarnegara dengan ibukota terletak di Kecamatan Banjarnegara. Kabupaten ini memiliki 20 Kecamatan, 12 Kelurahan, dan 266 Desa.

Peraturan Badan POM No. 3 Tahun 2025 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan POM No. 19 Tahun 2023 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pada Badan POM menjadi dasar pembentukan UPT di Kabupaten/Kota atau dikenal sebagai Balai POM di Banyumas.

1.4. Isu Strategis

Identifikasi potensi dan permasalahan Balai POM di Banyumas dilakukan untuk menganalisis permasalahan, tantangan, peluang, kelemahan dan potensi yang akan dihadapi dalam rangka melaksanakan penugasan RPJMN 2025-2029. Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran kinerja Balai POM di Banyumas perlu dilakukan analisis yang menyeluruh dan terpadu terhadap faktor lingkungan termasuk isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi tercapainya tujuan dan sasaran kinerja. Isu-isu strategis tersebut adalah sebagai berikut:

INTERNAL

Di dalam Daftar Risiko (Risk Register) Balai POM di Banyumas yang telah disahkan oleh Kepala Balai POM di Banyumas, yang secara rutin di *update* satu tahun satu kali. Berikut ini daftar isu baik internal di Balai POM di Banyumas:

1. Keterbatasan distribusi sumber daya manusia (SDM) dan pergerakan mutasi pegawai lintas fungsi yang dinamis;
2. Masih terdapat kesenjangan kompetensi, terutama pada aspek manajerial dan sosiokultural;
3. Kelembagaan dan susunan organisasi Balai POM di Banyumas yang belum optimal;
4. Penyelesaian proses perizinan melalui *Online Single Submission* BPOM – (OSS BPOM) belum sepenuhnya optimal;
5. BPOM Banyumas belum memiliki ruangan laboratorium yang sesuai dengan Standar Kemampuan Laboratorium (SKL);
6. Sentra tanggap darurat atau sistem peringatan dini (*early warning system*) belum terintegrasi;
7. Belum mampu mengoptimalkan sumber daya data yang dimiliki;
8. Sistem TI belum terintegrasi secara optimal.

EKSTERNAL

Di dalam Daftar Risiko (Risk Register) Balai POM di Banyumas yang telah disahkan oleh Kepala Balai POM di Kabupaten Banyumas, yang secara rutin di *update* satu tahun satu kali. Berikut ini daftar isu eksternal di Balai POM di Banyumas:

1. *E-commerce* dan kejahatan siber di bidang Obat dan Makanan;
2. Koordinasi antar lembaga belum sinergis;
3. Keterbatasan dan dinamika Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) inklusif;
4. Dinamika pasar yang cepat;
5. Penerimaan masyarakat dan industri terhadap kebijakan nasional obat dan makanan;
6. Krisis kesehatan global;
7. Isu lingkungan dan keberlanjutan;
8. Peningkatan risiko kontaminasi dan falsifikasi;
9. Perubahan demografi dan epidemiologi;
10. Ancaman bioteriosme;
11. Akselerasi perkembangan teknologi.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Uraian Singkat Renstra

Rencana Strategis (Renstra) Badan POM 2025-2029 telah ditetapkan melalui Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 pada 7 Oktober 2025. Dokumen Renstra ini menjadi acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Badan POM sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta berorientasi pada peningkatan kinerja lembaga, unit kerja sampai pada level individu. Renstra BPOM dirancang tidak hanya untuk menjawab tantangan saat ini, tetapi juga mengantisipasi dinamika masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan BPOM tetap relevan dan efektif dalam menjalankan mandat pengawasan, mengingat pesatnya inovasi dan perubahan di sektor tersebut.

Arah kebijakan dan strategi Badan POM Tahun 2026 ini diharapkan berkontribusi pada pencapaian RPJMN dan Visi Misi Presiden yang terpilih. Hal ini dimungkinkan karena program dan kegiatan Balai POM di Banyumas 2026 telah dilengkapi dengan target *outcome* dan *output* yang akan dipantau dan dievaluasi secara berkala Renstra Balai POM di Banyumas mengacu merujuk pada arah kebijakan dan strategi yang tertuang dalam Renstra BPOM 2025–2029, yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, dan strategi nasional dalam pengawasan obat dan makanan. Sebagai dokumen yang bersifat dinamis, Renstra Balai POM di Banyumas 2025–2029 akan menjadi acuan utama dalam penyusunan rencana kerja tahunan, pengukuran kinerja, serta evaluasi capaian strategis selama lima tahun ke depan. Dengan demikian, hasil pelaksanaan Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2026 dapat memberikan kontribusi terhadap visi, misi dan program kerja Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2025-2029.

Sebagaimana tercantum dalam Dokumen Renstra Balai POM di Banyumas Tahun 2025-2029 BAB II mengenai Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Kegiatan, Balai POM di Banyumas berkomitmen untuk memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan serta mutu yang dapat dipercaya oleh konsumen, sekaligus mendorong terciptanya kompetisi yang sehat baik di tingkat nasional maupun internasional. Berdasarkan dengan visi yang menjadi komitmen bagi

Balai POM di Banyumas, telah dirumuskan sejumlah misi sebagai langkah strategis untuk mewujudkan visi tersebut, antara lain:

a. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat. Terdapat penekanan mengenai pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. Balai POM di Banyumas tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat.

b. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing. Balai POM di Banyumas berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif Balai POM di Banyumas dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan.

c. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan. Balai POM di Banyumas menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, Balai POM di Banyumas berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.

d. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, Balai POM di Banyumas terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha.

Dengan adanya visi dan misi Balai POM di Banyumas tersebut, tersusunlah sasaran kegiatan yang mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya yang dimiliki. Balai POM di Banyumas diharapkan dapat mencapai sasaran kegiatan berikut:

a. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur,

berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait.

b. Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi. UPT BPOM berperan memastikan bahwa setiap sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerjanya mematuhi standar dan persyaratan yang berlaku. Pengawasan yang dilakukan secara efektif, terencana, dan berkelanjutan menjadi kunci dalam menjamin mutu serta keamanan produk yang dihasilkan.
c. Meningkatnya efektivitas KIE. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen.
d. Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu. UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar.
e. Terlaksananya penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT. UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko.
f. Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif di wilayah kerja UPT. UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat.
g. Layanan publik UPT yang prima. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi.

h. Terwujudnya tatakelola pemerintah unit organisasi yang optimal. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional.

Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Banyumas Tahun 2025-2029 ini tertuang di dalam Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas Nomor HK.02.02.24B.12.25.68 Tahun 2025.

2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT)

Sebelum tersusunnya Perjanjian Kinerja dan Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja, terdapat dokumen perencanaan untuk menjadi pedoman setelah adanya dokumen Renstra, yakni dokumen rencana kinerja tahunan atau dapat disebut sebagai RKT. RKT merupakan dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga untuk periode 1 (satu) tahun (tahun n+1), yang merupakan penjabaran sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh satuan organisasi / kerja melalui berbagai kegiatan tahunan. RKT Tahun 2026 yang dimiliki Balai POM di Banyumas terdiri atas sasaran kegiatan, indikator kinerja utama, dan target yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan. Berikut matriks RKT Tahun 2026 Balai POM di Banyumas.

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1.	01 – Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 – Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,25%
		02 – Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27%
		03 – Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77%
		04 – Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100%
		05 – Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti	87%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		sesuai ketentuan	
		06 – Persentase keputusan / rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96%
		07 – Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86%
		08 – Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83%
		09 – Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,5%
		10 – Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77%
		11 – Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,38%
		12 – Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar.	81%
		13 – Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%
		14 – Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai	9

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Standar Kemampuan Laboratorium	
		15 – Persentase Kabupaten / Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten / Kota Pangan Aman	50%
		16 – Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81%
2.	02 – Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 – Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63%
3.	03 – Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,58 nilai
		02 – Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 jumlah sekolah
		03 – Jumlah desa pangan aman	1 jumlah desa
		04 – Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 jumlah pasar
4.	04 – Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 – Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	37,25
5.	05 – Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 – Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	77%
6.	06 – Terlaksananya	01 – Persentase Laporan	91%

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	
7.	07 – Layanan Publik UPT yang prima	01 – Indeks Pelayanan Publik UPT	3,85 indeks
8.	08 – Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 – Nilai pembangunan ZI UPT BPOM	75%
		02 – Nilai AKIP UPT BPOM (Satker)	78,96%
		03 – Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM (Satker)	5 indeks
		04 – Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9 indeks

Tabel 2. 1 RKT Tahun 2026 Balai POM di Banyumas

Hingga Triwulan III Tahun 2026, Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan belum dapat dijalankan. Perkiraan indikator kinerja MBG ini akan dilaksanakan pada tahun 2027.

2.3. Perjanjian Kinerja (PK)

Perjanjian Kinerja wajib disusun sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 tahun 2014, sehingga Balai POM di Banyumas sebagai Unit Pelaksana Teknis Badan POM harus menyusun Perjanjian Kinerja untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas dan kinerja pemerintahan.

Dalam pelaksanaannya, Balai POM di Banyumas melaksanakan program kerja berdasarkan Perjanjian Kinerja yang telah disepakati antara Kepala Balai POM di Banyumas dan Kepala Badan POM. Perjanjian ini menjadi landasan utama dalam memastikan setiap kegiatan yang dilaksanakan selaras dengan sasaran strategis, tujuan organisasi, serta arah kebijakan nasional. Melalui mekanisme tersebut, setiap program dan kegiatan yang dijalankan tidak hanya berorientasi pada pencapaian target kinerja, tetapi juga pada peningkatan akuntabilitas, efektivitas pengawasan, dan kontribusi nyata terhadap perlindungan masyarakat.

Pada tahun 2026, terdapat perubahan Perjanjian Kinerja sebanyak 1 (satu) kali yang disahkan pada 5 Agustus 2026 sejalan dengan Nota Dinas Sekretariat Utama Nomor PR.07.2.07.26.541 mengenai Permintaan Revisi PK dan RAPK 2026. Dengan demikian, terdapat 2 (dua) dokumen Perjanjian Kinerja yakni dokumen Perjanjian Kinerja (PK) pada awal tahun dan perubahannya pada Triwulan III Tahun 2026 ini tepatnya bulan Agustus. Dokumen Perjanjian Kinerja awal tahun dan perubahannya dapat diakses secara lengkap pada Lampiran.

Dalam Perjanjian Kinerja terakhir, Balai POM di Banyumas memiliki 8 Sasaran Strategis yang diukur melalui 28 Indikator Kegiatan Utama (IKU). Target pencapaian ini merupakan *output* kegiatan yang harus dicapai berdasarkan kinerja di Balai POM di Banyumas. Anggaran atau pagu yang tercantum pada PK revisi final sebesar Rp 7.763.760.000,- dengan anggaran pada program pengawasan obat dan makanan sebesar Rp 4.173.108.000,- dan program dukungan manajemen sebesar Rp 3.590.652.000,-. Balai POM di Banyumas berkomitmen untuk terus mengoptimalkan kapabilitas yang dimiliki, sehingga target yang telah direncanakan dapat tercapai secara akuntabel dan memberikan kontribusi nyata terhadap peningkatan kualitas pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja.

Secara rinci, target Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas Revisi Final Tahun 2026 tersaji dalam tabel berikut :

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET 2026	ANGGARAN
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,41 %		30.143.000
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	35 %		4.239.000
		03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77 %		36.988.140
		04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh	100 %		536.060

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET 2026	ANGGARAN
			UPT			
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	%	4.288.480
		06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,03	%	8.075.000
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,67	%	16.684.500
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83	%	20.375.500
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,09	%	72.485.750
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77,33	%	49.437.500
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan	94,38	%	1.800.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET 2026	ANGGARAN
			olahan yang diawasi sesuai ketentuan			
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	87,36	%	13.387.000
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	%	6.451.750
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7,5	Nilai	83.534.000
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50	%	11.793.320
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	33,30	%	3.620.000
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,25	Nilai	21.526.000
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	Jumlah sekolah	14.480.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET 2026	ANGGARAN
		03	Jumlah desa pangan aman	1	Jumlah desa	22.431.000
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	Jumlah pasar	19.569.000
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	27,45	%	7.986.000
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	%	104.479.000
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91	%	5.000.000
7	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,22	Indeks	5.000.000
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75	Nilai	3.694.457.500
		02	Nilai AKIP UPT BPOM	76,3	%	1.115.420.500
		03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	Indeks	2.312.765.000

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN			TARGET 2026	ANGGARAN
		04	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9	Indeks	36.807.000

Tabel 2. 2 Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas Tahun 2026

2.4. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK)

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja merupakan wujud nyata komitmen seorang pejabat penerima amanah kepada atasan langsungnya. Dokumen ini tidak sekadar berisi daftar target, melainkan sebuah janji kinerja yang mencerminkan arah strategis lembaga. Di dalamnya termuat sasaran strategis, indikator kinerja, target pencapaian per triwulan, program, kegiatan, serta alokasi anggaran yang dirancang secara terkoordinasi.

Melalui Rencana Aksi ini, setiap unit kerja memiliki pedoman yang jelas untuk melaksanakan berbagai kegiatan secara terukur dan konsisten. Pendekatan ini memastikan bahwa setiap langkah yang diambil tidak hanya menghasilkan output, tetapi juga memberikan outcome yang berdampak nyata bagi masyarakat. Dengan demikian, Rencana Aksi Perjanjian Kinerja menjadi instrumen penting dalam menjaga akuntabilitas, memperkuat efektivitas pengawasan, serta menumbuhkan budaya kerja yang profesional dan berintegritas.

Dalam tahun 2026, dokumen RAPK Balai POM di Banyumas mengalami perubahan sebanyak 2 (dua) kali. Dokumen perubahan secara lengkap dapat diakses pada Lampiran. Berikut adalah Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas Revisi Final Tahun 2026:

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET			
				B03	B06	B09	B12
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,41	87,41	87,41	87,41
		02	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	0	27
		03	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko	77	77	77	77

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET			
				B03	B06	B09	B12
			yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan				
		04	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	100
		05	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	87	87	87
		06	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,03	96,03	96,03	96,03
		07	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,67	91,67	91,67	91,67
		08	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83	83	83	83
		09	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,09	96,09	96,09	96,09
		10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai	77,33	77,33	77,33	77,33

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET			
				B03	B06	B09	B12
			ketentuan				
		11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,38	94,38	94,38	94,38
		12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	87,36	87,36	87,36	87,36
		13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	0	0	100
		14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	6	6,5	7	7,5
		15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	0	0	50
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	12,5	33,3	33,3	33,3
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	01	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,25	89,25	89,25	89,25

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET			
				B03	B06	B09	B12
		02	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	20%	70%	70%	1
		03	Jumlah desa pangan aman	15%	72%	74%	1
		04	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	10%	70%	80%	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	21,67%	53,33%	75%	27,45
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	0	10	55	100
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	91
7	Layanan Publik UPT yang prima	01	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	4,22

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET			
				B03	B06	B09	B12
8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	0	75
		02	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0	76,3
		03	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	5
		04	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	2,8

Tabel 2. 3 Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Target per Triwulan 2026

Perubahan ini dilakukan untuk memastikan kesesuaian antara rencana dan realisasi, serta agar pelaksanaan program dan kegiatan tetap berjalan efektif, akuntabel, dan berorientasi pada pencapaian *outcome*. Dengan adanya revisi ini, Balai POM di Banyumas memiliki pedoman yang lebih adaptif terhadap dinamika kebutuhan, sekaligus memperkuat komitmen dalam mencapai target kinerja yang telah direncanakan.

2.5. Metode Pengukuran

Pengumpulan dan pengolahan data untuk mengukur kinerja melibatkan seluruh anggota unit kerja di Balai POM Banyumas. Setiap tim bertanggung jawab menyusun laporan kinerja berdasarkan data yang akurat dan valid, yang kemudian diintegrasikan menjadi laporan kinerja menyeluruh. Data yang terkumpul mencakup indikator kinerja utama yang mendukung pencapaian tujuan strategis Balai POM Banyumas.

Pengukuran kinerja mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Pengukuran kinerja ini dilakukan secara berkala (bulanan/ triwulanan/ semester) dan tahunan sesuai Manual Indikator Kinerja untuk kinerja level organisasi dan level satker/unit kerja.

Kriteria penilaian capaian kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja ini adalah sebagai berikut:

Kategori	Capaian IKU	Notifikasi Warna
Tidak Dapat Disimpulkan	>110%	
Sangat Baik	100% < x ≤ 110%	
Baik	90% < x ≤ 100%	
Cukup	60% ≤ x ≤ 90%	
Kurang	<60%	

Gambar 2. 1 Kriteria Penilaian Capaian Kinerja

Nilai Kinerja Organisasi (NKO) di lingkungan BPOM ini memiliki dua jenis, yakni NKO Periodik dan NKO Tahunan. NKO Periodik merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja secara triwulanan. NKO periodik dihitung dari total capaian indikator perjanjian kinerja periodik tertentu yang telah dinormalisasi dibagi dengan jumlah indikator kinerja yang memiliki capaian kinerja pada periode tersebut. NKO periodik yang digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja periodik pegawai. Kemudian, untuk NKO Tahunan merupakan nilai kinerja unit/satuan kerja pada akhir tahun anggaran. NKO tahunan digunakan untuk menetapkan sebaran (pola distribusi) predikat kinerja tahunan pegawai.

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 22 Tahun 2024 tentang Penilaian Kinerja Organisasi, NKO tahunan terdiri dari 2 (dua) komponen yaitu:

1) Capaian Perjanjian Kinerja Capaian perjanjian kinerja merupakan hasil pengukuran terhadap kinerja unit/satuan kerja setiap tahunnya yang dituangkan dalam laporan kinerja.
2) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja Kementerian Negara/Lembaga merupakan hasil evaluasi yang diterbitkan oleh Kementerian PAN RB setiap tahunnya kepada seluruh Instansi Pemerintah. Sementara hasil evaluasi akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah pada Entitas Akuntabilitas Kinerja dalam Kementerian/Lembaga (satuan kerja) diterbitkan oleh inspektorat/unit kerja yang ditunjuk sebagai evaluator internal Instansi Pemerintah. Matriks NKO dapat dilihat pada tabel berikut.

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Normalisasi Capaian PK (1)	Koreksi Normalisasi Capaian PK Berdasarkan Predikat AKIP (2)	Nilai Akhir Capaian PK (3) {(1)x(100%-(2))x100)
	Total Capaian PK (4)							
	Nilai Kinerja Organisasi (Rata-Rata Capaian PK (5)							
	Predikat NKO (6)							

Gambar 2. 2 Matriks NKO Tahunan

Keterangan:

a. Normalisasi Capaian PK mempertimbangkan koreksi terhadap anomali capaian kinerja unit/satuan kerja maka normalisasi capaian perjanjian kinerja sebagaimana ketentuan berikut:
   - Jika capaian kinerja setiap indikator >110% maka akan dinormalisasi menjadi 110%;
   - Jika capaian kinerja setiap indikator ≤110% maka tidak dilakukan normalisasi.

b. Koreksi Normalisasi Capaian PK, merupakan hasil normalisasi capaikan PK dikoreksi dengan memperhatikan predikat akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (AKIP) yang bersumber dari hasil evaluasi Inspektorat Utama. Predikat akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah menjadi faktor koreksi besaran capaian perjanjian kinerja yang disampaikan melalui laporan kinerja.

Predikat AKIP	**Koreksi Capaian PK setelah Normalisasi**
AA	0%
A	
BB	10%
B	15%
CC	20%
C	30%
D	

Gambar 2. 3 Koreksi Capaian PK Berdasarkan Capaian AKIP

c. Nilai akhir capaian perjanjian kinerja merupakan hasil perkalian nilai normalisasi capaian perjanjian kinerja (poin a) dengan hasil pengurangan 100% dengan nilai koreksi capaian perjanjian kinerja berdasarkan predikat AKIP (poin b), dikalikan 100.

Kinerja yang dicapai organisasi diberikan Predikat Nilai Kinerja Organisasi sebagai acuan dalam penetapan sebaran predikat kinerja pegawai. Predikat Nilai Kinerja Organisasi mengacu tabel berikut:

Predikat	NPSS	Notifikasi Warna
Istimewa	> 100%	
Baik	80% < x ≤ 100%	
Butuh Perbaikan	60% < x ≤ 80%	
Kurang	20% < x ≤ 60%	
Sangat Kurang	0% ≤ x ≤ 20%	

Tabel 2. 4 Predikat Berdasarkan Kriteria NKO

Selain itu, juga dilakukan perhitungan atas Efisiensi Kinerja. Pengukuran efisiensi dari kinerja diukur dengan menghitung kemampuan suatu kegiatan untuk menggunakan input yang lebih sedikit namun menghasilkan output yang sama atau lebih besar atau dengan kata lain bahwa persentase capaian output sama atau lebih tinggi dari capaian input. Diperoleh dengan membagi % capaian output dengan % capaian input:

$$IE = \frac{\%\ CapaianOutput}{\%\ RencanaCapaianinput} IE = \frac{100\ \%}{100\%} = 1$$

Efisiensi diukur dengan membandingkan indeks efisiensi (IE) terhadap standar efisiensi (SE). Apabila IE ≥ SE maka kegiatan dianggap efisien, apabila: IE ≤ SE maka kegiatan dianggap tidak efisien. Selanjutnya terhadap kegiatan yang efisien atau tidak efisien diukur tingkat efisiensi (TE) yang menggambarkan seberapa besar efisiensi atau ketidakefisienan yang terjadi pada setiap kegiatan dengan menggunakan persamaan:

$$TE = \frac{IE - SE}{SE}$$

Tingkat Efisiensi dihitung dengan range sebagai berikut:

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
1	<0	Tidak Efisien
2	0 – 0,2	100% (efisien)
3	0,21 – 0,4	95% (efisien)
4	0,41 – 0,6	92% (efisien)

No	Tingkat Efisiensi	Capaian
5	0,61 – 0,8	90% (efisien)
6	0,81 – 1,0	88% (efisien)
7	1,01 – 1,2	86% (tidak efisien)
8	1,21 – 1,4	84% (tidak efisien)
9	1,41 – 1,6	80% (tidak efisien)
10	1,61 – 1,8	78% (tidak efisien)
11	>1,81	75% (tidak efisien)

Tabel 2. 5 Tingkat Efisiensi

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran capaian kinerja organisasi merupakan bagian penting dari proses manajemen kinerja yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan kegiatan dan pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis dapat diketahui melalui pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan, khususnya Indikator Kinerja Utama (IKU), sebagai instrumen untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban setiap instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi serta melaksanakan misi yang telah ditetapkan. Pertanggungjawaban tersebut dilaksanakan secara periodik melalui sistem pengukuran dan pelaporan kinerja yang terstruktur, sehingga pencapaian sasaran dan tujuan organisasi dapat dipantau, dievaluasi, dan ditindaklanjuti secara transparan dan berkesinambungan.

Pada Triwulan III Tahun 2026, Balai POM di Banyumas telah melaksanakan berbagai kegiatan dalam upaya mencapai target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja. Pelaksanaan kegiatan diarahkan untuk memastikan tercapainya sasaran strategis organisasi melalui pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, penguatan pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, serta peningkatan kualitas tata kelola organisasi. Dalam pelaksanaannya, Balai POM di Banyumas terus berupaya mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, serta dukungan teknologi informasi sesuai dengan kebutuhan dan kondisi yang ada.

Berikut adalah nilai kinerja organisasi Balai POM di Banyumas per Triwulan III Tahun 2026, yang menjadi dasar evaluasi sekaligus pijakan untuk peningkatan kinerja pada periode berikutnya:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Dinormalisasi
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai	87,41	94,98	108,66	108,66%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Dinormalisasi
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	ketentuan				
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	-	-
		Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77	83,20	108,05	108,05%
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100	100	100	100%
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	92,50	106,32	106,32%
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,03	97,13%	101,15	101,15%
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,67	93,75%	102,27	102,27%
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti	83	85,71%	103,27	103,27%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Dinormalisasi
		sesuai ketentuan				
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,09	100	104,07	104,07%
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77,33	80,69%	104,35	104,35%
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,38	98,97%	104,86	104,86%
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	87,36	82,41%	94,33%	94,33%
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	0	-	-
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7	7,17	102,43	102,43%
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian	0	0	-	-

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Dinormalisasi
		Kabupaten/Kota Pangan Aman				
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	33,3	33,3	100	100%
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.25	90,36	101,24	101,24%
		Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	70%	70%	100	100%
		Jumlah desa pangan aman	74%	74%	100	100%
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	80%	80%	100	100%
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	75	80	106,67	106,67%
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan	55	55	100	100%

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Capaian Dinormalisasi
	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	100	100%
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	-	-
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	-	-
		Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	-	-
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	-	-
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	-	-

Tabel 3. 1 Capaian NKO

Hasil pengukuran nilai kinerja organisasi atau dapat disebut sebagai NKO sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, Balai POM di Banyumas mendapatkan capaian sebesar 101,72%. Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor

676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan, NKO > 100% masuk ke dalam kategori **Istimewa**. apaian tersebut menunjukkan bahwa secara umum pelaksanaan program dan kegiatan Balai POM di Banyumas telah berjalan dengan baik dan mampu memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, bahkan pada beberapa indikator telah mencapai hasil di atas target.

Capaian NKO sebesar 101,72% juga menunjukkan bahwa pelaksanaan kinerja organisasi sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 telah memberikan hasil yang positif. Sebagian besar indikator kinerja yang telah dapat diukur menunjukkan capaian pada atau di atas target yang ditetapkan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya upaya optimal dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, baik dalam aspek pengawasan, pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha, penindakan, maupun pelaksanaan kegiatan pendukung lainnya. Capaian tersebut perlu dipertahankan sekaligus menjadi dasar untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan pada periode berikutnya.

Namun demikian, terdapat beberapa indikator yang belum menunjukkan capaian atau belum dapat diperhitungkan secara penuh, seperti pelaporan KTD/ESO, pengendalian AMR, pendampingan Kabupaten/Kota pangan aman, serta indikator layanan publik dan tata kelola organisasi. Belum adanya capaian pada indikator-indikator tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa kegiatan tidak dilaksanakan atau mengalami kegagalan, tetapi disebabkan oleh karakteristik indikator yang bersifat tahunan dan/atau pengukurannya dilakukan pada akhir periode. Oleh karena itu, capaian indikator tersebut baru dapat dinilai secara komprehensif setelah seluruh rangkaian kegiatan dan proses pengukuran pada tahun 2026 selesai dilaksanakan.

Balai POM di Banyumas akan terus memastikan pelaksanaan kegiatan yang mendukung indikator tahunan berjalan sesuai dengan rencana, melakukan monitoring secara berkala, serta mengantisipasi potensi kendala yang dapat memengaruhi pencapaian target pada akhir tahun. Capaian hingga Triwulan III Tahun 2026 ini menjadi motivasi untuk mempertahankan kinerja yang telah tercapai dan meningkatkan kualitas pelaksanaan kegiatan, sehingga seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026 dapat tercapai secara optimal sampai dengan akhir periode.

Berikut dapat terlihat lebih rinci mengenai kinerja Balai POM di Banyumas pada Triwulan III Tahun 2026.

Kode SS	Sasaran Strategis	No IKK	Indikator	Target Tahun 2026	Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan III Tahun 2026			% Capaian Thd Target Triwulan III 2026	Kriteria	Notifikasi Warna
						Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSS1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,41%	87,41%			94,98%	108,66	SANGAT BAIK	108,66
		IKSS2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	35.00%				0	0,00	BELUM DAPAT TERHITUNG PADA TW III 2026	
		IKSS3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77,00%	77,00%			83,20%	108,05	SANGAT BAIK	108,05
		IKSS4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100%	100%			100%	100	BAIK	100
		IKSS5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87%	87%			92,50%	106,32	SANGAT BAIK	106,32
		IKSS6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,03%	96,03%			97,13%	101,15	SANGAT BAIK	101,15
		IKSS7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,67%	91,67%			93,75%	102,27	SANGAT BAIK	102,27

Kode SS	Sasaran Strategis	No IKK	Indikator	Target Tahun 2026	Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan III Tahun 2026			% Capaian Thd Target Triwulan III 2026	Kriteria	Notifikasi Warna
						Pembilang	Penyebut	Realisasi			
		IKSS8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83%	83%			85,17%	103,27	SANGAT BAIK	103,27
		IKSS9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,09%	96,09%			100%	104,07	SANGAT BAIK	104,07
		IKSS10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77,33%	77,33%			80,69%	104,35	SANGAT BAIK	104,35
		IKSS11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,38%	94,38%			98,97%	104,86	SANGAT BAIK	104,86
		IKSS12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	87,36%	87,36%			82,41%	94,33	BAIK	94,33
		IKSS13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%					0,00	BELUM DAPAT TERHITUNG PADA TW III 2026	

Kode SS	Sasaran Strategis	No IKK	Indikator	Target Tahun 2026	Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan III Tahun 2026			% Capaian Thd Target Triwulan III 2026	Kriteria	Notifikasi Warna
						Pembilang	Penyebut	Realisasi			
		IKSS14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7,5	7			7,17	102,43	SANGAT BAIK	102,43
		IKSS15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50%				0	0,00	BELUM DAPAT TERHITUNG PADA TW III 2026	
Capaian SS1									103,31	SANGAT BAIK	
SS2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSS16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	33,30%	33,30%			33,30%	100,00	BAIK	100,00
Capaian SS2									100,00	BAIK	
SS3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSS17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,25	89,25			90,36	101,24	SANGAT BAIK	101,24
		IKSS18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	70%			70%	100,00	BAIK	100,00
		IKSS19	Jumlah desa pangan aman	1	74%			74%	100,00	BAIK	100,00

Kode SS	Sasaran Strategis	No IKK	Indikator	Target Tahun 2026	Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan III Tahun 2026			% Capaian Thd Target Triwulan III 2026	Kriteria	Notifikasi Warna
						Pembilang	Penyebut	Realisasi			
		IKSS20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	80%			80%	100,00	BAIK	100,00
Capaian SS3									100,31	SANGAT BAIK	
SS4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSS21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	27,45	75%			80	106,67	SANGAT BAIK	106,67
Capaian SS4									106,67	SANGAT BAIK	
SS5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSS22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	55%			55%	100,00	BAIK	100,00
Capaian SS5									100,00	BAIK	
SS6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSS23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91,00	50,00			50,00	100,00	BAIK	100,00
Capaian SS6									100,00	BAIK	

Kode SS	Sasaran Strategis	No IKK	Indikator	Target Tahun 2026	Target Triwulan II Tahun 2026	Realisasi Triwulan III Tahun 2026			% Capaian Thd Target Triwulan III 2026	Kriteria	Notifikasi Warna
						Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SS7	Layanan Publik UPT yang Prima	IKSS24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,22				0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE	
Capaian SS7									0	BELUM DAPAT TERHITUNG	
SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSS25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM					0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE	
		IKSS26	Nilai AKIP UPT BPOM	78,96				0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE	
		IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5				0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE	
		IKSS28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9				0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE	
Capaian SS8									0	BELUM DAPAT TERHITUNG	
Total Capaian Sasaran Strategis									**101,72**	**SANGAT BAIK**	

Tabel 3. 2 Capaian kinerja Balai POM di Banyumas pada Triwulan III Tahun 2026

ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Balai POM di Banyumas

Kode SS	Sasaran Strategis	No IKK	Indikator	Target Tahun 2026	Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi Triwulan III Tahun 2026			% Capaian Thd Target Triwulan III 2026	Kriteria	Notifikasi Warna
						Pembilang	Penyebut	Realisasi			
SS1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	IKSS1	Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,41%	87,41%			94,98%	108,66%	SANGAT BAIK	108,66%
		IKSS2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	35,00%				0	0,00%	BELUM DAPAT TERHITUNG PADA TW III 2026	
		IKSS3	Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77,00%	77,00%			83,20%	108,05%	SANGAT BAIK	108,05%
		IKSS4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT	100%	100%			100%	100,00%	BAIK	100
		IKSS5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87%	87%			92,50%	106,32%	SANGAT BAIK	106,32
		IKSS6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,03%	96,03%			97,13%	101,15%	SANGAT BAIK	101,15%
		IKSS7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,67%	91,67%			93,75%	102,27%	SANGAT BAIK	102,27%
		IKSS8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83%	83%			85,71%	103,27%	SANGAT BAIK	101,36
		IKSS9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,09%	96,09%			100%	104,07%	SANGAT BAIK	104,07
		IKSS10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77,33%	77,33%			80,69%	104,35%	SANGAT BAIK	104,35%
		IKSS11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,36%	94,36%			98,97%	104,85%	SANGAT BAIK	104,86%
		IKSS12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	87,36%	87,36%			82,41%	94,33%	BAIK	94,33%
		IKSS13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100%				0	0,00%	BELUM DAPAT TERHITUNG PADA TW III 2026	
		IKSS14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7,5	7			7,17	102,43%	SANGAT BAIK	102,43%
		IKSS15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50%				0	#DIV/0!	BELUM DAPAT TERHITUNG PADA TW III 2026	
Capaian SS1									103,31%	SANGAT BAIK	

Gambar 3. 1 Capaian Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT

Capaian Sasaran Strategis 1, yaitu “Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT”, pada Triwulan III Tahun 2026 mencapai 103,32%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Balai POM di Banyumas telah berjalan secara optimal dan melampaui target yang telah ditetapkan. Atas capaian tersebut, Sasaran Strategis 1 memperoleh kategori **SANGAT BAIK**. Pencapaian tersebut mencerminkan bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 telah mampu memberikan hasil yang lebih tinggi dibandingkan dengan target kinerja yang direncanakan. Hal ini menunjukkan adanya

dukungan pelaksanaan kegiatan pengawasan yang konsisten dalam rangka memastikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di wilayah kerja Balai POM di Banyumas memenuhi ketentuan keamanan, mutu, dan persyaratan yang berlaku.

Capaian tersebut juga menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target secara kuantitatif, tetapi diarahkan untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan secara menyeluruh. Dengan capaian sebesar 103,32%, Balai POM di Banyumas perlu mempertahankan kualitas pelaksanaan pengawasan yang telah berjalan baik, sekaligus terus melakukan evaluasi terhadap hasil pengawasan untuk memastikan tindak lanjut dan perbaikan dapat dilaksanakan secara tepat.

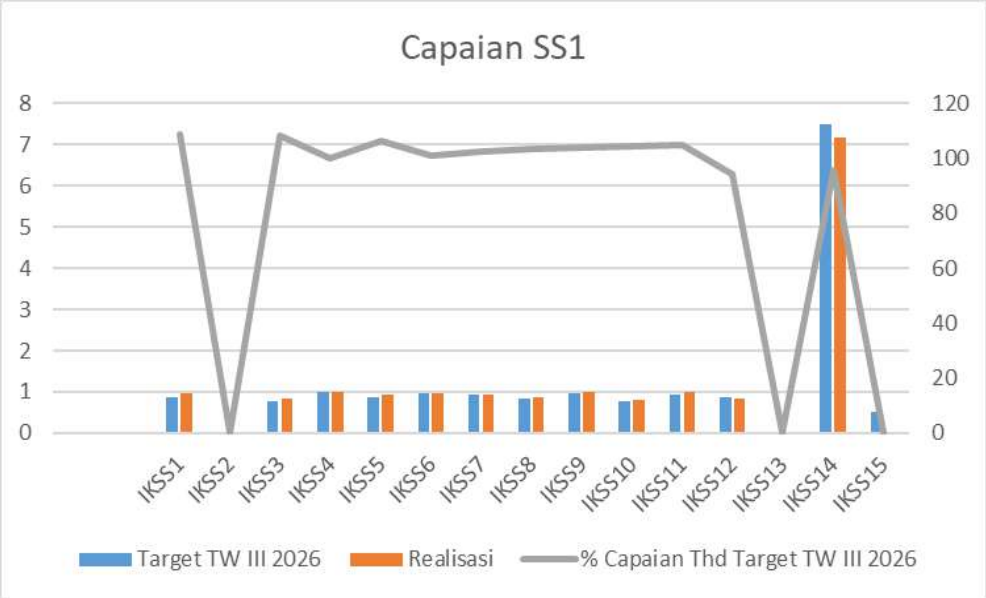

Gambar 3. 2 Grafik Capaian Sasaran Strategis 1

IKSS 1: Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sampel sediaan farmasi berisiko adalah sampel yang dipilih menggunakan metode *targeted* atau *purposive sampling* dan diklasifikasikan berdasarkan hasil analisis risiko sebagaimana diatur melalui pedoman *sampling* dan pengujian. Pelaksanaan sampling sediaan farmasi difokuskan pada sampel berisiko yang ditargetkan secara khusus (*targeted* atau *purposive sampling*) berdasarkan kriteria analisis risiko dalam pedoman sampling dan pengujian. Pelaksanaan tindak lanjut atas pengawasan ini mencakup rangkaian alur kerja yang sistematis, mulai dari pengambilan dan pengelolaan sampel, pemeriksaan penandaan/label, pelaksanaan pengujian laboratorium, hingga penyusunan laporan hasil.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Pada Triwulan III Tahun 2026, realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah sebesar 94,98%, jika dibandingkan dengan target 87,41 %, maka capaian sampai dengan sebesar 108,66% berada dalam kategori **SANGAT BAIK**. Realisasi tersebut dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain kesesuaian perencanaan sampling, kesesuaian pelaksanaan sampling, kesesuaian parameter uji, akurasi dalam penentuan kesimpulan, kesesuaian pelaporan hasil sampling, tanggapan atas surat tindak lanjut dan pengujian, serta ketidaksesuaian pelaporan monitoring penarikan. Capaian indikator ini mencerminkan keberhasilan sistem pengawasan sediaan farmasi yang tidak hanya memenuhi target, tetapi juga melampaui standar yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi Triwulan III Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	87,41			94,98	108,66 Sangat Baik

Tabel 3. 3 Capaian Indikator Kinerja sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 1 - Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	87,41	93,38	106,83	Sangat Baik

IKSS 1 - Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	87,41	94,98	108,66	Sangat Baik

Tabel 3. 4 Capaian IKSS 1 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Realisasi Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan III Tahun 2026 sebesar 94,98% jika dibandingkan dengan realisasi kinerja Triwulan II sebesar 94,43%, maka Triwulan II dan III sama-sama dalam kategori SANGAT BAIK. Dibandingkan triwulan sebelumnya pada triwulan III terjadi kenaikan, hal tersebut menunjukkan pelaksanaan sampling sudah berjalan dengan efektif dan sesuai perencanaan. Balai POM di Banyumas senantiasa memaksimalkan kondisi dan kapabilitas yang dimiliki, baik melalui peningkatan akurasi pengujian, konsistensi pelaporan, maupun koordinasi lintas sektor, sehingga kualitas pengawasan tetap terjaga dan kinerja dapat terus ditingkatkan pada periode berikutnya.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	94,98	87,41	108,66	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 5 Perbandingan IKSS 1 dengan Target Tahunan 2026

Realisasi Indeks Kinerja Sasaran Strategis Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan III Tahun 2026 sebesar 94,98%. Jika dibandingkan dengan target tahunan yaitu 87,41%, maka capaian terhadap target tahunan mencapai 108,66% dengan notifikasi capaian **Tercapai/Melampaui**. Hasil ini menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap sampel sediaan farmasi telah dilaksanakan secara efektif dan konsisten sesuai dengan perencanaan strategis, sehingga kualitas

pengawasan tetap terjaga dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja Balai POM di Banyumas.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam melaksanakan kegiatan *sampling* sediaan farmasi dalam Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa penyebab keberhasilan IKU ini dalam melebihi targetnya yakni:

- Kegiatan yang dilakukan telah mengikuti pedoman *sampling*, petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta *timeline* yang telah ditetapkan dalam pedoman atau SOP terkait, serta pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha yang berdampak jumlah sampel komoditi Obat, yang meliputi obat, obat tradisional, suplemen kesehatan, obat kuasi, dan kosmetik yang memenuhi ketentuan, hasil uji laboratorium memenuhi syarat.
- Komitmen petugas dalam melaksanakan tugas sesuai taggung jawabnya menjadi faktor penting yang memastikan penyelesaian tugas secara tepat waktu.
- Melakukan monitoring secara rutin dan berkala terhadap masing-masing parameter penilaian IKU turut memperkuat konsistensi pelaksanaan tindak lanjut.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 1	Persentase Sampel Sediaan Farmasi yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Sampai dengan Triwulan II ini tidak ada kendala yang berarti dalam melaksanakan kegiatan.	Perhatikan renlak agar capaian komoditi sediaan farmasi mampu tercapai hingga akhir periode tahun 2026.	Melanjutkan *sampling* sediaan farmasi yang sesuai dengan perencanaan yang disusun hingga akhir periode agar target mampu terus terpenuhi.	sampai dengan TW IV 2026	Y	INS/S/01	Masih tingginya produk sediaan farmasi yang diuji maupun penandaan tidak memenuhi persyaratan.

Tabel 3. 6 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 1

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

- Perencanaan sampling dilakukan atas kesepakatan petugas sampling dan penguji di laboratorium sehingga dapat diantisipasi penolakan sampel karena ada kendala di pengujian.
- Menjalin komunikasi lintas substansi dan antar balai dalam satu regional laboratorium jika terdapat kendala terkait sampling dan pengujian.
- Memastikan kesesuaian pelaksanaan sampling, kesesuaian parameter uji, akurasi dalam penentuan kesimpulan, kesesuaian pelaporan hasil sampling, tanggapan atas surat tindak lanjut dan pengujian, dan kesesuaian pelaporan monitoring penarikan serta pendampingan kepada pelaku usaha dibidang Kosmetik dan Obat Tradisional pada saat pemeriksaan sarana.

IKSS 2: Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah Melaporkan KTD/ESO

Rincian Output Target IKU ini adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans.

Capaian dihitung berdasarkan jumlah tenaga kesehatan/tenaga medis (orang) yang mengikuti/mendapatkan KIE Farmakovigilans yang dilaksanakan oleh BPOM Banyumas pada tahun berjalan. Satu tenaga kesehatan/tenaga medis mewakili satu fasilitas pelayanan Kesehatan

Indikatornya adalah persentase fasilitas pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke Badan POM.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Target Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah Melaporkan KTD/ESO tidak di break down secara spesifik setiap triwulan, namun dihitung secara kumulatif hingga akhir tahun. Hingga akhir TW III 2026, 26 dari 45 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan Komunikasi Informasi dan Edukasi Farmakovigilans (KIE PV) telah melaporkan KTD/ESO ke aplikasi e-MESO 2.0. Persentase capaian target sementara hingga akhir TW III 2026 yaitu 165,09% dari target tahunan yang ditetapkan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah Melaporkan KTD/ESO	0	26	45	57,78%	Target ditetapkan tahunan (35%), tidak ditetapkan setiap triwulan.

Tabel 3. 7 Capaian Indikator Kinerja KTD/ESO Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 2 - Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah Melaporkan KTD/ESO	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	0	22	48,89	-
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	0	26	57,78	-

Tabel 3. 8 Capaian IKSS 2 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO dihitung dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaporkan KTD/ESO dibagi dengan Jumlah Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO pada TW III 2026 mengalami peningkatan sebesar 8,89%, dengan persentase kumulatif sebesar 57,78%. Sejak TW II, realisasi target tahunan telah lebih dari 27%. Karena target dan realisasi cukup timpang, BPOM Banyumas mengajukan perubahan target tahunan dari 27% menjadi 35% pada TW III.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah Melaporkan KTD/ESO	57,78	35	165,09	Capaian bersifat tahunan. Namun, realitanya capaian telah melebihi target, meskipun target tahunan telah dilakukan penyesuaian oleh Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM.

Tabel 3. 9 Perbandingan IKSS 2 dengan Target Tahunan 2026

Pada TW II 2026, total 22 dari 45 Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO. Jumlah tersebut terus meningkat di TW III tahun 2026, terdapat 4 Fasilitas Pelayanan Kesehatan baru yang melaporkan KTD/ESO. Total sarana yang telah menyampaikan laporan pada akhir TW III 2026 yaitu 26 sarana (57,78%). Meskipun target dilakukan penyesuaian dari 27% menjadi 35% setahun, realisasi TW III 2026 masih melebihi 35% yaitu 57,78% atau 165.09% dari target tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang melaporkan KTD/ESO telah melebihi target tahunan yang ditentukan yaitu 57,78 %. Pada bulan September 2026 realisasi target tahunan telah mencapai 165,09 % dari target yang ditetapkan. Keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa banyak faktor antara lain:

1) KIE PV kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Balai POM Banyumas mampu meningkatkan pemahaman saryankes akan pentingnya Farmakovigilans dan pelaporan KTD/ESO. Hal ini terbukti meningkatnya kepatuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaporkan KTD/ESO. Hingga akhir September 2026 lebih dari 50% Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah menyampaikan laporan KTD/ESO melalui aplikasi e-meso 2.0.

2) Persepsi dan pola pikir terkait KTD/ESO mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah memahami bahwa seluruh laporan dapat disampaikan, tidak hanya kasus serius atau jarang terjadi saja. Laporan non serius akan menjadi bahan evaluasi pendukung risiko manfaat obat Pusat Farmakovigilans dalam pengambilan kebijakan.

3) *Follow up* dan penggalian informasi secara intensif secara online dan offline terhadap keluhan KTD/ESO diterima oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan terkait dengan penggunaan obat.

4) Melakukan *site visit* kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak aktif (respon). Melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah dan kendala yang dihadapi dalam penerapan farmakovigilans di tempat kerjanya.

Meskipun realisasi TW III tahun 2026 telah melampaui target tahunan yang ditetapkan, monitoring dan evaluasi berkala tetap diperlukan, terutama kegiatan koordinasi lintas sektor baik di tingkat pemerintah daerah serta organisasi profesi terkait. Kegiatan monitoring dan evaluasi laporan KTD/ESO juga dilakukan sebagai bentuk *follow up* kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE PV.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 2	Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang telah Melaporkan KTD/ESO	Hingga sekarang, peralihan aplikasi lama ke e-meso 2.0 belum berjalan lancar, sehingga menghambat	Kembali melihat juknis dari KTD/ESO untuk pencapaian dalam 5 tahun ke depan. Tetap mempertahankan koordinasi	Terus melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang belum	Akhir tahun 2026	Y	INS/S/03	Sarana pelayanan kesehatan tidak menyampaikan laporan KTD/ESO sehingga

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
		saryankes menyampaikan laporan KTD/ESO	dengan sarana pelayanan kesehatan untuk dapat mencapai secara optimal dalam 5 tahun ke depan.	melakukan pelaporan KTD/ESO. Melakukan koordinasi dan dukungan lintas sector untuk ikut berpartisipasi dalam mengingatkan				target persentase pelaporan tidak tercapai.

Tabel 3. 10 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 2

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan capaian kinerja hingga TW II tahun 2026 dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. KIE PV kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan oleh Balai POM Banyumas mampu meningkatkan pemahaman saryankes akan pentingnya Farmakovigilans dan pelaporan KTD/ESO. Hal ini meningkatnya kepatuhan Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam melaporkan KTD/ESO. Hingga akhir September 2026 lebih dari 50% Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah menyampaikan laporan KTD/ESO melalui aplikasi e-meso 2.0.
2. Persepsi dan pola pikir terkait KTD/ESO mengalami perubahan. Hal ini menunjukkan bahwa Fasilitas Pelayanan Kesehatan telah memahami bahwa seluruh laporan dapat disampaikan, tidak hanya kasus serius atau jarang terjadi saja. Laporan non serius akan menjadi bahan evaluasi pendukung risiko manfaat obat Pusat Farmakovigilans dalam pengambilan kebijakan.
3. Follow up dan penggalian informasi secara intensif secara online dan offline terhadap keluhan KTD/ESO diterima oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan terkait dengan penggunaan obat.
4. Melakukan site visit kepada Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang tidak aktif (respon). Melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung yang bertujuan untuk

mengidentifikasi masalah dan kendala yang dihadapi dalam penerapan farmakovigilans di tempat kerjanya.

IKSS 3: Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sampel Pangan Olahan Berisiko yang dimaksud disini adalah sampel yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Pangan Olahan memiliki definisi dalam Manual Indikator Kinerja yakni makanan atau minuman hasil proses dengan cara atau metode tertentu dengan atau tanpa bahan tambahan, dikecualikan pangan industri rumah tangga. Sampel akan ditindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pelaksanaan sampling pangan olahan difokuskan pada produk pangan olahan berisiko, yaitu produk makanan atau minuman hasil olahan dengan/tanpa bahan tambahan (di luar kategori pangan industri rumah tangga) yang dipilih berdasarkan evaluasi dan kajian risiko sesuai Pedoman Sampling. Seluruh sampel yang diambil selanjutnya ditindaklanjuti sesuai mekanisme dan ketentuan regulator yang berlaku.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Pada Triwulan III Tahun 2026, realisasi Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan mencapai 82,30%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 77%, maka capaian terhadap target adalah 106,88% dengan kategori **SANGAT BAIK**. Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain kesesuaian target sampel dengan prioritas pengawasan, kesesuaian parameter uji dengan pedoman teknis BPOM, ketepatan dalam pengambilan kesimpulan hasil pengujian, serta ketepatan waktu pelaksanaan sampling dan pelaporan hasil pengujian. Selain itu, tindak lanjut yang dilakukan juga sesuai dengan pedoman tindak lanjut dan ketentuan lainnya, sehingga hasil pengawasan memiliki validitas ilmiah sekaligus legitimasi regulatif. Kombinasi antara penerapan pedoman teknis, disiplin waktu, serta konsistensi tindak lanjut menjadikan capaian indikator ini berada dalam kategori **SANGAT BAIK**, sekaligus mencerminkan efektivitas pengawasan pangan olahan berisiko oleh Balai POM di Banyumas.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	77			83,20	108,05 Sangat Baik

Tabel 3. 11 Capaian Indikator Kinerja Sampel Pangan Olahan Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 3 - Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	77	78,75	102,27	Sangat Baik
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	77	83,20	108,05	Sangat Baik

Tabel 3. 12 Capaian IKSS 3 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Realisasi Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan III Tahun 2026 sebesar **83,20%**, jika dibandingkan dengan capaian Triwulan II sebesar **78,75%**, maka capaian tersebut mengalami kenaikan. Pergerakan naik ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dan konsistensi dalam alur pengawasan serta penyelesaian tindak lanjut sampel pangan olahan berisiko. Capaian kinerja pada Triwulan III tetap berada dalam kategori **SANGAT BAIK** dengan pencapaian **108,05%** terhadap target tahunan (77%), yang menunjukkan bahwa

pelaksanaan tindak lanjut sampel pangan olahan telah berjalan sangat efektif, optimal, dan sesuai dengan perencanaan strategis.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	83,20	77	108,05	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 13 Perbandingan IKSS 3 dengan Target Tahunan 2026

Realisasi indeks kinerja sasaran strategis Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan III adalah 83,20 %. Jika dibandingkan dengan target tahunan yaitu 77 %, capaian terhadap target tahunan 2026 adalah 108,05 % dengan notifikasi capaian **Tercapai/Melampaui**. Balai POM di Banyumas senantiasa memaksimalkan kondisi dan kapabilitas yang dimiliki, baik melalui penerapan pedoman teknis, peningkatan akurasi pengujian, maupun koordinasi lintas sektor, sehingga kualitas pengawasan tetap terjaga dan kinerja dapat terus ditingkatkan pada periode berikutnya.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam pelaksanaan kegiatan sampling pangan olahan berisiko pada Triwulan III Tahun 2026, terdapat beberapa faktor yang mendukung capaian indikator hingga melampaui target. Pertama, kegiatan sampling telah mengikuti pedoman sampling, petunjuk teknis Regionalisasi Laboratorium, pedoman tindak lanjut, serta timeline yang ditetapkan dalam SOP terkait. Selain itu, dilakukan pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha pangan olahan sehingga jumlah sampel komoditi pangan yang diuji memenuhi ketentuan, dengan hasil uji laboratorium yang sesuai persyaratan. Kedua, perencanaan sampling yang baik serta komitmen petugas dalam melaksanakan tugas sesuai rencana kerja (renlak) yang telah disepakati bersama antara pemeriksaan dan pengujian, memastikan pelaksanaan berjalan tepat waktu dan sesuai prosedur. Ketiga, monitoring

rutin dan berkala terhadap masing-masing parameter penilaian IKU turut memperkuat konsistensi pelaksanaan tindak lanjut, sehingga hasil pengawasan pangan olahan berisiko tetap terjaga kualitasnya.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 3	Persentase Sampel Pangan Olahan Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Dalam melaksanakan kegiatan tidak terdapat kendala yang berarti.	Pastikan untuk serapan anggaran mampu terserap secara maksimal pada tahun 2026, tanpa mengurangi anggaran untuk tahun berikutnya.	Melaksanakan kegiatan *sampling* yang telah direncanakan hingga akhir periode nanti.	sampai dengan TW IV 2026	Y	INS/S/02	Masih tingginya produk sediaan pangan olahan yang diuji maupun penandaan tidak memenuhi persyaratan.

Tabel 3. 14 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 3

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan capaian indikator pada Triwulan III Tahun 2026 didukung oleh sinergi beberapa program teknis yang dijalankan secara konsisten, yakni:

- Perencanaan sampling dilakukan atas kesepakatan bersama antara substansi pemeriksaan dan pengujian yang dilakukan di awal tahun dengan memperhatikan ketersediaan reagen/media serta baku pembanding, kondisi instrumen uji, sehingga memperlancar proses pengujian sampel pangan olahan di laboratorium.
- Terjalin komunikasi intensif lintas substansi dan antarbalai dalam satu regional laboratorium, khususnya dalam perencanaan dan pengiriman sampel pangan olahan yang masuk skema regionalisasi.
- Pelaksanaan pengawasan memastikan kesesuaian sampling, parameter uji, akurasi kesimpulan, serta ketepatan pelaporan hasil sampling dan pengujian, termasuk tindak lanjut sesuai pedoman dan pendampingan kepada pelaku usaha pangan olahan pada saat pemeriksaan sarana.

IKSS 4: Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT

Sampel KLB Keracunan Pangan adalah sampel pangan yang diduga sebagai penyebab KLB keracunan pangan berdasarkan hasil investigasi atau diduga sebagai penyebab dua orang atau lebih menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama setelah mengonsumsi pangan dari lokasi yang sama, dan berdasarkan analisis epidemiologi, pangan tersebut diidentifikasi sebagai sumber keracunan. Sampel dapat berupa pangan olahan dalam kemasan atau pangan olahan siap saji yang diuji oleh laboratorium BPOM dengan sampel berasal dari internal BPOM dan/atau dari eksternal BPOM (Dinas dan K/L).

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Pada Triwulan III Tahun 2026 realisasi KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT 100%, jika dibandingkan dengan target 100%, maka capaian pada TW III adalah 100% atau sesuai dengan target triwulan III tahun 2026. Pada TW III tahun 2026 terdapat 3 (tiga) kejadian KLB KP pada bulan Juli – September tahun 2026 di wilayah kerja Balai POM di Banyumas. Petugas BPOM Banyumas merespon cepat dengan melaksanakan pemeriksaan ke lapangan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat. Sampel KLB KP berupa sampel pangan olahan siap saji yang telah dilakukan sampling oleh Dinas Kesehatan Kabupaten untuk dilakukan pengujian di Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat dan Pengujian Alat Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Laporan akhir KLB KP yang telah disusun dan dilaporkan melalui aplikasi https://spimker.pom.go.id/.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT	100			100	100 Baik

Tabel 3. 15 Capaian Indikator Kinerja KLB Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 4 - Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	100	100	100	Baik
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	100	100	100	Baik

Tabel 3. 16 Capaian IKSS 4 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Realisasi IKSS 4 pada Triwulan III tahun 2026 sebesar 100% bila dibandingkan dengan realisasi Triwulan II tahun 2026 sebesar 100%. Pada triwulan III tahun 2026 ini tidak ada sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait ke UPT yang artinya tidak terhitung sebagai kinerja yang ditandai dengan tidak adanya sampel KLB yang dilakukan pengujian oleh Balai POM di Banyumas dan telah ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Sedangkan pada triwulan III tahun 2026 terdapat 3 (tiga) kasus KLP KP yang terjadi di wilayah kerja Balai POM di Banyumas dan telah dilakukan pemeriksaan ke lapangan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat serta melakukan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang	100%	100%	100%	Tercapai

Diuji Sesuai Standar oleh UPT				

Tabel 3. 17 Perbandingan IKSS 4 dengan Target Tahunan 2026

Realisasi Triwulan III pada tahun 2026 sebesar 100%. Pada Triwulan III terdapat 3 (tiga) kasus KLB KP di wilayah kerja Balai POM di Banyumas namun tidak ada sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang disampling oleh UPT atau sampel pangan dugaan KLB keracunan pangan yang dikirimkan oleh Dinas Kesehatan atau instansi terkait ke UPT. Kinerja ini akan terus berjalan hingga akhir periode 2026. Target tahunan yang ditetapkan sebesar 100% merupakan perhitungan sampel KLB yang harus diuji oleh Balai POM di Banyumas.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Untuk mendukung tercapainya target pada IKSS 4., pada triwulan III terdapat kasus KLB Keracunan Pangan sebanyak 3 (tiga) kasus dan dilakukan pengujian sampel dengan parameter yang sesuai dengan hasil penelusuran dugaan KLB KP berupa kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, kesesuaian antara pasangan bahaya dengan pangan, atau sesuai dengan parameter permintaan uji Dinas Kesehatan. Lebih lanjut untuk PODK juga memperhatikan kesesuaian dengan standar dalam regulasi terkait pangan dimaksud dan parameter dalam Pedoman Sampling dan Pengujian Pangan Olahan BPOM.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 4	Persentase Sampel KLB Keracunan Pangan yang Diuji Sesuai Standar oleh UPT	Tidak ada kendala.	Perkuat komunikasi dengan Dinas Kesehatan di dalam wilayah kerja Balai POM di Banyumas agar dapat selalu update terkait informasi KLB.	Pada TW III terdapat 3 (tiga) kejadian KLB KP yang terjadi pada bulan Juli hingga September 2026, petugas BPOM Banyumas merespon cepat dengan melaksanakan pemeriksaan ke lapangan dan	Akan melanjutkan kegiatan sesuai dengan ketentuan sampai Triwulan IV 2026	Y	INS/R/01	Tidak tercapainya Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT.

				berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat.				

Tabel 3. 18 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 4

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan capaian IKSS 4 pada Triwulan III Tahun 2026 tidak terlepas dari pelaksanaan program pengujian sampel yang dilakukan dengan parameter sesuai hasil penelusuran dugaan KLB Keracunan Pangan, meliputi kesesuaian dengan gejala korban, masa inkubasi agen penyebab, keterkaitan antara pasangan bahaya dengan pangan, serta permintaan uji dari Dinas Kesehatan Kabupaten. Program ini menunjukkan penerapan metode analisis berbasis bukti yang konsisten dengan pedoman teknis BPOM. Selain itu, keberhasilan capaian juga ditunjang oleh peningkatan koordinasi lintas sektor, khususnya dengan Dinas Kesehatan dan pihak terkait lainnya, sehingga pengawasan dan pengujian pangan dapat dilakukan secara lebih komprehensif dan berkualitas. Sinergi ini memungkinkan Balai POM di Banyumas untuk memperoleh pembaruan informasi terkait KLB secara cepat, sekaligus memastikan tindak lanjut pengawasan berjalan sesuai regulasi dan kebutuhan lapangan. Dengan demikian, kombinasi antara ketepatan metode pengujian dan efektivitas koordinasi lintas sektor menjadi faktor utama yang mendukung tercapainya target kinerja pada IKSS 4.

IKSS 5: Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Pelaksanaan sampling produk Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP) difokuskan pada sampel PIRT berisiko, yaitu sampel pangan olahan hasil produksi industri rumah tangga yang diprioritaskan dan dipilih menggunakan metode targeted berbasis analisis risiko sesuai dengan Pedoman Sampling. Pengawasan terhadap sampel ini ditindaklanjuti secara konsisten dan terstruktur sesuai ketentuan regulasi yang berlaku.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Pada Triwulan III Tahun 2026, realisasi Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah 92,50%. Jika dibandingkan dengan target sebesar 87%, maka capaian sampai dengan TW III adalah 106,32% dengan kategori **SANGAT BAIK**. Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain tercapainya target sampel PIRT sesuai dengan pedoman sampling, ketepatan waktu

pengambilan sampel, serta ketepatan waktu pelaporan hasil sampling dan pengujian. Selain itu, tindak lanjut terhadap sampel PIRT yang tidak memenuhi syarat (seperti Tanpa Izin Edar/TIE, rusak, kedaluwarsa, maupun Tidak Memenuhi Syarat/TMS hasil pengujian) telah dilakukan secara tuntas sesuai dengan pedoman tindak lanjut dan ketentuan regulasi lainnya. Kombinasi antara penerapan pedoman teknis, disiplin waktu, serta konsistensi tindak lanjut menjadikan capaian indikator ini tetap berada dalam kategori **SANGAT BAIK**, sekaligus mencerminkan efektivitas pengawasan pangan olahan berisiko di wilayah kerja Balai POM di Banyumas.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi Triwulan III Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	87			92,50	106,32 Sangat Baik

Tabel 3. 19 Capaian Indikator Kinerja Sampel PIRT Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 5 - Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	87	92,50	106,32	Sangat Baik
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	87	92,50	106,32	Sangat Baik

Tabel 3. 20 Capaian IKSS 5 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Realisasi Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Triwulan III Tahun 2026 sebesar 92,5% jika dibandingkan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 sebesar 92,5%, maka capaian tersebut tidak ada kenaikan. Hal tersebut terjadi karena pelaksanaan sampling produk PIRT telah selesai dilakukan pada bulan Mei (Triwulan II) sehingga untuk Triwulan III tidak ada pelaksanaan sampling PIRT. Capaian Triwulan III tersebut tetap berada dalam kategori SANGAT BAIK dengan pencapaian 106,32% terhadap target tahunan.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	92,50	87	106,32	Tercapai/ Melampaui 

Tabel 3. 21 Perbandingan IKSS 5 dengan Target Tahunan 2026

Realisasi indeks kinerja sasaran strategis Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan III adalah 92,50 %. Jika dibandingkan dengan target tahunan yaitu 87 %, capaian terhadap target tahunan 2026 adalah 106,32 % dengan notifikasi capaian Tercapai/Melampaui. Pelaksanaan sampling PIRT sendiri sudah selesai pada Triwulan II (bulan Mei) sehingga realisasi untuk Triwulan III dan IV hasilnya akan sama. Hasil ini menunjukkan bahwa tindak lanjut terhadap sampel PIRT berisiko telah dilaksanakan secara efektif dan konsisten sesuai dengan perencanaan strategis, sehingga kualitas pengawasan tetap terjaga dan memberikan kontribusi positif terhadap pencapaian kinerja Balai POM di Banyumas.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan capaian indikator Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan III Tahun 2026 didukung oleh beberapa faktor utama.

- Kegiatan sampling dan pengujian dilakukan sesuai dengan pedoman sampling, meliputi kesesuaian target sampel UPT, kesesuaian parameter uji, ketepatan waktu pengambilan sampel, serta ketepatan pelaporan hasil pengujian.

- Tindak lanjut oleh UPT terhadap sampel PIRT yang Tidak Memenuhi Syarat (TIE dan/atau Rusak dan/atau Kedaluwarsa dan/atau TMS hasil pengujian) dilakuakan sesuai dengan pedoman tindak lanjut atau ketentuan lainnya, baik kepada pelaku usaha IRTP maupun lintas sektor seperti Dinas Kesehatan dan DPM-PTSP sebagai OPD penerbit SPP-IRT. Untuk kasus lintas wilayah, tindak lanjut dilaporkan ke pusat agar penanganan lebih komprehensif.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 5	Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Tidak terdapat kendala yang berarti dalam pencapaian Triwulan III Tahun 2026	Perhatikan sampling PIRT agar mampu tercapai renlak setiap bulannya. Hal ini juga sejalan dengan serapan anggaran.	Melanjutkan *sampling* PIRT sesuai renlak hingga akhir periode tahun 2026.	sampai dengan TW IV 2026	Y	INS/S/04	Masih tingginya produk sediaan pangan PIRT yang diuji maupun penandaan tidak memenuhi persyaratan.

Tabel 3. 22 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 5

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan III Tahun 2026 antara lain pelaksanaan sampling yang sesuai dengan pedoman, baik dari sisi kesesuaian target sampel PIRT, ketepatan waktu pengambilan, maupun ketepatan pelaporan hasil. Selain itu, tindak lanjut terhadap sampel PIRT yang tidak memenuhi syarat (TIE, rusak, kedaluwarsa, maupun TMS hasil pengujian) dilakukan secara sistematis sesuai pedoman tindak lanjut atau ketentuan lainnya, sehingga penanganan kasus lebih terarah. Upaya pembinaan dan pendampingan kepada pelaku usaha pangan industri rumah tangga juga menjadi bagian penting, khususnya dalam penerapan CPPB-IRT pada saat pemeriksaan sarana. Di samping itu, koordinasi lintas sektor dengan Dinas Kesehatan dan DPMPTSP sebagai OPD penerbit SPP-IRT senantiasa dilakukan untuk memastikan sinergi kelembagaan dalam mendukung efektivitas pengawasan. Dengan adanya program-program tersebut, pencapaian

indikator tetap berada dalam kategori SANGAT BAIK dan mencerminkan keberhasilan strategi pengawasan yang terintegrasi.

IKSS 6: Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*

Keputusan/Rekomendasi hasil inspeksi yang dimaksud adalah keputusan/rekomendasi yang menunjukkan ketidaksesuaian antara peraturan dan penerapan yang dilakukan oleh sarana produksi/distribusi. Keputusan dapat berupa pembinaan, peringatan, peringatan keras atau rekomendasi PSK/Pencabutan Ijin/Pencabutan NIE dan atau tindak lanjut kasus yang berupa hasil pemeriksaan sarana (sarana produksi, sarana distribusi, sarana pelayanan kefarmasian), hasil pengujian sampel, hasil pengawasan iklan (kepada media lokal, KPID), hasil pengawasan label, penanganan kasus, pengaduan konsumen. Yang dimaksud keputusan/rekomendasi yang ditindaklanjuti terdiri dari Keputusan hasil inspeksi yang diterbitkan UPT dan ditindaklanjuti oleh pelaku usaha ataupun *stakeholder*.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Pada tahun Triwulan III Tahun 2026, realisasi IKSS 6 adalah sebesar 97,13%, jika dibandingkan dengan target 96,03% maka capaiannya yaitu 101,15% dan berada dalam kategori **SANGAT BAIK**. Capaian ini didapat dari hasil pemeriksaan terhadap 54 sarana produksi dan distribusi pada TW III. Pencapaian ini mencerminkan efektivitas sistem pengawasan yang dilaksanakan, mulai dari pemeriksaan sarana produksi, distribusi, dan pelayanan kefarmasian, hingga pengujian sampel, pengawasan iklan dan label, serta penanganan kasus dan pengaduan konsumen.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi Triwulan III Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 6	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	96,03			97,13	101,15 Sangat Baik

Tabel 3. 23 Capaian Indikator Kinerja Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 6 - Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	96,03	96,25	100,23	Sangat Baik
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	96,03	97,13	101,15	Sangat Baik

Tabel 3. 24 Capaian IKSS 6 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Dibandingkan dengan capaian TW II Tahun 2026, nilai IKSS 6 pada TW III ini mengalami kenaikan, hal ini dikarenakan kegiatan dilakukan sesuai rencana pelaksanaan dengan baik. Pada TW III ini telah dilaksanakan kegiatan Gethuk CAPA (Gerakan Methuk CAPA) sehingga banyak CAPA/ perbaikan dari pelaku usaha yang masuk. Kegiatan Gethuk CAPA dilaksanakan pada tanggal 30 Juli 2026 dihadiri oleh 40 pelaku usaha. Dari kegiatan ini didapatkan 22 dokumen perbaikan/ CAPA dari pelaku usaha yang hadir dan dijadikan capaian untuk didampingi oleh Balai POM di Banyumas.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Keputusan/	97,13	96,03	101,15	Tercapai/ Melampaui

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*				

Tabel 3. 25 Perbandingan IKSS 6 dengan Target Tahunan 2026

Target tahunan ini bersifat *flat* setiap bulannya atau dengan kata lain target bulanan sama dengan target tahunan. Dibandingkan dengan target tahunan sebesar 96,03, nilai IKSS 6 pada TW III ini terdapat kenaikan. TW III Tahun 2026 ini memiliki nilai capaian IKSS adalah 101,19% dengan kategori **SANGAT BAIK**.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa kegiatan yang mempengaruhi maksimalnya capaian dari adalah:

- Terselenggaranya kegiatan Gethuk CAPA (Gerakan Methuk CAPA) sehingga banyak CAPA / perbaikan dari pelaku usaha yang masuk.
- Mengingatkan kepada penanggung jawab yang memiliki tugas Menyusun surat rekomendasi/ keputusan untuk segera dilaksanakan dan dikirimkan kepada pelaku usaha / *stakeholder*.
- Monitoring feedback dari rekomendasi yang diberikan agar segera ditindaklanjuti baik oleh pelaku usaha maupun *stakeholder*.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 6	Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh *Stakeholder*	Belum semua pelaku usaha mengirimkan perbaikan atas hasil pemeriksaan.	*Follow up* kembali seluruh pelaku usaha yang belum mengirimkan tindaklanjut, dampingi apa yang menjadi kesulitannya dalam menindaklanjuti.	Melakukan monitoring terhadap perbaikan yang seharusnya sudah dikirimkan sesuai timeline oleh pelaku usaha	TW IV	Y	INS/R/02	Tidak semua surat rekomendasi ditindaklanjuti oleh stakeholder seperti DKK dan asosiasi profesi secara tepat waktu.

Tabel 3. 26 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 6

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja adalah dengan adanya kegiatan Gethuk CAPA di TW III ini sehingga banyak CAPA/ perbaikan dari pelaku usaha yang masuk. Kegiatan Gethuk CAPA merupakan inovasi yang dilakukan setiap tahun untuk mendorong capaian dari IKSS Persentase Keputusan/ Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti oleh Stakeholder karena pada kegiatan tersebut pelaku usaha dapat langsung menyerahkan perbaikan hasil pemeriksaan dan berkonsultasi langsung dengan petugas Balai POM di Banyumas. Hal ini juga menjadi solusi dari kendala terkait belum semua pelaku usaha mengirimkan perbaikan atas hasil pemeriksaan meskipun sudah dilakukan *reminder*.

IKSS 7: Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

IKSS7 merupakan indikator dari sasaran kegiatan meningkatnya efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT. Sarana produksi farmasi yang diperiksa di Balai POM di Banyumas berdasarkan jenis sarana produksi yang berada di wilayah pengawasan Balai POM di Banyumas. sarana produksi farmasi tersebut meliputi sarana produksi pembuatan ekstrak bahan alam (IEBA), produk obat bahan alam untuk

semua tahapan meliputi industri Obat Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Bahan Alam, dan Usaha Mikro Obat Bahan Alam.

Indikator dinilai dengan variabel kesesuaian pelaksanaan inspeksi, kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat, akurasi dalam penentuan kesimpulan hasil inspeksi dan kesesuaian dan ketepatan waktu atas tindak lanjut hasil pengawasan sarana. Apabila sarana target ketika dilakukan pemeriksaan dalam kondisi tutup/tidak beroperasi, tetap dihitung sebagai capaian indikator komponen kesesuaian pelaksanaan inspeksi dan kelengkapan/kualitas pelaporan dan ketepatan waktu dari pelaksanaan inspeksi hingga pelaporan ke pusat. Capaian IKSS 7 dihitung berdasarkan rata-rata capaian variabel-variabel tersebut.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Pada tahun 2026, Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ditargetkan sebesar 91,67% sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas. Angka tersebut merupakan target baru yang diadopsi dari capaian tahun 2026. Sarana produksi sediaan farmasi yang menjadi target pemeriksaan Balai POM di Banyumas meliputi Sarana yang melakukan pembuatan ekstrak bahan alam, produk obat bahan alam, dan produk kosmetik untuk semua tahapan dan/atau sebagian tahapan meliputi Industri Obat Tradisional, Industri Kosmetik golongan A dan B, Industri Ekstrak Bahan Alam, Usaha Kecil Obat Tradisional, Usaha Mikro Obat Tradisional. Pada Triwulan III tahun 2026, realisasi Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 93,75%, jika dibandingkan dengan target 91,67% maka capaian sampai dengan Triwulan II adalah 102,27% (Kategori **Sangat Baik**).

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi Triwulan III Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	91,67			93,75	102,27 Sangat Baik

Tabel 3. 27 Capaian Indikator Kinerja Sarana Produksi Sediaan Farmasi Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 7 - Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	91,67	93,33	101,81	Sangat Baik
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	91,67	93,75	102,27	Sangat Baik

Tabel 3. 28 Capaian IKSS 7 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Jumlah sarana yang diperiksa sampai dengan TW III tahun 2026 sebanyak 9 sarana dengan rincian 6 (enam) sarana produksi obat bahan alam dan 3 (tiga) sarana produksi kosmetik. Kedua sarana tersebut diperiksa sesuai dengan target dan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan administratif dan SLA yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, pencapaian persentase sarana produksi sediaan farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti memenuhi semua poin variabel pada LKE didapat angka 93,75%, dibandingkan dengan realisasi TW II sebesar 93,33%, terlihat bahwa Triwulan III terlihat meningkat dari Triwulan II Tahun 2026.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang	93,75	91,67	102,27	Tercapai/ Melampaui

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan				

Tabel 3. 29 Perbandingan IKSS 7 dengan Target Tahunan 2026

Kegiatan ini akan terus berjalan hingga akhir periode tahun 2026 dengan target sampai dengan bulan Desember 2026 sebesar 91,67%. Dengan realisasi pelaksanaan pemeriksaan inspeksi pada TW III, secara optimis dapat dikawal capaian IKU Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dapat tercapai sesuai target di tahun 2026.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan:

- Penetapan target sarana produksi berdasarkan Analisa Risiko dan pembobotan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya setiap bulan;
- Ketepatan waktu pelaporan petugas di SIPT atas hasil pemeriksaan yang dilakukan;
- Kesesuaian dan ketepatan waktu tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana yang telah dilakukan.

Analisis risiko terjadinya kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif yang dilakukan:

- Capaian kinerja pada IKSS 7 ini fluktuatif dikarenakan tergantung kepada tingkat kepatuhan dan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi aspek GMP (CPOB, CPOTB, dan CPKB);
- Instruksi khusus dari pusat maupun pelaporan dari masyarakat yang memberikan andil dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi farmasi tidak dilakukan sesuai dengan jadwal dan tim yang telah ditetapkan. Hal tersebut berisiko kualitas tindak lanjut dan pemenuhan SLA tidak optimal.

Upaya Perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut

- Bila terjadi pergeseran pada jadwal pemeriksaan, penanggung jawab jadwal membuat renlak revisi dan penjadwalan yang sesuai dengan beban di bulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang telah disusun;
- Melakukan Monitoring evaluasi bulanan dengan penunjukkan PIC untuk memantau pelaksanaan pemeriksaan dan tindaklanjutnya;
- Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap pemenuhan GMP dapat melalui kegiatan bimbingan teknis.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 7	Persentase Sarana Produksi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Pemeriksaan dilaksanakan sesuai rencana dan target. Masih ditemukan adanya ketidaksesuaian penetapan rekomendasi pasca pemeriksaan.	Perhatikan kegiatan yang menjadi perencanaan pada periode berikutnya. Mohon untuk selalu berkoordinasi dengan pihak terkait agar mampu tercapai secara maksimal.	Membuat *decission tree* untuk tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi.	TW IV 2026	Y	INS/O/03	Sarana produksi farmasi yang sudah tidak aktif, tidak melakukan permohonan pencabutan izin sarana ke BPOM.

Tabel 3. 30 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 7

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja:

- Penanggung Jawab perencanaan anggaran dan kegiatan untuk IKSS 7 melakukan rencana pelaksanaan yang adaptif sehingga apabila terjadi pergeseran pada jadwal pemeriksaan, penanggung jawab IKSS 7 membuat renlak revisi dan penjadwalan yang disesuaikan di bulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang telah disusun dan mencapai target;

- Melakukan monitoring evaluasi bulanan dengan penunjukkan PIC untuk memantau pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya;
- Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap pemenuhan GMP dapat melalui kegiatan bimbingan teknis.
- Peningkatan kompetensi SDM petugas inspeksi, pada tahun 2026 terjadi peningkatan personil yang telah mendapatkan sertifikat inspektur CPKB Senior.

IKSS 8: Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

IKSS8 merupakan indikator dari sasaran kegiatan meningkatnya efektifitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan di wilayah kerja UPT. Sarana produksi pangan olahan yang diperiksa di Balai POM di Banyumas berdasarkan jenis sarana produksi yang berada di wilayah pengawasan Balai POM di Banyumas. Sarana produksi pangan olahan tersebut meliputi fasilitas produksi pangan olahan, baik yang memproduksi pangan olahan dengan izin edar MD, izin edar IRTP maupun pangan olahan untuk ekspor atau bahan baku produksi sarana lain.

Indikator dinilai dengan variabel jumlah sarana yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibandingkan dengan jumlah sarana yang diperiksa. Jumlah sarana yang diperiksa adalah total jumlah sarana yang diperiksa berdasarkan dokumen data sarana produksi yang dikelola dan dilaporkan ke Pusat melalui SIPT. Jumlah sarana yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan adalah sarana yang telah ditindaklanjuti sesuai pedoman, dihitung dari rata-rata aspek ketepatan waktu, kesesuaian tindak lanjut dan kesesuaian *grading*.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Pada tahun 2026, Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan ditargetkan sebesar 83% sesuai dengan Perjanjian Kinerja Balai POM di Banyumas. Angka tersebut merupakan target baru yang diadopsi dari capaian tahun 2026. Sarana produksi pangan olahan yang menjadi target pemeriksaan Balai POM di Banyumas meliputi Sarana yang melakukan pembuatan pangan olahan meliputi sarana produk pangan MD dan PIRT. Pada Triwulan III tahun 2026, realisasi Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan sebesar 85,71%, jika dibandingkan dengan target 83% maka capaian sampai dengan Triwulan II adalah 103,27% (Kategori **Sangat Baik**).

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	83			85,71	103,27 Sangat Baik

Tabel 3. 31 Capaian Indikator Kinerja Sarana Produksi Pangan Olahan Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 8 - Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	83	84,13	101,36	Sangat Baik
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	83	85,71	103,27	Sangat Baik

Tabel 3. 32 Capaian IKSS 8 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Jumlah sarana yang diperiksa sampai dengan TW III tahun 2026 sebanyak 28 sarana yaitu sarana produksi pangan MD, dan PIRT. Sarana tersebut diperiksa sesuai dengan target dan terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan administratif dan SLA yang ditentukan. Berdasarkan hal tersebut, pencapaian persentase sarana produksi pangan olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti memenuhi semua poin variabel pada LKE didapat angka 84,14% dibandingkan dengan realisasi TW II sebesar 85,71%. Dengan

angka yang dicapai pada TW III sebesar 84,13% masih lebih besar jika dibandingkan capaian TW II yaitu 84,13%. IKSS 8 pada TW III mencapai 103,27% dibandingkan dengan target tahun 2026 yang telah ditetapkan yaitu 83%. Pemeriksaan sarana produksi pangan di TW III telah tercapai 100% untuk jumlah sarana diperiksa dalam 1 tahun. TW IV difokuskan kepada evaluasi dan perbaikan tindak lanjut IKSS 8.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,71	83	103,27	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 33 Perbandingan IKSS 8 dengan Target Tahunan 2026

Kegiatan ini akan terus berjalan hingga akhir periode tahun 2026 dengan target sampai dengan bulan Desember 2026 sebesar 83%. Dengan pelaksanaan pemeriksaan inspeksi pada TW III, secara optimis dapat dikawal capaian IKU Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan dapat tercapai sesuai target di tahun 2026.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan atau peningkatan kinerja yang telah dilakukan:

- Penetapan target sarana produksi berdasarkan Analisa Risiko dan pembobotan serta monitoring dan evaluasi pelaksanaannya setiap bulan;
- Ketepatan waktu pelaporan petugas di SIPT atas hasil pemeriksaan yang dilakukan;
- Kesesuaian dan ketepatan waktu tindak lanjut atas hasil pemeriksaan sarana yang telah dilakukan;

Analisis risiko terjadinya kegagalan atau penurunan kinerja serta alternatif yang dilakukan:

- Capaian kinerja pada IKSS 8 ini fluktuatif dikarenakan tergantung kepada tingkat kepatuhan dan komitmen pelaku usaha untuk memenuhi aspek GMP (CPPOB dan IRTP).
- Instruksi khusus dari pusat maupun pelaporan dari masyarakat yang memberikan andil dalam pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan tidak dilakukan sesuai dengan jadwal dan tim yang telah ditetapkan. Hal tersebut berisiko kualitas tindak lanjut dan pemenuhan SLA tidak optimal.

Upaya Perbaikan dan Rencana Tindak Lanjut

- Bila terjadi pergeseran pada jadwal pemeriksaan, penanggung jawab jadwal membuat renlak revisi dan penjadwalan yang sesuai dengan beban di bulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang telah disusun;
- Melakukan monitoring evaluasi bulanan dengan penunjukkan PIC untuk memantau pelaksanaan pemeriksaan dan tindaklanjutnya;
- Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap pemenuhan GMP dapat melalui kegiatan bimbingan teknis.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 8	Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Tidak ada kendala	Perhatikan tindaklanjut yang harus diselesaikan agar mampu mencapai kinerja secara maksimal hingga akhir periode tahun 2026.	Membuat *decission tree* untuk tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.	TW IV 2026	Y	INS/O/04	Sarana produksi pangan olahan yang sudah tidak aktif, tidak melakukan permohonan pencabutan izin sarana ke BPOM.

Tabel 3. 34 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 8

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang paling mendukung ketercapaian kinerja:

- Penanggung Jawab perencanaan anggaran dan kegiatan untuk IKSS 8 melakukan rencana pelaksanaan yang adaptif sehingga apabila terjadi pergeseran pada jadwal pemeriksaan, penanggung jawab IKSS 8 membuat renlak revisi dan penjadwalan yang disesuaikan di bulan berikutnya agar pelaksanaan kegiatan pengawasan sesuai renlak yang telah disusun dan mencapai target;
- Melakukan monitoring evaluasi bulanan dengan penunjukkan PIC untuk memantau pelaksanaan pemeriksaan dan tindak lanjutnya;
- Meningkatkan pembinaan kepada pelaku usaha untuk meningkatkan kepatuhan dan pemahaman terhadap pemenuhan GMP dapat melalui kegiatan bimbingan teknis.
- Peningkatan kompetensi SDM petugas inspeksi, pada tahun 2025 terjadi peningkatan personil yang telah mendapatkan sertifikat *Food Inspector Junior*.

IKSS 9: Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Fasilitas distribusi farmasi yang dimaksudkan adalah sarana/fasilitas yang memiliki kewenangan dan melakukan distribusi sediaan farmasi, yang meliputi:

- Fasilitas yang memiliki kewenangan distribusi obat dan bahan obat meliputi Pedagang Besar Farmasi dan Fasilitasi Pengelolaan Kefarmasian;
- Fasilitas yang memiliki kewenangan penyerahan obat meliputi Rumah Sakit, Klinik, Puskesmas, Apotek, Toko Obat dan fasilitas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Sarana yang melakukan distribusi obat bahan alam dan suplemen kesehatan yang terdiri dari usaha perorangan, badan usaha di bidang pemasaran suplemen kesehatan, distributor, agen, swalayan, apotik, toko obat, depot jamu, stokis MLM, dan pengecer;
- Fasilitas distribusi sediaan farmasi meliputi fasilitas distribusi kosmetik, yaitu fasilitas distribusi pemilik notifikasi dan fasilitas distribusi bukan pemilik notifikasi.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Hingga Triwulan III Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan berhasil

menyentuh angka 100%. Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa di TW III sebanyak 22 sarana yang meliputi sarana distribusi obat, sarana pelayanan kefarmasian, sarana distribusi OBASK dan sarana distribusi kosmetik. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 96,09%, dengan nilai capaian IKSS 9 sebesar 104,07% dan berkriteria **SANGAT BAIK**. Hasil tersebut mencerminkan efektivitas dan konsistensi Balai POM di Banyumas dalam mengawasi sarana distribusi sediaan farmasi. Keberhasilan melampaui target ini memperkuat sistem pengawasan produk farmasi di wilayah kerja sekaligus menjamin perlindungan masyarakat dari risiko beredarnya produk yang tidak memenuhi ketentuan. Rincian capaian IKSS 9 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	96,09			100	104,07 Sangat Baik

Tabel 3. 35 Capaian Indikator Kinerja Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 9 - Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	96,09	100	104,07	Sangat Baik
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	96,09	100	104,07	Sangat Baik

Tabel 3. 36 Capaian IKSS 9 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Pada Triwulan III, capaian indikator kinerja utama terkait Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan mencatatkan angka 100%. Dibandingkan dengan perolehan Triwulan II Tahun 2026 yang sama-sama mencapai 100%, tingkat keberhasilan relatif terhadap triwulan lalu berada pada angka 100%, memperlihatkan kontinuitas dalam fungsi pengawasan. Hasil tersebut menegaskan bahwa perencanaan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana distribusi sediaan farmasi senantiasa berjalan terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Konsistensi hasil ini menggambarkan ketepatan perencanaan, keberhasilan pelaksanaan di lapangan, serta komitmen tinggi para petugas pengawas, sehingga indikator tetap berada pada klasifikasi SANGAT BAIK sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dari risiko peredaran produk yang tidak sesuai standar.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai	100	96,09	104,07	Tercapai/ Melampaui

Ketentuan				

Tabel 3. 37 Perbandingan IKSS 9 dengan Target Tahunan 2026

Capaian indeks kinerja sasaran strategis untuk Persentase sarana distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan berada pada posisi sempurna 100% di Triwulan III. Jika dikomparasikan dengan target tahunan 2026 yang sebesar 96,09%, rasio capaian terhadap target tersebut bernilai 104,07% dengan kriteria Tercapai/Melampaui. Hal tersebut membuktikan bahwa di tengah skema target tahunan yang ditetapkan secara flat, realisasi triwulan tetap mampu melampaui sasaran, mencerminkan efektivitas strategi perencanaan, kedisiplinan operasional pemeriksaan, serta responsivitas tindak lanjut oleh petugas pengawas. Melampauinya perolehan ini dari target yang ditentukan memberikan bukti konkret bahwa pengawasan terhadap sarana distribusi obat dan makanan di lingkungan Balai POM di Banyumas berjalan optimal sekaligus memberikan kontribusi substantif dalam memitigasi risiko distribusi produk yang tidak sesuai regulasi demi keselamatan masyarakat.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Optimalnya capaian kinerja IKSS 9 terkait Persentase Sarana Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan III Tahun 2026 ditopang oleh beberapa pilar utama. Pertama, penetapan sasaran pemeriksaan sarana didasarkan pada pemetaan analisis risiko, sehingga pengawasan di lapangan menjadi lebih terfokus dan tepat sasaran. Kedua, kedisiplinan petugas dalam melaporkan hasil pemeriksaan secara real-time melalui aplikasi SIPT mendukung pemantauan capaian data yang presisi. Ketiga, pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pengawasan senantiasa merujuk pada standar operasional dan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu, menjaga konsistensi efektivitas pengawasan. Keempat, ketersediaan *database* sarana yang komprehensif per komoditas mempermudah penetapan target serta mengakselerasi seluruh proses pengawasan. Perpaduan faktor-faktor inilah yang mendorong perolehan indikator hingga melampaui target, sekaligus mencerminkan efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan Balai POM di Banyumas.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 9	Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Sampai dengan Triwulan III ini tidak ada kendala yang berarti dalam melaksanakan kegiatan	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian.	Melanjutkan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sesuai dengan perencanaan yang disusun hingga akhir periode agar target mampu terus terpenuhi	sampai dengan TW IV 2026	Y	INS/S/06	Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha distribusi sediaan farmasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Tabel 3. 38 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 9

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja pengawasan fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tidak hanya ditunjang oleh pelaksanaan pemeriksaan yang telah disusun dalam rencana kerja, tetapi juga oleh penerapan program kelembagaan yang memastikan konsistensi pengawasan. Salah satu program penting adalah ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan oleh petugas melalui SIPT, yang menjamin akurasi data capaian dan memudahkan monitoring secara berkala. Selain itu, keberhasilan juga didukung oleh kesesuaian tindak lanjut terhadap sarana distribusi sesuai pedoman yang berlaku, sehingga setiap hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara tepat dan terstandar. Dengan adanya program-program tersebut, pengawasan sarana distribusi sediaan farmasi tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan capaian yang melampaui target, memperkuat akuntabilitas Balai POM di Banyumas dalam melindungi masyarakat dari risiko distribusi produk farmasi yang tidak sesuai ketentuan.

IKSS 10: Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Sarana distribusi pangan olahan adalah tempat melakukan kegiatan penerimaan, penyimpanan, pemajangan, distribusi, pengangkutan, dan/atau penyaluran Pangan Olahan. Pemeriksaan disini melibatkan beberapa tahap, dimulai dari perencanaan cangkupan pengawasan, pelaksanaan pengawasan sarana, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan, sedangkan “diperiksa sesuai ketentuan” berarti mengikuti pedoman pemeriksaan sarana peredaran, pedoman tindak lanjut, serta SOP terkait.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Hingga Triwulan III Tahun 2026, capaian indikator kinerja Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan berhasil menyentuh angka 80, 69%. Capaian ini melampaui target yang ditetapkan sebesar 77,33%, dengan nilai capaian IKSS 10 sebesar 104,35% dan berkriteria **SANGAT BAIK**. Hasil tersebut mencerminkan efektivitas dan konsistensi Balai POM di Banyumas dalam mengawasi sarana distribusi pangan olahan. Keberhasilan melampaui target ini memperkuat sistem pengawasan produk pangan olahan di wilayah kerja sekaligus menjamin perlindungan masyarakat dari risiko beredarnya produk yang tidak memenuhi ketentuan. Rincian capaian IKSS 10 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	77,33			80,69	104,35 Sangat Baik

Tabel 3. 39 Capaian Indikator Kinerja Sarana Distribusi Pangan Olahan Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 10 - Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan I Tahun 2026	77,33	80	103,45	Sangat Baik
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	77,33	80,69	104,35	Sangat Baik

Tabel 3. 40 Capaian IKSS 10 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Pada Triwulan III, capaian indikator kinerja utama terkait Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan mencatatkan angka 103,45%. Dibandingkan dengan perolehan Triwulan II Tahun 2026 yang mencapai 104,35%, tingkat keberhasilan relatif terhadap triwulan lalu berada pada angka 100,86%, memperlihatkan kontinuitas dalam fungsi pengawasan. Hasil tersebut menegaskan bahwa perencanaan pemeriksaan dan tindak lanjut terhadap sarana distribusi sediaan pangan olahan senantiasa berjalan terukur sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hasil ini menggambarkan ketepatan perencanaan, keberhasilan pelaksanaan di lapangan, serta komitmen tinggi para petugas pengawas, sehingga indikator tetap berada pada klasifikasi SANGAT BAIK sekaligus memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakat dari risiko peredaran produk yang tidak sesuai standar.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	80,69	77,33	104,35	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 41 Perbandingan IKSS 10 dengan Target Tahunan 2026

Capaian indeks kinerja sasaran strategis untuk Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan berada pada posisi 80,69% di Triwulan III. Jika dikomparasikan dengan target tahunan 2026 yang sebesar 77,33%, rasio capaian terhadap target tersebut bernilai 104,35% dengan kriteria **Tercapai/Melampaui**. Hal tersebut membuktikan bahwa di tengah skema target tahunan yang ditetapkan secara flat, realisasi triwulan tetap mampu melampaui sasaran, mencerminkan efektivitas strategi perencanaan, kedisiplinan operasional pemeriksaan, serta responsivitas tindak lanjut oleh petugas pengawas. Melampauinya perolehan ini dari target yang ditentukan memberikan bukti konkret bahwa pengawasan terhadap sarana distribusi obat dan makanan di lingkungan Balai POM di Banyumas berjalan optimal sekaligus memberikan kontribusi substantif dalam memitigasi risiko distribusi produk yang tidak sesuai regulasi demi keselamatan Masyarakat.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Optimalnya capaian kinerja IKSS 10 terkait Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan pada Triwulan III Tahun 2026 ditopang oleh beberapa pilar utama. Pertama, penetapan sasaran pemeriksaan sarana didasarkan pada pemetaan analisis risiko, sehingga pengawasan di lapangan menjadi lebih terfokus dan tepat sasaran. Kedua, kedisiplinan petugas dalam melaporkan hasil pemeriksaan secara real-time melalui aplikasi SIPT mendukung pemantauan capaian data yang presisi. Ketiga, pelaksanaan tindak lanjut dari hasil pengawasan senantiasa merujuk pada standar operasional dan ketentuan yang berlaku secara tepat waktu, menjaga konsistensi efektivitas pengawasan. Keempat, ketersediaan *database* sarana yang komprehensif per komoditas mempermudah penetapan target serta mengakselerasi seluruh proses pengawasan. Perpaduan faktor-faktor inilah yang mendorong perolehan indikator hingga melampaui target, sekaligus mencerminkan efektivitas sistem pengawasan yang diterapkan Balai POM di Banyumas.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 10	Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Sampai dengan Triwulan III ini tidak ada kendala yang berarti dalam melaksanakan kegiatan.	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian.	Melanjutkan pemeriksaan sarana pangan olahan yang sesuai dengan perencanaan yang disusun hingga akhir periode agar target mampu terus terpenuhi.	sampai dengan TW IV 2026.	Y	INS/S/09	Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha distribusi pangan olahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan.

Tabel 3. 42 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 10

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja pengawasan sarana Distribusi Pangan Olahan yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan tidak hanya ditunjang oleh pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan yang telah disusun, tetapi juga oleh penerapan program kelembagaan yang memastikan konsistensi pengawasan. Salah satu program penting adalah ketepatan waktu pelaporan hasil pemeriksaan oleh petugas melalui SIPT, yang menjamin akurasi data capaian serta memudahkan monitoring secara berkala. Selain itu, keberhasilan juga didukung oleh kesesuaian tindak lanjut terhadap sarana distribusi sesuai pedoman yang berlaku, sehingga setiap hasil pemeriksaan ditindaklanjuti secara tepat dan terstandar. Dengan adanya program-program tersebut, pengawasan sarana distribusi pangan olahan tidak hanya berjalan sesuai rencana, tetapi juga menghasilkan capaian yang melampaui target.

IKSS 11: Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan

Iklan adalah setiap keterangan atau pernyataan mengenai Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan dalam bentuk visual, audio, audiovisual, untuk pemasaran dan/atau perdagangan Obat, Obat Bahan Alam, Obat Kuasi, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan/atau merek Kosmetik dan/atau Kosmetik Isi Ulang dan Pangan Olahan. Tahapan pengawasan iklan ini diantaranya evaluasi iklan, pelaporan hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan pengawasan iklan obat dan makanan, telah ditetapkan target pengawasan sebanyak 531 iklan selama satu tahun, yang terdiri atas 40 iklan obat, 120 iklan pangan olahan, 240 iklan kosmetik, 79 iklan obat bahan alam, 43 iklan suplemen kesehatan, dan 9 iklan obat kuasi. Penetapan target tersebut menjadi salah satu bentuk komitmen dalam meningkatkan cakupan dan kualitas pengawasan terhadap peredaran informasi serta promosi produk obat dan makanan di masyarakat.

Perubahan Realisasi Iklan dari Bulan Januari – Agustus 2026

Pada indikator kinerja iklan ini mengalami perubahan realisasi bulan Januari hingga Agustus Tahun 2026. Sebagaimana yang tertuang pada nota dinas nomor PR.10.01.28B.10.26.432 mengenai Penyampaian Perubahan Realisasi IKU Iklan Pada Balai POM di Banyumas, disampaikan kepada Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM. Sejalan dengan perubahan realisasi ini, terdapat kenaikan realisasi IKU Iklan dari bulan Januari hingga Agustus Tahun 2026. Berikut secara jelas data perubahan Indikator Kinerja Utama (IKU) iklan.

Bulan	Target (*flat*)	Realisasi Semula	Realisasi Menjadi
Januari	94,38	94,54	100
Februari	94,38	94,84	100
Maret	94,38	94,42	100
April	94,38	94,42	100
Mei	94,38	94,42	100
Juni	94,38	94,42	98,52
Juli	94,38	94,42	98,71
Agustus	94,38	94,42	98,86

Tabel 3. 43 Perubahan Realisasi IKU Iklan Januari-Agustus 2026

Perubahan tersebut terjadi karena adanya masukan pada saat desk penilaian SAKIP oleh Inspektorat, dimana ditemukan ketidaksesuaian data yang diinput dalam kertas kerja dengan

kondisi aktual. Untuk menjaga akurasi dan konsistensi pelaporan kinerja, sudah dilakukan penyesuaian data pada sistem Simetris *e-performance* dan sistem lainnya yang berkaitan.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Pada Triwulan III Tahun 2026, realisasi IKSS 11 adalah sebesar 98,97 % jika dibandingkan dengan target 94,38%, maka capaian sampai dengan saat ini sebesar 104,86% berada dalam kategori SANGAT BAIK. Rincian target dan realisasi pengawasan iklan obat dan makanan pada TW III Tahun 2026, yaitu:

Bulan	Pengawasan iklan				
	Obat	Pangan	Kosmetik	OBA	SK dan Kuasi
Juli	4	10	20	4	5
Agustus	4	10	20	7	3
September	4	10	20	8	3

Tabel 3. 44 Jumlah Pengawasan Iklan TW III 2026

Hal ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas mampu melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan secara optimal. Kegiatan ini akan terus dipertahankan agar mampu mencapai targetnya pada kategori “Sangat Baik” pada akhir tahun 2026. Berikut tabel rincian pencapaian indikator kinerja pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		**Target Triwulan III Tahun 2026**	**Realisasi**			**Capaian Terhadap Target TW II 2026**
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	**Penyebut**	**Realisasi**	
IKSS 11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	94,38			98,97	104,86 Sangat Baik

Tabel 3. 45 Capaian Indikator Kinerja Iklan Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 11 - Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	94,38	98,52	104,39	Sangat Baik
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	94,38	98,97	104,86	Sangat Baik

Tabel 3. 46 Capaian IKSS 11 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Capaian iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan pada Triwulan III lebih tinggi dari capaian Triwulan II Tahun 2026, sehingga capaian yang didapat yakni 104,86%. Hal ini mencerminkan adanya konsistensi yang dilakukan oleh Balai POM di Banyumas sebagai upaya memperkuat perlindungan konsumen, seiring dengan meningkatnya jumlah dan variasi produk serta intensitas peredaran iklan di berbagai media yang memerlukan pengawasan lebih ketat dan komprehensif.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	98,97	94,38	104,86	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 47 Perbandingan IKSS 11 dengan Target Tahunan 2026

Berdasarkan Manual IKU yang tersedia, target pada indikator iklan merupakan target yang bersifat *flat* setiap bulannya sehingga target tahunan sama dengan target triwulanannya. Namun, terlihat pada tabel, jika dibandingkan dengan target tahunan, realisasi pengawasan iklan pada Triwulan III Tahun 2026 ini dapat tercapai karena kegiatan pengawasan telah dilaksanakan secara optimal, sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Selain itu, adanya koordinasi yang baik, pemantauan secara rutin, serta tindak lanjut terhadap hasil pengawasan turut mendukung tercapainya target yang telah ditentukan. Indikator pengawasan iklan berhasil mencapai notifikasi segitiga hijau atau mampu melampaui 100% dari target yang ditentukan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Adanya pembagian tugas yang terstruktur, perencanaan jadwal yang sistematis, ketepatan waktu pengisian SIPT serta monitoring dan evaluasi secara berkala, pelaksanaan pengawasan iklan dapat berjalan secara efektif dan konsisten, sehingga target capaian pengawasan iklan obat dan makanan dapat terpenuhi sesuai dengan yang telah direncanakan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 11	Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Masih terdapat iklan yang tidak memenuhi ketentuan dan pelaporan yang melebihi *timeline* pada SIPT.	Perhatikan kembali justifikasi pada pelaporan yang telah tercantum pada surat yang diberikan dari Pusat. Pastikan semua iklan telah terunggah pada sistem (SIPT).	Akan melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak	sampai dengan TW IV tahun 2026	Y	INS/S/10	Masih terdapat iklan yang tidak memenuhi ketentuan.

Tabel 3. 48 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 11

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tercapainya target pengawasan iklan obat dan makanan didukung oleh pembagian tugas dan tanggung jawab yang jelas kepada masing-masing *Person in Charge* (PIC)

yang bertanggung jawab terhadap pemenuhan target capaian pengawasan iklan sesuai dengan komoditas yang diampu. Untuk memastikan pelaksanaan kegiatan berjalan secara terencana dan optimal, telah disusun jadwal pengawasan iklan secara bulanan yang disesuaikan dengan target masing-masing komoditas serta dikelompokkan berdasarkan media pengawasan, baik media online maupun offline. Selain itu, pelaksanaan pengawasan dilakukan secara berkala dan terukur melalui monitoring serta evaluasi triwulanan oleh pusat untuk memantau progres capaian, mengidentifikasi kendala, dan memastikan kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan. Dengan adanya pembagian tugas yang terstruktur, perencanaan jadwal yang sistematis, serta monitoring dan evaluasi secara berkala, pelaksanaan pengawasan iklan dapat berjalan secara efektif dan konsisten sehingga target capaian pengawasan iklan obat dan makanan dapat terpenuhi sesuai dengan yang telah direncanakan.

IKSS 12: Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar

Label Produk tembakau dan atau rokok elektronik adalah setiap keterangan mengenai produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang berbentuk gambar, tulisan, kombinasi keduanya atau bentuk lain yang disertakan pada produk tembakau, dimasukkan ke dalam, ditempatkan pada atau merupakan bagian dari kemasan produk tembakau. IKSS Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar merupakan perbandingan antara Jumlah “Label Kemasan Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang memenuhi ketentuan pencantuman Peringatan Kesehatan termasuk Informasi pada Label Kemasan” dan “Sampel Produk Tembakau yang diperiksa yang memenuhi ketentuan” terhadap keseluruhan Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang disampling dan Sampel produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai dengan pedoman yang berlaku.

<u>Perubahan Realisasi Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik dari Bulan Januari – Juli 2026</u>

Indikator kinerja utama Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar menyampaikan kepada Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM adanya perubahan realisasi capaian dari bulan Januari – Juli 2026 melalui nota dinas nomor PR.10.01.28B.09.26.395. Perubahan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pemahaman terkait acuan ketepatan waktu pelaporan SIPT. Sebelumnya, PIC kami memahami bahwa batas maksimal dihitung berdasarkan akun operator dengan tenggat

tanggal 5 setiap bulan. Namun, berdasarkan hasil penilaian bersama unit pengampu yakni Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, acuan yang benar adalah pelaporan melalui akun Kepala Balai yang dikirimkan ke pusat.

Perubahan akibat miskomunikasi ini menyebabkan beberapa capaian IKU mengalami peningkatan capaian (misalnya Januari dan Februari naik menjadi 100%), sementara pada bulan lain terjadi penurunan (seperti April, Mei, Juni, dan Juli). Berikut secara jelas perubahan data realisasinya.

Bulan	Target (flat)	Realisasi Semula	Realisasi Menjadi
Januari	87,36	91.67	100
Februari	87,36	91.67	100
Maret	87,36	91.67	91,67
April	87,36	93.75	81,25
Mei	87,36	94.17	85
Juni	87,36	94.44	87,5
Juli	87,36	95.24	83,93

Tabel 3. 49 Perubahan Realisasi IKU Label Tembakau Januari-Juli 2026

Kemudian, Balai POM di Banyumas mendapat tanggapan melalui Nota Dinas dari Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM Nomor PR.04.02.21.09.26.510 berupa:

1. Berdasarkan justifikasi yang disampaikan, penyesuaian data realisasi IKU Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi sesuai Standar pada aplikasi Simetris E-Performance **dapat dilakukan sesuai dengan perhitungan baru**.
2. Penyesuaian data realisasi IKU pada poin 1 juga perlu dilakukan pada *googlesheet* Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), Laporan Evaluasi Internal (LEI) dan Laporan Kinerja (Lapkin) Interim. Untuk LEI dan Lapkin Interim, perubahan datanya dapat dilakukan pada laporan triwulan III tahun 2026.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Perhitungan IKU presentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar yaitu (A+B)/2. A merupakan Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi: Jumlah label yang telah selesai diinput melalui SIPT dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat. Sedangkan B merupakan Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu: Jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodic setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya. Pada triwulan III tahun 2026, realisasi

indeks kinerja sasaran strategis Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar adalah 82,41%. Jika dibandingkan dengan target triwulan III tahun 2026 yaitu 87,36%, capaian terhadap IKSS 12 adalah 94,33% dengan kriteria Baik. Hasil tersebut dikarenakan pada triwulan III terdapat presentase ketepatan waktu pelaporan label yang tidak tercapai disebabkan miskomunikasi petugas pengawasan label produk tembakau mengenai waktu pelaporan. Rincian capaian IKSS 12 sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	87,36			82,41	94,33 Baik

Tabel 3. 50 Capaian Indikator Kinerja Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 12 - Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	87,36	87,50	100,16	Sangat Baik
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	87,36	82,41	94,33	Sangat Baik

Tabel 3. 51 Capaian IKSS 12 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Realisasi Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi pada triwulan III tahun 2026 sebesar 94,33% jika dibandingkan realisasi kinerja Triwulan II sebesar 100,16%. Penurunan presentase capaian ini dikarenakan pada triwulan III terdapat presentase ketepatan waktu pelaporan label yang tidak tercapai disebabkan miskomunikasi petugas pengawasan label produk tembakau mengenai waktu pelaporan.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	82,41	87,36	94,33	Akan Tercapai

Tabel 3. 52 Perbandingan IKSS 12 dengan Target Tahunan 2026

Pada triwulan III tahun 2026, realisasi indeks kinerja sasaran strategis Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar adalah 82,41%. Jika dibandingkan dengan target tahun 2026 yaitu 87,36%, persentase capaian terhadap IKSS 12 adalah 94,33%, hal tersebut menunjukkan bahwa realisasi triwulan III lebih rendah dari target tahunan yang ditetapkan. Penurunan persentase capaian ini dikarenakan pada triwulan III terdapat presentase ketepatan waktu pelaporan label yang tidak tercapai disebabkan miskomunikasi petugas pengawasan label produk tembakau mengenai waktu pelaporan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Berikut beberapa analisa penyebab dari penurunan persentase pengawasan kegiatan label produk tembakau dan/atau rokok elektronik berserta alternatif solusi yang telah dilakukan, diantaranya:

1. PIC label produk tembakau dan/atau rokok elektronik mempunyai target/ jadwal setiap bulannya (sudah terjadwal).

2. Persentase ketepatan waktu pelaporan label yang tidak tercapai disebabkan miskomunikasi petugas pengawasan label produk tembakau mengenai waktu pelaporan.
3. Pelaporan pengawasan label produk tembakau dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.
4. Telah dilakukan koordinasi dengan Ketua Tim Kerja terkait pengiriman laporan pengawasan label produk tembakau melalui SIPT.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 12	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Pada triwulan III terdapat presentase ketepatan waktu pelaporan label elektronik yang diawasi sesuai standar yang tidak tercapai. Oleh karena adanya miskomunikasi petugas mengenai waktu pelaporan	Tolong untuk pelaporan pada SIPT dilakukan evaluasi sesuai dengan surat yang diberikan dari Pusat. Pelaporan komoditi vape diperhatikan kembali sesuai dengan renlak dan serapan anggaran.	Melakukan koordinasi dengan dengan Ketua Tim Kerja terkait pengiriman laporan pengawasan label produk tembakau melalui SIPT. Membuat reminder agar pelaporan dilakukan berdekatan dengan batas waktu pelaporan	s.d. TW IV 2026	Y	INS/S/05	Tidak tercapainya presentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan

Tabel 3. 53 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 12

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang menunjang tercapainya kinerja yaitu ketepatan waktu petugas dalam melakukan sampling sesuai rencana pelaksanaan, evaluasi dan pelaporannya. Ketepatan waktu pelaporan merupakan Jumlah label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang selesai diawasi dan dilaporkan tepat waktu dibagi dengan Jumlah label yang selesai diawasi, dilaporkan dan dikirimkan oleh Kepala UPT ke BPOM Pusat

melalui SIPT secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 pada bulan berikutnya.

IKSS 13: Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT

Penilaian indikator kinerja level UPT dalam pengendalian AMR di BPOM Banyumas dihitung berdasarkan rerata % realisasi dari kegiatan:

1) Pengawasan dengan menggunakan tools pengawasan antibiotik. Penilaian mempertimbangkan penggunaan dan ketepatan pengisian tools antibiotik pada pemeriksaan Apotek.
2) Bimbingan teknis terkait pengendalian resistensi antimikroba.
3) Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba.
4) Publikasi hasil pengawasan apotek yang menyerahkan antibiotik tanpa resep dokter.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Target Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT merupakan target yang ditetapkan dalam satu tahun berjalan, persentase akhir dihitung secara kumulatif, tidak ada target setiap triwulan. Capaian Target kumulatif Pengendalian AMR di Wilayah UPT pada TW III sebagai berikut:

- Persentase penggunaan tools pengawasan AMR di sarana apotek telah tercapai 100% (Target penggunaan tools AMR 85%). Hal ini disebabkan tools AMR telah dielaborasi dalam daftar periksa pengawasan apotek.
- Persentase kegiatan advokasi lintas sektor terkait pengendalian AMR telah terlaksana 2 (dua) kali dari target 1 kali dalam setahun. Kegiatan advokasi lintas sektor dilakukan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dan Dinas Kesehatan Kabupaten Purbalingga.
- Bimtek AMR kepada apotek telah dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu:
  Tanggal 1 Juli 2026 dalam kegiatan Bimbingan Teknis Perizinan dan Pengelolaan Obat yang Baik di Apotek dan Toko Obat di Kabupaten Cilacap
  Tanggal 22 Juli 2026 dalam Pengelola Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Purbalingga.
- Publikasi terkait pengendalian AMR telah terealisasi setiap triwulan, dan sudah terlaksana 3 kali sampai TW III tahun 2026.
- KIE AMR kepada masyarakat (1 kali setahun), target telah terealisasi pada TW II 2026 (Bulan April 2026).

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 13	Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	0			0	Capaian di Akhir Periode

Tabel 3. 54 Capaian Indikator Kinerja Pengendalian AMR Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 13 - Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	0	0	0	-
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	0	0	0	-

Tabel 3. 55 Capaian IKSS 13 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Jika dibandingkan antara realisasi kinerja TW II dan TW III Tahun 2026, capaian kinerja TW III tahun 2026 mengalami peningkatan dengan rincian sebagai berikut:

- Persentase penggunaan tools pengawasan AMR di sarana apotek telah tercapai 100% (Target penggunaan tools AMR 85%). Hal ini disebabkan tools AMR telah dielaborasi dalam daftar periksa pengawasan apotek.
- Persentase kegiatan advokasi lintas sektor terkait pengendalian AMR telah terlaksana 2 (dua) kali dari target 1 kali setahun. Kegiatan advokasi lintas sektor dilakukan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dan Dinas Kesehatan Kabuaten Purbalingga.

- Bimtek AMR kepada apotek telah dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu:
  Tanggal 1 Juli 2026 dalam kegiatan Bimbingan Teknis Perizinan dan Pengelolaan Obat yang Baik di Apotek dan Toko Obat di Kabupaten Cilacap.
  Tanggal 22 Juli 2026 dalam Pengelola Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Purbalingga.
- Publikasi terkait pengendalian AMR telah terealisasi setiap triwulan, dan sudah terlaksana 3 kali sampai TW III tahun 2026.
- KIE AMR kepada masyarakat (1 kali setahun), target telah terealisasi pada TW II 2026 (Bulan April 2026).

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah UPT	0	100	0	Perlu Upaya Keras (Akan tercapai pada akhir periode)

Tabel 3. 56 Perbandingan IKSS 13 dengan Target Tahunan 2026

Meskipun realisasi belum dapat dibandingkan dengan target tahunan, beberapa realisasi yang telah dilakukan hingga TW III yaitu:

- Persentase penggunaan tools pengawasan AMR di sarana apotek telah tercapai 100% (Target penggunaan tools AMR 85%). Hal ini disebabkan tools AMR telah dielaborasi dalam daftar periksa pengawasan apotek.
- Persentase kegiatan advokasi lintas sektor terkait pengendalian AMR telah terlaksana 2 (dua) kali dari target 1 kali setahun. Kegiatan advokasi lintas sektor dilakukan bersama Dinas Kesehatan Kabupaten Banjarnegara dan Dinas Kesehatan Kabuaten Purbalingga.
- Bimtek AMR kepada apotek telah dilaksanakan sebanyak 2 kali yaitu:

- Tanggal 1 Juli 2026 dalam kegiatan Bimbingan Teknis Perizinan dan Pengelolaan Obat yang Baik di Apotek dan Toko Obat di Kabupaten Cilacap.
- Tanggal 22 Juli 2026 dalam Pengelola Pelayanan Kefarmasian di Kabupaten Purbalingga.

- Publikasi terkait pengendalian AMR telah terealisasi setiap triwulan, dan sudah terlaksana 3 kali sampai TW III tahun 2026.
- KIE AMR kepada masyarakat (1 kali setahun), target telah terealisasi pada TW II 2026 (Bulan April 2026).

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara umum, capaian kinerja TW III sudah berjalan baik, beberapa target tahunan bahkan telah tercapai sebelum akhir tahun seperti Persentase Kegiatan Advokasi lintas sektor terkait pengendalian resistensi antimikroba dan KIE AMR kepada masyarakat. Keberhasilan capaian ini dipengaruhi oleh banyak faktor antara lain:

1. Kegiatan KIE AMR kepada masyarakat dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan fungsi lain seperti fungsi informasi dan komunikasi dalam kegiaatn yang melibatkan tokoh Masyarakat;
2. Tools pengawasan AMR telah terakomodir dan menjadi bagian dalam chekilst pemeriksaan apotek, sehingga petugas wajib mengisi tools tersebut saat melakukan pengawasan apotek;
3. Peningkatan koordinasi dan komunikasi Balai POM Banyumas dengan pemerintah daerah setempat, yang memudahkan follow up; dan
4. Pemanfaatan kegiatan pemerintah daerah yang dapat dintervensi dengan program AMR, seperti kolaborasi dalam bimtek pengelola apotek dan toko obat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik BPOM.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 13	Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Tidak ada kendala, masih berjalan sesuai rencana	Kegiatan akan dilakukan sesuai rencana	Melakukan publikasi AMR serta Penggunaan *tools* AMR dalam pemeriksaan.	Akhir tahun 2026	Y	INS/O/05	Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan di masyarakat.

Tabel 3. 57 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 13

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Tercapainya Persentase Pemenuhan Target Pengendalian AMR di Wilayah Balai POM di Banyumas pada TW III tidak lepas dari keberhasilan program sebagai berikut:

- Kegiatan KIE AMR kepada masyarakat dapat dilakukan bersamaan dengan kegiatan fungsi lain seperti fungsi informasi dan komunikasi dalam kegiaatn yang melibatkan tokoh masyarakat.
- Tools pengawasan AMR telah terakomodir dan menjadi bagian dalam chekilst pemeriksaan apotek, sehingga petugas wajib mengisi tools tersebut saat melakukan pengawasan apotek.
- Peningkatan koordinasi dan komunikasi Balai POM Banyumas dengan pemerintah daerah setempat, yang memudahkan follow up.
- Pemanfaatan kegiatan pemerintah daerah yang dapat dintervensi dengan program AMR, seperti kolaborasi dalam bimtek pengelola apotek dan toko obat yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan penerima Dana Alokasi Khusus Non Fisik BPOM.

IKSS 14: Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar

Mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 161 Tahun 2025 tentang Standar Kemampuan Laboratorium Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan

Badan Pengawas Obat dan Makanan, Balai POM di Banyumas termasuk dalam klasifikasi Laboratorium Tingkat 2. Penetapan klasifikasi ini digunakan sebagai acuan dalam menentukan target pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium yang harus dicapai sesuai dengan indikator kinerja yang telah ditetapkan.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Pada Triwulan III Tahun 2026, target indikator Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium ditetapkan sebesar 7,0 sebagaimana tercantum dalam Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Adapun realisasi yang berhasil dicapai sampai dengan akhir Triwulan III adalah sebesar 7,17. Berdasarkan perbandingan antara target dan realisasi tersebut, tingkat pencapaian indikator kinerja mencapai 102,38% atau melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan capaian tersebut, kinerja indikator pada Triwulan III Tahun 2026 termasuk dalam kategori **Sangat Baik**.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi Triwulan III Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar	7			7,17	102,43 Sangat Baik

Tabel 3. 58 Capaian Indikator Kinerja Laboratorium Pengujian Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	6,5	6,65	102,31	Sangat Baik
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	7	7,17	102,43	Sangat Baik

Tabel 3. 59 Capaian IKSS 14 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Realisasi indikator Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan III Tahun 2026 mengalami peningkatan dibandingkan dengan capaian pada Triwulan II Tahun 2026. Realisasi pada Triwulan II tercatat sebesar 6,65, kemudian meningkat menjadi 7,17 pada Triwulan III. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium di Balai POM di Banyumas. Selain mengalami peningkatan dibandingkan triwulan sebelumnya, realisasi Triwulan III juga telah melampaui target sebesar 7,0. Hasil tersebut memberi gambaran positif atas upaya pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium. Ke depan, upaya pemenuhan standar perlu terus dilaksanakan secara berkelanjutan agar capaian kinerja dapat dipertahankan dan ditingkatkan dalam mendukung pencapaian target kinerja tahun 2026.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar	7,17	7,5	95,6	Akan Tercapai

Tabel 3. 60 Perbandingan IKSS 14 dengan Target Tahunan 2026

Target tahunan indikator Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Tahun 2026 ditetapkan sebesar 7,5 sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2026. Hingga akhir Triwulan III Tahun 2026, realisasi yang telah dicapai adalah sebesar 7,17. Apabila realisasi Triwulan III Tahun 2026 dibandingkan dengan target tahunan, maka tingkat pencapaian kinerja mencapai 95,60% dari target yang ditetapkan. Berdasarkan hasil tersebut, capaian indikator termasuk dalam kriteria akan tercapai, yang menunjukkan bahwa sebagian besar target tahunan telah terpenuhi hingga periode Triwulan III. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa realisasi kinerja sampai dengan Triwulan III telah mendekati target tahunan yang ditetapkan. Secara umum, perkembangan capaian hingga Triwulan III menunjukkan bahwa indikator berada pada jalur yang sesuai untuk memenuhi target tahunan sesuai dengan perencanaan kinerja yang telah ditetapkan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Realisasi indikator Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium pada Triwulan III Tahun 2026 mencapai 7,17 meningkat dibandingkan dengan Triwulan II sebesar 6,65. Realisasi tersebut telah melampaui target Triwulan III sebesar 7,0 dengan persentase capaian sebesar 102,43%. Peningkatan ini menunjukkan adanya kemajuan dalam pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium di Balai POM di Banyumas.

Peningkatan capaian didukung oleh upaya pengembangan ruang lingkup pengujian, pemenuhan kebutuhan bahan penunjang laboratorium, serta peningkatan kompetensi personel. Namun, pemenuhan standar masih menghadapi beberapa kendala, terutama keterbatasan anggaran yang berdampak pada belum terpenuhinya seluruh kebutuhan test kit, reagen, alat gelas, dan peralatan laboratorium. Selain itu, kompetensi personel pada beberapa metode pengujian kimia dan mikrobiologi masih perlu ditingkatkan agar pelaksanaan pengujian dapat dilakukan secara mandiri sesuai kebutuhan laboratorium.

Untuk mengatasi kendala tersebut, dilakukan penyusunan prioritas kebutuhan test kit, reagen, dan alat gelas berdasarkan kebutuhan pengujian serta ketersediaan anggaran. Kebutuhan peralatan laboratorium juga diusulkan dalam perencanaan anggaran dengan mempertimbangkan prioritas pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium. Di samping itu, peningkatan kompetensi personel terus diupayakan melalui pelatihan dan bimbingan teknis sesuai kebutuhan pengujian. Upaya tersebut diharapkan dapat

mendukung pemenuhan komponen Standar Kemampuan Laboratorium yang masih perlu ditingkatkan dan membantu pencapaian target tahunan sebesar 7,5.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT Sesuai Standar	Kompetensi personil laboratorium belum sepenuhnya mencakup seluruh aspek pengujian yang dibutuhkan	Perencanaan pengembangan kompetensi	Mengikuti pelatihan di PPPOMN dan UPT lain	TW IV	Y	LAB/ SDM/01	Terdapat gap kompetensi personil laboratorium
		Belum terdapat Peralatan Laboratorium sesuai Standar Ruang Lingkup di Balai POM Banyumas	Perencanaan kebutuhan pemenuhan sarana dan prasarana laboratorium	Pengadaan Peralatan Laboratorium di Balai POM Banyumas	2027	Y	LAB/O/02	Tidak tersedianya peralatan laboratorium yang memadai untuk pelaksanaan pengujian

Tabel 3. 61 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 14

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung capaian indikator Nilai Pemenuhan Laboratorium Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium antara lain:

1. Pemenuhan Standar Ruang Lingkup.

   Pemenuhan Standar Ruang Lingkup dilakukan melalui verifikasi metode analisis ONAPPZA secara rapid test. Kegiatan ini mendukung pengembangan kemampuan laboratorium dalam melaksanakan pengujian sesuai metode yang digunakan. Pelaksanaan verifikasi metode menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan pemenuhan komponen ruang lingkup dalam Standar Kemampuan Laboratorium. Pengembangan ruang lingkup selanjutnya perlu disesuaikan dengan kesiapan sarana dan prasarana serta kebutuhan pengujian.

2. Pemenuhan kebutuhan tes kit, reagen dan alat gelas laboratorium.

   Pemenuhan kebutuhan tes kit, reagen dan alat gelas laboratorium merupakan kegiatan penunjang untuk mendukung pelaksanaan pengujian. Pemenuhan kebutuhan tersebut mendukung kesiapan laboratorium dalam melaksanakan kegiatan pengujian. Namun, keterbatasan anggaran menyebabkan pengadaan belum dapat memenuhi seluruh kebutuhan. Oleh karena itu, diidentifikasi kebutuhan dan pengusulan pengadaan dilakukan dengan mempertimbangkan prioritas penggunaan serta ketersediaan anggaran.

3. Peningkatan kompetensi personel pengujian.

   Peningkatan kompetensi personel dilaksanakan melalui pelatihan teknis yang berkaitan dengan pengujian laboratorium, baik di bidang kimia maupun mikrobiologi. Kegiatan ini mendukung peningkatan pengetahuan dan keterampilan personel dalam melaksanakan pengujian. Kompetensi personel merupakan salah satu komponen penting dalam pemenuhan Standar Kemampuan Laboratorium karena berkaitan dengan kemampuan laboratorium dalam melaksanakan pengujian sesuai dengan ruang lingkupnya. Untuk itu, peningkatan kompetensi perlu dilanjutkan sesuai kebutuhan dan metode pengujian yang menjadi prioritas.

4. Pengusulan Pengadaan Peralatan Laboratorium.

   Upaya pemenuhan peralatan laboratorium dilakukan melalui pengajuan permohonan rekomendasi pengadaan peralatan kepada PPPOMN sebagai salah satu tahapan awal dalam pengusulan pengadaan peralatan laboratorium untuk Tahun 2027. Rekomendasi dari PPOMN telah diperoleh dan menjadi salah satu dasar untuk melanjutkan proses pengusulan pengadaan peralatan sesuai kebutuhan laboratorium. Tindak lanjut pemenuhan peralatan laboratorium akan dilakukan melalui proses pengusulan anggaran sesuai ketentuan yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kebutuhan prioritas laboratorium.

IKSS 15: Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman

Kabupaten/Kota yang didampingi adalah Kabupaten/Kota yang berpotensi menyelenggarakan pengawasan dan pemberdayaan keamanan pangan di sepanjang rantai pangan sesuai dengan ketentuan. Pendampingan yang dilakukan meliputi:

- Advokasi kepada Kabupaten/Kota terkait penyelenggaraan Keamanan Pangan di daerah.
- Mengaktivasi Tim Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan (TKPPOM) di Kabupaten/Kota.
- Mendampingi dan memastikan Kabupaten/Kota mengisi *tools* penilaian mandiri dalam kerangka kerja TKPPOM.

Sedangkan kriteria Kabupaten/Kota yang berhasil didampingi:

- Kabupaten/Kota mengisi tools penilaian mandiri secara lengkap (seluruh kriteria penilaian meliputi Komitmen, Perencanaan, Implementasi, Monitoring dan Evaluasi serta Inovasi) dan sesuai ketentuan;
- Kabupaten/Kota mengirimkan tools penilaian mandiri (dengan nilai minimal 60).

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Pada triwulan III tahun 2026 belum ada realisasi pada IKSS 15 dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2026 sesuai timeline KAK/TOR yang ditetapkan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yaitu pada bulan Februari - Juli 2026 dan pengumuman final dilaksanakan pada bulan Desember 2026, sehingga capaian realisasi sebesar 0, hal ini sesuai dengan target pada triwulan III tahun 2026. Rincian capaian IKSS 15 adalah sebagai berikut:

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0			0	Capaian di Akhir Periode

Tabel 3. 62 Capaian Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Pangan Aman Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	0	0	0	-
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	0	0	0	-

Tabel 3. 63 Capaian IKSS 15 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Pada triwulan III tahun 2026 dibandingkan dengan triwulan I masih sama dengan sebelumnya yaitu belum ada realisasi pada IKSS 15 dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2026 sesuai timeline KAK/TOR yang ditetapkan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yaitu pada bulan Februari - Juli 2026 dan pengumuman final dilaksanakan pada bulan Desember 2026. Pendampingan dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman dapat menjadi salah satu indikator terimplementasinya keamanan pangan di daerah.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	50	0	Perlu Upaya Keras (Akan tercapai pada akhir periode)

Tabel 3. 64 Perbandingan IKSS 15 dengan Target Tahunan 2026

Realisasi Tahun 2025 sebesar 1 (satu) kabupaten yang didampingi oleh Balai POM di Banyumas atau 25% kabupaten dari 4 kabupaten wilayah kerja telah didampingi. Target tahunan pada tahun 2026 yaitu 50% dimana merupakan akumulasi dari tahun sebelumnya sehingga target yang harus didampingi pada tahun 2026 sebesar 1 (satu) kabupaten yang didampingi oleh Balai POM di Banyumas. Pada triwulan III tahun 2026 belum ada realisasi pada IKSS 15 dikarenakan waktu pelaksanaan kegiatan pendampingan Penilaian Kabupaten/Kota Pangan Aman tahun 2026 sesuai timeline KAK/TOR yang ditetapkan Direktur Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha Pangan Olahan yaitu pada bulan Februari - Juli 2026 dan pengumuman final dilaksanakan pada bulan Desember 2026.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Beberapa faktor yang berkontribusi dalam keberhasilan pencapaian kinerja kinerja IKSS 15 Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman antara lain:

1. Pemahaman dan kapasitas daerah yang memerlukan adanya pendampingan lebih intens dalam mengisi tools penilaian mandiri.
2. Komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kebijakan pangan aman melalui regulasi daerah, SK Tim, dan alokasi anggaran.

3. Sinergi lintas sektor.

Balai POM di Banyumas berkomitmen untuk terus memantau pelaksanaan pendampingan Kabupaten/Kota Pangan Aman pada TW berikutnya. Upaya perbaikan dan rencana tindak lanjut yang akan dilakukan dalam meningkatkan capaian kinerja IKSS 15 adalah memperluas jejaring pangan aman baik desa, pasar maupun sekolah sebagai pengungkit capaian kabupaten/kota.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	1. Terdapat perubahan personil kunci program KKPA Balai POM di Banyumas. 2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme program.	Perkuat kembali koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dari KKPA ini. Mari tetap mempertahankan prestasi Balai POM di Banyumas sebelumnya.	1. Koordinasi dengan personil kunci sebelumnya terkait program KKPA dan indikator keberhasilannya. 2. Penetapan usulan lokus program KKPA. 3. Internalisasi perencanaan pelaksanaan program KKPA th 2026. 4. Advokasi terhadap kabupaten yang akan menerima intervensi program Kabupaten/Kota Pangan Aman. 5. Telah dibuat grup whatsapp sebagai sarana komunikasi antara PIC pengisian tools KKPA tiap Kabupaten dengan petugas Balai POM di Banyumas	s.d. TW IV 2026	Y	INS/R/03	Tidak tercapainya presentase Kab/Kota yang didampingi.

Tabel 3. 65 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 15

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Indikator Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman menjadi salah satu tolak ukur kinerja Balai POM di Banyumas dalam memperkuat sistem keamanan pangan daerah melalui pendekatan kolaboratif dan berkelanjutan. Beberapa program yang menunjang keberhasilan capaian indikator ini antara lain:

1. Penguatan Tim Jejaring Keamanan Pangan Daerah dan Tim Koordinasi Pengawasan Obat dan Makanan.
2. Sosialisasi, monitoring, dan evaluasi secara berkelanjutan.
3. Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi serta literasi Masyarakat.

Peningkatan capaian indikator ini diharapkan berkontribusi langsung terhadap perlindungan kesehatan masyarakat, peningkatan kepercayaan konsumen, serta terwujudnya ekosistem pangan yang aman dan bermutu di wilayah kerja Balai POM di Banyumas.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi

SS2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	IKSS16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	33,3	33,3			33,3	100	BAIK	100
Capaian SS2									100%	BAIK	

Gambar 3. 3 Capaian Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Balai POM di Banyumas

Capaian Sasaran Strategis 2 “Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi” pada Triwulan III Tahun 2026 tercatat sebesar 100%. Untuk pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi ini telah berhasil mencapai target tahunannya pada bulan April 2026 dengan sarana sebanyak 3 (tiga). Capaian tersebut masuk ke dalam kategori BAIK. Keberhasilan ini mencerminkan konsistensi penerapan standar pengawasan serta komitmen Balai POM dalam memastikan bahwa sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja UPT memenuhi ketentuan yang berlaku. Dengan capaian penuh, dapat disimpulkan bahwa pengawasan tidak hanya dilakukan secara rutin, tetapi juga menghasilkan *outcome* yang nyata dalam mendukung keamanan pangan masyarakat. Ke depan, evaluasi tetap diperlukan untuk menjaga keberlanjutan capaian hingga akhir periode tahun. Balai POM di Banyumas terus berkomunikasi dengan unit pengampu agar tindak lanjut pengawasan terus berjalan selaras dengan target kinerja serta anggaran yang telah ditetapkan.

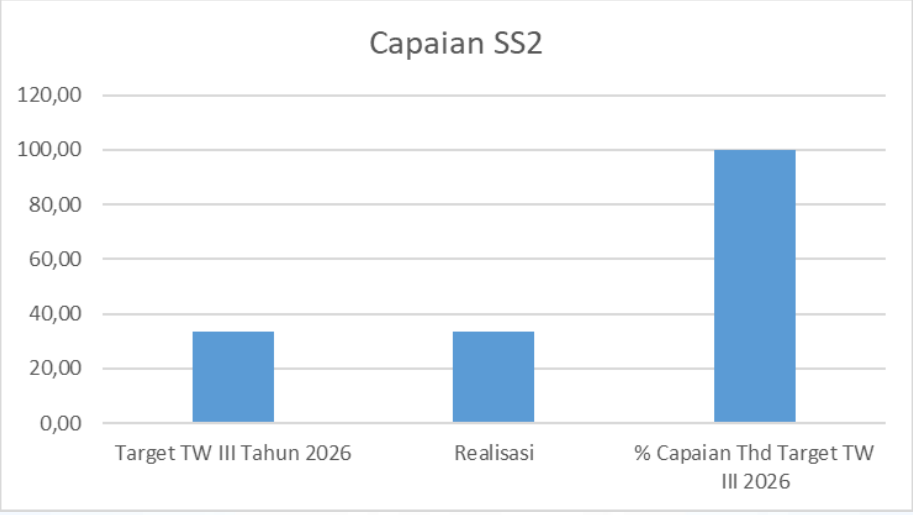

Gambar 3. 4 Grafik Capaian Sasaran Strategis 2

IKSS 16: Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan

Indikator ini mengukur sejauh mana ketercakupan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi di wilayah kerja masing-masing UPT yang ditindak lanjuti berdasarkan pedoman pemeriksaan atau ketentuan yang berlaku. Sarana Produksi Pangan Fortifikasi adalah sarana produksi pangan yang memproduksi minyak goreng sawit, garam konsumsi dan tepung terigu baik skala usaha mikro, skala usaha kecil, skala usaha menengah dan skala usaha besar.

Sarana Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan adalah Sarana produksi pangan fortifikasi yang berada di wilayah kerja UPT yang diperiksa dan ditindak lanjuti berdasarkan regulasi perundang-undangan, petunjuk pelaksanaan pemeriksaan sarana produksi, pedoman tindak lanjut hasil pengawasan, SOP terkait dan pedoman lainnya, meliputi kesesuaian tindak lanjut serta koordinasi dengan lintas sektor terkait hasil pemeriksaan dan hasil uji sampling produk pangan fortifikasi (jika diperlukan).

Perhitungan IKSS 16 ini berdasarkan Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan dibagi dengan jumlah sarana produksi pangan fortifikasi yang ada di wilayah UPT kemudian dikalikan 100%.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Target tahunan IKSS 16 sudah tercapai pada bulan April. Telah dilakukan pemeriksaan terhadap target 3 sarana yaitu pada Kugar Minamas Pansela, PT Indofood Sukses Makmur dan PT Al Barokah Amin Sukses, sehingga capaian pada TW III ini sudah mencapai 100% dengan kategori **BAIK**.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi Triwulan III Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 16	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	33,30			33,30	100 Baik

Tabel 3. 66 Capaian Indikator Kinerja Kabupaten/Kota Pangan Aman Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 16 - Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	37,50	37,50	100	Baik
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	33,30	33,30	100	Baik

Tabel 3. 67 Capaian IKSS 16 TW II Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan I 2026

Target tahunan pada IKSS 16 mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali. Pada awal tahun targetnya yaitu 63% didapat dari target pemeriksaan terhadap 5 sarana. Kemudian berdasarkan Nota dinas sekretariat utama Badan POM nomor PR.04.02.2.04.26.321 tanggal 29 April 2026 perihal Penyampaian Rekapitulasi Penyesuaian Target RO 2026 Terkait dengan hal tersebut Badan POM perlu melakukan penyesuaian target RO 2026. Perubahan target dari 5 sarana menjadi 3 sarana. Hal ini membuat target tahunan juga mengalami penurunan menjadi 37,5%.

Selanjutnya berdasarkan Nota dinas dari Direktur Pengawasan Produksi Pangan Olahan nomor PR.04.02.53.07.26.832 tanggal 6 Juli 2026 hal Penyampaian Perubahan Target RO dan IKU UPT Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Tahun 2026. Target Balai POM di Banyumas sebanyak 3 sarana dengan baseline tahun 2025 sebanyak 9 sarana. Hal ini membuat target tahunan berubah menjadi 33,30%.

Capaian pada TW III ini sudah mencapai 100% dengan kategori Baik karena target tahunan sudah tercapai pada bulan April 2026 (dapat dijelaskan bahwa IKU ini tuh berubah" dalam setahun ini dari 63% → 37,50% terus berakhir jd 33,3%).

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	33,30	33,30	100	Tercapai 

Tabel 3. 68 Perbandingan IKSS 16 dengan Target Tahunan 2026

Capaian pada TW III ini sudah mencapai 100% dengan kategori Baik karena target tahunan sudah tercapai pada bulan April 2026.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Faktor yang mempengaruhi ketercapaian target IKSS 16 adalah dengan melakukan pemeriksaan sesuai dengan rencana pelaksanaan yang sudah disusun serta berkoordinasi dengan Balai Besar POM di Semarang untuk perencanaan dan pelaksanaan sampling di sarana produksi pangan fortifikasi.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 16	Persentase Cakupan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Belum ada kendala	Tetap perhatikan pelaporan yang harus dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2026. Pastikan tidak melewati timeline dan berjalan sebagaimana	Melaksanakan pengawasan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditentukan dengan	s.d. TW IV 2026	Y	INS/O/02	Terdapat beberapa sarana produksi fortifikasi yang tidak beroperasi namun masih memiliki izin edar.

			mestinya.	mengoptimalkan sumber daya yang tersedia				

Tabel 3. 69 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 16

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi tidak hanya ditunjang oleh pemeriksaan yang dilakukan sesuai dengan perencanaan pelaksanaan yang telah disusun, tetapi juga oleh koordinasi yang intensif dengan Balai Besar POM di Semarang. Koordinasi ini berperan penting dalam memastikan perencanaan dan pelaksanaan sampling berjalan efektif, tepat sasaran, serta sesuai ketentuan yang berlaku.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT

SS3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	IKSS17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,25	89,25			90,36	101,24%	SANGAT BAIK	101,24%
		IKSS18	Jumlah sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1	70%			70%	100%	BAIK	100
		IKSS19	Jumlah desa pangan aman	1	74%			74%	100%	BAIK	100
		IKSS20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1	80%			80%	100%	BAIK	100
Capaian SS3									100,31%	SANGAT BAIK	

Gambar 3. 5 Capaian Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Efektivitas KIE di Masing-Masing Wilayah Kerja UPT

Capaian Sasaran Strategis 3 “Meningkatnya efektivitas kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di wilayah kerja Balai POM di Banyumas” pada Triwulan III Tahun 2026 tercatat sebesar 100,30% dengan kategori **SANGAT BAIK**. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan KIE telah berjalan dengan sangat baik dan secara keseluruhan mampu memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan, bahkan melampauinya. Secara keseluruhan, capaian sebesar 100,30% mencerminkan kinerja yang optimal dalam pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada masyarakat di wilayah kerja Balai POM di Banyumas. Hasil tersebut juga menunjukkan bahwa strategi edukasi dan pemberdayaan masyarakat telah dilaksanakan secara terarah melalui berbagai sasaran, baik di lingkungan pendidikan, pemerintahan desa, maupun komunitas pasar. Sinergi dengan lintas sektor dan pemangku kepentingan menjadi salah satu aspek penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan program tersebut. Meskipun demikian, upaya peningkatan efektivitas KIE perlu terus dilakukan agar capaian kinerja tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target secara kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak nyata dan berkelanjutan terhadap perubahan pengetahuan, sikap, dan perilaku masyarakat dalam memilih serta menggunakan obat dan makanan secara aman. Balai POM di Banyumas akan selalu memperluas jangkauan sasaran KIE, meningkatkan kolaborasi dengan lintas sektor, serta melakukan evaluasi terhadap efektivitas kegiatan yang telah dilaksanakan.

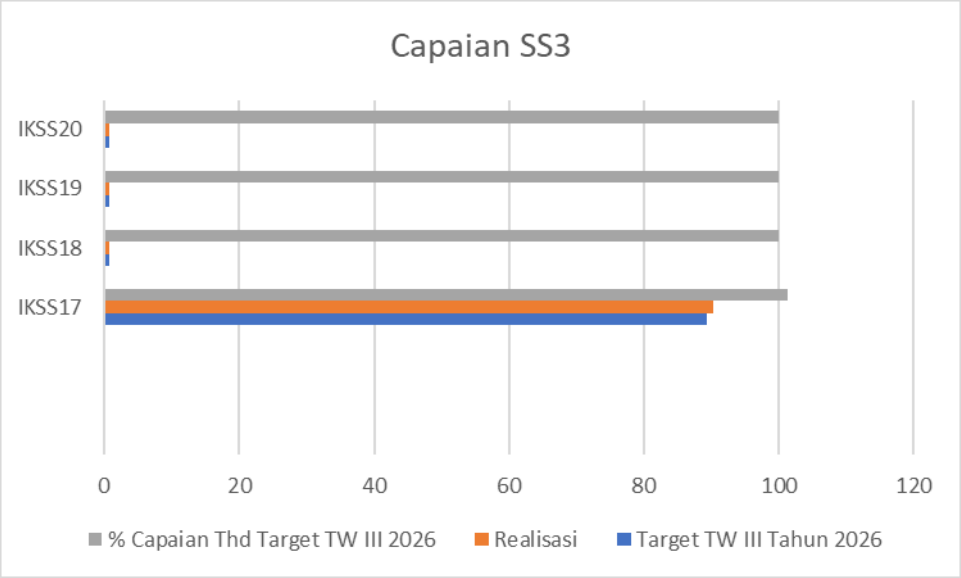

Gambar 3. 6 Grafik Capaian Sasaran Strategis 3

IKSS 17: Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

Tingkat Efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja UPT adalah ukuran efektivitas pelaksanaan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi yang dilakukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) berdasarkan penerimaan audiens KIE UPT terutama pada aspek sumber/narasumber, konten/informasi, pemahaman dan manfaat KIE. Jenis ragam KIE meliputi KIE langsung kepada Masyarakat maupun melalui media diantaranya media sosial, media cetak, media elektronik, media digital dan media luar ruang.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

KIE tatap muka yang sudah dilaksanakan sampai Triwulan III yakni KIE Keamanan Pangan dalam rangka HUT BPOM RI ke-25; KIE Tenaga Kesehatan, Tantangan dan Peluang Menuju Indonesia Emas di STIKES Seruling Mas Cilacap; KIE Kosmetik Aman Bagi Remaja di SMKN 1 Kalibagor Kabupaten Banyumas dan KIE Kosmetik Aman Bagi Remaja di SMK NU Ma'arif Cilongok Kabupaten Banyumas. Total responden yang telah melakukan pengisian survey effektifitas KIE sebanyak 91 orang dari target sebanyak 117 orang (67,52%). Masih terdapat 2 (dua) kegiatan KIE tatap muka yang akan dilaksanakan pada Triwulan IV yakni KIE tatap muka stunting dan KIE tatap muka dengan anggota Pramuka. Target responden yang akan melakukan pengisian survey effektivitas KIE Triwulan IV sebanyak 38 orang responden

KIE Media sampai dengan Triwulan III sudah melaksanakan kegiatan-kegiatan KIE meliputi KIE media daring, KIE media cetak dan KIE media digital. Sebanyak 91 orang responden yang telah melakukan pengisian survey effektivitas KIE dari target sebanyak 117 orang (77,87%). Sebanyak 26 responden akan melaksanakan pengisian survey effektivitas KIE pada Triwulan IV.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.25			90,36	101,24 Sangat Baik

Tabel 3. 70 Capaian Indikator Kinerja KIE Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 17 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	89.25	90,33	101,21	Sangat Baik
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	89.25	90,36	101,24	Sangat Baik

Tabel 3. 71 Capaian IKSS 17 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Pada Triwulan II persentase capaian effektivitas KIE sebesar 101,21% dengan detail realisasi 90,33 dengan target 89,25. Pada Triwulan III realisasi yang dicapai 90,36

ataupersentase capaian sebesar 101,24%. Capaian Triwulan III ini didapatkan dari kontribusi pengisian survey effektivitas KIe melalui media yang dilakukan oleh responden. Pada Triwulan III terdapat 31 orang responden yang melakukan pengisian kuisioner, hal ini dilakukan karena pada Triwulan III tidak terdapat KIE tatap muka langsung, sehingga dilakukan upaya peningkatan nilai indeks effektivitas KIE melalui pengisian survey KIE media yang memang telah dilaksanakan tiap bulan oleh petugas Balai POM di Banyumas. Pelaksanaan kegiatan KIE langsung/tatap muka dan KIE media sudah dilakukan sesuai dengan perencanaan yang telh dibuat. Kekurangan data responden pengisian survey effektivitas KIE akan dilakukan pemenuhan pada Triwulan IV, dimana masih terdapat 2 (dua) kegiatan KIE tatap muka/langsung dan 3 (tiga) bulan pelaksanaan KIE media.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan II 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	90,36	89,25	101,24	Tercapai/ Melampaui

Tabel 3. 72 Perbandingan IKSS 17 dengan Target Tahunan 2026

Perbandingan realisasi Triwulan III tahun 2026 dengan target tahunan sebesar 101.24%, hal ini dapat terjadi karena selama Triwulan III sudah dilaksanakan kegiatan KIE secara langsung ataupun KIE melalui media, sehingga nilai effektifitas KIE dapat mencapai realisasi 90.36 dari target 89.25% (sebesar 101.24%).

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian kinerja effektifitas KIE sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dikarenakan konsistensi petugas didalam melakasnaakan kegiatan KIE sesuai dengan perencanaan yang telah dibuat sebelumnya. Petugas juga konsisten menyampaikan kuisioner effektivitas pelaksanaan KIE yang dilakukan setiap bulan, sehingga capaian kinerja effektivitas KIE dapat dilakukan pengawalan setiap bulan, sampai pada triwulan ke tiga dengan realisasi melebihi target yang telah ditetapkan yakni sebesar 101,24%.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tidak terdapat kendala.	Memanfaatkan media supaya kegiatan yang dijalankan oleh Balai POM di Banyumas agar tersebar secara luas kepada masyarakat. Perhatikan kembali media sosial, adakan pengawas untuk media sosial agar memastikan sosial media selalu update setiap harinya. Lakukan evaluasi secara konsisten.	Menjalankan perencanaan kegiatan KIE yang telah disusun yakni KIE Pramuka dan KIE Stunting.	Hingga TW IV 2026	Y	INF/R/02	Petugas KIE tidak dapat melayani permintaan KIE tatap muka yang diminta oleh stakeholder/ masyarakat
							INF/O/01	Produk layanan informasi belum update status UPT dari Loka menjadi Balai
							INF/S/03	Pelaksanaan KIE belum menyentuh daerah perifer

Tabel 3. 73 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 17

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kinerja Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah Balai POM di Banyumas sebesar 89.25% dapat terealisasi sebesar 90.36% (capaian 101.24%), merupakan gabungan nilai dari kegiatan KIE secara langsung (tatap muka) dengan KIE melalui media. Pendukung keberhasilan capaian kinerja ini adalah dari perencanaan pelaksanaan KIE yang sudah direncanakan sepanjang tahun 2026 dimulai dari TW I s/d TW IV. Dengan perencanaan ini maka pelaksanaan KIE berjalan sepanjang TW, sehingga dapat diambil penilaian efektifitas KIE dari masyarakat penerima KIE. Selain itu adanya kolaborasi intensif dengan stakeholder dalam pelaksanaan KIE menyebabkan pelaksanaan KIE dapat dilaksanakan sepanjang tahun 2026. Kegiatan KIE yang sudah dilaksanakan menggandeng keterlibatan aktif dari stakeholder yang mencangkup pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia Pendidikan serta Masyarakat.

IKSS 18: Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan

Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan merupakan satuan pendidikan yang mendapatkan intervensi dan pemberdayaan keamanan pangan kepada komunitas sekolah melalui Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman. Intervensi dilaksanakan melalui tahapan yang meliputi advokasi lintas sektor, sosialisasi keamanan pangan, bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah, monitoring dan sertifikasi sekolah, serta pengawalan terhadap sekolah yang telah diintervensi. Pada Tahun 2026, pelaksanaan program PJAS Aman oleh Balai POM di Banyumas dilaksanakan di SD Negeri 2 Sokaraja.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Pada Triwulan III Tahun 2026, realisasi IKSS 18, yaitu Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan, tercatat sebesar 70%, sesuai dengan target yang ditetapkan sebesar 70%, sehingga capaian terhadap target Triwulan III mencapai 100% dengan kategori Baik.

Capaian tersebut merupakan capaian kumulatif pelaksanaan tahapan Program PJAS Aman yang telah dilaksanakan hingga Triwulan III Tahun 2026. Pada Triwulan II Tahun 2026, tahapan koordinasi dan advokasi, sosialisasi keamanan pangan, serta bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah telah dilaksanakan di SD Negeri 2 Sokaraja. Pelaksanaan tahapan tersebut menjadi dasar pencapaian realisasi sebesar 70% yang dipertahankan pada Triwulan III Tahun 2026.

Dengan demikian, capaian IKSS 18 pada Triwulan III telah memenuhi target periode pelaporan. Tahapan lanjutan berupa monitoring dan evaluasi, sertifikasi, serta pengawalan sekolah perlu ditindaklanjuti sesuai dengan petunjuk teknis program untuk mendukung penyelesaian intervensi dan pencapaian target tahunan.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi Triwulan III Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 18	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	70%			70%	100 Baik

Tabel 3. 74 Capaian Indikator Kinerja Sekolah Keamanan Pangan Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 18 - Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	70	70	100	Baik
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	70	70	100	Baik

Tabel 3. 75 Capaian IKSS 18 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Realisasi IKSS 18 pada Triwulan III Tahun 2026 sebesar 70%, sama dengan realisasi pada Triwulan II Tahun 2026 sebesar 70%. Dengan demikian, realisasi kinerja pada Triwulan III tetap terjaga sesuai target yang telah ditetapkan, dengan capaian terhadap target Triwulan III sebesar 100% dan kategori Baik.

Kondisi tersebut menunjukkan bahwa capaian tahapan awal Program PJAS Aman yang telah diperoleh pada Triwulan II tetap menjadi kontribusi terhadap realisasi kumulatif pada Triwulan III. Tidak adanya peningkatan persentase pada periode ini perlu dilihat berdasarkan tahapan program yang telah diselesaikan dan tahapan lanjutan yang masih harus ditindaklanjuti, bukan semata-mata sebagai penurunan kinerja.

Untuk menjaga keberlanjutan capaian, diperlukan koordinasi dengan sekolah intervensi dan pemantauan terhadap pelaksanaan tahapan lanjutan, sehingga seluruh rangkaian kegiatan dapat diselesaikan sesuai jadwal dan mendukung pencapaian target tahunan.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	70%	1	70	Akan tercapai 

Tabel 3. 76 Perbandingan IKSS 18 dengan Target Tahunan 2026

Target tahunan IKSS 18 Tahun 2026 adalah sebanyak 1 sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan. Sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, realisasi tahapan program telah mencapai 70% dari keseluruhan tahapan yang direncanakan. Dengan demikian, capaian terhadap target tahunan tercatat sebesar 70%, dengan notifikasi capaian Akan Tercapai.

Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan Program PJAS Aman di SD Negeri 2 Sokaraja telah berjalan sesuai dengan tahapan yang direncanakan, terutama pada aspek koordinasi dan advokasi, sosialisasi keamanan pangan, serta bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah.

Meskipun demikian, target tahunan belum dapat dinyatakan selesai hanya berdasarkan capaian 70%. Penyelesaian tahapan monitoring dan evaluasi, sertifikasi, serta pengawalan sekolah tetap diperlukan untuk melengkapi rangkaian intervensi sesuai petunjuk teknis program. Oleh karena itu, koordinasi dan pemantauan terhadap sekolah intervensi perlu dilanjutkan agar target tahunan sebanyak 1 sekolah dapat dicapai secara optimal.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian IKSS 18 pada Triwulan III Tahun 2026 sebesar 70% telah memenuhi target triwulanan sebesar 70%, dengan capaian 100% dan kategori Baik. Keberhasilan tersebut didukung oleh koordinasi dan pembagian tugas yang sinergis antara tim kerja Program PJAS Aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), serta koordinasi yang baik antara tim kerja PJAS Aman dengan sekolah sasaran intervensi.

Pada Triwulan II Tahun 2026, pelaksanaan koordinasi dan advokasi, sosialisasi keamanan pangan, serta bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah telah berkontribusi terhadap pencapaian realisasi sebesar 70%. Pada Triwulan III, realisasi kumulatif tersebut tetap terjaga sesuai target. Namun, belum terdapat peningkatan persentase capaian dibandingkan Triwulan II, sehingga diperlukan tindak lanjut terhadap tahapan program yang belum diselesaikan.

Beberapa risiko yang perlu menjadi perhatian dalam pelaksanaan program meliputi kompetensi fasilitator PJAS di sekolah, ketidaksinkronan jadwal pelaksanaan tahapan program dengan jadwal penanggung jawab kegiatan, serta keterbatasan anggaran untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, terutama sosialisasi dan penyediaan produk informasi. Selain itu, efektivitas intervensi perlu dijaga agar peningkatan pemahaman, sikap, dan perilaku siswa mengenai keamanan pangan dapat berlangsung secara berkelanjutan.

Sebagai alternatif solusi, tindak lanjut yang perlu dilakukan meliputi penguatan koordinasi dengan sekolah intervensi, penyesuaian jadwal pelaksanaan kegiatan antara sekolah dan penanggung jawab program, optimalisasi sumber daya dan anggaran yang tersedia, serta pemantauan penyelesaian tahapan monitoring dan evaluasi, sertifikasi, dan pengawalan sekolah. Evaluasi terhadap pemahaman, sikap, dan perilaku siswa juga perlu diperkuat untuk menjadi dasar penentuan tindak lanjut program.

Dengan langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan tahapan lanjutan dapat berjalan sesuai rencana dan mendukung pencapaian target tahunan IKSS 18 sebanyak 1 sekolah.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 18	Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kompetensi fasilitator PJAS di sekolah belum merata sehingga berpotensi memengaruhi kualitas intervensi dan pelaporan.	Memperkuat kapasitas fasilitator dan koordinasi dengan sekolah intervensi.	Melakukan koordinasi dan pendampingan kepada kader keamanan pangan sekolah serta memantau kelengkapan dokumentasi	TW III–IV 2026	Y	INF/SDM/02	Kompetensi fasilitator PJAS di sekolah belum merata sehingga berpotensi memengaruhi kualitas intervensi dan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
				kegiatan.				pelaporan.
		Jadwal pelaksanaan tahapan PJAS di sekolah tidak sinkron dengan jadwal PIC Balai POM di Banyumas.	Menyelaraskan jadwal kegiatan dengan kalender sekolah dan ketersediaan PIC.	Menyusun atau memperbarui jadwal bersama sekolah serta melakukan pemantauan progres pelaksanaan tahapan.	TW III–IV 2026	Y	INF/SDM/02	Jadwal pelaksanaan tahapan PJAS di sekolah tidak sinkron dengan jadwal PIC Balai POM di Banyumas.
		Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PJAS, terutama sosialisasi dan penyediaan produk informasi.	Mengoptimalkan pemanfaatan anggaran dan sinergi dengan program terkait	Memprioritaskan kebutuhan kegiatan sesuai tahapan program serta mengoptimalkan sumber daya dan media informasi yang tersedia.	TW III–IV 2026	Y	INF/KEU/02	Keterbatasan anggaran untuk pelaksanaan kegiatan PJAS, terutama sosialisasi dan penyediaan produk informasi.

Tabel 3. 77 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 18

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman merupakan kegiatan utama yang menunjang pencapaian IKSS 18. Pelaksanaan koordinasi dan advokasi, sosialisasi keamanan pangan, serta bimbingan teknis kader keamanan pangan sekolah menjadi tahapan yang berkontribusi terhadap pencapaian realisasi sebesar 70% hingga Triwulan II Tahun 2026, yang tetap terjaga sampai dengan Triwulan III Tahun 2026.

Keberhasilan pelaksanaan tahapan tersebut didukung oleh sinergi antara Program PJAS Aman, Desa Pangan Aman, dan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), serta komitmen dan koordinasi dengan SD Negeri 2 Sokaraja sebagai sekolah

sasaran intervensi. Sinergi tersebut mendukung pelaksanaan kegiatan secara terarah dan membuka peluang optimalisasi penggunaan sumber daya yang tersedia.

Di sisi lain, penyelesaian seluruh rangkaian program masih memerlukan pelaksanaan monitoring dan evaluasi, sertifikasi, serta pengawalan sekolah. Oleh karena itu, tindak lanjut terhadap tahapan tersebut menjadi faktor penting untuk melengkapi intervensi dan mencapai target tahunan. Penguatan koordinasi, penyesuaian jadwal kegiatan, dan optimalisasi anggaran perlu terus dilakukan agar pelaksanaan program dapat berlangsung secara efektif dan berkesinambungan.

IKSS 19: Jumlah Desa Pangan Aman

Desa Pangan Aman adalah:

a. Desa pangan aman merupakan desa yang diintervensi keamanan pangan (desa baru) berupa advokasi, bimbingan teknis, pendampingan secara intensif dalam pelaksanaan bimbingan teknis pembentukan kader keamanan pangan desa, bimbingan teknis komunitas dan pengawalan desa yang telah diintervensi keamanan pangan.

b. Desa yang diintervensi merupakan desa stunting.

c. Desa pangan aman adalah desa yang memiliki:

   1. Kader keamanan pangan desa yang aktif.
   2. Melakukan intervensi keamanan pangan pada komunitas desa.
   3. Mempunyai dokumen perencanaan program keamanan pangan yang mandiri (dengan dana desa, dana mandiri atau integrasi dengan program lain).

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Desa yang diintervensi adalah desa baru yang menerima intervensi pengawasan keamanan pangan dan memenuhi kriteria Desa Pangan Aman pada poin b dan c. Tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. Advokasi Kelembagaan Desa.
2. Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD).
3. Bimtek Komunitas.
4. Monitoring dan Evaluasi.
5. Pengawalan.

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah desa pangan aman dilaksanakan di kabupaten Banyumas pada Tahun 2026 dengan total target desa yang dintervensi sebesar 1 Desa yaitu Desa Lanngongsari yang merupakan kategori Desa Stunting berdasarkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 320 Tahun 2025 Tentang Desa/Kelurahan Prioritas Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Tahun 2025-2026. Penentuan desa/kelurahan dan lokasi kab/kota yang akan menjadi target intervensi oleh UPT BPOM juga mengacu pada Keputusan Kepala BPOM No. 134 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Desa Dan Kelurahan Pangan Aman Oleh Unit Pelaksana Teknis Pada Badan Pengawas Obat Dan Makanan.

Progres tahapan pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 adalah sebesar 100 % yaitu tahapan Advokasi Lintas sektor 25 % mencakup penunjukan PIC kegiatan serta koordinasi awal dan pre advokasi kepada pemerintah daerah dan lintas sektor terkait seperti Bapperida, Dinas Pemberdayaan Masayarakat Desa dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan, Bimtek Kader Keamanan Pangan Desa (KKPD) 25 % yang mana dalam kegiatan bimtek turut mengundang perwakilan Desa Kalisari Kec Cilongok yang merupakan sentra tahu dan Desa Melung sebagai desa wisata , Bimtek Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 20 %, dan Pengawalan 2 % sehingga total realisasi adalah 72 %. Jika dibandingkan dengan target Triwulan 2 Tahun 2026 maka akan diperoleh capaian sebesar 100 % dengan kriteria **Baik**.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 19	Jumlah Desa Pangan Aman	74%			74%	100 Baik

Tabel 3. 78 Capaian Indikator Kinerja Desa Pangan Aman Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 19 - Jumlah Desa Pangan Aman	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	72	72	100	Baik
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	74	74	100	Baik

Tabel 3. 79 Capaian IKSS 19 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Target indikator Desa Pangan Aman tahun 2026 di Kabupaten Banyumas adalah 1 desa. Progress realisasi kegiatan Desa Pangan Aman tahun 2026 ini merupakan kumulatif pembobotan tahapan kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan, sedangkan target akhir tahun yaitu Triwulan IV merupakan target jumlah desa yang diintervensi tahun 2026.

Progress realisasi kegiatan Desa Pangan Aman tahun 2026 ini merupakan kumulatif pembobotan tahapan kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan, sedangkan target akhir tahun merupakan target jumlah desa yang diintervensi tahun 2026. Pada Triwulan 3 ini telah dilaksanakan tahapan Avokasi Lintas Sektor bersama pemerintah Kabupaten Banyumas, Bimtek Kader dan Bimtek komunitas Desa serta Pengawalan terhadap desa yang sudah diintervensi tahun sebelumnya dengan capaian tahapan dalan Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman sebesar 74% dengan persentase capaian sebesar 100% dengan kriteria Baik. Setiap tahapan dalan Program Prioritas Nasional Desa Pangan Aman Balai POM di Banyumas Triwulan III Tahun 2026 telah selesai 100.00% sesuai target tahapan program dan mengalami peningkatan 2% dibandingkan Triwulan sebelumnya dengan kriteria Baik.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Jumlah Desa Pangan Aman	74%	1	74	Akan Tercapai 

Tabel 3. 80 Perbandingan IKSS 19 dengan Target Tahunan 2026

Target Indikator Desa Pangan Aman Tahun 2026 adalah 1 desa. Progres realisasi kegiatan Desa Pangan Aman Tahun 2026 ini merupakan kumulatif pembobotan tahapan kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan, sedangkan target akhir tahun merupakan Desa Pangan Aman sepanjang tahun 2026. Pelaksanaan tahapan dalam Program Desa Pangan Aman Balai POM di Banyumas Triwulan III Tahun 2026 telah sesuai dengan target per tahapan kegiatan yaitu 74%.

Realisasi Triwulan III tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan target tahun 2026 karena karakteristik dari target Indikator Kinerja Desa Pangan Aman ini bersifat jumlah desa, sedangkan pada Triwulan III ini merupakan progress tahapan kegiatan. Namun demikian target Triwulan III 2026 telah dapat dicapai dengan Kriteria Baik dan jika dibandingkan terhadap Kriteria Target 2026 dengan kriteria akan tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah desa pangan aman dilaksanakan diakhir tahun pelaksanaan kegiatan di kabupaten Banyumas dengan target desa yang dintervensi tahun 2026 sebesar 1 Desa. Adapun tahapan pelaksanaan kegiatan Desa Pangan Aman tahun 2026 adalah meliputi tahapan kegiatan Advokasi kelembagaan desa 25 %, pelatihan kader keamanan pangan desa 25%, bimbingan teknis terhadap komunitas desa 20%, monitoring dan evaluasi 20%, pengawalan desa sebelumnya sebesar 10%.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 19	Jumlah Desa Pangan Aman	Pelaksanaan KIE Mandiri hanya dilakukan oleh sebagian Kader Tahapan monitoring dan evaluasi belum terlaksana	Melakukan koordinasi intensif dengan pemerintah desa dan kader yang belum melaksanakan KIE mandiri Melakukan koordinasi dengan Tim KPD untuk persiapan pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Pendampingan kepada kader yang belum dapat melaksanakan KIE mandiri Menyusun jadwal monitoring dan evaluasi pada TW IV	November	Y	INF/R/03 INF/SDM/03 INF/KEU/03	Informasi Program Desa Pangan Aman belum dipahami secara konsisten oleh stakeholder Masyarakat. Kompetensi petugas pelaksana KIE belum sesuai dengan kebutuhan kegiatan. Tahapan kegiatan Program Desa Pangan Aman belum terlaksana sesuai rencana.

Tabel 3. 81 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 19

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Capaian tahapan kegiatan disebabkan beberapa hal yang terkait eksternal dan internal Balai POM di Banyumas. Untuk Aspek Eksternal diantaranya:

1. Koordinasi awal dan komunikasi aktif dengan Bapperida, Dinpermades dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan sehingga dapat melaksanakan tiap tahapan kegiatan tepat waktu dan sesuai dengan target progress tahapan kegiatan Desa Pangan aman.

2. Dukungan dari *stakeholder* terutama dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas yang memberikan dukungan dan respon yang positif dan aktif terhadap koordinasi dan komunikasi sehingga capaian target tiap tahapan program dapat terlaksana dengan baik.
3. Advokasi lintas sektor bersama pemerintah kabupaten sebagai komitmen bersama dalam mendukung pelaksanaan seluruh tahapan intervensi.
4. Pelaksanaan Bimbingan Teknis kepada Kader Keamanan Pangan Desa dan Bimbingan Teknis kepada Komunitas Desa.
5. Pelaksanaan KIE mandiri oleh kader untuk menambah jumlah komunitas yang menerima pengetahuan tentang keamanan pangan.
6. Pelaksanaan pengawasan pangan melalui sampling dan uji bersama kader.
7. Pelaksanaan pengawalan program desa pangan aman terhadap desa yang yang telah diintervensi melalui pendampingan kepada Tim KPD dalam melaksanakan program mandiri.

Sementara dari pihak Internal, upaya yang dilakukan yaitu:

1. Perencanaan yang baik, semenjak awal hingga akhir tahapan dapat diselesaikan sesuai yang direncanakan.
2. Komunikasi aktif dengan pihak *stakeholder* terutama lintas sektor terkait Upaya untuk pengimbasan desa telah dikomunikasikan secara aktif dengan pemerintah daerah.

Program/Kegiatan intervensi Keamanan Pangan di Desa dilaksanakan sebagai kegiatan terpadu dengan intervensi terhadap Sekolah dan Pasar di Kabupaten Banyumas. Hal ini bertujuan untuk tersedianya Pangan Aman, Sehat dan Percepatan Perbaikan Gizi yang merupakan salah satu langkah untuk menuju Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Sadar Pangan Aman sebagai gerakan bersama yang terintegrasi dan berkelanjutan, disamping untuk mengefisiensikan baik dari segi anggaran, maupun dari segi waktu pelaksanaan.

IKSS 20: Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Dalam rangka menjamin keamanan dan mutu pangan olahan yang beredar di masyarakat dan menggugah komunitas pasar agar dapat berdaya dan mandiri dalam pembinaan dan pengawasan kepada komunitas pasar, BPOM melakukan revitalisasi Program Pasar Aman dari Bahan Berbahaya menjadi Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK) dengan strategi program yaitu:

1. Advokasi,
2. Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar,
3. Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar,
4. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi, dan
5. Pengawalan Pasar.

PPABK adalah pasar yang didalamnya terdapat komitmen dan dukungan penuh dari pemangku kepentingan dan pemberdayaan komunitas pasar dari sisi *supply* (pengelola pasar, pedagang pasar, asosiasi pasar, pemasok) dan dari sisi *demand* (pengunjung pasar). Kriteria PPABK adalah sebagai berikut:

1. Pasar Sehat,
2. Pasar SNI, dan
3. Pasar yang masih ditemukan pangan mengandung Bahan Berbahaya (BB).

Output dari program PPABK adalah kemandirian komunitas pasar dalam mengawasi dan menjamin keamanan pangan secara berkelanjutan, dengan adanya PPABK, diharapkan:

1. Pengelola pasar memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk melakukan pengawasan mandiri,
2. Perubahan Perilaku dan Lingkungan Pasar, dan
3. Peningkatan Kepercayaan Masyarakat.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pelaksanaan pengukuran atas indikator Jumlah PPABK dilaksanakan di Kabupaten Banyumas pada Tahun 2026 dengan total target pasar yang diintervensi sebanyak 1 (satu) Pasar yaitu Pasar Banyumas yang merupakan Pasar SNI, Pasar Sehat, dan masih ditemukan pangan yg mengandung BB. Progres tahapan pelaksanaan kegiatan Pasar Pangan Aman sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 adalah sebesar 100% yaitu tahapan Advokasi Kelembagaan 25% mencakup penunjukan Person In Charge (PIC) kegiatan dan koordinasi awal kepada pemerintah daerah dan lintas sektor terkait seperti Dinas Kesehatan dan Pengendalian Keluarga Berencana (Dinkes-KB) dan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dan Perdagangan (DKUKMP) Kabupaten Banyumas. Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar sebesar 25% yang mana dalam kegiatan tersebut turut mengundang pengelola Pasar Buntu dan Pasar Sokaraja yang merupakan pasar terdekat wilayah Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Banyumas Timur, Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar sebesar 20%, Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi sebesar 5% dan Pengawalan Pasar sebesar 5% sehingga total realisasinya adalah 80%. Jika

dibandingkan dengan target Triwulan II Tahun 2026 maka akan diperoleh capaian sebesar 100% dengan kriteria **Baik**.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 20	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	80%			80%	100 Baik

Tabel 3. 82 Capaian Indikator Kinerja Pasar Aman Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 20 - Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	70	70	100	Baik
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	80	80	100	Baik

Tabel 3. 83 Capaian IKSS 20 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Target indikator PPABK Tahun 2026 di Kabupaten Banyumas adalah 1 pasar. Progress realisasi kegiatan PPABK Tahun 2026 ini merupakan kumulatif pembobotan tahapan kegiatan yang menunjang pelaksanaan kegiatan, sedangkan target akhir tahun yaitu Triwulan IV merupakan target jumlah pasar yang diintervensi tahun 2026. Pada Triwulan 3 ini telah dilaksanakan tahapan Advokasi Kelembagaan bersama pemerintah Kabupaten Banyumas, Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar, Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi, dan Pengawalan Pasar sebesar 80% dengan capaian sebesar

100%. Setiap tahapan dalam Program Prioritas Nasional PPABK Balai POM di Banyumas Triwulan III Tahun 2026 telah selesai 100.00% sesuai target tahapan program dan mengalami peningkatan 10% dibandingkan Triwulan sebelumnya (kriteria **Baik**).

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	80%	1	80	Akan Tercapai 

Tabel 3. 84 Perbandingan IKSS 20 dengan Target Tahunan 2026

Target Indikator PPABK Tahun 2026 adalah 1 pasar. Pelaksanaan tahapan dalam Program Desa Pangan Aman Balai POM di Banyumas Triwulan III Tahun 2026 telah sesuai dengan target per tahapan kegiatan yaitu 80%. Realisasi Triwulan III Tahun 2026 tidak dapat dibandingkan dengan target Tahun 2026 karena karakteristik dari target Indikator Kinerja PPABK ini merupakan jumlah pasar yang diintervensi, sedangkan realisasi kinerja Triwulan III merupakan progress tahapan kegiatan. Namun demikian target Triwulan III 2026 telah dapat dicapai dengan Kriteria Baik dan jika dibandingkan terhadap Kriteria Target 2026 dengan kriteria akan tercapai.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Capaian kinerja Triwulan III telah sesuai target karena didukung oleh perencanaan yang baik dan koordinasi lintas sektor yang efektif. Sebagai tindak lanjut, akan dilaksanakan kegiatan koordinasi dengan Tim Keamanan Pangan Pasar Tanjungsari, Cilacap, terkait dengan persiapan pelaksanaan kegiatan Bimtek Pengawalan Pasar yang Sudah Diintervensi.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 20	Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Pengelola Pasar sudah dipindahtugaskan sehingga kader lama yg tersisa dari Pasar yang sudah diintervensi hanya 1 (satu) orang. Hal tersebut berpengaruh pada pemahaman pengelola pasar terkait adanya program PPABK pada Pasar Tanjungsari, Cilacap Pasar Tanjungsari tidak memiliki inventaris berupa speaker dan proyektor untuk menunjang kegiatan Bimtek Pengawalan PPABK.	Dilaksanakan Bimtek Pengawalan untuk Pasar Tanjungsari dalam rangka *refreshment* pemahaman terkait keamanan pangan dan monitoring pelaksanaan program mandiri kader keamanan pangan Pasar Tanjungsari Kendala tidak adanya speaker dan proyektor sudah disiasati dengan meminjam speaker pada paguyuban pasar dan mengganti penggunaan proyektor dengan memberikan fotokopi materi kepada peserta Bimtek Pengawalan	Koordinasi pelaksanaan monev akhir impelementasi PPABK di Pasar Banyumas.	8 Oktober 2026	Y	INF/IT/02 INF/O/03 INF/KEU/04	Gangguan sistem pelaporan menyebabkan keterlambatan penyampaian data kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas. Pelaksanaan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Keterbatasan pelaksanaan tahapan kegiatan pasar pangan aman berbasis komunitas.

Tabel 3. 85 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 20

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja pada Triwulan III didukung oleh terlaksananya rangkaian kegiatan Program Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas (PPABK), yaitu Advokasi, Bimbingan Teknis dan Penyuluhan Komunitas Pasar, Sosialisasi Keamanan

Pangan Kepada Komunitas Pasar dan Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring Evaluasi. Pelaksanaan kegiatan secara bertahap dengan melibatkan lintas sektor berhasil meningkatkan komitmen, kapasitas, dan partisipasi pengelola pasar serta pedagang dalam penerapan keamanan pangan. Sinergi yang baik antara Balai POM di Banyumas, pemerintah daerah, dan pengelola pasar menjadi faktor utama yang mendukung tercapainya target kinerja Triwulan III sesuai dengan rencana. Keberhasilan ini menjadi landasan yang kuat untuk pelaksanaan tahapan berikutnya, yaitu pengawalan implementasi program hingga target tahunan dapat tercapai secara optimal.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

SS4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	IKSS21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	27,45	75%	0	0	80%	106,67%	SANGAT BAIK	106,67
Capaian SS4									106,67%	SANGAT BAIK	

Gambar 3. 7 Capaian Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Pendampingan UMKM dalam Pemenuhan Standar Keamanan dan Mutu

Capaian Sasaran Strategis 4 “Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu” pada Triwulan III Tahun 2026 tercatat sebesar 106,67% dengan kategori **Sangat Baik**. Capaian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pendampingan kepada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) dalam memenuhi persyaratan keamanan dan mutu telah berjalan dengan sangat baik serta melampaui target kinerja yang ditetapkan. Pendampingan ini menjadi salah satu upaya strategis Balai POM di Banyumas untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan pelaku usaha dalam menerapkan standar keamanan dan mutu produk pangan olahan. Tingginya capaian tersebut mencerminkan pelaksanaan pembinaan dan pendampingan UMKM yang efektif, baik dalam memberikan pemahaman mengenai persyaratan perizinan maupun dalam mendorong pemenuhan komitmen produksi pangan olahan yang sesuai ketentuan. Melalui pendampingan yang dilakukan, pelaku UMKM diharapkan mampu meningkatkan kualitas proses produksi, menerapkan praktik pengolahan pangan yang baik, serta memenuhi persyaratan administrasi dan teknis untuk memperoleh rekomendasi atau perizinan yang diperlukan. Dengan demikian, pendampingan tidak hanya berkontribusi terhadap pencapaian target kinerja organisasi, tetapi juga mendukung peningkatan daya saing produk UMKM dan perlindungan masyarakat sebagai konsumen. Meskipun capaian telah melampaui target dengan kategori Sangat Baik, upaya peningkatan kinerja perlu terus dilakukan melalui pendampingan yang berkelanjutan, penguatan koordinasi dengan pemerintah daerah dan lintas sektor, serta pemantauan terhadap pemenuhan komitmen pelaku usaha setelah memperoleh pendampingan.

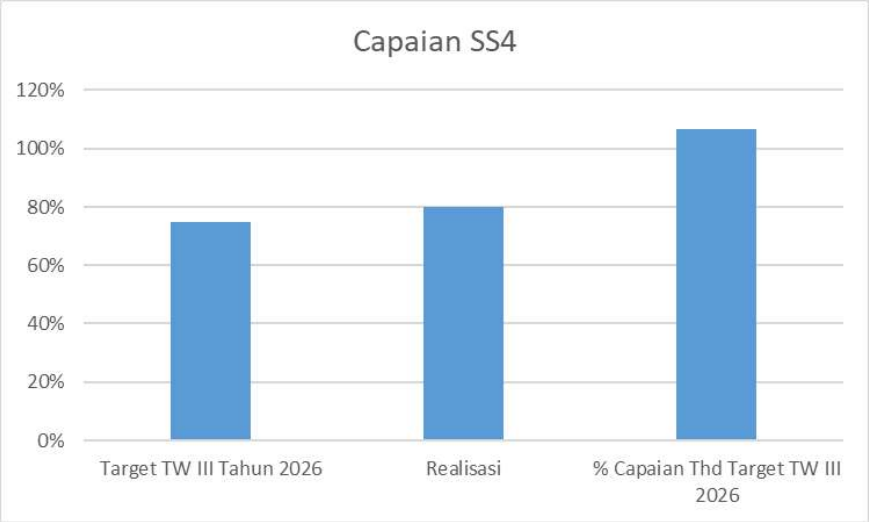

Gambar 3. 8 Grafik Capaian Sasaran Strategis 4

IKSS 21: Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan

Indikator kinerja ini dilaksanakan dengan mendampingi pelaku usaha pangan, obat bahan alam dan kosmetik dengan status UMKM untuk mendapatkan Sertifikat CPPOB (Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik), CPOBAB (Cara Pembuatan Obat Bahan Alam yang Baik) atau CPKB (Cara Pembuatan Kosmetik yang Baik) sesuai komoditi yang diproduksi. Pada periode 2025-2029, Balai POM di Banyumas memiliki target 51 UMKM untuk didampingi. Target tahun 2026 adalah 27,45% yang merupakan persentase total UMKM yang didampingi pada tahun 2025-2026 dibandingkan dengan target tahun 2025-2029, dengan rincian 9 UMKM di tahun 2025 dan 5 UMKM di tahun 2026.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pada TW III tahun 2026, capaian kinerja untuk IKSS Pendampingan UMKM Pangan, Obat Bahan Alam (OBA) dan Kosmetik sebesar 80% yang melebihi target yang sudah ditetapkan, yaitu 75%. Persentase capaian terhadap target adalah sebesar 106,67%, angka ini melebihi 100% namun masih bisa dinyatakan sebagai kriteria Sangat Baik. Capaian yang melebihi target ini dapat tercapai karena pelaku usaha yang dijadikan target pendampingan UMKM tahun ini sudah direncanakan sejak akhir tahun 2025 dengan cara memilih pelaku usaha yang sudah pernah melakukan konsultasi dengan Tim Sertifikasi maupun Tim Infokom dan sekiranya berpotensi dapat mengikuti seluruh tahap pendampingan dengan baik. Selain itu, Tim Sertifikasi juga menyiapkan beberapa pelaku usaha cadangan untuk didampingi jika sekiranya pelaku usaha yang menajdi target utama pendampingan tidak bisa memenuhi seluruh tahap pendampingan tepat

waktu. Dengan demikian, pada tahun 2026 tahap pendampingan dapat dilaksanakan dengan lebih cepat dan efektif.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 21	Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	75%			80%	106,67 Sangat Baik

Tabel 3. 86 Capaian Indikator Kinerja UMKM yang Didampingi Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 21 - Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan I Tahun 2026	50	53,33	106,66	Sangat Baik
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	75	80	106,67	Sangat Baik

Tabel 3. 87 Capaian IKSS 21 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Jika dilihat dari tabel di atas, capaian kinerja pada TW III 2026 mengalami peningkatan signifikan dibandingkan dengan capaian TW II. Hal ini disebabkan cara penghitungan capaian yang menggunakan metode kumulatif, bukan rata-rata sehingga nilai capaian memang akan terus bertambah sampai mendekati 100%.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	80	27,45	80%	Akan Tercapai 

Tabel 3. 88 Perbandingan IKSS 21 dengan Target Tahunan 2026

Capaian kinerja pada TW III tahun 2026 telah sesuai dengan timeline pendampingan yang telah ditetapkan oleh Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha masing-masing komoditi dan telah ditargetkan dapat tercapai di TW IV. Adapun capaian pada TW I-III adalah persentase pencapaian tahap pendampingan UMKM, sedangkan target tahunan adalah persentase jumlah UMKM yang berhasil didampingi dibandingkan dengan target jumlah UMKM yang didampingi pada periode 2025-2029.

Pada awal tahun 2026, target Balai POM di Banyumas ditetapkan sebesar 37,25% namun target tersebut mengalami penurunan menjadi 27,45% sehubungan dengan adanya efisiensi anggaran. Jika kegiatan pendampingan UMKM tetap dilakukan sesuai rencana, maka target pendampingan UMKM tahun 2026 dapat tercapai di TW IV.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target TW III tahun 2026 dapat tercapai karena adanya perencanaan yang memadai sejak akhir tahun 2025 dalam menentukan target pendampingan UMKM. Selain

mempersiapkan target pendampingan utama, Tim Sertifikasi juga mempersiapkan pelaku usaha cadangan yang dapat dijadikan pengganti pelaku usaha utama jika sekiranya pelaku usaha utama tidak bisa memenuhi seluruh tahap pendampingan dengan tepat waktu yang biasanya disebabkan oleh keterbatasan sumber daya untuk membangun sarana produksi atau kendala teknis perizinan dasar yang saat ini sering dialami oleh pelaku usaha akibat penerapan Peraturan Pemerintah nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 21	Persentase UMKM yang Didampingi dan Memperoleh Rekomendasi Sertifikat Cara Pembuatan OBA, Kos yang Baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	Sebagian pelaku usaha yang menjadi target pendampingan tidak bisa memenuhi seluruh tahapan pendampingan tepat waktu	Mencari pelaku usaha lain yang sekiranya bisa memenuhi seluruh tahap pendampingan tepat waktu	Mengganti target pendampingan dengan pelaku usaha lain yang sekiranya bisa memenuhi seluruh tahap pendampingan tepat waktu	TW III	Y	SER/S/01	Pelaku usaha yang menjadi target pendampingan UMKM di tahun berjalan tidak bisa menyelesaikan proses sertifikasi CPPOB/CPOTB/CPKB.

Tabel 3. 89 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 21

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian target pendampingan UMKM adalah koordinasi lintas sektor untuk secara aktif menjaring calon peserta pendampingan UMKM. Penjaringan calon peserta ini sebaiknya dilakukan di pertengahan sampai dengan akhir tahun berjalan untuk mencari kandidat peserta pendampingan tahun berikutnya. Dengan demikian, proses penjaringan dapat dilakukan dengan seksama untuk mencari calon peserta yang sekiranya memiliki komitmen serta sumber daya yang memadai agar bisa mengikuti seluruh tahap pendampingan dengan baik sehingga bisa mendapatkan Sertifikat CPPOB/CPOBAB/CPKB maksimal di TW IV tahun berjalan sesuai dengan target pendampingan.

Selain itu, kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian target pendampingan UMKM adalah berbagai kegiatan pengembangan kompetensi bagi fasilitator pendampingan, baik kompetensi teknis maupun non teknis. Hal ini sangat penting untuk memastikan fasilitator pendampingan memiliki pengetahuan teknis yang mumpuni dalam mengarahkan pelaku usaha menerapkan aspek CPPOB/CPOBAB/CPKB dengan baik dan menyeluruh. Kompetensi non teknis seperti kemampuan komunikasi juga penting untuk dimiliki oleh fasilitator agar arahan pendampingan dapat disampaikan dengan baik dan diterima oleh pelaku usaha untuk kemudian ditindaklanjuti.

Sasaran Strategis 5: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

SS5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSS22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100	55%			55%	100%	BAIK	100
Capaian SS5									100%	BAIK	

Pada Triwulan IiI Tahun 2026, capaian daripada Sasaran Strategis 5 yakni “Terlaksananya Penindakan Kegiatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di Wilayah Kerja ZI” tercatat pada kategori “Baik” dengan capaian 100%. Realisasi sebesar 100% menunjukkan bahwa target keberhasilan penyidikan yang telah direncanakan dapat tercapai secara optimal. Hal ini mencerminkan pelaksanaan fungsi penindakan yang berjalan sesuai dengan sasaran kinerja, khususnya dalam mendukung upaya penegakan hukum terhadap dugaan tindak pidana di bidang obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Banyumas. Keberhasilan pencapaian indikator ini tidak terlepas dari pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penindakan yang terarah, pengumpulan serta pendalaman informasi, dan koordinasi dengan aparat penegak hukum maupun instansi terkait. Sinergi tersebut menjadi aspek penting dalam mendukung proses penyidikan agar berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan terlaksananya penindakan secara efektif, diharapkan dapat memberikan efek jera kepada pelaku pelanggaran sekaligus meningkatkan kepatuhan pelaku usaha terhadap ketentuan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Meskipun target kinerja telah tercapai 100%, upaya peningkatan efektivitas penindakan tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Langkah tersebut dapat diwujudkan melalui penguatan intelijen dan analisis risiko, peningkatan kualitas penanganan perkara, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta evaluasi terhadap proses penyidikan dan tindak lanjut perkara. Selain itu, kegiatan penindakan perlu didukung oleh pengawasan yang konsisten agar potensi pelanggaran dapat diidentifikasi dan ditangani secara tepat.

IKSS 22: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT

Pada Triwulan III ini capaian persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM Banyumas adalah sebesar 55%. Persentase Keberhasilan Penyidikan kejahatan ini sudah sesuai dengan target pada triwulan 3. Angka 55 % ini menunjukkan bahwa tahapan penyidikan perkara sudah sampai di tahap penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) atau kegiatan Serah Tahap 1.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan II Tahun 2026

Pada Triwulan III ini sudah dilaksanakan koordinasi antara PPNS Balai POM di Banyumas dengan Korwas PPNS Polda Jawa Tengah, Korwas PPNS Polresta Cilacap, dan Kasipidum dan Jaksa Penuntut umum di Kejaksaan Negeri cilacap. Kegiatan koordinasi ini dilaksanakan dalam rangka penyelesaian berkas perkara tindak pidana memproduksi atau mengedarkan obat bahan alam yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, khasiat dan mutu. Dengan koordinasi yang baik dengan *criminal justice system* diharapkan proses pemberkasan berjalan dengan efektif dan efisien.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi Triwulan III Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55			55	100

Tabel 3. 90 Capaian Indikator Kinerja Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 22 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	10	0	0	Kurang

IKSS 22 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	55	55	100	Baik

Tabel 3. 91 Capaian IKSS 22 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2025

Pada bulan Agustus, kegiatan pemberkasan masih belum selesai karena dibutuhkan penelusuran tambahan untuk mencari saksi pekerja dan pemeriksaan tambahan untuk tersangka sehingga penyerahan berkas perkara atas nama tersangka HARI PURNOMO baru diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum bulan September oleh karena itu terjadi peningkatan capaian persentase keberhasilan penyidikan kejahatan obat dan makanan dari Triwulan II ke Triwulan III dikarenakan adanya koordinasi yang optimal dengan Jaksa, dan berkas perkara sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk diperiksa kelengkapannya.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55	100	55	Perlu Upaya Keras

Tabel 3. 92 Perbandingan IKSS 22 dengan Target Tahunan 2026

Berdasarkan hasil koordinasi dengan Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Cilacap, diharapkan Surat P21 dari berkas perkara yang ditangani PPNS Balai POM Banyumas akan keluar di pertengahan bulan Oktober dan serah tahap 2 akan

dilaksanakan pada akhir Oktober sehingga capaian persentase keberhasilan penyidikan obat dan makanan menjadi 100 %.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Target Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Balai POM Banyumas pada bulan September tercapai dengan angka sebesar 55%, hal ini ditunjang adanya koordinasi yang optimal dengan Jaksa, dan berkas perkara sudah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum untuk diperiksa kelengkapannya. Balai POM di Banyumas akan terus berkomitmen untuk berkooridnasi secara solid agar target tahunan tercapai secara optimal.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Tidak ada kendala	Perhatikan renlak dan serapan anggaran agar kegiatan penyidikan ini dipastikan selesai hingga akhir periode tahun 2026.	Koordinasi dengan Kasiepidum dan JPU terkait serah tahap 2.	Oktober 2026	Y	P/H/01	Perbedaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lama dengan yang terbaru. KUHAP yang sekarang berlaku yaitu Undang Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP.

Tabel 3. 93 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 22

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pada Triwulan II Tahun 2026, kegiatan yang dapat menunjang keberhasilan pencapaian kinerja IKSS 22: Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT antara lain adalah dengan melakukan koordinasi secara optimal dengan Korwas PPNS, Ka.Sie Pidum, Jaksa Penuntut Umum. Sinergi lintas sektor ini menjadi faktor penting untuk meningkatkan efektivitas penyidikan, memperkuat

legitimasi penindakan, serta mempercepat proses hukum terhadap pelaku usaha yang terbukti melakukan produksi atau distribusi ilegal.

Sasaran Strategis 6: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

SS6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	IKSS23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91	50			50	100	BAIK	100
Capaian SS6									100	BAIK	

Gambar 3. 9 Capaian Sasaran Strategis 5: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Capaian Sasaran Strategis 6 “Terlaksananya kegiatan teknis di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT” pada Triwulan III Tahun 2026 tercatat sebesar 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan dan masuk ke dalam kategori pencapaian “Baik”. Hasil ini menunjukkan bahwa Balai POM di Banyumas telah melaksanakan kegiatan analisis dan deteksi kejahatan di sektor farmasi dan pangan olahan secara efektif dan sistematis. Keberhasilan capaian ini menegaskan bahwa seluruh laporan analisis kejahatan yang menjadi indikator utama dapat diselesaikan sesuai standar yang berlaku. Dengan capaian penuh, dapat disimpulkan bahwa fungsi teknis pengawasan berjalan optimal dan mendukung efektivitas penegakan hukum di bidang farmasi dan pangan olahan. Capaian ini diharapkan dapat dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya melalui penguatan kualitas analisis, konsistensi penerapan standar, serta pemanfaatan hasil analisis secara optimal guna mendukung pengawasan obat dan makanan yang efektif, akuntabel, dan berkelanjutan di wilayah kerja Balai POM di Banyumas.

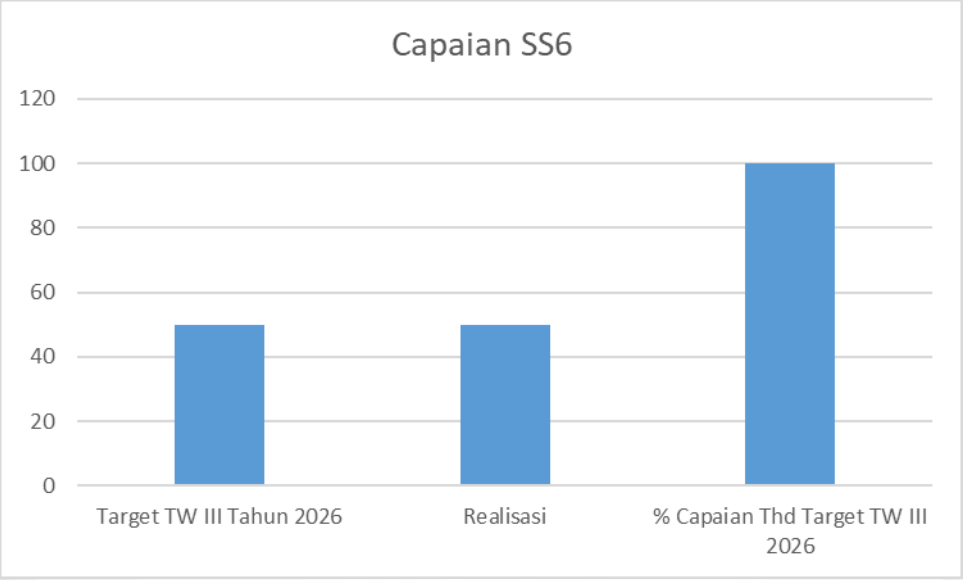

Gambar 3. 10 Grafik Capaian Sasaran Strategis 6

IKSS 23: Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar dihitung berdasarkan jumlah laporan patrol siber yang dikumpulkan setiap bulan. Pada Triwulan III Tahun 2026 Balai POM Banyumas mengumpulkan 3 (tiga) Laporan Patroli Siber.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

NPSS 6 tercapai sebesar 100% dengan memenuhi target. Hal ini menggambarkan bahwa Balai POM di Banyumas telah melaksanakan kegiatan deteksi kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan yang efektif pada wilayah kerja Balai POM di Banyumas dengan kategori **BAIK**.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	50%			50%	100 Baik

Tabel 3. 94 Capaian Indikator Kinerja Laporan Analisis Kejahatan yang Didampingi Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 23 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	50	50	100	Baik
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	50	50	100	Baik

Tabel 3. 95 Capaian IKSS 23 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Pada Triwulan II dan Triwulan III Tahun 2026, capaian indikator ini tercatat sebesar 50%, sehingga kedua triwulan tersebut memiliki capaian 100%. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja penyelesaian laporan analisis kejahatan tetap konsisten dan sesuai standar yang berlaku. Stabilitas capaian ini menandakan adanya kesinambungan dalam pelaksanaan fungsi teknis pengawasan, khususnya dalam penyusunan dan penyelesaian laporan analisis kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. engan dukungan koordinasi lintas sektor, monitoring internal, serta penguatan kapasitas tim. Capaian ini sangat didukung dengan pengumpulan Laporan Patroli Siber yang tepat waktu sesuai dengan *timeline*.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	50%	91%	54,95	Perlu Upaya Keras

Tabel 3. 96 Perbandingan IKSS 23 dengan Target Tahunan 2026

Seperti pada Triwulan II Tahun 2026, Triwulan III capaian indikator ini tercatat sebesar 50%, sementara target tahunan yang ditetapkan adalah 91%, sehingga persentase capaian terhadap target tahunan mencapai 54,95%. Notifikasi capaian menunjukkan status “Perlu Upaya Keras”, yang menandakan perlunya peningkatan intensitas kegiatan agar target tahunan dapat tercapai sesuai rencana. Namun, dengan ketepatan waktu dalam pelaporan, Balai POM di Banyumas akan mencapai target tahunan pada akhir periode 2026.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kondisi stagnan pada Triwulan III dan triwulan sebelumnya ini bukan disebabkan oleh kelemahan kinerja, melainkan karena memang target yang ditetapkan hingga bulan November adalah 50%, sementara target tahunan baru meningkat menjadi 91% pada akhir tahun. Dengan demikian, capaian yang stabil hingga Triwulan III justru menunjukkan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana tahapan target yang telah ditetapkan. Balai POM di Banyumas akan terus konsisten untuk menyusun laporan siber dan melaporkannya tepat waktu.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diselesaikan Sesuai Standar	Tidak ada kendala yang berarti	Silahkan untuk menyelesaikan data laporan penggalangan pada bulan Oktober 2026.	Melaksanakan laporan kegiatan Penggalan.	Oktober 2026	Y	P/F/01	Adanya upaya penyuapan dari pelaku usaha saat proses operasi penindakan.

Tabel 3. 97 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 23

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang mendukung keberhasilan pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang

Diselesaikan Sesuai Standar antara lain adalah kegiatan penggalangan kepada lintas sektor dan penyusunan laporan patroli siber. Kegiatan penggalangan kepada lintas sektor dilaksanakan untuk memperkuat koordinasi dan sinergi dengan instansi terkait dalam memperoleh informasi, data, serta dukungan yang diperlukan untuk mendeteksi dan menindaklanjuti dugaan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Selain itu, kegiatan patroli siber berperan dalam mengidentifikasi dan menelusuri dugaan pelanggaran atau kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan. Kedua kegiatan tersebut saling mendukung dalam meningkatkan ketersediaan informasi, memperkuat koordinasi, serta menunjang ketepatan dan ketepatan waktu penyelesaian laporan analisis kejahatan sesuai standar. Dengan demikian, pelaksanaan kegiatan penggalangan kepada lintas sektor dan penyusunan laporan patroli siber diharapkan dapat berkontribusi terhadap pencapaian target IKU yang telah ditetapkan.

Sasaran Strategis 7: Layanan Publik UPT yang Prima

SS7	Layanan Publik UPT yang Prima	IKSS24	Indeks Pelayanan Publik UPT	4,22				0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE	
Capaian SS7									0	BELUM DAPAT TERHITUNG	

Gambar 3. 11 Capaian Sasaran Strategis 7: Layanan Publik Balai POM di Banyumas yang Prima

Capaian Sasaran Strategis 7 “Layanan Publik UPT yang Prima” pada Triwulan III Tahun 2026 belum dapat dihitung atau masih berada pada angka 0%. Hal ini disebabkan oleh belum tersedianya data capaian untuk indikator kinerja Indeks Pelayanan Publik UPT pada periode pelaporan tersebut. Dengan demikian, angka 0 yang tercantum dalam tabel belum dapat diartikan sebagai rendahnya kualitas pelayanan publik, melainkan menunjukkan bahwa capaian indikator belum dapat ditentukan berdasarkan data yang tersedia. Meskipun capaian indikator belum dapat dihitung, upaya peningkatan kualitas pelayanan publik tetap perlu dilaksanakan secara berkelanjutan. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan kompetensi petugas pelayanan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, serta evaluasi terhadap masukan dan kepuasan masyarakat. Dengan adanya tindak lanjut yang tepat, diharapkan hingga akhir periode capaian indikator layanan publik dapat terukur secara jelas, sehingga mendukung pencapaian sasaran strategis dan memperkuat akuntabilitas kinerja Balai POM di Banyumas.

IKSS 24: Indeks Pelayanan Publik UPT

Nilai Indeks Pelayanan Publik adalah nilai yang menggambarkan kualitas pelayanan publik yang disediakan oleh Balai POM di Banyumas. Penilaian dilakukan oleh Tim Penilai Survey Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik dari Biro Umum Badan POM. Adapun penilaian tersebut dilakukan terhadap 6 aspek pelayanan publik, yaitu: (1) Kebijakan pelayanan, (2) Profesionalisme Sumber Daya Manusia, (3) Sarana Prasarana, (4) Sistem Informasi Pelayanan Publik, (5) Konsultasi dan Pengaduan dan (6) Inovasi yang diakumulasikan dengan poin yang diperoleh dari survey pelayanan publik yang diisi oleh pelaku usaha yang pernah mendapatkan pelayanan publik di Balai POM di Banyumas

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Pada TW II tahun 2026 telah dilakukan pengisian survey Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (PEKPPP) melalui website Evortala oleh Tim Sertifikasi disertai dengan data dukung yang menggambarkan kondisi pelayanan

publik di Balai POM di Banyumas pada keenam aspek yang dinilai serta telah dilakukan pengisian survei pelayanan publik oleh pelaku usaha. Selain itu, telah dilakukan wawancara oleh Tim Penilai dan pengunggahan dokumen data dukung tambahan sesuai hasil wawancara oleh Tim Sertifikasi.

Pada TW III tahun 2026 Tim Penilai Survey PEKPPP dari Biro Umum Badan POM telah menerbitkan Berita Acara Hasil PEKPPP tertanggal 13 Agustus 2026 yang ditandatangani oleh Tim Penilai dan Kepala Balai POM di Banyumas.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 24	Indeks Pelayanan Publik UPT	0			0	Belum dapat terhitung pada TW III 2026

Tabel 3. 98 Capaian Indikator Kinerja Indeks Pelayanan Publik Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 24 - Indeks Pelayanan Publik UPT	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	-	-	-	Tidak ada target dan capaian pada TW II 2026
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	-	-	-	Tidak ada target dan capaian pada TW III 2026

Tabel 3. 99 Capaian IKSS 24 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Tidak ada target di TW III tahun 2026. Adapun target tahun 2026 akan tercapai di TW IV 2026 sesuai dengan Berita Acara Hasil PEKPPP tertanggal 13 Agustus 2026 yang telah ditandatangani oleh Tim Penilai dan Kepala Balai POM di Banyumas.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Indeks Pelayanan Publik UPT	0	4,22	0	Perlu Upaya Keras (Akan tercapai pada akhir periode) 

Tabel 3. 100 Perbandingan IKSS 24 dengan Target Tahunan 2026

Nilai capaian IK Indeks Pelayanan Publik UPT berupa nilai indeks yang diperoleh dari Berita Acara PEKPPP (Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik) yang akan didapatkan pada TW IV berdasarkan survey yang dilaksanakan pada TW II. Adapun nilai yang diperoleh Balai POM di Banyumas sesuai Berita Acara Hasil PEKPPP tertanggal 13 Agustus 2026 adalah 4,52 yang mencapai, bahkan melebihi target tahunan.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Kendala utama yang dihadapi oleh balai POM di Banyumas terkait pemenuhan target Indeks Pelayanan Publik (IPP) adalah ruang pelayanan publik di kantor Balai POM di Banyumas yang belum memenuhi standar serta tidak tersedianya anggaran untuk melakukan perbaikan pada ruang pelayanan publik tersebut. Untuk mengatasi hal tersebut, Tim Sertifikasi menggunakan ruang pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik (MPP) Kab, Banyumas dengan justifikasi bahwa sebagian besar jenis pelayanan publik yang disediakan oleh Balai POM di Banyumas dapat dilaksanakan di MPP Kab.

Banyumas sehingga nilai Indeks Pelayanan Publik dapat mencapai, bahkan melebihi target tahunan.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Kantor Balai POM di Banyumas tidak memiliki ruang pelayanan publik yang memadai sesuai standar dan tidak tersedia anggaran untuk melakukan perbaikan ruang pelayanan publik	Menggunakan ruang pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik (MPP)sebagai data dukung penilaian aspek Sarana Prasarana	Menggunakan ruang pelayanan publik di Mall Pelayanan Publik Kab. Banyumas sebagai data dukung penilaian aspek Sarana Prasarana dengan justifikasi bahwa sebagian besar pelayanan yang disediakan oleh Balai POM di Banyumas dapat dilaksanakan di MPP Kab. Banyumas	TW III	Y	SER/S/02	Menurunnya nilai indeks pelayanan publik Balai POM di Banyumas

Tabel 3. 101 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 24

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Kegiatan yang dapat mendukung keberhasilan pencapaian target Indeks Pelayanan Publik adalah berbagai kegiatan pengembangan kompetensi bagi petugas pelayanan, baik kompetensi teknis maupun non teknis. Dengan kompetensi teknis yang mumpuni, petugas pelayanan dapat memberikan layanan informasi yang tepat untuk masing-masing pelaku usaha sesuai dengan kebutuhannya masing-masing. Selain itu, kemampuan non teknis, misalnya kemampuan komunikasi yang baik dapat menjadi faktor pendukung bagi petugas pelayanan publik untuk menyampaikan seluruh informasi dengan jelas dan menyeluruh untuk mewujudkan pelayanan prima bagi pelaku usaha.

Sasaran Strategis 8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

SS8	Terwujudnya tata kelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	IKSS25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75				0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE
		IKSS26	Nilai AKIP UPT BPOM	78,96				0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE
		IKSS27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5				0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE
		IKSS28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9				0	0	CAPAIAN AKHIR PERIODE
Capaian SS8									0	BELUM DAPAT TERHITUNG

Gambar 3. 12 Capaian Sasaran Strategis 8: Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal

Capaian Sasaran Strategis 8 “Terwujudnya tata kelola pemerintahan Unit Organisasi yang optimal” pada Triwulan III Tahun 2026 belum dapat dihitung atau masih berada pada angka 0%. Hal ini menunjukkan bahwa indikator kinerja yang terkait dengan tata kelola organisasi, seperti Nilai Pembangunan Zona Integritas (ZI), Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP), Nilai Kinerja Anggaran, serta Indeks Manajemen Risiko, masih dalam tahap proses akumulasi capaian dan belum dapat diukur secara komprehensif pada periode pelaporan Triwulan III. Pengukuran indikator-indikator tersebut umumnya dilakukan berdasarkan hasil evaluasi dan penilaian yang dilaksanakan pada akhir tahun anggaran oleh pihak yang berwenang. Oleh karena itu, capaian Sasaran Strategis 8 belum dapat ditetapkan pada Triwulan III dan akan diketahui setelah seluruh proses evaluasi, penilaian, serta verifikasi data kinerja selesai dilaksanakan pada akhir Tahun 2026. Dengan demikian, meskipun capaian indikator masih nol pada Triwulan III Tahun 2026, hal ini dapat dijadikan momentum untuk memperkuat sistem tata kelola, memastikan konsistensi proses akuntabilitas, serta menyiapkan evaluasi yang lebih komprehensif pada akhir tahun.

IKSS 25: Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM

Berdasarkan hasil evaluasi internal Triwulan III Tahun 2026, pencapaian indikator pembangunan Zona Integritas (ZI) Balai POM di Banyumas masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam pelaksanaan program kerja pembangunan ZI, pemantauan rencana kerja (Renja), dan pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

IKSS Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM merupakan indikator kinerja baru yang ditetapkan tahun ini di Balai POM Banyumas dengan target nilai RB 75. Target indikator

kinerja ini merupakan target tahunan sehingga belum dapat dihitung capaiannya pada TW III tahun 2026.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0			0	Belum dapat terhitung pada TW III 2026

Tabel 3. 102 Capaian Indikator Kinerja Nilai Pembangunan ZI Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 25 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	-	-	-	Tidak ada target dan capaian pada TW II 2026
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	-	-	-	Tidak ada target dan capaian pada TW III 2026

Tabel 3. 103 Capaian IKSS 25 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Capaian indikator pembangunan Zona Integritas (ZI) pada UPT BPOM merupakan capaian tahunan yang baru akan dinilai secara resmi pada Triwulan IV Tahun 2026. Hal ini karena penilaian ZI dilakukan melalui mekanisme evaluasi menyeluruh oleh Inspektorat, sehingga nilai capaian tidak dapat ditampilkan pada Triwulan II maupun

Triwulan III. Dengan demikian, angka capaian pada periode sebelumnya masih bernilai 0, dan hasil akhir baru akan keluar setelah proses penilaian resmi selesai di akhir tahun.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	75	0	Perlu Upaya Keras (Akan tercapai pada akhir periode) 

Tabel 3. 104 Perbandingan IKSS 25 dengan Target Tahunan 2026

Hasil evaluasi Zona Integritas (ZI) untuk Balai POM di Banyumas menunjukkan capaian sebesar 82,07%. Nilai tersebut akan secara resmi diakui sampai akhir periode Tahun 2026. Dengan capaian tersebut, Balai POM di Banyumas memperoleh persentase kinerja sebesar 109,43%, yang mencerminkan keberhasilan melampaui target yang telah ditetapkan. Target indikator kinerja ini merupakan target tahunan sehingga belum dapat diklaim capaiannya pada TW III tahun 2026.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Sebagai upaya perbaikan, telah dilakukan desk ZI dan rapat perkembangan pembangunan ZI sampai dengan Juni 2026, serta pembaruan SOP mikro. Selanjutnya, tindak lanjut yang perlu terus dilakukan adalah mengevaluasi kembali hasil desk penilaian Inspektorat, memperbaiki aspek yang masih memperoleh nilai rendah, melakukan pemantauan berkala terhadap pelaksanaan Renja setiap Pokja, serta menyesuaikan linimasa kegiatan dengan kondisi aktual. Program yang belum dapat dilaksanakan pada tahun 2026 perlu dimasukkan dalam perencanaan tahun 2027 agar tindak lanjut dapat diselesaikan secara berkelanjutan.

1) Pemantauan pelaksanaan Renja ZI belum dilakukan secara berkala oleh seluruh kelompok kerja (Pokja). Kondisi ini menyebabkan masih terdapat program kerja yang tidak terlaksana sesuai jadwal dan target yang telah ditetapkan. Selain itu, penetapan linimasa Renja belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi pelaksanaan sehingga diperlukan penyesuaian atau revisi jadwal.

2) Inovasi pelayanan publik belum menunjukkan dampak yang terukur. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa inovasi yang dilaksanakan belum sepenuhnya dapat membuktikan manfaat dan dampak langsung yang dirasakan oleh masyarakat atau pemangku kepentingan. Hal ini menjadi salah satu aspek yang perlu diperbaiki dalam pembangunan ZI menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

3) Integrasi SOP inovasi ke dalam SOP mikro belum sepenuhnya selesai. Pada evaluasi sebelumnya, masih ditemukan SOP inovasi yang belum terintegrasi ke dalam SOP mikro, termasuk kelengkapan formulir perubahan dan evaluasi SOP pada fungsi terkait.

4) Tindak lanjut hasil penilaian Inspektorat belum seluruhnya dapat diselesaikan pada tahun 2026. Beberapa tindak lanjut memerlukan pengusulan program pada tahun 2027, antara lain inovasi agen perubahan yang berdampak terhadap IKU unit serta mekanisme dan penetapan tim kerja. Kondisi ini menyebabkan sebagian perbaikan belum dapat direalisasikan pada periode berjalan

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Belum semua pokja melakukan pemantauan berkala terhadap renja kerja yang ditetapkan. Masih terdapat program yang tidak terlaksana sesuai target.	Perhatikan hasil desk penilaian yang telah diberikan dari Inspektorat, evaluasi kembali kekuangan yang telah disampaikan dan lakukan tindaklanjutnya.	Pelaksanaan program dan monev renja ZI Sep -Des 2026 (on going) Tindak lanjut hasil evaluasi pelaksanaan Pembangunan ZI oleh Sestama	Akhir 2026	Y	ZI/O/01	Penilaian penyelenggaraan Balai POM di Banyumas yang bersih dan bebas KKN melalui pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tidak tercapai sesuai target.

		Penetapan timeline renja tidak sesuai dengan realita sehingga perlu dilakukan penyesuaian/ revisi *timeline* Renja. Usulan rencana Tindak Lanjut hasil penilaian Inspektorat belum semua dapat ditindaklanjuti tahun ini, karena program baru bisa diusulkan untuk tahun 2027, misalnya inovasi agen perubahan yang berdampak pada IKU unit serta mekanisme dan penetapan tim kerja					ZI/O/02	Inovasi masih belum memiliki dampak terukur yang dirasakan langsung masyarakat.

Tabel 3. 105 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 25

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator pembangunan ZI pada Triwulan III Tahun 2026 meliputi pelaksanaan desk ZI bersama Inspektorat, rapat pemantauan perkembangan pembangunan ZI, pemutakhiran SOP mikro, serta evaluasi dan tindak lanjut hasil penilaian pembangunan ZI. Kegiatan tersebut merupakan bagian penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pembangunan ZI berjalan sesuai rencana, didukung bukti yang memadai, dan memenuhi komponen penilaian yang dipersyaratkan.

Namun, efektivitas kegiatan tersebut masih perlu ditingkatkan karena belum semua Pokja melaksanakan pemantauan Renja secara berkala dan masih terdapat program yang belum terlaksana sesuai target. Selain itu, inovasi pelayanan publik belum sepenuhnya menunjukkan dampak terukur bagi masyarakat, sementara sebagian tindak lanjut hasil evaluasi Inspektorat masih memerlukan perencanaan pada tahun berikutnya.

Faktor-faktor tersebut menjadi hambatan dalam mendorong peningkatan nilai pembangunan ZI secara optimal.

Untuk meningkatkan pencapaian indikator, langkah perbaikan yang perlu dilaksanakan meliputi:

1. Melaksanakan monitoring dan evaluasi Renja ZI secara berkala pada seluruh Pokja, disertai pencatatan progres, bukti dukung, dan tindak lanjut atas kegiatan yang belum terlaksana.
2. Menyempurnakan inovasi pelayanan publik dengan menetapkan indikator manfaat dan dampak yang dapat diukur serta dirasakan langsung oleh masyarakat.
3. Menindaklanjuti rekomendasi hasil desk Inspektorat dan evaluasi pembangunan ZI, termasuk memasukkan kegiatan yang belum dapat direalisasikan ke dalam perencanaan tahun 2027.
4. Memperkuat koordinasi antar-Pokja dan pimpinan untuk memastikan setiap program pembangunan ZI memiliki penanggung jawab, jadwal pelaksanaan, target, serta bukti dukung yang jelas.

Dengan pelaksanaan langkah-langkah tersebut secara konsisten, diharapkan pembangunan ZI Balai POM di Banyumas menjadi lebih terarah, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

IKSS 26: Nilai AKIP UPT BPOM

Pada Triwulan III Tahun 2026, Balai POM di Banyumas telah melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi AKIP, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas pengukuran, pelaporan, dan evaluasi akuntabilitas kinerja. Upaya yang dilakukan meliputi pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala, penyempurnaan analisis capaian kinerja, pendokumentasian kendala dan rencana tindak lanjut, serta peningkatan kualitas penyajian informasi kinerja dalam dokumen pelaporan.

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada Triwulan III menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi AKIP. Hasil monitoring dan evaluasi serta masukan dari desk AKIP bersama APIP Inspektorat selanjutnya menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan laporan kinerja dan penyempurnaan implementasi SAKIP pada Triwulan IV Tahun 2026.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Nilai AKIP adalah nilai hasil evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama atas implementasi SAKIP Satuan Kerja Eselon I dan Eselon II Mandiri Pusat, Balai Besar POM, Balai POM dan Loka POM di lingkungan BPOM. Realisasi nilai AKIP Balai POM di Banyumas akan terealiasi pada akhir tahun 2026.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi Triwulan III Tahun 2026			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 26	Nilai AKIP UPT BPOM	0			0	Belum dapat terhitung pada TW III 2026

Tabel 3. 106 Capaian Indikator Kinerja Nilai AKIP Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 26 - Nilai AKIP UPT BPOM	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	-	-	-	Tidak ada target dan capaian pada TW II 2026
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	-	-	-	Tidak ada target dan capaian pada TW III 2026

Tabel 3. 107 Capaian IKSS 26 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Pada Triwulan II maupun Triwulan III Tahun 2026, capaian indikator Nilai AKIP UPT BPOM masih bernilai 0. Hal ini terjadi karena penilaian AKIP merupakan indikator

tahunan yang baru akan dilakukan secara menyeluruh pada akhir tahun dan tidak dilakukan *breakdown* tiap triwulan. Dengan demikian, capaian terhadap target belum dapat dihitung pada periode triwulan berjalan.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Nilai AKIP UPT BPOM	0	76,30	0	Perlu Upaya Keras (Akan tercapai pada akhir periode) 

Tabel 3. 108 Perbandingan IKSS 26 dengan Target Tahunan 2026

Pada Triwulan III Tahun 2026, capaian indikator Nilai AKIP UPT BPOM memang masih bernilai 0, sementara target tahunan yang ditetapkan adalah 76,30. Penurunan target tahunan ini sejalan dengan Nota Dinas Sekretaris Utama Nomor PR.07.2.07.26.541 mengenai Permintaan Revisi PK dan RAPK Tahun 2026, telah ditetapkan adanya perubahan kebijakan penggunaan konversi *baseline* Tahun 2025. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian metode evaluasi dari lima komponen penilaian menjadi empat komponen penilaian. Dengan kebijakan baru tersebut, nilai evaluasi AKIP Balai POM di Banyumas Tahun 2025 yang sebelumnya sebesar 77,07 (menggunakan lima komponen) dikonversi menjadi 76,30 (menggunakan empat komponen). Oleh karena itu, Balai POM di Banyumas mengusulkan perbaikan target nilai evaluasi AKIP Tahun 2026 menjadi 76,30, selaras dengan rekomendasi kebijakan baru dan hasil konversi baseline. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan target yang ditetapkan tetap realistis, terukur, dan konsisten dengan mekanisme penilaian terbaru.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP pada Triwulan III Tahun 2026 didukung oleh upaya peningkatan koordinasi antara Tim SAKIP, ketua tim kerja, dan pimpinan dalam proses pemantauan serta evaluasi capaian kinerja. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala membantu mengidentifikasi permasalahan sejak dini, sedangkan pendokumentasian data capaian kinerja dan penyempurnaan analisis pelaporan menjadi upaya untuk meningkatkan keandalan informasi kinerja yang disajikan.

Faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan tindak lanjut meliputi:

1. Komitmen pimpinan dalam penguatan akuntabilitas kinerja, melalui arahan dan keterlibatan dalam monitoring dan evaluasi serta dorongan untuk menindaklanjuti rekomendasi perbaikan.
2. Koordinasi antarunit kerja dan Tim SAKIP, dalam penyediaan data capaian kinerja, penyampaian kendala pelaksanaan kegiatan, serta penyusunan langkah perbaikan.
3. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi secara berkala, yang mendukung identifikasi kesenjangan antara target dan realisasi serta perumusan rencana tindak lanjut.
4. Adanya pendampingan melalui desk AKIP bersama APIP Inspektorat pada September 2026, yang memberikan kesempatan untuk mengidentifikasi aspek implementasi SAKIP yang masih perlu diperbaiki dan menyelaraskan tindak lanjut dengan rekomendasi hasil evaluasi.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 26	Nilai AKIP UPT BPOM	Terdapat beberapa masukan terkait pelaksanaan SAKIP pada Balai POM di Banyumas.	Perhatikan kembali data pelaporan yang telah diinput, menjadi sebuah tanggungjawab bagi seluruh pegawai tidak hanya di TU. Perencanaan, pelaksanaan,	Menunggu hasil desk SAKIP yang nantinya berupa capaian IKU Nilai AKIP, selanjutnya ditindaklanjuti dengan penyusunan RATL hasil Evaluasi dari	TW IV 2026	Y	TU/O/02	Capaian kinerja, anggaran, dan output yang tidak terpenuhi.

			dan monev memanfaatkan inovasi KANGMAS agar terus update secara real-time.	APIP.				

Tabel 3. 109 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 26

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Program dan kegiatan yang menunjang pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP pada Triwulan III Tahun 2026 terutama berkaitan dengan penguatan tata kelola perencanaan, pengukuran, pelaporan, dan evaluasi kinerja. Kegiatan-kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya peningkatan kualitas implementasi SAKIP dan mendukung pencapaian target kinerja Balai POM di Banyumas secara lebih terukur, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan yang berkontribusi terhadap peningkatan kualitas implementasi SAKIP meliputi:

1. Monitoring dan evaluasi kinerja serta anggaran bulanan. Kegiatan ini mendukung pemantauan realisasi target, identifikasi hambatan, evaluasi efektivitas pelaksanaan kegiatan, dan penyusunan rekomendasi perbaikan. Pelaksanaannya membantu pimpinan menentukan langkah korektif terhadap indikator yang belum mencapai target.
2. Pengumpulan dan pendokumentasian data capaian kinerja. Permintaan data kepada masing-masing ketua tim kerja serta penyusunan kertas kerja perhitungan capaian kinerja mendukung keakuratan dan ketertelusuran informasi yang digunakan dalam pelaporan. Kelengkapan dan ketepatan waktu penyediaan data menjadi faktor yang memengaruhi kualitas hasil evaluasi kinerja.
3. Reviu berjenjang terhadap dokumen perencanaan dan pelaporan. Pelibatan ketua tim kerja, Tim SAKIP, dan Kepala Balai dalam proses reviu membantu memastikan kesesuaian antara target, realisasi, data dukung, dan analisis kinerja. Kegiatan ini juga berperan dalam meminimalkan kesalahan penyajian informasi serta meningkatkan konsistensi antar dokumen.

IKSS 27: Nilai Kinerja Anggaran UPT

Indikator kinerja Nilai Kinerja Anggaran (NKA) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur kualitas pelaksanaan anggaran dalam mendukung pencapaian sasaran dan target kinerja Balai POM di Banyumas. Penilaian ini tidak hanya berfokus pada tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga memperhatikan kesesuaian perencanaan dan realisasi anggaran, ketepatan pelaksanaan kegiatan, serta keterkaitan antara penggunaan anggaran dengan capaian kinerja yang dihasilkan. Oleh karena itu, diperlukan monitoring dan evaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa anggaran digunakan secara efektif, efisien, dan akuntabel, serta mampu mengidentifikasi kendala dan merumuskan langkah perbaikan guna meningkatkan nilai kinerja anggaran pada setiap periode pelaporan.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Realisasi Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Banyumas akan terealiasi pada akhir tahun 2026 setelah dilakukan penilaian Satuan Kerja oleh Kementerian Keuangan. Dengan kata lain, target Nilai Kinerja Anggaran bersifat tahunan dan tidak ada *breakdown* target tiap triwulan sehingga tidak bisa dibandingkan target dan realisasi tiap TW.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 27	Nilai Kinerja Anggaran UPT	0			0	Belum dapat terhitung pada TW III 2026

Tabel 3. 110 Capaian Indikator Kinerja Nilai Kinerja Anggaran Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 27 - Nilai Kinerja Anggaran UPT	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	-	-	-	Tidak ada target dan capaian pada TW II 2026
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	-	-	-	Tidak ada target dan capaian pada TW III 2026

Tabel 3. 111 Capaian IKSS 27 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Target Nilai Kinerja Anggaran bersifat tahunan dan tidak ada *breakdown* target tiap triwulan sehingga tidak bisa dibandingkan target dan realisasi tiap TW.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan III Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Nilai Kinerja Anggaran UPT	0	5	0	Perlu Upaya Keras (Akan tercapai pada akhir periode) 

Tabel 3. 112 Perbandingan IKSS 27 dengan Target Tahunan 2026

Target Nilai Kinerja Angagran bersifat tahunan dan tidak ada *breakdown* target tiap triwulan sehingga tidak bisa dibandingkan target dan realisasi tiap TW.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Salah satu faktor yang memengaruhi penilaian NKA adalah pencadangan anggaran belanja modal pada KRO CBV (Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan). Rencana Penarikan Dana pada Halaman III DIPA sebelumnya mengalokasikan penarikan sebesar Rp3.832.946.000,00 pada bulan Desember. Kondisi tersebut berdampak pada kesesuaian antara rencana penyerapan anggaran dan target penyerapan per triwulan, khususnya karena target penyerapan belanja modal yang menjadi acuan penilaian ditetapkan sebesar 10% pada Triwulan I, 40% pada Triwulan II, 70% pada Triwulan III, dan 90% pada Triwulan IV. Penempatan rencana penarikan anggaran pada akhir tahun menyebabkan realisasi penyerapan pada triwulan berjalan belum sepenuhnya sesuai dengan target penilaian.

Pada bulan Juli, penyerapan anggaran masih relatif rendah. Sementara itu, pada bulan Agustus terdapat kekurangan anggaran belanja pegawai dan rendahnya penyerapan belanja modal. Pada bulan September, beberapa akun anggaran mengalami kekurangan atau minus dan memerlukan revisi POK, tetapi proses revisi belum dapat dilakukan karena revisi DIPA terkait pengalihan anggaran belanja modal untuk program prioritas Presiden belum selesai.

Untuk mengatasi kendala tersebut, upaya yang telah dilakukan dan direkomendasikan dalam monitoring dan evaluasi meliputi:

1. Melakukan monitoring dan evaluasi anggaran secara berkala, dengan memperhatikan kesesuaian antara rencana penarikan dana, realisasi anggaran, dan perkembangan capaian kinerja masing-masing tim.
2. Menindaklanjuti dan berkomunikasi secara aktif dengan unit pusat terkait penyesuaian RPD Halaman III DIPA dan penyelesaian proses revisi anggaran agar rencana penarikan dana lebih sesuai dengan kebutuhan serta jadwal pelaksanaan kegiatan.
3. Mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan, termasuk melakukan penyesuaian jadwal dan mekanisme pelaksanaan apabila terdapat perubahan kondisi atau kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sesuai rencana awal.
4. Melakukan penelaahan terhadap kebutuhan anggaran dan kekurangan pada akun belanja, termasuk menindaklanjuti kekurangan anggaran belanja pegawai serta mencatat kebutuhan pengeluaran operasional yang signifikan untuk mendukung pengendalian anggaran.

5. Menyelaraskan penyerapan anggaran dengan capaian kinerja, sehingga percepatan realisasi tidak hanya berorientasi pada penyerapan anggaran, tetapi tetap mendukung pencapaian output dan sasaran kinerja organisasi.

Dengan demikian, faktor utama yang memengaruhi pencapaian NKA pada Triwulan III Tahun 2026 adalah kesesuaian jadwal penarikan dana, perubahan pelaksanaan kegiatan, keterkaitan capaian penindakan dengan kegiatan lanjutan, serta proses penyesuaian anggaran. Perbaikan perlu difokuskan pada penguatan perencanaan kas, percepatan penyelesaian revisi anggaran, dan pengendalian pelaksanaan kegiatan secara berkala agar realisasi anggaran dan capaian kinerja dapat berjalan selaras.

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Beberapa anggaran minus dan perlu dilakukan revisi POK namun belum bisa dilakukan karena proses revisi DIPA pengalihan anggaran belanja modal untuk program prioritas Presiden belum selesai.	Gunakan anggaran secara seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan capaian kegiatan secara maksimal. Sisir kembali serapan anggaran agar anggaran dan kinerja berjalan selaras.	Revisi POK bulan Oktober	Oktober 2026	Y	TU/KEU/02	Realisasi tidak sesuai dengan perencanaan

Tabel 3. 113 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 27

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi Triwulan III Tahun 2026, program dan kegiatan yang memengaruhi pencapaian NKA dapat dianalisis sebagai berikut.

1. Kegiatan pengawasan dan penindakan. Pelaksanaan kegiatan pengawasan dan penindakan menjadi salah satu faktor yang memengaruhi realisasi anggaran. Belum tercapainya target penindakan pada periode tertentu menyebabkan kegiatan lanjutan belum dapat dilaksanakan sesuai rencana. Kondisi ini berpotensi menimbulkan

deviasi antara rencana penarikan dana dan realisasi anggaran. Oleh karena itu, diperlukan pemantauan terhadap perkembangan capaian penindakan dan penyesuaian jadwal kegiatan lanjutan berdasarkan hasil pelaksanaan di lapangan.

2. Kegiatan terpadu dan koordinasi lintas sektor. Beberapa kegiatan terpadu yang semula direncanakan secara luring tidak jadi dilaksanakan dengan mekanisme tersebut. Perubahan metode pelaksanaan ini memengaruhi jadwal dan pola penggunaan anggaran. Untuk mengantisipasinya, perlu dilakukan evaluasi terhadap kesiapan pelaksanaan kegiatan, penyesuaian metode kegiatan apabila diperlukan, serta pembaruan RPD sesuai dengan kondisi pelaksanaan yang sebenarnya.
3. Kegiatan pembangunan atau renovasi gedung dan bangunan. Kegiatan pada KRO CBV memiliki pengaruh terhadap penilaian NKA karena terdapat alokasi RPD belanja modal yang direncanakan pada bulan Desember. Kondisi ini menyebabkan profil rencana penyerapan anggaran belum sepenuhnya sejalan dengan target penyerapan per triwulan. Upaya perbaikan dilakukan melalui komunikasi dengan unit pusat dan penyesuaian RPD sesuai perkembangan kebijakan serta kesiapan pelaksanaan kegiatan.
4. Kegiatan operasional dan pemenuhan belanja pegawai. Kekurangan anggaran belanja pegawai dan adanya akun anggaran yang memerlukan penyesuaian menunjukkan pentingnya pemantauan kebutuhan anggaran secara berkala. Penelaahan terhadap kecukupan pagu, kebutuhan belanja operasional, serta ketepatan pengalokasian anggaran perlu dilakukan agar tidak menghambat pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.
5. Kegiatan monitoring, evaluasi, dan pelaporan kinerja. Rapat evaluasi bulanan yang melibatkan masing-masing ketua tim menjadi instrumen penting untuk membandingkan realisasi anggaran dan capaian kinerja dengan target yang telah ditetapkan. Evaluasi ini digunakan untuk mengidentifikasi deviasi, menelaah penyebab kendala, serta merumuskan langkah tindak lanjut. Selain itu, pemanfaatan inovasi KANGMAS dalam proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan perlu terus dioptimalkan agar data perkembangan kegiatan dan anggaran selalu diperbarui secara tepat waktu.

Berdasarkan analisis tersebut, upaya peningkatan NKA perlu dilakukan secara terpadu melalui penguatan koordinasi antarunit, penyesuaian perencanaan penarikan dana, percepatan penyelesaian revisi anggaran, serta pemantauan realisasi kegiatan dan anggaran secara berkala. Setiap tim kerja perlu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan sesuai dengan target dan jadwal yang ditetapkan, serta segera menyampaikan kendala yang berpotensi menghambat realisasi anggaran. Dengan langkah tersebut,

diharapkan pelaksanaan anggaran semakin efektif dan efisien, deviasi antara perencanaan dan realisasi dapat diminimalkan, serta anggaran dapat mendukung pencapaian target kinerja Balai POM di Banyumas secara optimal.

IKSS 28: Indeks Manajemen Risiko UPT

Pelaksanaan manajemen risiko di Balai POM di Banyumas pada Triwulan III Tahun 2026 menunjukkan adanya kemajuan dalam proses tindak lanjut evaluasi dan penyusunan dokumen manajemen risiko. Namun, masih terdapat beberapa hal yang perlu diperkuat, khususnya penyelesaian dokumen peta risiko, pembaruan analisis risiko pada setiap Indikator Kinerja Utama (IKU), serta kelengkapan dokumentasi dan kertas kerja manajemen risiko.

Selain itu, berdasarkan catatan hasil audit internal, kertas kerja manajemen risiko belum sepenuhnya menjelaskan penurunan atau stagnasi level risiko. Level risiko antara Semester I dan Semester II masih sama, dengan keterangan pengendalian efektif. Hal ini menunjukkan perlunya penguatan analisis terhadap efektivitas pengendalian, sehingga penetapan level risiko didukung oleh bukti yang memadai dan dapat ditelusuri. Dokumentasi manajemen risiko juga masih menjadi aspek yang perlu diperbaiki.

a. Perbandingan Realisasi dengan Target Triwulan III Tahun 2026

Target Nilai Indeks Manajemen Resiko UPT bersifat tahunan dan tidak ada *breakdown* target tiap triwulan sehingga tidak bisa dibandingkan target dan realisasi tiap TW.

Indikator Kinerja Sasaran Strategis (IKSS)		Target Triwulan III Tahun 2026	Realisasi			Capaian Terhadap Target TW III 2026
			Triwulan III Tahun 2026			
			Pembilang	Penyebut	Realisasi	
IKSS 28	Indeks Manajemen Risiko UPT	0	0	0	0	Belum dapat terhitung pada TW III 2026

Tabel 3. 114 Capaian Indikator Kinerja Indeks Manajemen Risiko Triwulan III Tahun 2026

b. Perbandingan Realisasi Kinerja Triwulan dengan Realisasi Kinerja Triwulan Sebelumnya

Perbandingan realisasi kinerja Triwulan III Tahun 2026 dengan realisasi kinerja triwulan sebelumnya yakni dapat dikatakan realisasi kinerja Triwulan II Tahun 2026 dapat dilihat secara detail pada tabel berikut.

IKSS 28 - Indeks Manajemen Risiko UPT	Target	Realisasi	% Capaian	Kategori
Realisasi Triwulan II Tahun 2026	-	-	-	Tidak ada target dan capaian pada TW II 2026
Realisasi Triwulan III Tahun 2026	-	-	-	Tidak ada target dan capaian pada TW III 2026

Tabel 3. 115 Capaian IKSS 28 TW III Tahun 2026 terhadap Realisasi Triwulan II 2026

Target Nilai Indeks Manajemen Resiko UPT bersifat tahunan dan tidak ada *breakdown* target tiap triwulan sehingga tidak bisa dibandingkan target dan realisasi tiap TW.

c. Perbandingan Realisasi Triwulan II Tahun 2026 dengan Target Tahunan

Indikator Kinerja	Realisasi Triwulan III 2026	Target Tahunan 2026	% Capaian Terhadap Target Tahunan 2026	Notifikasi Capaian
Indeks Manajemen Risiko UPT	0	2,9	0	Perlu Upaya Keras (Akan tercapai pada akhir periode)

Tabel 3. 116 Perbandingan IKSS 28 dengan Target Tahunan 2026

Target Nilai Indeks Manajemen Resiko UPT bersifat tahunan dan tidak ada *breakdown* target tiap triwulan sehingga tidak bisa dibandingkan target dan realisasi tiap TW.

d. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Memasuki Triwulan III, pada Juli dan Agustus 2026 tidak terdapat kendala yang berarti. Kondisi ini menjadi peluang untuk melanjutkan rencana kegiatan yang telah disusun dan mempertahankan progres tindak lanjut hingga akhir tahun. Adapun alternatif solusi dan upaya perbaikan yang dilakukan atau direkomendasikan meliputi:

1. Menyelesaikan dan memperbarui dokumen manajemen risiko, termasuk dokumen peta risiko serta analisis risiko Semester II, dengan memastikan kesesuaiannya terhadap perkembangan kondisi organisasi dan target kinerja.
2. Memastikan setiap IKU memiliki identifikasi risiko dan rencana mitigasi, sehingga risiko yang berpotensi menghambat pencapaian target dapat dikendalikan sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan kegiatan.
3. Meningkatkan kualitas kertas kerja manajemen risiko, khususnya dalam menjelaskan perubahan level risiko, efektivitas pengendalian, serta dasar penetapan tingkat risiko setelah mitigasi.
4. Meningkatkan keterlibatan seluruh pegawai dalam mengidentifikasi dan mengusulkan risiko sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing, serta memastikan atribut pengendalian yang ditetapkan dapat dilaksanakan oleh Balai POM di Banyumas.
5. Melakukan koordinasi dengan Inspektorat dan Tim QMS dan MR terkait jadwal desk maturitas risiko, serta memastikan pegawai mengikuti proses evaluasi dan melengkapi dokumen sesuai ketentuan.
6. Melanjutkan pemantauan dan tindak lanjut secara berkala, agar progres penyusunan dokumen dan pelaksanaan mitigasi risiko tetap terjaga sampai dengan akhir periode tahun 2026.

Dengan demikian, aspek yang perlu diperkuat dalam pencapaian Indeks Manajemen Risiko UPT adalah ketepatan waktu penyelesaian dokumen, kualitas analisis risiko, keterukuran efektivitas pengendalian, serta kelengkapan dokumentasi. Perbaikan pada aspek-aspek tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dan mendukung pencapaian target kinerja Balai POM di Banyumas

No	Indikator	Kendala/ Permasalahan	Rekomendasi	Rencana Tindak Lanjut	Timeline	Apakah sudah dikelola sebagai risiko (Y/T)	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
IKSS 28	Indeks Manajemen Risiko UPT	Terdapat masukan saat kegiatan Audit Internal terkait kertas kerja Manajemen Risiko yang belum menjelaskan penurunan/ stagnansi dari level risiko. Level risiko antara semester 1 dan semester 2 masih sama dengan keterangan pengendalian efektif.	Masing-masing pegawai memperhatikan manajemen risiko kembali karena berkaitan dengan SKP seluruh pegawai. Buatkan atribute pengendalian yang mampu diselesaikan oleh Balai POM di Banyumas. Untuk seluruh pegawai ikuti desknya dan lengkapi sesuai dengan ketentuan.	Melakukan koordinasi dengan Inspektorat terkait jadwal desk Maturitas Risiko.	Oktober	Y	TU/SDM/04	Dokumentasi manajemen risiko tidak memadai.

Tabel 3. 117 Matriks Rekomendasi Pada IKSS 28

e. Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja

Pencapaian Indeks Manajemen Risiko UPT didukung oleh program dan kegiatan yang berkaitan dengan penyusunan dokumen manajemen risiko, identifikasi dan mitigasi risiko pada setiap IKU, evaluasi maturitas risiko, serta koordinasi dan pemantauan tindak lanjut hasil evaluasi internal. Pelaksanaan kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memastikan bahwa risiko yang dapat memengaruhi pencapaian target kinerja organisasi dikelola secara sistematis.

Program dan kegiatan yang menunjang pencapaian indikator ini dapat diuraikan sebagai berikut.

1. Penyusunan dan pemutakhiran dokumen manajemen risiko. Kegiatan penyusunan peta risiko dan pembaruan analisis risiko IKU merupakan fondasi penerapan manajemen risiko. Tindak lanjut diarahkan pada penyelesaian dokumen serta pemutakhiran risiko berdasarkan perubahan kondisi dan sasaran kinerja.

2. Identifikasi dan mitigasi risiko pada setiap IKU. Kegiatan ini mendukung integrasi manajemen risiko dengan pengelolaan kinerja organisasi. Setiap IKU perlu memiliki risiko yang relevan, disertai penyebab, dampak, langkah mitigasi, dan pengendalian yang dapat dilaksanakan. Pelibatan pegawai dalam mengusulkan risiko juga diperlukan agar identifikasi risiko mencerminkan kondisi nyata dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.
3. Evaluasi maturitas risiko dan tindak lanjut hasil audit internal. Evaluasi maturitas risiko menjadi sarana untuk menilai kualitas penerapan manajemen risiko, termasuk kecukupan dokumentasi dan efektivitas pengendalian. Catatan audit internal mengenai belum memadainya penjelasan perubahan level risiko menunjukkan bahwa kegiatan evaluasi perlu diikuti dengan perbaikan kertas kerja dan penyediaan bukti pendukung yang dapat ditelusuri. Koordinasi dengan Inspektorat serta Tim QMS dan MR perlu dilanjutkan untuk mendukung kesiapan pelaksanaan desk maturitas risiko.
4. Monitoring dan koordinasi pelaksanaan manajemen risiko. Pemantauan progres secara berkala berperan dalam menjaga keberlanjutan tindak lanjut. Pada Juli dan Agustus 2026 tidak terdapat kendala yang berarti, sehingga rencana kegiatan yang telah disusun perlu dilanjutkan dan dipertahankan. Monitoring juga perlu memastikan bahwa dokumen telah diselesaikan, mitigasi dilaksanakan, dan hasil pengendalian dievaluasi secara berkala.

Secara keseluruhan, keberhasilan pencapaian Indeks Manajemen Risiko UPT tidak hanya ditentukan oleh tersusunnya dokumen, tetapi juga oleh kualitas analisis risiko, implementasi mitigasi, evaluasi efektivitas pengendalian, dan kelengkapan bukti pelaksanaan. Oleh karena itu, kegiatan pada sisa periode tahun 2026 perlu difokuskan pada penyelesaian dokumen yang masih diperlukan, peningkatan kualitas kertas kerja, penguatan peran seluruh pegawai, serta tindak lanjut hasil evaluasi maturitas risiko secara konsisten. Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan kualitas penerapan manajemen risiko dan memperkuat dukungan terhadap pencapaian sasaran strategis Balai POM di Banyumas.

3.2. Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW II 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum ada kendala	Anggaran bisa dimaksimalkan agar mampu mencapai target yang telah direncanakan sampai akhir periode. Pelaporan tindaklanjut untuk diperhatikan agar sesuai dengan *timeline*.	Melaksanakan sampling sediaan farmasi sesuai renlak pada Triwulan II 2026.	Selesai	Melanjutkan sampling sediaan farmasi sesuai dengan perencanaan dengan memperhatikan *timeline* pelaporan dan target yang ditetapkan.	s.d. TW IV 2026	Y	INS/S/01	Masih tingginya produk sediaan farmasi yang diuji maupun penandaan tidak memenuhi persyaratan
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	Masih terdapat beberapa kendala minor terkait aplikasi e-meso 2.0, namun dapat diatasi dan penginputan dapat diselesaikan.	Pelaporan tetap dijalankan apa adanya namun bisa diperjelas saja justifikasi kenapa melampaui target tahunannya.	Saryankes potensial yang berpeluang untuk melakukan pelaporan KTD/ESO, masih terus dilakukan follow dan pemantauan secara rutin.	Target dihitung hingga akhir tahun 2026	Monitoring pelaporan KTD/ESO dari sarana pelayanan Kesehatan yang telah diberikan KIE Farmakovigilans.	s.d. TW IV 2026	Y	INS/S/03	Sarana pelayanan kesehatan tidak menyampaikan laporan KTD/ESO sehingga target persentase pelaporan tidak tercapai.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW II 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
						Perkuatan jejaring lintas sektor dengan pemerintah daerah atau organisasi profesi Kesehatan di area pengawasan BPOM Banyumas.				
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum ada kendala	Perhatikan kembali pelaporan tindaklanjut agar sesuai dengan ketentuan.	Akan melakukan sampling sesuai renlak Triwulan II Tahun 2026	Selesai	Melanjutkan sampling pangan olahan sesuai dengan perencanaan pada Triwulan III 2026.	s.d. TW III 2026	Y	INS/S/02	Masih tingginya produk sediaan pangan olahan yang diuji maupun penandaan tidak memenuhi persyaratan
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	Belum ada kendala	Laksanakan koordinasi dengan seluruh pihak di wilayah kerja terkait dengan KLB agar petugas selalu *update*	Tetap dilakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan di tiap Kabupaten.	Selesai	Melanjutkan koordinasi secara berkelanjutan hingga akhir periode.	s.d. TW IV 2026	Y	INS/R/01	Tidak tercapainya Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW II 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			informasi.							UPT
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum ada kendala	Memperhatikan pelaporan pada SIPT dan pastikan sampling sesuai dengan renlak.	Menjalankan sampling PIRT sesuai dengan renlak Triwulan II 2026.	Selesai	Melanjutkan sampling PIRT sesuai dengan perencanaan Triwulan III 2026.	s.d. TW III 2026	Y	INS/S/04	Masih tingginya produk sediaan pangan PIRT yang diuji maupun penandaan tidak memenuhi persyaratan
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	Belum semua pelaku usaha mengirimkan perbaikan atas hasil pemeriksaan	Follow up kembali dan koordinasikan dengan pelaku usaha terkait. Pastikan hasil pengawasan mudah dipahami oleh pelaku usaha.	Melakukan monitoring terhadap perbaikan yang seharusnya sudah dikirimkan sesuai timeline oleh pelaku usaha	Selesai	Melanjutkan monitoring terhadap perbaikan yang seharusnya sudah dikirimkan sesuai timeline oleh pelaku usaha	s.d. TW IV 2026	Y	INS/R/02	Tidak semua surat rekomendasi ditindaklanjuti oleh stakeholder seperti DKK dan asosiasi profesi secara tepat waktu.
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Pemeriksaan sarana bulan Juni tidak sesuai renlak yang disampaikan ke Dit. Was OTSK dikarenakan sarana target	Tetap koordinasikan hasil pengawasan kepada unit pengampu dan pastikan bahwa pelaporan yang kita input sudah sesuai dengan	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang sesuai dengan renlak	Selesai	Membuat *decission tree* untuk tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi	s.d. TW IV 2026	Y	INS/O/03	Sarana produksi farmasi yang sudah tidak aktif, tidak melakukan pencabutan izin sarana sehingga akan selalu terdata di sistem BPOM.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW II 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		tutup sehingga dialihkan ke sarana lain. Pemeriksaan sarana selanjutnya merupakan inspeksi rutin sekaligus untuk menindaklanjuti temuan inspeksi sebelumnya yang masih berkaitan.	juknis.							Pemeriksaan sarana produksi tidak tepat sasaran.
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Tidak ada kendala.	Pelaporan tindaklanjut untuk diperhatikan agar sesuai dengan timeline.	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang sesuai dengan renlak	Selesai	Membuat *decission tree* untuk tindak lanjut pemeriksaan sarana produksi pangan olahan.	s.d. TW IV 2026	Y	INS/O/04	Sarana produksi farmasi yang sudah tidak aktif, tidak melakukan pencabutan izin sarana sehingga akan selalu terdata di sistem BPOM. Pemeriksaan sarana produksi tidak tepat sasaran.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW II 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum ada kendala	Pastikan penyerapan anggaran untuk indikator ini dapat terserap secara optimal hingga akhir periode.	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian	Selesai	Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap fasilitas distribusi sediaan farmasi.	TW III 2026	Y	INS/S/06	Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha distribusi sediaan farmasi terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum ada kendala	Selalu koordinasikan seluruh pelaporan pengawasan kepada unit pusat sehingga hasil kinerja pengawasan sarana distribusi pangan olahan berjalan maksimal.	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang sudah disetujui oleh roren dan kedeputian 3	Selesai	Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap sarana distribusi pangan olahan.	TW III 2026	Y	INS/S/09	Masih rendahnya kepatuhan pelaku usaha distribusi pangan olahan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk dalam menindaklanjuti hasil pemeriksaan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW II 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	Belum ada kendala	Perluas kembali pengawasan iklan dengan berkoordinasi kepada pihak eksternal terkait.	Melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak	Selesai	Melanjutkan kegiatan pengawasan terhadap iklan yang menjadi ruang lingkup Balai POM di Banyumas.	TW III 2026	Y	INS/S/10	Iklan OBA SK Media penyiaran lokal (TV/Radio) jarang bisa didapatkan untuk dilakukan evaluasi
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	Belum ada kendala	Mohon perhatikan selalu juknis pelaporan dan serapan anggaran.	Dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan	Selesai	Akan dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan	s.d. TW IV 2026	Y	INS/S/05	Tidak tercapainya presentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai ketentuan
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	IKU AMR tidak memiliki pos anggaran spesifik. Oleh karena itu, Kegiatan bimtek AMR perlu kolaborasi dengan pemerintah daerah atau	Maksimalkan kegiatan yang telah direncanakan, mungkin bisa dibarengi oleh kegiatan lainnya agar mampu efisien secara anggaran. KIE melalui media sosial bisa	Penggunaan tools AMR pada saat pemeriksaan. Pemeriksaan TW I dan II terlaksana 100%. Publikasi AMR TW I dan II sudah terlaksana	Selesai	Seluruh pemeriksaan sarana apotek telah menggunakan tools AMR. Telah dilakukan publikasi AMR setiap triwulan (sudah	s.d. TW IV 2026	Y	INS/O/05	Tingginya praktik penyaluran dan penyerahan antibiotika yang tidak sesuai ketentuan di masyarakat

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW II 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		asosiasi.	dioptimalkan kembali agar jangkauan bisa lebih luas kembali.	sesuai timeline. Advokasi AMR dengan lintas sektor 1 tahun sekali sudah terlaksana 2 kali (melebihi target). KIE/Bimtek AMR kepada masyarakat 1 tahun sekali sudah terlaksana.		terlaksana di bulan Maret, Juni dan September 2026). Telah dilakukan KIE/Bimtek AMR dengan masyarakat pada bulan April 2026. Telah dilakukan advokasi dan koordinasi AMR dengan lintas sektor (Dinas Kesehatan Banjarnegara dan Purbalingga). Target Bimtek AMR dengan				

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW II 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
						Apotek sebanyak 2 kali setahun sudah tercapai pada tanggal 1 Juli di Cilacap dan 22 Juli di Purbalingga.				
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	Pemenuhan standar peralatan masih rendah dan tidak ada alokasi anggaran untuk pembelian alat laboratorium pada TA 2026	Berkoordinasi dengan P3OMN agar mampu memenuhi peralatan yang sesuai dengan standar Balai. Siapkan perlengkapan untuk menjadi dasar justifikasi sehingga apabila ditanyakan sudah ada datanya.	Melakukan verifikasi SRL ONAPPZA. Melakukan pengembangan kompetensi pengujian kimia pangan.	Selesai	Melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan agenda pada bulan berikutnya.	Akan terus berprogress hingga akhir periode.	Y	LAB/O/02	Tidak tersedianya peralatan laboratorium yang memadai untuk proses pengujian
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota	1. Terdapat perubahan personil kunci program KKPA Balai POM di	Harapannya di tahun ini Kabupaten yang diampu mampu masuk peringkat seperti	Membuat grup *WhatsApp* sebagai sarana komunikasi antara PIC pengisian tools	Selesai	Akan dilaksanakan Pengawalan untuk Kabupaten yang didampingi pada	Akan terus berprogress hingga akhir periode.	Y	INS/R/03	Tidak tercapainya presentase Kab/Kota yang didampingi

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW II 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	Pangan Aman	Banyumas. 2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme program.	pendampingannya yang tahun lalu mendapat penghargaan. Perhatikan koordinasi di dalam Kabupaten, keterlibatan Bupati, dan kerjasama petugas.	KKPA tiap Kabupaten dengan petugas Balai POM di Banyumas.		tahapan selanjutnya, yaitu pemantauan hasil penilaian, masa sanggah, dan wawancara.				
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Belum ada kendala	Perhatikan alur pelaporan yang benar hingga akhir periode. Pastikan target tahunan ini telah tercapai secara optimal.	Melaksanakan pengawasan terhadap sarana produksi pangan fortifikasi sesuai dengan ketentuan dan perencanaan yang telah ditentukan dengan mengoptimalkan sumber daya yang tersedia.	Selesai	Target tahunan telah tercapai pada bulan April 2026	s.d. TW IV 2026	Y	INS/O/02	Terdapat beberapa sarana produksi fortifikasi yang tidak beroperasi namun masih memiliki izin edar.
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di	Tidak terdapat kendala di dalam	Inovasi pelayanan publik dapat diperhatikan	Pelaksanaan KIE tatap muka	Rencana TW IV	KIE Pramuka akan mulai	Mulai September	Y	1. INF/R/02 2. INF/O/01	1. Petugas KIE tidak dapat melayani

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW II 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	wilayah kerja UPT	pencapaian nilai Effektivitas KIE	kembali dan tindaklanjutnya dapat dimaksimalkan. Isu-isu nasional dapat ditampilkan pada media sosial yang dimiliki Balai POM di Banyumas, terutama *public warning*.		2026	inklusif berjalan	2026		3. INF/S/03	permintaan KIE tatap muka yang diminta oleh stakeholder/ masyarakat. 2. Produk layanan informasi belum update status UPT dari Loka menjadi Balai. 3. Pelaksanaan KIE belum menyentuh daerah perifer.
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Tidak ada kendala yang berarti dalam melaksanakan kegiatan.	Terkait monev keamanan pangan pada Sekolah dapat berkoodinasi dengan Duren Bawor agar semua pihak yang berkepentingan mampu memberikan pendapatnya	1. Advokasi-April 2. Sosialisasi-Juni 3. Bimtek-Juni	Selesai	Monev dan Sertifikasi	TW IV (Oktober-Desember)	Y	1. INF/IT/02 2. INF/O/03 3. INF/K/04	1. Risiko pelaporan tidak tepat waktu. 2. Risiko pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal. 3. Risiko pelaksanaan kegiatan KIE yang kurang

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW II 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			sehingga meningkatkan insight baru dan bersama-sama meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan.							maksimal yang mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat yang masih kurang.
19	Jumlah desa pangan aman	Tidak ada kendala yang berarti dalam melaksanakan kegiatan.	Dapat mengajak pihak eksternal yang terkait dengan kegiatan monev keamanan pangan untuk mengikuti Duren Bawor agar mampu memberikan pendapatnya.	1. Advokasi Kelembagaan Program Keterpaduan Pangan 2. Koordinasi dengan Kader Desa Danasri Kidul Kabupaten Cilacap terkait Pengawalan program (intervensi tahun sebelumnya) 3. Bimtek Kader Desa Pangan Aman di Desa Langgongsari Kec Cilongok Kab Banyumas. 4. Bimtek	Selesai	Monev dan Pengawalan	TW IV 2026	Y	1. INF/SDM/03 2. INF/R/03 3. INF/K/03	1. GAP Kompetensi petugas KIE. 2. Kepercayaan masyarakat menurun terhadap program Desa Pangan Aman. 3. Pelaksanaan kegiatan KIE /Tahapan Desa Pangan Aman kurang maksimal.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW II 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Langgongsari Kec Cilongok Kab Banyumas						
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	Tidak ada kendala	Berkoodinasi dengan Duren Bawor agar seluruh pihak Pasar mampu mengikuti kegiatan tersebut sehingga Balai POM di Banyumas mampu mendapatkan insight baru untuk meningkatkan program.	Sosialisasi Komunitas Pasar Banyumas	Selesai	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monev di Pasar Banyumas	21 Juli 2026	Y	1. INF/IT/02 2. INF/O/03 3. INF/K/04	1. Risiko pelaporan tidak tepat waktu. 2. Risiko pelaksanaan kegiatan yang tidak sesuai dengan jadwal. 3. Risiko pelaksanaan kegiatan KIE kurang maksimal yang mengakibatkan tingkat pemahaman masyarakat masih kurang.
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh	Tidak ada kendala	Apabila ada pelaku usaha yang meminta	Kegiatan bimbingan teknis untuk UMKM	Selesai	Pendampingan terhadap UMKM untuk	Desember 2026	Y	SER/S/01	Pelaku usaha yang menjadi target

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW II 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
	rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan		untuk sertifikasi mohon untuk diterima dan dimaksimalkan output yang bisa didapatkan oleh pelaku usaha.	Pangan, Obat Bahan Alam dan Kosmetik.Audit Sertifikasi CPOBAB Bertahap terhadap peserta pendampingan UMKM OBA		mendapatkan Sertifikat CPPOB /CPOBAB/CPKB				pendampingan UMKM di tahun berjalan tidak bisa menyelesaikan proses sertifikasi CPPOB / CPOTB / CPKB
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	Situasi geokriminal atau rawan kasus di wilayah Cilacap belum kondusif untuk dilakukan penindakan karena pelaku usaha jamu bko untuk sementara ini menghentikan kegiatan produksinya	Segera dilaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan. Bisa dilakukan justifikasi secara lengkap bahwa bukan tidak melakukan operasi penindakan, namun sudah ada kegiatan akan tetapi hasilnya tidak memungkinkan pencapaian	Kegiatan pendalaman informasi sudah selesai dilaksanakan	Selesai	Pelaksanaan kegiatan operasi penindakan	Juli 2026	Y	P/H/01	Perbedaan Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang lama dengan yang terbaru. KUHAP yang sekarang berlaku yaitu Undang Undang nomor 20 tahun 2025 tentang KUHAP

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW II 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
			target.							
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	Tidak ada kendala yang berarti dalam melaksanakan kegiatan.	Dibuatkan edukasi umum seperti infografis melalui media sosial terkait dengan obat setelan. Sesuaikan kegiatan sesuai dengan perencanaan.	Kegiatan penggalangan lintas sektor dan pelaku usaha dalam rangka pencegahan penyalahgunaan obat OOT	Selesai	Penggalangan obat setelan dan akan berkoodinasi dengan tim Inspeksi.	Agustus 2026	Y	P/F/01	Adanya upaya penyuapan dari pelaku usaha saat proses operasi penindakan.
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	Tidak ada kendala	Pelayanan publik dapat dikoordinasikan oleh fungsi Infokom agar mampu memenuhi nilai yang masih rendah sebelum akhir periode tahun 2026.	Sudah dilakukan pengisian survei PEKPPP sebagai tools penilaian Indeks Pelayanan Publik, wawancara konfirmasi pengisian survey serta pengisian data dukung tambahan sesuai hasil wawancara.	Selesai	Akan melaksanakan agenda atau perencanaan kegiatan yang telah tersedia sesuai dengan timeline	Juli 2026	Y	SER/S/02	Menurunnya nilai indeks pelayanan publik Balai POM di Banyumas
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	Inovasi terkait Pelayanan	Memperbaiki penilaian yang	Pelaksanaan desk ZI dan	Selesai	Update SOP Mikro	10 Juli 2026	T	1. ZI/O/01 2. ZI/O/02	1. Penilaian penyelenggaraan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW II 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		Publik belum optimal, belum terukur dan dianggap belum berdampak langsung bagi stakeholder. Belum semua pokja melakukan pemantauan program kerja yang ditetapkan dalam renja, sehingga ada program kerja yang tidak terlaksana sesuai schedule Belum semua SOP inovasi terintegrasi pada SOP Mikro. Fungsi yang belum update SOP Mikro dan	masih rendah dan mampu dilakukan untuk periode berikutnya.	rapat progress ZI sampai dengan bulan Juni 2026						Balai POM di Banyumas yang bersih dan bebas KKN melalui pembangunan ZI menuju WBK/WBBM tidak tercapai sesuai target. 2. Inovasi masih belum memiliki dampak terukur yang dirasakan langsung masyarakat.

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW II 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		kelengkapannya (Form perubahan dan evaluasi) yaitu: Fungsi Penindakan								
26	Nilai AKIP UPT BPOM	Beberapa target RAPK tidak relevan lagi dengan target output yang turun menyesuaikan efisiensi anggaran, sehingga perlu dilakukan penyeeuaian target bulanan (RAPK)	Koordinasi oleh seluruh tim kerja untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan. Dapat dibuatkan diskusi sebelum adanya desk dari Pusat.	Pengisian RATL hasil evaluasi di SAPA APIP	Selesai	Mempersiapkan desk SAKIP Tahun 2026	Menunggu pengumuman dari Badan POM Pusat	Y	TU/O/02	Capaian kinerja, anggaran, dan output yang tidak terpenuhi
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	Deviasi penyerapan anggaran bulan Juni lebih dari 5% dikarenakan, antara lain:	Perhatikan kembali serapan anggaran yang harus dicapai dan efektifkan kembali seluruh kegiatan hingga akhir periode sehingga	1. Pemantauan realisasi penyerapan anggaran dan pengingat percepatan realiasi anggaran kepada	Selesai	Revisi RPD TW III	Juli-2026	Y	TU/KEU/02	Realisasi tidak sesuai dengan perencanaan

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW II 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
		> beberapa kegiatan keikutsertaan dari Unit kerja Pusat tentative/tidak pasti jadwal kegiatannya > KRO QCD target Perkara belum tercapai sehingga mempengaruhi pelaksanaan kegiatan dan penyerapan realisasi anggaran.	mampu terserap secara maksimal.	pengelola kegiatan/pemilik anggaran setiap hari senin tiap minggu 2. Peningkatan kompetensi PPK/PBJ administrasi pencairan anggaran belanja di inaproc melaui kegiatan HAITalk tema “Ngulik Alur Pengadaan Katalog Elektronik & Pendaftaran Kontrak pada SAKTI”.						
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	Perlu dilakukan update analisis resiko indikator kinerja utama semester II	Pembuatan risiko agar disesuaikan dengan kapabilitas sehingga mampu termitigasi.	Telah dilaksanakan sosialisasi Petunjuk Penerapan Manajemen	Selesai	Update dokumen daftar resiko	Juli-2026	Y	TU/SDM/04	Dokumentasi manajemen risiko tidak memadai

No	Indikator	Kendala / Permasalahan TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rekomendasi TW Sebelumnya (TW II 2026)	Rencana Tindak Lanjut TW Sebelumnya (TW II 2026)	Status	Progres TL Rekomendasi	*Timeline*	Apakah Sudah Dikelola Sebagai Risiko (Y/T)*	Kode Risiko	Peristiwa Risiko
				Risiko						

Tabel 3. 118 Matriks Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Evaluasi Sebelumnya Tiap Indikator Kinerja

3.3. Realisasi Anggaran

Pada Triwulan III Tahun 2026 ini terdapat perubahan anggaran. Awal Triwulan III Tahun 2026 Balai POM di Banyumas memperoleh anggaran sesuai Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor: SP DIPA-063.01.2.672844/2026 sebesar Rp 7.763.760.000,- atau tujuh miliar tujuh ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah. Dari total anggaran tersebut, total dana untuk pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Banyumas sebesar Rp 4.173.108.000,- serta total dana untuk pengelolaan sarana dan prasarana sebesar Rp 3.590.652.000,-.

Tertanggal 28 September 2026, terdapat revisi DIPA ke 08 dengan anggaran yang diterima oleh Balai POM di Banyumas sebesar Rp 8.247.972.000,- atau delapan miliar dua ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu rupiah. Penambahan anggaran disahkan melalui Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2026 Nomor SP DIPA- 063.01.2.672844/2026. Penambahan anggaran tersebut terletak pada anggaran 51 atau Belanja Gaji dan Tunjangan. Proporsi anggaran secara detail sebagai berikut:

1. Program Pengawasan Obat dan Makanan: Rp 4.173.108.000,-
2. Program Dukungan Manajemen: Rp 4.074.864.000,-

Hingga Triwulan III Tahun 2026 telah terealisasi sebesar Rp 3.641.339.658,- (44,15%) dari target serapan anggaran yang disusun internal oleh Balai POM di Banyumas sebesar Rp 3.545.239.087,-. Hal tersebut menunjukkan bahwa serapan anggaran melebihi target yang telah ditetapkan. Dari serapa anggaran berikut jumlah dana yang terserap untuk Program Pengawasan Obat dan Makanan sebesar Rp 423.759.599,- dan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 3.217.580.059,-. Anggaran akan terserap secara optimal pada akhir tahun 2026. Hal ini dipastikan dengan adanya monitoring setiap bulan terhadap anggaran dan koordinasi secara optimal baik dengan pihak internal maupun pihak eksternal terkait.

Pengelolaan anggaran di Balai POM di Banyumas selalu disesuaikan dengan prinsip-prinsip akuntabilitas dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dengan mengutamakan penggunaan anggaran secara efektif dan efisien. Berikut tabel efisiensi anggaran Balai POM di Banyumas.

a. Capaian Kinerja dan Efisiensi tiap Capaian Output Tahun sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 Balai POM di Banyumas

No	Kode	Program /Kegiatan/Output	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian			
a		b	c	d	e=(d/c*100)	f	g	h=(g/f*100)			
1	AEA.001	Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT	9	10	111,11%	5.000.000	4.714.000	94,28%	1,18	0,18	Efisien (100%)
2	BAH.001	Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang diselesaikan oleh UPT	38	38	100,00%	5.000.000	5.000.000	100,00%	1,0	0,00	Efisien (100%)
3	BDB.001	Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	0	0	0,00%	14.480.000	9.201.518	63,55%	0,0	-1,00	Tidak Efisien
4	BDB.002	Desa Pangan Aman	0	0	0,00%	22.431.000	15.588.095	69,49%	0,0	-1,00	Tidak Efisien
5	BDB.003	Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	0	0	0,00%	19.569.000	11.644.801	59,51%	0,0	-1,00	Tidak Efisien
6	BDC.001	Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE	90	120	133,33%	13.860.000	5.123.736	36,97%	3,6	2,61	Tidak Efisien (75%)
7	BIA.001	Label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diperiksa sesuai ketentuan oleh UPT BPOM	108	108	100,00%	13.387.000	7.363.600	55,01%	1,8	0,82	Efisien (88%)
8	BKB.001	Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan	0	0	0,00%	75.843.000	55.440.774	73,10%	0,0	-1,00	Tidak Efisien
9	BMB.001	Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT	8	8	100,00%	7.666.000	3.133.776	40,88%	2,4	1,45	Tidak Efisien (80%)
10	CBV.001	Prasarana Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia	0	0	0,00%	3.532.955.000	45.168.608	1,28%	0,0	-1,00	Tidak Efisien
11	PDD.001	Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	0	0	0,00%	83.534.000	55.268.764	66,16%	0,0	-1,00	Tidak Efisien
12	QCD.U06	Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan Balai POM	1	1	100,00%	104.479.000	66.636.773	63,78%	1,6	0,57	Efisien (92%)

No	Kode	Program /Kegiatan/Output	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
			Target	Realisasi	Capaian	Pagu	Realisasi	Capaian			
a		b	c	d	e=(d/c*100)	f	g	h=(g/f*100)			
		Kab Banyumas									
13	QDC.002	Sarana Pelayanan Kesehatan (RS/PKM/Klinik) yang diberikan KIE Farmakovigilans	45	45	100,00%	4.239.000	4.231.000	99,81%	1,0	0,00	Efisien (100%)
14	QDG.001	UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT	3	4	133,33%	7.986.000	4.240.000	53,09%	2,5	1,51	Tidak Efisien (80%)
15	QIA.001	Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT	36	36	100,00%	53.606.000	22.365.261	41,72%	2,4	1,40	Tidak Efisien (84%)
16	QIA.002	Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT	92	104	113,04%	30.143.000	18.908.093	62,73%	1,8	0,80	Efisien (90%)
17	QIC.001	Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	31	31	100,00%	45.135.000	30.706.500	68.03%	1,5	0,47	Efisien (92%)
18	QIC.003	Layanan pemeriksaan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa oleh UPT	3	3	100,00%	3.620.000	2.256.300	62.33%	1,6	0,60	Efisien (92%)
19	QIC.004	Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT	101	101	100,00%	130.175.000	56.768.000	43,61%	2,3	1,29	Tidak Efisien (84%)
20	EBA.956	Layanan BMN	0	0	0,00%	2.787.000	1.020.000	36,60%	0,0	-1,00	Tidak Efisien
21	EBA.994	Layanan Perkantoran UPT	0	0	0,00%	4.072.077.000	3.216.460.059	78,99%	0,0	-1,00	Tidak Efisien
Efisiensi Berdasarkan Capaian Output					1.390,82			1.270,91	1,09	0,09	Efisien (100%)

Tabel 3. 119 Capaian Kinerja dan Efisiensi tiap Capaian Output Triwulan II Tahun 2026 Balai POM di Banyumas

Berdasarkan perhitungan efisiensi anggaran hingga Triwulan III Tahun 2026 dengan output berupa capaian setiap kegiatan, Balai POM di Banyumas menghasilkan tingkat efisiensi sebesar 0,09 yang termasuk dalam kriteria 'Efisien

(100%)'. Hasil tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan kegiatan telah memenuhi kriteria efisiensi berdasarkan metode perhitungan yang digunakan. Capaian ini menjadi indikasi positif dalam pengelolaan anggaran, khususnya dalam mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Diharapkan Balai POM di Banyumas dapat menjaga konsistensi efisiensi anggaran pada Triwulan IV Tahun 2026 sekaligus memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan memberikan dukungan maksimal terhadap pencapaian target kinerja dan peningkatan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Banyumas. Secara rinci beberapa upaya yang dilakukan untuk mencapai efektivitas anggaran dengan output berupa capaian setiap kegiatan:

a. Mengoptimalkan pencapaian output melalui pelaksanaan kegiatan sesuai rencana kerja. Pelaksanaan sampling, pemeriksaan sarana produksi dan distribusi, pelayanan informasi, pendampingan UMKM, serta kegiatan penindakan diarahkan agar sesuai dengan target dan jadwal yang telah ditetapkan. Pemantauan berkala dilakukan untuk memastikan target dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia.
b. Memanfaatkan anggaran secara proporsional sesuai kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
c. Mengoptimalkan sumber daya yang tersedia untuk mengatasi keterbatasan sarana. Dalam pelaksanaan pembinaan Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas di Pasar Tanjungsari, keterbatasan sarana berupa pengeras suara dan proyektor diatasi dengan meminjam pengeras suara dari paguyuban pasar serta mengganti penggunaan proyektor dengan materi fotokopi. Langkah ini memungkinkan kegiatan tetap dilaksanakan tanpa harus menambah pengadaan sarana baru.
d. Melakukan evaluasi terhadap kesesuaian anggaran dan target output. Pada kegiatan pemeriksaan sampel makanan, terdapat kondisi anggaran yang relatif besar dibandingkan target sampel setelah penyesuaian. Oleh karena itu, telah diajukan revisi anggaran agar alokasi dana lebih sesuai dengan kebutuhan dan target output yang dapat direalisasikan.
e. Mempercepat pelaksanaan kegiatan yang belum mencapai target. Monitoring terhadap output yang belum optimal dilakukan melalui evaluasi progres fisik dan anggaran, identifikasi hambatan, serta koordinasi antar-tim kerja. Perhatian khusus diberikan pada kegiatan yang masih menunggu penyelesaian administrasi, penyesuaian anggaran, atau tahapan pelaksanaan berikutnya.
f. Menjaga konsistensi efisiensi hingga akhir tahun anggaran. Setiap tim kerja didorong untuk melaksanakan kegiatan berdasarkan perencanaan yang telah ditetapkan, memperhatikan perkembangan realisasi anggaran, serta memastikan

bahwa penghematan tidak mengurangi kualitas hasil pengawasan dan pelayanan publik.

Dengan upaya tersebut, efisiensi berdasarkan output diarahkan pada pencapaian hasil kegiatan secara optimal, pemanfaatan anggaran sesuai kebutuhan, dan penggunaan sumber daya secara tepat guna. Namun, penilaian efisiensi tetap perlu memperhatikan output yang belum terealisasi serta kesesuaian antara capaian fisik dan penggunaan anggaran.

b. Capaian Kinerja dan Efisiensi tiap Indikator Kinerja Utama sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 Balai POM di Banyumas

	Indikator	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
		Target Triwulan III 2026	Realisasi	%	Pagu	Realisasi	%			
1	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87,41	94,98	108,66	30.143.000	18.908.093	62,73 %	1,7	0,7	Efisien (90%)
2	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	0	0	0	4.239.000	4.231.000	99,81 %	0,0	-1,0	Tidak Efisien
3	Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77	83,20	108,05	36.988.140	15.432.030	41,72 %	2,6	1,6	Tidak Efisien (80%)
4	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100	100	100	536.060	223.653	41,72 %	2,4	1,4	Tidak Efisien (84%)
5	Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87	92,50	106,32	4.288.480	1.789.221	41,72 %	2.4	1.4	Tidak Efisien (84%)
6	Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96,03	97,13	101,15	8.075.000	3.508.000	43,44 %	2,3	1,3	Tidak Efisien (84%)
7	Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,67	93,75	102,27	16.684.500	12.217.500	73,23 %	1,4	0,4	Efisien (95%)

	Indikator	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
8	Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83	85,71	103,27	20.375.500	14.981.000	73,52 %	1,4	0,4	Efisien (95%)
9	Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96,09	100	104,07	72.485.750	33.176.000	45,77 %	2,3	1,3	Tidak Efisien (84%)
10	Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77,33	80,69	104,35	49.437.500	20.731.000	41,93 %	2,5	1,5	Tidak Efisien (80%)
11	Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94,38	98,97	104,86	1.800.000	0	0%	0	-1,0	Tidak Efisien
12	Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	87,36	82,41	94,33	13.387.000	7.363.600	55,01 %	1,7	0,7	Efisien (90%)
13	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	0	0	0	6.451.750	2.861.000	44,34 %	0,0	-1,0	Tidak Efisien
14	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7	7,17	102,43	83.534.000	55.268.764	66,16 %	1,5	0,5	Efisien (92%)
15	Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	0	0	0	11.793.320	4.920.357	41,72 %	0,0	-1,0	Tidak Efisien
16	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	33,30	33,30	100	3.620.000	2.256.300	62,33 %	0,0	-1,0	Tidak Efisien
17	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89,25	90,36	101,24	21.526.000	8.257.512	38,36 %	2,6	1,6	Tidak Efisien (80%)
18	Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	70	70	100	14.480.000	9.201.518	63,55 %	1,6	0,6	Efisien (92%)

	Indikator	Output			Input Anggaran			IE	TE	Capaian TE
19	Jumlah desa pangan aman	74	74	100	22.431.000	15.588.095	69,49 %	1,4	0,4	Efisien (95%)
20	Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	80	80	100	19.569.000	11.644.801	59,51 %	1,7	0,7	Efisien (90%)
21	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	75	80	106,67	7.986.000	4.240.000	53,09 %	0,0	-1,0	Tidak Efisien
22	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	55	55	100	104.479.000	66.636.773	63,78 %	1,6	0,6	Efisien (92%)
23	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50%	100	5.000.000	4.714.000	94,28 %	1,1	0,1	Efisien (100%)
24	Indeks Pelayanan Publik UPT	0	0	0	5.000.000	5.000.000	100%	0,0	-1,0	Tidak Efisien
25	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	0	0	0	3.694.457.500	179.924.210	4,87 %	0,0	-1,0	Tidak Efisien
26	Nilai AKIP UPT BPOM	0	0	0	1.154.912.500	952.684.939	82,49 %	0,0	-1,0	Tidak Efisien
27	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	0	0	0	2.797.997.000	2.158.654.905	77,15 %	0,0	-1,0	Tidak Efisien
28	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	0	0	0	36.295.000	26.925.387	74.18 %	0,0	-1,0	Tidak Efisien
Efisiensi Berdasarkan Indikator Kinerja Utama				1.946,05%			1.086,83%	1,79	**0,79**	**Efisien (90%)**

Tabel 3. 120 Capaian Kinerja dan Efisiensi tiap Indikator Kinerja Utama Triwulan III Tahun 2026 Balai POM di Banyumas

Perhitungan efisiensi mengacu pada Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 676 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Berdasarkan hasil perhitungan efisiensi anggaran sampai dengan Triwulan III Tahun 2026, dengan output berupa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU), Balai POM di Banyumas memperoleh nilai efisiensi sebesar 0,26 dan termasuk dalam kategori “Efektif (95%)”, sesuai dengan kriteria penilaian yang berlaku. Efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan tidak hanya ditentukan oleh tingkat penyerapan anggaran, tetapi juga oleh kemampuan unit kerja dalam menghasilkan output dan mencapai target kinerja yang telah ditetapkan. Efisiensi belum mencapai 100% karena banyak anggaran yang belum terserap maksimal dan capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) masih terdapat yang bersifat tahunan. Namun, menjadi sebuah perhatian bahwa Efiesiensi dengan output IKU ini mengalami kenaikan dengan penyerapan yang lebih efektif dari Triwulan sebelumnya (TW II sebesar Efisien 90%). Beberapa upaya yang telah kami laksanakan diantaranya:

a. Melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala. Evaluasi dilakukan setiap bulan terhadap perkembangan capaian IKU, realisasi anggaran, serta kesesuaian pelaksanaan kegiatan dengan target yang telah ditetapkan. Hasil evaluasi digunakan untuk mengidentifikasi indikator yang memerlukan percepatan maupun penyesuaian strategi pelaksanaan.

b. Mengoptimalkan penggunaan anggaran sesuai prioritas pencapaian kinerja. Penggunaan anggaran diarahkan pada kegiatan yang memberikan kontribusi langsung terhadap pencapaian indikator kinerja, dengan mempertimbangkan keterbatasan anggaran akibat kebijakan efisiensi dan perubahan alokasi anggaran.

c. Menyesuaikan perencanaan dengan kondisi pelaksanaan kegiatan. Terhadap target bulanan yang sudah tidak relevan dengan ketersediaan anggaran maupun target setelah efisiensi, dilakukan evaluasi untuk mengusulkan penyesuaian Rencana Aksi Perjanjian Kinerja (RAPK) agar lebih realistis dan selaras dengan target tahunan.

d. Mendorong percepatan capaian indikator yang telah menunjukkan hasil optimal. Sejumlah indikator pengawasan telah melampaui target tahunan, antara lain persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan sebesar 94,95% dari target 87,41%, persentase sampel pangan olahan berisiko

sebesar 84,05% dari target 77%, serta tingkat efektivitas KIE sebesar 90,36 dari target 89,25.

e. Meningkatkan koordinasi atas kendala anggaran dan pelaksanaan kegiatan. Koordinasi dengan unit terkait di tingkat pusat terus dilakukan untuk menindaklanjuti permasalahan anggaran, penyesuaian target, serta kebutuhan revisi anggaran yang memengaruhi pencapaian indikator kinerja.

Secara keseluruhan, upaya tersebut diarahkan agar penggunaan anggaran semakin selaras dengan capaian IKU, sehingga efisiensi tidak hanya tercermin dari penghematan anggaran, tetapi juga dari kemampuan menghasilkan capaian kinerja yang optimal dan terukur.

Berikut Perhitungan Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis:

No	Sasaran Strategis	%Capaian Output	Input (Anggaran)			IE	TE	Capaian TE
			Pagu	Realisasi	%			
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	103,32%	360,219,000	195,611,218	54.30%	1.90	0.90	Efisien (88%)
2	Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	100,00%	3,620,000	2,256,300	62.33%	1.60	0.60	Efisien (92%)
3	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	100,31%	78,006,000	44,691,926	57.29%	1.75	0.75	Efisien (90%)
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	106,67%	7,986,000	4,240,000	53.09%	2.01	1.01	Tidak Efisien (86%)
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	100,00%	104,479,000	66,636,773	63.78%	1.57	0.57	Efisien (92%)
6	Terlaksananya kegiatan pemantauan siber dan deteksi	100,00%	5,000,000	4,714,000	94.28%	1.06	0.06	Efisien (100%)

	kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif							
7	Layanan Publik UPT yang prima	0,00%	5,000,000	5,000,000	100.00%	0.00	-1.00	Tidak Efisien
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	0,00%	7,683,662,000	3,318,189,441	43.19%	0.00	-1.00	Tidak Efisien
Efisiensi Berdasarkan Sasaran Strategis		**610,30%**			**528,26%**	**1,16**	**0,16**	**Efisien (100%)**

Tabel 3. 121 Perhitungan Efisiensi Anggaran Berdasarkan Sasaran Strategis

Apabila dilihat dari perhitungan efisiensi anggaran yang berdasarkan dengan output berupa sasaran strategis, Balai POM di Banyumas dalam Triwulan III Tahun 2026 masih termasuk dalam kriteria "Efisien (100%)". Hasil tersebut menunjukkan bahwa secara agregat, pengelolaan anggaran berdasarkan sasaran strategis telah memenuhi kriteria efisiensi sesuai dengan metode perhitungan yang digunakan. Berdasarkan tabel capaian, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang output-nya berupa target tahunan, yaitu "Layanan Publik UPT yang Prima" dan "Terwujudnya Tata Kelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal", yang masing-masing menunjukkan capaian output sebesar 0,00%. Kondisi tersebut menyebabkan capaian kedua sasaran strategis tersebut belum tergambarkan secara optimal sampai dengan Triwulan III Tahun 2026. Upaya yang akan dilakukan oleh Balai POM di Banyumas untuk mencapai efektivitas secara optimal, diantaranya:

a. Memfokuskan sumber daya pada pencapaian sasaran strategis prioritas. Penggunaan anggaran diarahkan untuk mendukung efektivitas pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi, peningkatan efektivitas komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE), pendampingan UMKM, serta penindakan kejahatan di bidang obat dan makanan.
b. Mengintegrasikan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap tim kerja melaksanakan pemantauan terhadap keterkaitan kegiatan dengan indikator sasaran strategis. Evaluasi dilakukan untuk memastikan bahwa realisasi kegiatan dan anggaran memberikan kontribusi terhadap pencapaian target organisasi, bukan hanya memenuhi penyerapan anggaran.
c. Mempertahankan capaian sasaran strategis yang telah memenuhi atau melampaui target. Berdasarkan data evaluasi, beberapa indikator pengawasan dan pendampingan telah menunjukkan capaian di atas target tahunan. Capaian

tersebut perlu dipertahankan melalui pelaksanaan kegiatan yang konsisten, pengendalian mutu hasil pengawasan, dan penggunaan anggaran yang terukur.

d. Melakukan penyesuaian terhadap kebutuhan dan alokasi anggaran. Terhadap kegiatan yang mengalami perubahan target, keterbatasan anggaran, atau kendala administrasi, dilakukan koordinasi dan pengusulan revisi sesuai ketentuan. Langkah ini dimaksudkan agar anggaran dapat dimanfaatkan secara lebih tepat sasaran dan mendukung pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Dengan demikian, upaya peningkatan efisiensi berdasarkan sasaran strategis tidak hanya berorientasi pada pengendalian belanja, tetapi juga pada penguatan keterkaitan antara anggaran, pelaksanaan kegiatan, dan pencapaian hasil strategis organisasi.

BAB IV
PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dan saran yang disusun sebagai arahan langsung dari Kepala Balai POM di Banyumas. Keseluruhan poin yang tercantum merupakan hasil penelaahan atas Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2026, sehingga dapat menjadi pedoman dalam menilai capaian yang telah diraih sekaligus memberikan arah strategis bagi peningkatan pengawasan obat dan makanan di masa mendatang.

4.1 Kesimpulan

Pelaksanaan program dan kegiatan Balai POM di Banyumas sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Evaluasi kinerja menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Hingga Triwulan III Tahun 2026 secara umum menunjukkan capaian kinerja yang baik. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap enam sasaran strategis yang dapat diukur, rata-rata capaian kinerja mencapai 101,72%, dengan empat sasaran strategis memperoleh kategori Sangat Baik dan dua sasaran strategis memperoleh kategori Baik. Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen dan upaya seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Memasuki akhir Tahun 2026, perhatian perlu difokuskan pada penyelesaian seluruh target kinerja yang belum tercapai, pemenuhan target indikator yang pengukurannya dilakukan pada akhir periode, serta penyelesaian tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi, dan rekomendasi perbaikan. Setiap unit kerja perlu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target secara kuantitatif, tetapi juga menghasilkan keluaran yang berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi perlindungan masyarakat di wilayah kerja Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara.

Dari aspek pengelolaan anggaran, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III perlu terus dioptimalkan dengan tetap memperhatikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, capaian output, dan ketentuan pengelolaan keuangan negara. Memasuki Triwulan IV yang merupakan periode menuju akhir tahun anggaran,

diperlukan langkah percepatan dan pengendalian yang lebih intensif agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi menjadi aspek penting yang perlu terus diperhatikan. Seluruh jajaran Balai POM di Banyumas diharapkan dapat menjadikan hasil evaluasi Triwulan III sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan menentukan prioritas kerja pada Triwulan IV.

Dengan demikian, keberhasilan pencapaian kinerja pada akhir tahun 2026 memerlukan komitmen, kedisiplinan, koordinasi, dan sinergi seluruh pegawai serta pemangku kepentingan. Setiap unit kerja perlu memastikan bahwa sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran dimanfaatkan secara optimal untuk menyelesaikan target yang belum tercapai, menjaga kualitas hasil pengawasan, serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Banyumas.

4.2 Saran

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja Balai POM di Banyumas pada Triwulan IV Tahun 2026, Langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Setiap penanggungjawab IKU untuk dapat melakukan identifikasi terhadap indikator yang belum mencapai target, menetapkan langkah percepatan yang terukur, serta memastikan penyelesaian target sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan agar memastikan data kinerja disusun secara akurat, lengkap, konsisten, dan didukung bukti yang memadai.
3. Mengoptimalkan penyerapan dan penggunaan anggaran. Pelaksanaan anggaran agar diselaraskan dengan rencana kegiatan dan target output, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap ketentuan, serta kualitas hasil yang dihasilkan.
4. Mengintegrasikan sistem pengawasan berbasis digital untuk mempercepat proses, meningkatkan akurasi, serta memudahkan akses dan integrasi data lintas fungsi.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor. Kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya agar terus diperkuat untuk mendukung efektivitas pengawasan obat dan makanan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta memperluas dampak pembinaan kepada masyarakat dan UMKM.

6. Melakukan peningkatan inovasi dalam pelayanan publik maupun pendampingan UMKM yang berdampak nyata terhadap Masyarakat.
7. Menggiatkan peningkatan kompetensi pegawai mengikuti kebutuhan pengawasan obat dan makanan yang terkini.

LAMPIRAN

Arahan Balai POM di Banyumas Terkait Laporan Kinerja Interim Triwulan III 2026

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS

NOTA DINAS
NOMOR: PR.08.02.28B.10.26.473

Yth.	: Ketua Tim Kerja Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja Balai POM di Banyumas
Dari	: Kepala Balai POM di Banyumas
Lampiran	: -
Hal	: Arahan Pimpinan untuk Bab IV Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2026
Tanggal	: 20 Oktober 2026

Sehubungan dengan permintaan permintaan Kesimpulan dan Saran Bab IV Laporan Kinerja (Lapkin) Triwulan III Balai POM di Banyumas Tahun 2026 pada surat nota dinas nomor PR.08.02.28B1.10.26.471, berikut disampaikan arahan Pimpinan untuk Kesimpulan dan Saran Pada Bab IV Laporan Kinerja Triwulan III Tahun 2026. Untuk selanjutnya dapat dimasukkan ke dalam Laporan Kinerja Balai POM di Banyumas Triwulan III Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

KESIMPULAN:

Pelaksanaan program dan kegiatan Balai POM di Banyumas sampai dengan Triwulan III Tahun 2026 merupakan bagian dari upaya mewujudkan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan masyarakat. Evaluasi kinerja menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa seluruh sasaran strategis dan Indikator Kinerja Utama (IKU) dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kinerja, Rencana Kinerja Tahunan, dan Rencana Aksi Perjanjian Kinerja yang telah ditetapkan.

Hingga Triwulan III Tahun 2026 secara umum menunjukkan capaian kinerja yang baik. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap enam sasaran strategis yang dapat diukur, rata-rata capaian kinerja mencapai 101,72%, dengan empat sasaran strategis memperoleh kategori Sangat Baik dan dua sasaran strategis memperoleh kategori Baik. Capaian tersebut menunjukkan adanya komitmen dan upaya seluruh jajaran dalam melaksanakan tugas pengawasan obat dan makanan serta mendukung pencapaian sasaran strategis organisasi.

Memasuki akhir Tahun 2026, perhatian perlu difokuskan pada penyelesaian seluruh target kinerja yang belum tercapai, pemenuhan target indikator yang pengukurannya dilakukan pada akhir periode, serta penyelesaian tindak lanjut hasil monitoring, evaluasi, dan rekomendasi perbaikan. Setiap unit kerja perlu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan tidak hanya berorientasi pada pemenuhan target secara kuantitatif, tetapi juga menghasilkan keluaran yang berkualitas dan memberikan dampak nyata bagi perlindungan masyarakat di wilayah kerja Kabupaten Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Banjarnegara.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dari aspek pengelolaan anggaran, realisasi anggaran sampai dengan Triwulan III perlu terus dioptimalkan dengan tetap memperhatikan kesesuaian antara perencanaan, pelaksanaan kegiatan, capaian output, dan ketentuan pengelolaan keuangan negara. Memasuki Triwulan IV yang merupakan periode menuju akhir tahun anggaran, diperlukan langkah percepatan dan pengendalian yang lebih intensif agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat diselesaikan secara tepat waktu, efektif, efisien, dan akuntabel.

Selain itu, penguatan manajemen risiko, peningkatan kualitas pelaporan kinerja, serta tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi menjadi aspek penting yang perlu terus diperhatikan. Seluruh jajaran Balai POM di Banyumas diharapkan dapat menjadikan hasil evaluasi Triwulan III sebagai dasar untuk melakukan perbaikan dan menentukan prioritas kerja pada Triwulan IV.

Dengan demikian, keberhasilan pencapaian kinerja pada akhir tahun 2026 memerlukan komitmen, kedisiplinan, koordinasi, dan sinergi seluruh pegawai serta pemangku kepentingan. Setiap unit kerja perlu memastikan bahwa sisa waktu pelaksanaan tahun anggaran dimanfaatkan secara optimal untuk menyelesaikan target yang belum tercapai, menjaga kualitas hasil pengawasan, serta meningkatkan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Banyumas.

SARAN:

Dalam rangka mengoptimalkan pencapaian kinerja Balai POM di Banyumas pada Triwulan IV Tahun 2026, Langkah-langkah yang dapat dilakukan diantaranya:

1. Setiap penanggungjawab IKU untuk dapat melakukan identifikasi terhadap indikator yang belum mencapai target, menetapkan langkah percepatan yang terukur, serta memastikan penyelesaian target sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
2. Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pelaporan agar memastikan data kinerja disusun secara akurat, lengkap, konsisten, dan didukung bukti yang memadai.
3. Mengoptimalkan penyerapan dan penggunaan anggaran. Pelaksanaan anggaran agar diselaraskan dengan rencana kegiatan dan target output, dengan memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, kepatuhan terhadap ketentuan, serta kualitas hasil yang dihasilkan.
4. Mengintegrasikan sistem pengawasan berbasis digital untuk mempercepat proses, meningkatkan akurasi, serta memudahkan akses dan integrasi data lintas fungsi.
5. Meningkatkan koordinasi dan sinergi lintas sektor. Kerja sama dengan pemerintah daerah, instansi terkait, pelaku usaha, dan pemangku kepentingan lainnya agar terus diperkuat untuk mendukung efektivitas pengawasan obat dan makanan, meningkatkan kepatuhan pelaku usaha, serta memperluas dampak pembinaan kepada masyarakat dan UMKM.
6. Melakukan peningkatan inovasi dalam pelayanan publik maupun pendampingan UMKM yang berdampak nyata terhadap Masyarakat.
7. Menggiatkan peningkatan kompetensi pegawai mengikuti kebutuhan pengawasan obat dan makanan yang terkini.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama, diucapkan terima kasih.

Gidion, S.Si., M.Sc.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Surat Permintaan Perubahan Realisasi IKU Label Tembakau

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS

NOTA DINAS
NOMOR: PR.10.01.28B.09.26.395

Yth. : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM
Dari : Kepala Balai POM di Banyumas
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Perubahan Realisasi IKU Label Tembakau Pada Balai POM di Banyumas
Tanggal : 01 September 2026

Terkait dengan indikator kinerja utama Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar, Balai POM di Banyumas menyampaikan adanya perubahan realisasi capaian dari bulan Januari - Juli 2026. Berikut tabel perubahan capaian IKU tersebut.

Bulan	Target (flat)	Capaian Semula	Capaian Menjadi
Januari	87,36	91.67	100
Februari	87,36	91.67	100
Maret	87,36	91.67	91,67
April	87,36	93.75	81,25
Mei	87,36	94.17	85
Juni	87,36	94.44	87,5
Juli	87,36	95.24	83,93

Perubahan tersebut terjadi karena adanya perbedaan pemahaman terkait acuan ketepatan waktu pelaporan SIPT. Sebelumnya, PIC kami memahami bahwa batas maksimal dihitung berdasarkan akun operator dengan tenggat tanggal 5 setiap bulan. Namun, berdasarkan hasil penilaian bersama unit pengampu yakni Direktorat Pengawasan Keamanan, Mutu, dan Ekspor Impor Obat, Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif, acuan yang benar adalah pelaporan melalui akun Kepala Balai yang dikirimkan ke pusat. Nilai capaian IKU Label Tembakau yang telah diperoleh, dapat diakses pada tautan berikut: https://bit.ly/HasilPenilaianRealisasiLabelTembakau.

Perubahan akibat miskomunikasi ini menyebabkan beberapa capaian IKU mengalami peningkatan capaian (misalnya Januari dan Februari naik menjadi 100%), sementara pada bulan lain terjadi penurunan (seperti April, Mei, Juni, dan Juli).

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Oleh karena itu, kami perlu menyampaikan secara resmi agar dapat dibuka pada sistem Simetris *e-performance* untuk dilakukan penyesuaian. Penyesuaian ini diperlukan guna memastikan sinkronisasi atas data capaian kinerja sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Gidion, S.Si., M.Sc.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Surat Tanggapan dari Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM Terkait IKU Label Tembakau

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BIRO PERENCANAAN DAN KEUANGAN

NOTA DINAS
NOMOR : PR.04.02.21.09.26.510

Yth.	:	Kepala Balai POM di Banyumas
Dari	:	Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Lampiran	:	-
Hal	:	Tanggapan atas Penyampaian Perubahan Realisasi IKU Label Tembakau pada Balai POM di Banyumas
Tanggal	:	10 September 2026

Sehubungan dengan nota dinas Kepala Balai POM di Banyumas nomor PR.10.01.28B.09.26.395 tanggal 01 September 2026 perihal Penyampaian Perubahan Realisasi IKU Label Tembakau pada Balai POM di Banyumas, dengan ini kami sampaikan tanggapan sebagai berikut:

1. Berdasarkan justifikasi yang disampaikan, penyesuaian data realisasi IKU Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi sesuai Standar pada aplikasi Simetris E-Performance **dapat dilakukan** sesuai dengan perhitungan baru.
2. Penyesuaian data realisasi IKU pada poin 1 juga perlu dilakukan pada *googlesheet* Rekapitulasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan (RHPK), Laporan Evaluasi Internal (LEI) dan Laporan Kinerja (Lapkin) Interim. Untuk LEI dan Lapkin Interim, perubahan datanya dapat dilukan pada laporan triwulan III tahun 2026.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Antonius Tarigan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Surat Permintaan Perubahan Realisasi IKU Iklan

BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS

NOTA DINAS
NOMOR: PR.10.01.28B.10.26.432

Yth. : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM
Dari : Kepala Balai POM di Banyumas
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Perubahan Realisasi IKU Iklan Pada Balai POM di Banyumas
Tanggal : 02 Oktober 2026

Mengenai indikator kinerja utama Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan, Balai POM di Banyumas menyampaikan adanya perubahan realisasi dan capaian dari bulan Januari - Agustus 2026. Berikut tabel perubahan realisasi IKU Iklan.

Bulan	Target (flat)	Realisasi Semula	Realisasi Menjadi
Januari	94,38	94,54	100
Februari	94,38	94,84	100
Maret	94,38	94,42	100
April	94,38	94,42	100
Mei	94,38	94,42	100
Juni	94,38	94,42	98,52
Juli	94,38	94,42	98,71
Agustus	94,38	94,42	98,86

Berdasarkan tabel di atas, terdapat kenaikan realisasi IKU Iklan dari bulan Januari hingga Agustus Tahun 2026. Perubahan tersebut terjadi karena adanya masukan pada saat desk penilaian SAKIP oleh Inspektorat, dimana ditemukan ketidaksesuaian data yang diinput dalam kertas kerja dengan kondisi aktual.

Untuk menjaga akurasi dan konsistensi pelaporan kinerja, diperlukan penyesuaian data pada sistem Simetris *e-performance*. Sehubungan dengan hal tersebut, kami memohon dukungan Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM agar dapat membukakan akses Simetris *e-performance* sehingga pembaruan data dapat segera dilakukan sesuai hasil verifikasi.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Gidion, S.Si., M.Sc.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Dokumen Rencana Strategis Tahun 2025-2029

diakses secara lengkap pada: https://bit.ly/Renstra2025-2029_BalaiPOMBanyumas.

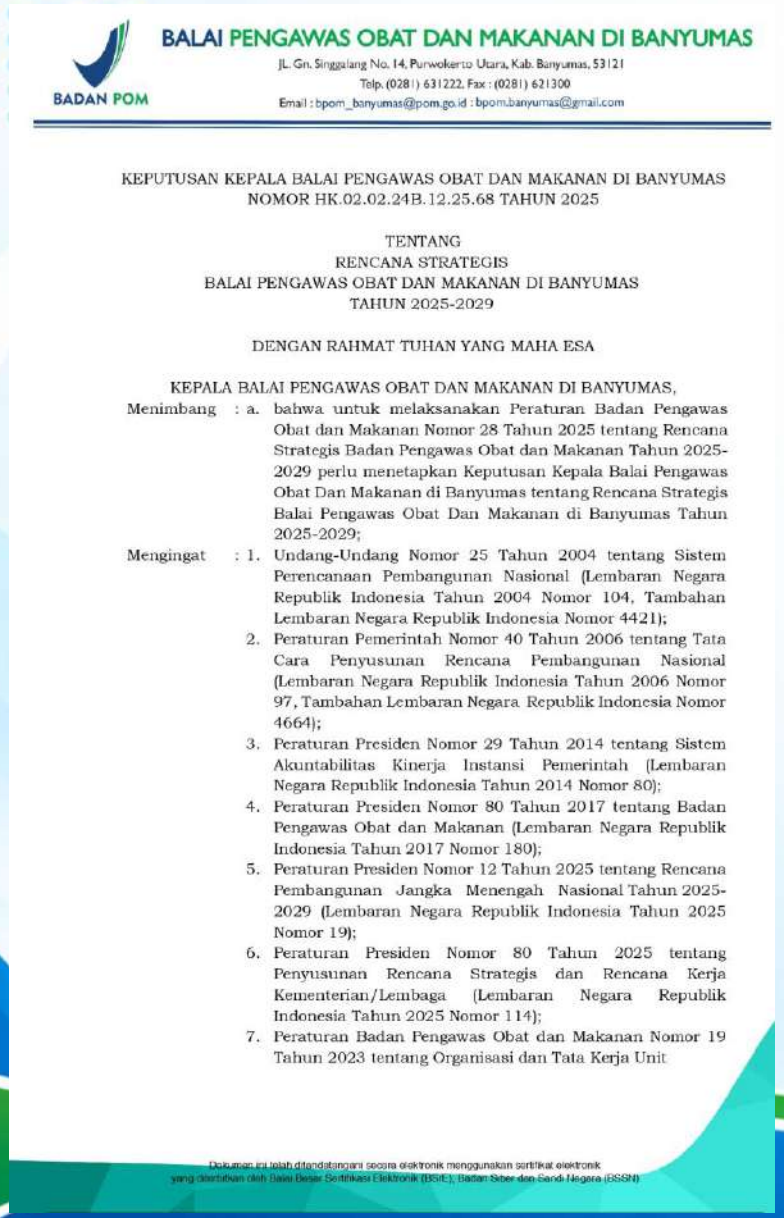

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
BADAN POM
JL. Gn. Singgalang No. 14, Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, 53121
Telp. (0281) 631222, Fax : (0281) 621300
Email : bpom_banyumas@pom.go.id : bpom.banyumas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
NOMOR HK.02.02.24B.12.25.68 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA STRATEGIS
BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Banyumas tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat Dan Makanan di Banyumas Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

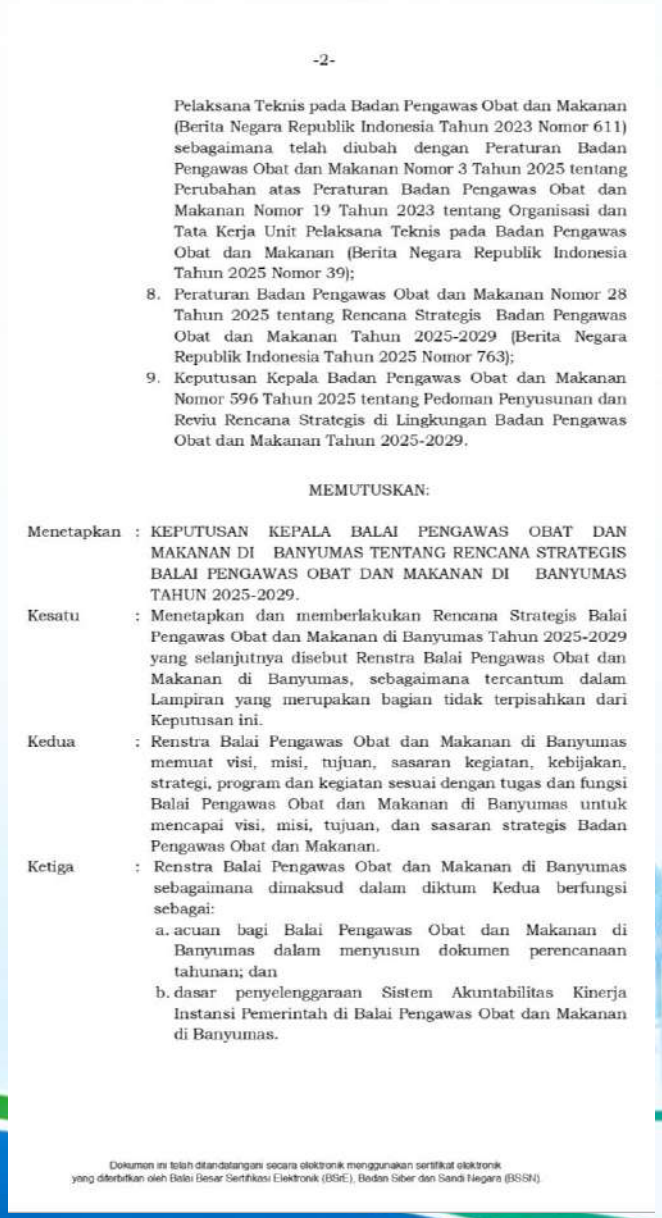

Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS TAHUN 2025-2029.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.

Ketiga : Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
a. acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Kabupaten Banyumas
Pada tanggal : 5 Desember 2025
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS,

GIDION

Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2026 Balai POM di Banyumas

BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
BADAN POM
Jl. Gn. Singgalang No. 14, Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, 53121
Telp. (0281) 631222, Fax : (0281) 621300
Email : bpom_banyumas@pom.go.id : bpom.banyumas@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
NOMOR HK.02.02.24B.09.25.56 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI BANYUMAS TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS,

Menimbang :
a. bahwa untuk penyusunan rencana kerja dan penganggaran Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas pada Tahun 2026, perlu menetapkan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas Tahun 2026;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas Tahun 2026;

Mengingat :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
2. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
3. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1569);

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

6. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1002) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 629);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 83 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan tentang Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas Tahun 2026.

Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Kinerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas Tahun 2026 yang selanjutnya disebut dengan Rencana Kinerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Kedua : Rencana Kinerja sebagaimana dimaksud dalam diktum Kesatu merupakan acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan di Banyumas dalam melakukan penyusunan rencana kerja dan penganggaran tahun 2026.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banyumas
Pada tanggal : 7 Oktober 2025
KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT
DAN MAKANAN DI BANYUMAS,

GIDION

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS
TENTANG
RENCANA KINERJA BALAI OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS TAHUN 2026
NOMOR : HK.02.02.24B.09.25.56 TAHUN 2025
TANGGAL : 7 OKTOBER 2025

RENCANA KINERJA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS TAHUN 2026

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
1	Meningkatnya efektivitas Pengawasan produk Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83,25
		Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27
		Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77
		Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100
		Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87
		Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96
		Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	86
		Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83
		Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	94,5
		Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
		Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	90,38
		Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	81
		Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100
		Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	9
		Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50
		Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	81
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan sarana produksi pangan fortifikasi	Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63
3	Meningkatnya efektivitas KIE	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	88,58
		Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2
		Jumlah desa pangan aman	1
		Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1
4	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB Pangan Olahan	37,25
5	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	77
6	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR	TARGET
	Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		
7	Layanan Publik UPT yang Prima	Indeks Pelayanan Publik UPT	3,85
8	Terwujudnya Tatakelola Pemerintah Unit Organisasi yang Optimal	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75
		Nilai AKIP UPT BPOM	78,96
		Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5
		Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2,9

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI BANYUMAS,

GIDION

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Perjanjian Kinerja (PK) Balai POM di Banyumas Tahun 2026



BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI BANYUMAS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: GIDION
Jabatan	: KEPALA BALAI POM DI BANYUMAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama	: TARUNA IKRAR
Jabatan	: KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

JAKARTA, 26 February 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
KEPALA BALAI POM DI BANYUMAS	KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
GIDION	TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
ns.pom.go.id/new/1/2026/kinerja/rekapitulasi

piran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI BANYUMAS

.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.41 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	27 %
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96.03 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.67 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.09 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77.33 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94.38 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
id/new/1/2026/kinerja/rekapitulasi

W

Simetris

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	87.36 %
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 %
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7.5 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	63 %
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.25 Nilai
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2 Jumlah Sekolah
		05 - Jumlah desa pangan aman	1 Jumlah Desa
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	37.25 %
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 %
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	91 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)
pom.go.id/new/1/2026/kinerja/rekapitulasi

AM

Simetris

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.22 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	78.96 %
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Indeks
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.9 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 8,083,498,000 (Delapan Miliar Delapan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4,492,663,000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3,590,835,000

JAKARTA, 26 February 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
KEPALA BALAI POM DI BANYUMAS	KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
GIDION	TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
pom.go.id/new/1/2026/kinerja/rekapitulasi

Perjanjian Kinerja (PK) Revisi Balai POM di Banyumas Tahun 2026

(Tanggal Revisi 5 Agustus 2026)



10.52 Simetris

BADAN POM

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI BANYUMAS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : GIDION

Jabatan : KEPALA BALAI POM DI BANYUMAS

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : TARUNA IKRAR

Jabatan : KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Dalam penggunaan anggaran dilaksanakan sesuai peraturan dan perundang-undangan yan berlaku. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

JAKARTA, 05 August 202

Pihak Pertama	Pihak Kedua
KEPALA BALAI POM DI BANYUMAS	KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
GIDION	TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
etns.pom.go.id/new/t/2026#renja/rekapitulasi

1.52 Simetris

Lampiran

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI BANYUMAS

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87.41 %
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	35 %
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77 %
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100 %
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	87 %
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder	96.03 %
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.67 %
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83 %
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.09 %
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77.33 %
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94.38 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
ns.pom.go.id/new/t/2026#renja/rekapitulasi

52 Simetris

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	87.36 %
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100 %
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	7.5 Nilai
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman	50 %
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	33.3 %
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	89.25 Nilai
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	1 Jumlah Sekolah
		05 - Jumlah desa pangan aman	1 Jumlah Desa
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	1 Jumlah Pasar
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	27.45 %
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT	100 %
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang disolesaikan sesuai standar	91 %

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
is.pom.go.id/new/t/2026#renja/rekapitulasi

Simetris

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET
	dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT		
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT	4.22 Indeks
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	75 Nilai
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM	76.3 %
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5 Indeks
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	2.9 Indeks

Alokasi anggaran tahun 2026 sebesar Rp. 7.763.760.000 (Tujuh Miliar Tujuh Ratus Enam Puluh Tiga Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

NO.	KEGIATAN	ANGGARAN
1.	DR.3165 - Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	4.173.108.000
2.	WA.6384 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	3.590.652.000

JAKARTA, 05 August 2026

Pihak Pertama	Pihak Kedua
KEPALA BALAI POM DI BANYUMAS	KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
GIDION	TARUNA IKRAR

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
pom.go.id/new/t/2026#renja/rekapitulasi

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (RAPK) Balai POM di Banyumas Tahun 2026

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI BANYUMAS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	30,143,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27	4,239,000
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	36,988,140
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	536,060
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	4,288,480
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	7,200,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder													
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	12,542,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	30,252,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	66,303,750
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	51,416,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	1,780,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	13,387,000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	5,815,250
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			6	6	6	6.5	6.5	6.5	7	7	7	7.5	83,534,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												50	11,793,320
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	12.5	37.5	63	63	63	63	63	63	63	63	3,620,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	21,526,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	5	20	25	25	25	45	70	70	95	100	2	14,480,000
		05 - Jumlah desa pangan aman	2	5	15	27	52	72	72	74	74	80	100	1	22,701,000
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	5	10	25	50	70	75	80	80	80	100	1	19,569,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	10	20	30	40	50	60	70	75	80	85	37.25	7,986,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT				10	25	35	50	60	70	77	87	100	124,648,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	91	4,125,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT														
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.22	5,000,000
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												75	4,079,550,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												78.96	1,115,699,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	2,281,306,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.9	23,069,000
														Total	8,083,498,000

BANYUMAS, 26 February 2026

KEPALA BALAI POM DI BANYUMAS

GIDION

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (RAPK) Revisi I B04-B11 Balai POM di Banyumas Tahun 2026

(Tanggal Revisi 9 Juni 2026)

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI BANYUMAS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	30,143,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												27	4,239,000
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	36,988,140
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	536,060
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	4,288,480
		06 - Persentase	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	7,200,000

State locked

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder													
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	12,542,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	30,252,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	66,303,750
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	51,416,000
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	1,780,000

State locked

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	13,387,000
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	5,815,250
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			6	6	6	6.5	6.5	6.5	7	7	7	7.5	83,534,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												50	11,793,320
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	12.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	37.5	63	3,620,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	21,526,000

State locked

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	5	20	25	25	70	70	70	70	95	100	1	14,480,000
		05 - Jumlah desa pangan aman	2	5	15	27	52	72	72	74	74	80	100	1	22,701,000
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	5	10	25	50	70	75	80	80	80	100	1	19,569,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	10	20	30	40	50	60	70	75	80	85	37.25	7,986,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT						10	15	45	55	80	85	100	124,648,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	91	4,125,000

State locked

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
	Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT														
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.22	5,000,000
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												75	4,079,550,000
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												78.96	1,115,699,000
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	2,281,306,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.9	23,069,000
														Total	8,083,498,000

BANYUMAS, 09 June 2026

KEPALA BALAI POM DI BANYUMAS

GIDION

State locked

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Rencana Aksi atas Perjanjian Kinerja (RAPK) Revisi II dengan Mengikuti Perubahan PK Balai POM di Banyumas Tahun 2026

(Tanggal Revisi 5 Agustus 2026)

BADAN POM

RENCANA AKSI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2026
BALAI POM DI BANYUMAS
BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
1.	01 - Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	01 - Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	87.41	30,143,000
		02 - Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO												35	4,239,000
		03 - Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	77	36,988,140
		04 - Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar		100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	536,060
		05 - Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	0	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	87	4,288,480
		06 - Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi yan	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	96.03	8,075,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder													
		07 - Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	91.67	16,684,500
		08 - Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	83	20,375,500
		09 - Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	96.09	72,485,750
		10 - Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	77.33	49,437,500
		11 - Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	94.38	1,800,000
		12 - Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai Standar	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	87.36	13,387,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		13 - Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT												100	6,451,750
		14 - Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			6	6	6	6.5	6.5	6.5	7	7	7	7.5	83,534,000
		15 - Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman												50	11,793,320
2.	02 - Meningkatnya Efektifitas Pengawasan Sarana Produksi Pangan Fortifikasi	01 - Persentase cakupan sarana produksi pangan fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan		0	12.5	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	33.3	3,620,000
3.	04 - Meningkatnya efektivitas KIE	01 - Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	89.25	21,526,000
		04 - Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	2	5	20	25	25	70	70	70	70	95	100	1	14,480,000
		05 - Jumlah desa pangan aman	2	5	15	27	52	72	72	74	74	80	100	1	22,431,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
		06 - Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas	2	5	10	25	50	70	75	80	80	80	100	1	19,569,000
4.	05 - Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	01 - Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan	0	10	21.67	31.67	43.33	53.33	60	70	75	80	85	27.45	7,986,000
5.	06 - Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT						10	15	45	55	80	85	100	104,479,000
6.	07 - Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	01 - Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	91	5,000,000

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET												ANGGARAN
			B01	B02	B03	B04	B05	B06	B07	B08	B09	B10	B11	B12	
7.	08 - Layanan Publik UPT yang prima	01 - Indeks Pelayanan Publik UPT												4.22	5,000,000
8.	09 - Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	01 - Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM												75	3,694,457,500
		02 - Nilai AKIP UPT BPOM												76.3	1,155,420,500
		03 - Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM												5	2,312,765,000
		04 - Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM												2.9	36,807,000
														Total	7,763,760,000

BANYUMAS, 05 August 2026

KEPALA BALAI POM DI BANYUMAS

GIDION

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

KERTAS KERJA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

BALAI POM DI BANYUMAS TRIWULAN III TAHUN 2026

Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai POM di Banyumas TW III 2026

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Belum terdapat kendala	Akan mulai kegiatan inspeksi sesuai dengan perencanaan dan ruang lingkup pada bulan berikutnya	Sampel Sediaan Farmasi.xlsx
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari		87.41	95.83	91.67	90.00	90.00	91.88	Tidak ada kendala yang berarti	Akan melakukan sampling sesuai renlak	Sampel Sediaan Farmasi.xlsx
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret		87.41	96.88	95.00	93.33	92.50	94.43	Belum terdapat kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	Sampel Sediaan Farmasi.xlsx
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April		87.41	96.88	92.86	95.00	93.85	94.64	Belum terdapat kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	Sampel Sediaan Farmasi.xlsx
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei		87.41	96.15	91.67	93.33	93.68	93.71	Belum terdapat kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	Sampel Sediaan Farmasi.xlsx
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni		87.41	94.74	90.91	96.67	91.20	93.38	Belum ada kendala	Akan melakukan sampling	Sampel Sediaan Farmasi.xlsx

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Sediaan Farmasi	Target Indikator (%)	% Sampel Obat Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Obat Bahan Alam Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (Bobot 60%)	% Sampel Suplemen Kesehatan Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	% Sampel Kosmetik Berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
										sesuai renlak	
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli		87,41	95,83	92,31	100,00	90,97	94,78	Belum ada kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sampel sediaan farmasi jan - jul.xlsx
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus		87,41	96,76	90,63	100,00	92,43	94,95	Belum ada kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sipt sampel farmasi.xlsx
Persentase Sampel Sediaan Farmasi Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September		87,41	96.09	90.48	100.00	93.33	94.98	Belum ada kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sipt sampel farmasi sept.xlsx

Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Banyumas TW III 2026

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Belum terdapat kendala	Akan mulai kegiatan inspeksi sesuai dengan perencanaan dan ruang lingkup pada bulan berikutnya	sampel Panngan olahan.xlsx
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari		77.00	100.00	100.00	100.00	28.57	28.57	0.00	82.14	Tidak ada kendala yang berarti	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sampel Panngan olahan.xlsx
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret		77.00	100.00	100.00	100.00	30.00	30.00	0.00	82.50	Belum terdapat kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sampel Panngan olahan.xlsx
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April		77.00	100.00	100.00	84.62	46.15	38.46	0.00	81.73	Belum terdapat kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sampel Panngan olahan.xlsx
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei		77.00	100.00	100.00	75.00	56.25	43.75	0.00	81.25	Belum terdapat kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sampel Panngan olahan.xlsx
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai	Juni		77.00	100.00	100.00	65.00	55.00	45.00	0.00	78.75	Belum terdapat kendala	Akan melakukan sampling	sampel Panngan olahan.xlsx

Nama Indikator	Bulan	Target Sampel Pangan Olahan	Target Indikator (%)	Kesesuaian Target Sampel (Bobot 20%)	Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	Ketepatan Pengambilan Kesimpulan (Bobot 20%)	Ketepatan Waktu Pengambilan Sampel (Bobot 10%)	Ketepatan Waktu Pelaporan Sampling dan Pengujian (Bobot 10%)	Tindak Lanjut sesuai Pedoman Tindak Lanjut/ Ketentuan lainnya (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
ketentuan												sesuai renlak	
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli		77,00	100,00	100,00	70,83	62,50	54,17	0.00	82,29	Belum terdapat kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sampel pangan jan - jul.xlsx
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus		77.00	100.00	100.00	67.86	67.86	60.71	0.00	83.04	Belum terdapat kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	Salinan sipt sampel pangan jan-agt.xlsx
Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September		77.00	100.00	100.00	65.63	68.75	65.63	0.00	83.20	Belum terdapat kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sampel pangan sd sept.xlsx

Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai POM di Banyumas TW III 2026

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Belum terdapat kendala	Akan mulai kegiatan inspeksi sesuai dengan perencanaan dan ruang lingkup pada bulan berikutnya	sampel PIRT.xlsx
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	87.00	100.00	100.00	100.00	0.00	100.00	100.00	90.00	Tidak ada kendala yang berarti	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sampel PIRT.xlsx
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	87.00	100.00	100.00	100.00	50.00	100.00	100.00	95.00	Belum ada kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sampel PIRT.xlsx
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	April	87.00	100.00	100.00	100.00	33.33	100.00	100.00	93.33	Belum ada kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sampel PIRT.xlsx
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	87.00	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00	100.00	92.50	Belum ada kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sampel PIRT.xlsx
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	87.00	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00	100.00	92.50	Belum ada kendala	Akan melakukan sampling sesuai renlak	sampel PIRT.xlsx
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	87.00	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00	100.00	92.50	Belum ada kendala	sampel sudah selesai sesuai renlak	sampel PIRT jan - jul.xlsx

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan Target Sampel PIRT (Bobot 20%)	% Kesesuaian Parameter Uji (Bobot 20%)	% Ketepatan pengambilan kesimpulan (Bobot 20%)	% Ketepatan waktu pengambilan sampel (Bobot 10%)	% Ketepatan waktu pelaporan (Bobot 10%)	% Tindak lanjut sampel PIRT (Bobot 20%)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	87.00	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00	100.00	92.50	Belum ada kendala	sampel sudah selesai sesuai renlak	sampel PIRT jan - jul.xlsx
Persentase Sampel PIRT Berisiko yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	87.00	100.00	100.00	100.00	25.00	100.00	100.00	92.50	Belum ada kendala	sampel sudah selesai sesuai renlak	sampel PIRT jan - jul.xlsx

Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder Balai POM di Banyumas TW III 2026

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pelaku usaha	% Rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh lintas sektor	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Januari	96,03	94.44	100.00	97.22	Tidak ada kendala yang berarti	Akan menjalankan kegiatan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup	Data Dukung IKU Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Februari	96,03	92.31	100.00	96.15	Tidak ada kendala	Akan menjalankan kegiatan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup	Data Dukung IKU Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Maret	96,03	93.75	100.00	96.88	Belum semua pelaku usaha mengirimkan perbaikan atas hasil pemeriksaan	Melakukan monitoring terhadap perbaikan yang seharusnya sudah dikirimkan sesuai timeline oleh pelaku usaha	Data Dukung IKU Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	April	96,03	92.75	100.00	96.38	Belum semua pelaku usaha mengirimkan perbaikan atas hasil pemeriksaan	Melakukan monitoring terhadap perbaikan yang seharusnya sudah dikirimkan sesuai timeline oleh pelaku usaha	Data Dukung IKU Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Mei	96,03	92.71	100.00	96.35	Belum semua pelaku usaha mengirimkan perbaikan atas hasil pemeriksaan	Melakukan monitoring terhadap perbaikan yang seharusnya sudah dikirimkan sesuai timeline oleh pelaku usaha	Data Dukung IKU Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Juni	96,03	92.50	100.00	96.25	Belum semua pelaku usaha mengirimkan perbaikan atas hasil pemeriksaan	Melakukan monitoring terhadap perbaikan yang seharusnya sudah dikirimkan sesuai timeline oleh pelaku usaha	Data Dukung IKU Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti	Juli	96,03	93.55	100.00	96.77	Belum semua pelaku usaha mengirimkan perbaikan atas	Melakukan monitoring terhadap perbaikan yang seharusnya sudah dikimkan sesuai timeline oleh pelaku usaha. Sejauh ini	Data Dukung IKU Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan

Stakeholder						hasil pemeriksaan	terdapat 22 CAPA yang akan didampingi oleh Balai POM di Banyumas.	
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	Agustus	96,03	92.31	100.00	96.15	Belum semua pelaku usaha mengirimkan perbaikan atas hasil pemeriksaan	Melakukan monitoring terhadap perbaikan yang seharusnya sudah dikimkan sesuai timeline oleh pelaku usaha.	Data Dukung IKU Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan
Persentase Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Ditindaklanjuti Stakeholder	September	96,03	94.25	100.00	97.13	Belum semua pelaku usaha mengirimkan perbaikan atas hasil pemeriksaan	Melakukan monitoring terhadap perbaikan yang seharusnya sudah dikimkan sesuai timeline oleh pelaku usaha.	Data Dukung IKU Keputusan/Rekomendasi Hasil Pengawasan

Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Banyumas TW III 2026

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	91.67	0	0	0	0	0	Target jumlah sarana berkurang atau terpotong dari 14 sarana menjadi 10 sarana dan tidak memungkinkan untuk setiap bulan terdapat sarana yang diperiksa.	Kendala ini akan coba didiskusikan oleh Roren bagian Perencanaan	JAN - JUN 2026
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	91.67	0	0	0	100.00	100.00	Tidak ada kendala	Akan menjalankan kegiatan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup	JAN - JUN 2026
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	91.67	0	100.00	0	100.00	100.00	Sarana UMOT dalam kondisi tidak aktif dan tidak dapat diperiksa	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang sesuai dengan renlak	JAN - JUN 2026
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	91.67	0	100.00	0	87.50	93.75	Pemeriksaan sarana IKOS bulan April berdasarkan pengaduan masyarakat. Telah dilakukan koordinasi dengan PIC Pusat dan merekomendasikan dilakukan pemeriksaan untuk capaian rutin.	Memasukan IKOS tersebut dalam renlak dengan justifikasi pengaduan masyarakat. Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi sesuai renlak.	JAN - JUN 2026
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	91.67	0	100.00	0	87.50	93.75	pemeriksaan IEBA yang akan dilakukan adalah pemeriksaan rutin sekaligus konfirmasi resertifikasi tanpa audit. Sehingga memerlukan koordinasi dengan Dit. Was OTSK	Mengajukan surat permohonan joint inspection dengan Dit. Was OTSK. Pemeriksaan rutin IEBA dilaksanakan dengan joint inspection dengan bagian Ketua Tim Kerja Kemandirian UPT.	JAN - JUN 2026
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	91.67	0	95.00	0	91.67	93.33	pemeriksaan sarana bulan Juni tidak sesuai renlak yang disampaikan ke Dit. Was OTSK dikarenakan sarana target tutup sehingga dialihkan ke sarana lain. Pemeriksaan sarana selanjutnya merupakan inspeksi rutin	Konsultasi melalui Whatsapp ke pihak Dit. Was OTSK dan diberikan arahan untuk melakukan pemeriksaan rutin sesuai kondisi	JAN - JUN 2026

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% Sarprod Obat	% Sarprod OBA	% Sarprod SK	% Sarprod Kosmetik	% Sarprod SF	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
								sekaligus untuk menindaklanjuti temuan inspeksi sebelumnya yang masih berkaitan.	terkini.	
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	91,67	0	95.00	0	91.67	93.33	Tidak ada target pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi di bulan Juli	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang sesuai dengan renlak	SARPROD FARMASI
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	91,67	0	95.00	0	91.67	93.33	Tidak ada target pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi di bulan Agustus	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang sesuai dengan renlak	SARPROD FARMASI
Persentase sarana Produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	91,67	0	95,83	0	91.67	93,75	Pemeriksaan dilaksanakan sesuai rencana dan target	Melaksanakan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang sesuai dengan renlak	SARPROD FARMASI

Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai POM di Banyumas TW III 2026

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa2	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa 2	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Januari	83.00%	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	2.00	2.00	100.00	100.00	Tidak ada kendala	Akan menjalankan kegiatan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup	JAN - JUN 2026
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Februari	83.00%	5.00	5.00	100.00	4.00	5.00	80.00	4.00	5.00	80.00	86.67	Tidak ada kendala	Akan menjalankan kegiatan pengawasan sesuai dengan ruang lingkup	JAN - JUN 2026
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Maret	83.00%	7.00	7.00	100.00	6.00	7.00	85.71	5.00	7.00	71.43	85.71	Sarana UMOT dalam kondisi tidak aktif dan tidak dapat diperiksa	Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi sediaan farmasi yang sesuai dengan renlak	JAN - JUN 2026
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai	April	83.00%	9.00	9.00	100.00	7.00	9.00	77.78	7.00	9.00	77.78	85.19	Tidak ada kendala	Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana	JAN - JUN 2026

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa2	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa 2	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
Ketentuan														produksi pangan olahan yang sesuai dengan renlak	
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Mei	83.00%	11.00	11.00	100.00	9.00	11.00	81.82	8.00	11.00	72.73	84.85	Pedoman TL dan pengisian SIPT belum dipahami dengan optimal	Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang sesuai dengan renlak	JAN - JUN 2026
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juni	83.00%	21.00	21.00	100.00	15.00	21.00	71.43	17.00	21.00	80.95	84.13	Tidak ada kendala	Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang sesuai dengan renlak	JAN - JUN 2026
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Juli	83.00	23.00	23.00	100.00	18.00	23.00	78.26	17.00	23.00	73.91	84.06	Tidak ada kendala	Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan	SARPROD PANGAN

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	Jumlah sarana yang diperiksa tepat waktu	jumlah sarana yang diperiksa	% Ketepatan waktu	Jumlah sarana yang ditindaklanjuti dengan tepat	Jumlah sarana yang diperiksa2	% Ketepatan tindak lanjut	Jumlah sarana yang diberikan grading dengan tepat	jumlah sarana yang diperiksa 2	% Evaluasi Ketepatan Grading	% Sarana Diperiksa & Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
														olahan yang sesuai dengan renlak	
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Agustus	83.00	27.00	27.00	100.00	21.00	27.00	77.78	21.00	27.00	77.78	85.19	Tidak ada kendala	Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang sesuai dengan renlak	SARPROD PANGAN
Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (termasuk IRTP) yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	September	83.00	28.00	28.00	100.00	22.00	28.00	78.57	22.00	28.00	78.57	85.71	Tidak ada kendala	Melanjutkan pelaksanaan kegiatan pemeriksaan sarana produksi pangan olahan yang sesuai dengan renlak	SARPROD PANGAN

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan Balai POM di Banyumas TW III 2026

Nama Indikator	Bulan	Target	% Sardis Obat	% Sardis OBA	% Sardis SK	% Sardis Kosmetik	% Sardis	Kendala	RTL	Link Data Dukung*
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Januari	96,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian	DADUK IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Februari	96,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian	DADUK IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Maret	96,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian	DADUK IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	April	96,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian	DADUK IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Mei	96,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian	DADUK IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juni	96,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian	DADUK IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Juli	96,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian	DADUK IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Agustus	96,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian	DADUK IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	September	96,09	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi sediaan farmasi yang sudah disetujui oleh roren dan masing-masing kedeputian	DADUK IKU Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan

Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan Balai POM di Banyumas TW III 2026

Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Waktu (Bobot 10%)	% Sardis PO	Kendala	RTL	Link Data Dukung
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Januari	77,33	9	9	20,00	7	9	54,44	8	9	8,89	83,33	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang sudah disetujui oleh roren dan kedeputian 3	DADUK IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Februari	77,33	13	15	17,33	10	13	53,85	10	13	7,69	78,87	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang sudah disetujui oleh roren dan kedeputian 4	DADUK IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Maret	77,33	26	23	20,00	19	26	51,15	19	26	7,31	78,46	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang sudah disetujui oleh roren dan kedeputian 3	DADUK IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	April	77,33	27	24	20,00	20	27	51,85	20	27	7,41	79,26	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang sudah disetujui oleh roren dan kedeputian 4	DADUK IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Waktu (Bobot 10%)	% Sardis PO	Kendala	RTL	Link Data Dukung
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Mei	77,33	28	25	20,00	21	28	52,50	21	28	7,50	80,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang sudah disetujui oleh roren dan kedeputian 5	DADUK IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juni	77,33	28	25	20,00	21	28	52,50	21	28	7,50	80,00	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang sudah disetujui oleh roren dan kedeputian 6	DADUK IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Juli	77,33	29	26	20,00	22	29	53,10	22	29	7,59	80,69	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang sudah disetujui oleh roren dan kedeputian 7	DADUK IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan	Agustus	77,33	29	26	20,00	22	29	53,10	22	29	7,59	80,69	Belum ada kendala	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang sudah disetujui oleh roren dan kedeputian 8	DADUK IKU Persentase sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan
Persentase sarana distribusi Pangan Olahan	September	77,33	29	26	20,00	22	29	53,10	22	29	7,59	80,69	Belum ada	Melakukan pemeriksaan sarana distribusi pangan	DADUK IKU Persentase

Nama Indikator	Bulan	Target	Jumlah Sarana yang Diperiksa	Target Jumlah Sarana yang Diperiksa sesuai Renlak	% Pemenuhan Target Sarana yang Diperiksa (Bobot 20%)	Jumlah Sarana yang Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Tindak Lanjut (Bobot 70%)	Jumlah Sarana yang Diperiksa dan Dilaporkan Tepat Waktu	Jumlah Sarana yang Diperiksa	% Ketepatan Waktu (Bobot 10%)	% Sardis PO	Kendala	RTL	Link Data Dukung
(termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan													kendala	olahan berdasarkan jumlah target pemeriksaan sarana distribusi pangan olahan yang sudah disetujui oleh roren dan kedeputian 8	sarana distribusi Pangan Olahan (termasuk PIRT) yang diperiksa sesuai ketentuan

Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan Balai POM di Banyumas TW III 2026

Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO	Kendala	RTL	Link Data Dukung
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Januari	94,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Akan melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak	https://drive.google.com/drive/folders/1KD8Na6cscuirYM1B2nMuOWKqkN--bvhu
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Februari	94,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Akan melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak	https://drive.google.com/drive/folders/1KD8Na6cscuirYM1B2nMuOWKqkN--bvhu
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Maret	94,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Akan melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak	https://drive.google.com/drive/folders/1KD8Na6cscuirYM1B2nMuOWKqkN--bvhu
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	April	94,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Akan melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak	https://drive.google.com/drive/folders/1Axo-8Mf6esQUZbMmtkFOx-X3nUO1Y-5J
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Mei	94,38	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Akan melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak	https://drive.google.com/drive/folders/1Axo-8Mf6esQUZbMmtkFOx-X3nUO1Y-5J
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juni	94,38	92,59	100,00	100,00	100,00	100,00	98,52	Belum ada kendala	Akan melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak	https://drive.google.com/drive/folders/1Axo-8Mf6esQUZbMmtkFOx-X3nUO1Y-5J
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Juli	94,38	93,55	100,00	100,00	100,00	100,00	98,71	Belum ada kendala	Akan melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak	https://drive.google.com/drive/folders/1JyBwOfbq6xLLaREkmL-TYHePOjO9vsLG

Nama Indikator	Bulan	Target	% Iklan Obat	% Iklan Kos	% Iklan OBA	% Iklan SK	% Iklan PO	% Iklan SF dan PO	Kendala	RTL	Link Data Dukung
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	Agustus	94,38	94,29	100,00	100,00	100,00	100,00	98,86	Belum ada kendala	Akan melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak	https://drive.google.com/drive/folders/1JyBwOfbq6xLLaREkmL-TYHePOjO9vsLG
Persentase Iklan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Diawasi Sesuai Ketentuan	September	94,38	94,87	100,00	100,00	100,00	100,00	98,97	Belum ada kendala	Akan melakukan pengawasan iklan sediaan farmasi dan pangan olahan sesuai renlak	https://drive.google.com/drive/folders/1JyBwOfbq6xLLaREkmL-TYHePOjO9vsLG

Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan Balai POM di Banyumas TW III 2026

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kendala	RTL	Link Data Dukung
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Januari	2%	2%				0.02	0	Tidak ada kendala	Koordinasi kepada lintas sektor untuk pelaksanaan program PJAS Aman	https://drive.google.com/drive/folders/18ipsLbTkcNZmtWUBR-ue4BWYqhGjT4Rw?usp=drive_link
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Februari	5%	5%				0.05	0	Sinkronisasi jadwal petugas dan jadwal dinas terkait untuk dapat melakukan koordinasi	Advokasi kelembagaan (penentuan secara resmi lokus sekolah yang diintervensi) pada Bulan April 2026	https://drive.google.com/drive/folders/18ipsLbTkcNZmtWUBR-ue4BWYqhGjT4Rw?usp=drive_link
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Maret	20%	20%				0.20	0	Tidak ada kendala yang berarti	1. Advokasi (April) 2. Sosialisasi (April-Juni) 3. Bimtek (Juli-Agustus) 4. Monev (November-Desember)	https://drive.google.com/drive/folders/18ipsLbTkcNZmtWUBR-ue4BWYqhGjT4Rw?usp=drive_link
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	April	25%	25%				0.25	0	Tidak ada kendala yang berarti	2. Sosialisasi Keamanan Pangan (Juni)	https://drive.google.com/drive/folders/18ipsLbTkcNZmtWUBR-ue4BWYqhGjT4Rw?usp=drive_link
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan	Mei	25%	25%				0.25	0	Tidak ada kendala yang berarti	2. Sosialisasi Keamanan Pangan (Juni)	https://drive.google.com/drive/folders/18ipsLbTkcNZmtWUBR-ue4BWYqhGjT4Rw?usp=drive_link

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kendala	RTL	Link Data Dukung
Keamanan Pangan											
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juni	70%	25%	20%	25%		0.70	0	Tidak ada kendala yang berarti	Pendampingan Kick-off Program PJAS di Sekolah Intervensi, dan Juli-Oktober (Tahap Monev dan Sertifikasi)	https://drive.google.com/drive/folders/18ipsLbTkcNZmtWUBR-ue4BWYqhGjT4Rw?usp=drive_link
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Juli	70%	25%	20%	25%		0.70	0	Tidak ada kendala yang berarti	Pendampingan Program PJAS secara daring maupun luring hingga awal TW IV 2026	https://drive.google.com/drive/folders/18ipsLbTkcNZmtWUBR-ue4BWYqhGjT4Rw?usp=drive_link
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Agustus	70%	25%	20%	25%		0.70	0	Tidak ada kendala yang berarti	Pendampingan Program PJAS secara daring maupun luring hingga awal TW IV 2026, Dukungan dalam program Gebyar PJAS di SD Target pada akhir Sep 2026	https://drive.google.com/drive/folders/18ipsLbTkcNZmtWUBR-ue4BWYqhGjT4Rw?usp=drive_link
Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	September	70%	25%	20%	25%		0.70	0	Tidak ada kendala yang berarti	Pendampingan Program PJAS secara daring maupun luring hingga awal TW IV 2026, Dukungan dalam program Gebyar PJAS di SD Target pada Awal	https://drive.google.com/drive/folders/18ipsLbTkcNZmtWUBR-ue4BWYqhGjT4Rw?usp=drive_link

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Lintas Sektor Program SAPA Sekolah	Sosialisasi Keamanan Pangan (Sesuai Batch)	Bimbingan Teknis Keamanan Pangan untuk Kader Keamanan Pangan Sekolah (Sesuai Batch)	Monitoring dan Sertifikasi Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan	Realisasi	Total Jumlah Sekolah yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	Kendala	RTL	Link Data Dukung
										Oktober 2026 (perubahan jadwal dari sebelumnya september). Kegiatan ini sekaligus sebagai Monev	

Jumlah Desa Pangan Aman Balai POM di Banyumas TW III 2026

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Kelembagaan Desa (25%)	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (25%)	Bimtek Komunitas (20%)	Monitoring dan Evaluasi (Pertemuan Lintas Sektor) (20%)	Pengawalan (10%)	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kendala	RTL	Link Data Dukung
Jumlah Desa Pangan Aman	Januari	2	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00		Kendala : tidak ada Output 1 desa dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Januari a. Persiapan dan Penunjukan PIC b. Sosialisasi program Desa, Pasar, Sekolah pada tanggal 22 Januari Pelaksanaan kegiatan tahapan desa : 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan	Koordinasi terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya GKPD, meliputi Bapperida Banyumas, Dinpermades Banyumas dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas	Desa Pangan Aman 2026
Jumlah Desa Pangan Aman	Februari	5	5.00	0.00	0.00	0.00	0	5.00		Kendala : Sinkronisasi jadwal petugas dan jadwal dinas terkait untuk dapat melakukan koordinasi Output 1 desa dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan	Akan dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait sebelum adanya tanda tangan komitmen pada bulan April dan Setda Banyumas akan memfasiltasi kegiatan tersebut	Desa Pangan Aman 2026

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Kelembagaan Desa (25%)	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (25%)	Bimtek Komunitas (20%)	Monitoring dan Evaluasi (Pertemuan Lintas Sektor) (20%)	Pengawalan (10%)	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kendala	RTL	Link Data Dukung
										Februari melaksanakan terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya GKPD, meliputi Bapperida Banyumas, Dinpermades Banyumas dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas Pelaksanaan kegiatan tahapan desa : 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan		
Jumlah Desa Pangan Aman	Maret	15	15.00	0.00	0.00	0.00	0	15.00		Output 1 desa dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Februari melaksanakan terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya GKPD, meliputi Bapperida Banyumas, Dinpermades Banyumas dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas Pelaksanaan kegiatan	Telah dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait sebelum adanya tanda tangan komitmen pada bulan April dan Setda Banyumas akan memfasiltasi kegiatan tersebut	Desa Pangan Aman 2026

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Kelembagaan Desa (25%)	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (25%)	Bimtek Komunitas (20%)	Monitoring dan Evaluasi (Pertemuan Lintas Sektor) (20%)	Pengawalan (10%)	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kendala	RTL	Link Data Dukung
										tahapan desa : 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan Melakukan persiapan kegiatan Advokasi : 1. Permohonan fasilitasi ke Setda Banyumas 2. Permohonan dukungan kepada Bupati 3. Permohonan sambutan kepada Bupati dan narasumber kepada Sekda 4. Menyiapkan administrasi kegiatan.		
Jumlah Desa Pangan Aman	April	27	25.00	0.00	0.00	0.00	2.00	27.00		Output 1 desa dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Februari melaksanakan terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya GKPD, meliputi Bapperida Banyumas, Dinpermades Banyumas dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas	1. Advokasi Kelembagaan Program Keterpaduan Pangan Pangan 8 April 2026 2.Koordinasi dengan Kader Desa Danasri Kidul Kab Cilacap terkait engawalan program (intervensi tahun sebelumnya	Desa Pangan Aman 2026

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Kelembagaan Desa (25%)	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (25%)	Bimtek Komunitas (20%)	Monitoring dan Evaluasi (Pertemuan Lintas Sektor) (20%)	Pengawalan (10%)	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kendala	RTL	Link Data Dukung
										Pelaksanaan kegiatan tahapan desa : 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan		
Jumlah Desa Pangan Aman	Mei	52	25.00	25.00	0.00	0.00	2	52.00		Output 1 desa dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Februari melaksanakan terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya GKPD, meliputi Bapperida Banyumas, Dinpermades Banyumas dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas Pelaksanaan kegiatan tahapan desa : 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan	1. Advokasi Kelembagaan Program Keterpaduan Pangan Pangan 8 April 2026 2.Koordinasi dengan Kader Desa Danasri Kidul Kab Cilacap terkait engawalan program (intervensi tahun sebelumnya) 3. Bimtek Kader Desa Pangan 20 Mei 2026	Desa Pangan Aman 2026
Jumlah Desa	Juni	72	25.00	25.00	20.00	0.00	2	72.00		Output 1 desa dinilai pada akhir tahun berjalan, namun	1. Advokasi Kelembagaan Program Keterpaduan	Desa Pangan Aman 2026

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Kelembagaan Desa (25%)	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (25%)	Bimtek Komunitas (20%)	Monitoring dan Evaluasi (Pertemuan Lintas Sektor) (20%)	Pengawalan (10%)	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kendala	RTL	Link Data Dukung
Pangan Aman										dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Februari melaksanakan terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya GKPD, meliputi Bapperida Banyumas, Dinpermades Banyumas dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas Pelaksanaan kegiatan tahapan desa : 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan	Pangan Pangan 8 April 2026 2.Koordinasi dengan Kader Desa Danasri Kidul Kab Cilacap terkait engawalan program (intervensi tahun sebelumnya) 3. Bimtek Kader Desa Pangan 20 Mei 2026 4. Bimtek Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 17 Juni 2026	
Jumlah Desa Pangan Aman	Juli	72	25.00	25.00	20.00	0.00	2	72.00		Output 1 desa dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Februari melaksanakan terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya GKPD, meliputi Bapperida Banyumas, Dinpermades Banyumas dan Dinas Ketahanan Pangan dan	1. Advokasi Kelembagaan Program Keterpaduan Pangan Pangan 8 April 2026 2.Koordinasi dengan Kader Desa Danasri Kidul Kab Cilacap terkait engawalan program (intervensi tahun sebelumnya) 3. Bimtek Kader Desa Pangan 20 Mei 2026	Desa Pangan Aman 2026

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Kelembagaan Desa (25%)	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (25%)	Bimtek Komunitas (20%)	Monitoring dan Evaluasi (Pertemuan Lintas Sektor) (20%)	Pengawalan (10%)	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kendala	RTL	Link Data Dukung
										Perikanan Banyumas Pelaksanaan kegiatan tahapan desa : 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan	4. Bimtek Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 17 Juni 2026	
Jumlah Desa Pangan Aman	Agustus	74	25.00	25.00	20.00	0.00	4	74.00		Output 1 desa dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Februari melaksanakan terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya GKPD, meliputi Bapperida Banyumas, Dinpermades Banyumas dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas Pelaksanaan kegiatan tahapan desa : 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan	1. Advokasi Kelembagaan Program Keterpaduan Pangan Pangan 8 April 2026 2.Koordinasi dengan Kader Desa Danasri Kidul Kab Cilacap terkait engawalan program (intervensi tahun sebelumnya) 3. Bimtek Kader Desa Pangan 20 Mei 2026 4. Bimtek Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 17 Juni 2026	Desa Pangan Aman 2026

Nama Indikator	Bulan	Target	Advokasi Kelembagaan Desa (25%)	Pelatihan Kader Keamanan Pangan Desa (25%)	Bimtek Komunitas (20%)	Monitoring dan Evaluasi (Pertemuan Lintas Sektor) (20%)	Pengawalan (10%)	Realisasi	Jumlah Desa Pangan Aman	Kendala	RTL	Link Data Dukung
Jumlah Desa Pangan Aman	September	74	25.00	25.00	20.00	0.00	4	74.00		Output 1 desa dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Februari melaksanakan terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya GKPD, meliputi Bapperida Banyumas, Dinpermades Banyumas dan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Banyumas Pelaksanaan kegiatan tahapan desa : 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan	1. Advokasi Kelembagaan Program Keterpaduan Pangan Pangan 8 April 2026 2.Koordinasi dengan Kader Desa Danasri Kidul Kab Cilacap terkait engawalan program (intervensi tahun sebelumnya) 3. Bimtek Kader Desa Pangan 20 Mei 2026 4. Bimtek Komunitas dan Pemberdayaan Masyarakat Desa 17 Juni 2026 5. Melaksanakan koordinasi persiapan pelaksanaan Monev Desa Pangan Aman di Langgongsari yang direncanakan akan dilaksanakan bulan November 2026 dengan mengundang lintas sekltor	Desa Pangan Aman 2026

Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas Balai POM di Banyumas TW III 2026

Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala	RTL	Link Data Dukung
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Januari	2	2.00	0.00	0.00	0.00	2.00		Kendala : tidak ada Output 1 pasar dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Januari a. Persiapan dan Penunjukan PIC b. Sosialisasi program Desa, Pasar, Sekolah pada tanggal 22 Januari 2026 Pelaksanaan kegiatan tahapan pasar: 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar 3. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar 4. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring dan Evaluasi 5. Pengawalan	Koordinasi terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya PPABK, meliputi DinkopUKM dan Dinas Kesehatan Banyumas.	1. JANUARI
Jumlah Pasar Pangan Aman	Februari	5	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00		Kendala : Sinkronisasi jadwal petugas dan jadwal dinas terkait untuk dapat melakukan koordinasi	Akan dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait sebelum adanya tanda tangan komitmen pada bulan April dan	2. FEBRUARI

Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala	RTL	Link Data Dukung
Berbasis Komunitas									Output 1 pasar dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Bulan Februari melaksanakan terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya PPABK, meliputi DinkopUKM dan Dinas Kesehatan Banyumas. Pelaksanaan kegiatan tahapan pasar: 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan	Setda Banyumas akan memfasiltasi kegiatan tersebut	
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Maret	10	10.00	0.00	0.00	0.00	10.00		Kendala: Jadwal fasilitasi program GERMAS SAPA Balai POM di Banyumas yang berubah menyesuaikan dengan jadwal kegiatan sekretariat daerah Kabupaten Banyumas Output 1 pasar dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di	Telah dilaksanakan sosialisasi kepada seluruh stakeholder terkait sebelum adanya tanda tangan komitmen pada bulan April dan Setda Banyumas akan memfasiltasi kegiatan tersebut	3. MARET

Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala	RTL	Link Data Dukung
									nilai sebagai capaian. Bulan Maret melaksanakan fasilitasi program GERMAS SAPA Balai POM di Banyumas dari Sekretariat Daerah Kabupaten Banyumas terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya PPABK. Pelaksanaan kegiatan tahapan pasar: 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Kader Keamanan Daerah 3. Bimtek Komunitas 4. Monev 5. Pengawalan Dilakukan persiapan kegiatan Advokasi Kelembagaan.		
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	April	25	25.00	0.00	0.00	0.00	0.00		Kendala: Tidak ada kendala Output 1 pasar dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Pada 8 April 2026, telah diaksanakan advokasi kelembagaan program GERMAS SAPA Balai POM di Banyumas terhadap	Telah dilaksanakan advokasi kelembagaan pada 8 April 2026 dan koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan Bimtek Komunitas tanggal 27 April 2026. Bimtek rencananya dilaksanakan tanggal 12 Mei 2026.	4. APRIL

Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala	RTL	Link Data Dukung
									instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya PPABK. Pelaksanaan kegiatan tahapan pasar: 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Komunitas 3. Sosialisasi 4. Monev 5. Pengawalan Pada 27 April 2026, dilakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, dan UKMP dan Pengelola Pasar Banyumas terkait pelaksanaan Bimtek Komunitas pasar.		
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Mei	50	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00		Kendala: Tidak ada kendala Output 1 pasar dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Pada 8 April 2026, telah diaksanakan advokasi kelembagaan program GERMAS SAPA Balai POM di Banyumas terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya PPABK.	Telah dilaksanakan: 1. Advokasi kelembagaan pada 8 April 2026, 2. Koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan Bimtek Komunitas tanggal 27 April 2026, 3. Bimtek rencananya dilaksanakan tanggal 12 Mei 2026.	5. MEI

Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala	RTL	Link Data Dukung
									Pelaksanaan kegiatan tahapan pasar: 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Komunitas 3. Sosialisasi 4. Monev 5. Pengawalan Pada 27 April 2026, dilakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, dan UKMP dan Pengelola Pasar Banyumas terkait pelaksanaan Bimtek Komunitas pasar.		
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juni	70	0.00	0.00	70.00	0.00	0.00		Kendala: Tidak ada kendala Output 1 pasar dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Pada 8 April 2026, telah diaksanakan advokasi kelembagaan program GERMAS SAPA Balai POM di Banyumas terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya PPABK. Pelaksanaan kegiatan tahapan	Telah dilaksanakan: 1. Advokasi kelembagaan pada 8 April 2026, 2. Koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan Bimtek Komunitas tanggal 27 April 2026, 3. Bimtek rencananya dilaksanakan tanggal 12 Mei 2026. 4. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar tanggal 23 Juni 2026	6. JUNI

Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala	RTL	Link Data Dukung
									pasar: 1. Advokasi koordinasi kelembagaan 2. Bimtek Komunitas 3. Sosialisasi 4. Monev 5. Pengawalan Pada 27 April 2026, dilakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, dan UKMP dan Pengelola Pasar Banyumas terkait pelaksanaan Bimtek Komunitas pasar.		
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Juli	75	0.00	0.00	0.00	75.00	0.00		Kendala: Tidak ada kendala Output 1 pasar dinilai pada akhir tahun berjalan, namun dalam hal penilaian, progress pelaksanaan tiap tahapan di nilai sebagai capaian. Pada 8 April 2026, telah diaksanakan advokasi kelembagaan program GERMAS SAPA Balai POM di Banyumas terhadap instansi/stakeholder terkait mengenai program keterpaduan pangan salah satunya PPABK. Pelaksanaan kegiatan tahapan pasar: 1. Advokasi koordinasi kelembagaan	Telah dilaksanakan: 1. Advokasi kelembagaan pada 8 April 2026, 2. Koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan Bimtek Komunitas tanggal 27 April 2026, 3. Bimtek rencananya dilaksanakan tanggal 12 Mei 2026. 4. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar tanggal 23 Juni 2026 5. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monev tanggal 21 Juli 2026	7. JULI

Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala	RTL	Link Data Dukung
									2. Bimtek Komunitas 3. Sosialisasi 4. Monev 5. Pengawalan Pada 27 April 2026, dilakukan koordinasi dengan Dinas Koperasi, dan UKMP dan Pengelola Pasar Banyumas terkait pelaksanaan Bimtek Komunitas pasar.		
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Agustus	80	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00		Pengelola Pasar sudah dipindahtugaskan sehingga kader lama yg tersisa dari Pasar yang sudah diintervensi hanya 1 (satu) orang. Hal tersebut berpengaruh pada pemahaman pengelola pasar terkait adanya program PPABK pada Pasar Tanjungsari, Cilacap	Telah dilaksanakan: 1. Advokasi kelembagaan pada 8 April 2026, 2. Koordinasi dengan lintas sektor terkait pelaksanaan Bimtek Komunitas tanggal 27 April 2026, 3. Bimtek rencananya dilaksanakan tanggal 12 Mei 2026. 4. Sosialisasi Keamanan Pangan kepada Komunitas Pasar tanggal 23 Juni 2026 5. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monev tanggal 21 Juli 2026 6. Pengawalan Pasar Intervensi Tahun 2025 tanggal 25 Agustus 2026	8. AGUSTUS
Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	September	80	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00		Pasar Tanjungsari tidak memiliki inventaris berupa speaker dan proyektor, namun sudah disiasati dengan meminjam speaker pada paguyubanpasar dan mengganti penggunaan	Telah dilaksanakan: 1. Advokasi kelembagaan pada 8 April 2026 2. Koordinasi pelaksanaan kegiatan Bimtek tanggal 27 April 2026	9. SEPTEMBER

Nama Indikator	Bulan	Target	Forum advokasi Komitmen Pemda dan Lintas Sektor Pasar	Bimtek dan Penyuluhan Komunitas Pasar	Sosialisasi Keamanan Pangan Kepada Komunitas Pasar	Pengawasan Keamanan Pangan dan Monitoring evaluasi	Realisasi	Total Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	Kendala	RTL	Link Data Dukung
									proyektor dengan memberikan fotokopi materi kepada peserta Bimtek Pengawalan	3. Bimtek Pengelola Pasar pada 12 Mei 2026. 4. Sosialisasi Komunitas Pasar 23 Juni 2026 5. Pengawasan Keamanan Pangan dan Monev 21 Juli 2026 6. Pengawalan Pasar Intervensi Tahun 2025 25 Agustus 2026 7. Bimtek Pengawalan Pasar Intervensi Tahun 2025 22 September 2026	

Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB Balai POM di Banyumas TW III 2026

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan (Jan-Nov) Target UMKM selama 5 tahun (Des)	Link Data Dukung
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Januari	0	0.00	0.00	0.00			
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Februari	10	10.00	10.00	10.00	10.00	3	https://drive.google.com/drive/folders/1fdDBsR42XKqaz9FOGDEjEcp-Dg3fl2zX?usp=drive_link
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Maret	20	25.00	30.00	10.00	21.67	3	https://drive.google.com/drive/folders/1fdDBsR42XKqaz9FOGDEjEcp-Dg3fl2zX?usp=drive_link
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	April	30	35.00	30.00	30.00	31.67	3	https://drive.google.com/drive/folders/1fdDBsR42XKqaz9FOGDEjEcp-Dg3fl2zX?usp=drive_link
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Mei	40	45.00	45.00	40.00	43.33	3	https://drive.google.com/drive/folders/1fdDBsR42XKqaz9FOGDEjEcp-Dg3fl2zX?usp=drive_link
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juni	50	50.00	60.00	50.00	53.33	3	https://drive.google.com/drive/folders/1fdDBsR42XKqaz9FOGDEjEcp-Dg3fl2zX?usp=drive_link
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Juli	60	60.00	70.00	60.00	63.33	3	https://drive.google.com/drive/folders/1-AZyebOoO7gAaObvq8fS-tRBYBcNZDOB?usp=drive_link
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	Agustus	70	70.00	80.00	70.00	73.33	3	https://drive.google.com/drive/folders/1-AZyebOoO7gAaObvq8fS-tRBYBcNZDOB?usp=drive_link

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator	% UMKM Pangan Olahan	% UMKM OBA	% UMKM Kosmetik	Realisasi	Target Jumlah UMKM di tahun berjalan (Jan-Nov) Target UMKM selama 5 tahun (Des)	Link Data Dukung
Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik, dan/atau IP-CPPOB	September	75	75.00	85.00	80.00	80.00	3	https://drive.google.com/drive/folders/1-AZyebOoO7gAaObvq8fS-tRBYBcNZDOB?usp=drive_link

Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Balai POM di Banyumas TW III 2026

Bulan	Target Indikator	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	**Nilai Realisasi SPDP**	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	**Nilai Realisasi Tahap I**	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	**Nilai Realisasi P21**	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	**Nilai Realisasi Tahap II**	% Keberhasilan Perkara	Kendala	RTL
Januari	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Belum ada kendala	Operasi Penindakan dilaksanakan di TW 2
Februari	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Tidak ada kendala	Operasi Penindakan dilaksanakan di TW 2
Maret	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Tidak ada kendala yang berarti	Operasi Penindakan dilaksanakan di TW 2
April	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Tidak ada kendala yang berarti	Operasi Penindakan dilaksanakan di TW 2
Mei	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Sedang proses revisi anggaran dan target bulanan pada RAPK	Perubahan target capaian perkara per bulan sudah diusulkan ke Roren
Juni	10	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00	Pada tanggal 26 februari 2026 sudah dilakukan operasi penertiban terhadap kegiatan produksi obat tradisional	Perkuat justifikasi pada pelaporan dan pelaksanaan kegiatan operasi penindakan pada bulan

Bulan	Target Indikator	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	**Nilai Realisasi SPDP**	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	**Nilai Realisasi Tahap I**	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	**Nilai Realisasi P21**	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	**Nilai Realisasi Tahap II**	% Keberhasilan Perkara	Kendala	RTL
																	yang diduga mengandung bko di desa pagubugan kecamatan binangun Cilacap, namun saksi terlapor tidak memenuhi panggilan pemeriksaan 2 kali secara berturut turut tanpa alasan yang sah, sehingga membutuhkan upaya lanjutan untuk pengembangan penanganan kasus dan penelusuran keberadaan saksi atau terlapor	Juli 2026
Juli	15	1	0	1	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,00	Tidak ada kendala	sudah sesuai target
Agustus	45	1	0	1	0	0,15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15,00	masih dalam tahap penelusuran dan pemeriksaan	Bulan september dijadwalkan untuk serah tahap 1 di

Bulan	Target Indikator	Target Perkara Tahun Berjalan	Target Perkara Carry Over	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (SPDP)	Realisasi Perkara Carry Over (SPDP)	**Nilai Realisasi SPDP**	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap I)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap I)	**Nilai Realisasi Tahap I**	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (P21)	Realisasi Perkara Carry Over (P21)	**Nilai Realisasi P21**	Realisasi Perkara Tahun Berjalan (Tahap II)	Realisasi Perkara Carry Over (Tahap II)	**Nilai Realisasi Tahap II**	% Keberhasilan Perkara	Kendala	RTL
																	saksi pembeli	kejaksaan negeri cilacap
September	55	1	0	0	0	0	1	0	0,55	0	0	0	0	0	0	55,00	tidak ada kendala	sesuai dengan jadwal perencanaan

Link Data Dukung:

- Juni: https://drive.google.com/drive/folders/1_FNgbjwFjEi4HUikF4iiR8WwPQjcnpxS?usp=sharing.
- September: https://drive.google.com/file/d/1-z6Iy_su5aIZIvgcaexPOxJDtAqb0OlB/view?usp=drive_link.

Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar Balai POM di Banyumas TW III 2026

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label (A)	% Ketepatan waktu pelaporan label (B)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Januari	87.36%	100,00	100,00	100,00	Tidak ada kendala	Akan dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan	Daftar Laporan pengawasan Penandaan Rokok Januari - Juni tahun 2026 Balai POM di Banyumas.xlsx
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Februari	87.36%	100,00	100,00	100,00	Belum ada kendala	Akan dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan	Daftar Laporan pengawasan Penandaan Rokok Januari - Juni tahun 2026 Balai POM di Banyumas.xlsx
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Maret	87.36%	100,00	83,33	91,67	Tidak ada kendala	Akan dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan	Daftar Laporan pengawasan Penandaan Rokok Januari - Juni tahun 2026 Balai POM di Banyumas.xlsx
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	April	87.36%	100,00	62,50	81,25	Terdapat ketidaksepahaman terkait ketepatan waktu pelaporan pada akun Kepala Balai.	Akan dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan	Daftar Laporan pengawasan Penandaan Rokok Januari - Juni tahun 2026 Balai POM di Banyumas.xlsx
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang	Mei	87.36%	100,00	70,00	85,00	Kesalahpahaman terkait pelaporan yang seharusnya dihitung dari akun Kepala Balai.	Akan dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan	Daftar Laporan pengawasan Penandaan Rokok Januari - Juni tahun 2026 Balai POM di Banyumas.xlsx

Nama Indikator	Bulan	Target Indikator (%)	% Pemenuhan jumlah target pengawasan label (A)	% Ketepatan waktu pelaporan label (B)	Realisasi (%)	Kendala	Rencana Tindak Lanjut	Link Data Dukung
Diawasi Sesuai Standar							perencanaan	
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Juni	87.36%	100,00	75,00	87,50	Belum ada kendala	Akan dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan	Daftar Laporan pengawasan Penandaan Rokok Januari - Juni tahun 2026 Balai POM di Banyumas.xlsx
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Juli	87.36%	100,00	67,86	83,93	Ketidaktepatan waktu pelaporan dari akun Kepala Balai. Hal ini terjadi karena ketidaksepahaman antara PJ IKU Balai POM di Banyumas dan unit pengampu bahwa ketepatan waktu berada pada pengiriman dari akun Kepala Balai.	Akan dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan	Daduk IKU Persentase label produk tembakau dan-atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	Agustus	87.36%	100,00	60,42	80,21	Pembelian sampel rokok pada akhir bulan, bersamaan dengan sampling komoditi lain membuat waktu pengerjaan penandaan label tembakau mendekati tenggat waktu pengiriman laporan ke pusat, serta kurangnya koordinasi petugas penandaan dengan PIC yang meneruskan pelaporan SIPT sehingga capaian pelaporan ketepatan waktu menjadi kurang.	Akan dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan	Daduk IKU Persentase label produk tembakau dan-atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
Persentase Label Produk Tembakau dan/atau Rokok Elektronik yang Diawasi Sesuai Standar	September	87.36%	100,00	64,81	82,41	Anggaran sampling tembakau digunakan juga untuk sampling sediaan farmasi dimana pelaksanaan sampling dilakukan pada minggu terakhir bulan pengawasan label produk tembakau. Sehingga waktu pelaksanaan pengawasan label produk tembakau memiliki tenggat waktu terlalu singkat dengan batas waktu pelaporan	Akan dilakukan pemeriksaan label produk tembakau sesuai dengan perencanaan	Daduk IKU Persentase label produk tembakau dan-atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar

Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT Balai POM di Banyumas TW III 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar oleh UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0%	0%	Pada bulan Januari tidak ada target terkait IKU ini	Perhatikan perencanaan yang telah diitetapkan dan dilaksanakan sesuai dengan ruang lingkup
Februari	0%	0%	Belum ada KLB di BPOM Banyumas	Pertahankan capaian yang telah tercapai, mohon untuk selanjutnya dalam pelaksanaan dapat terus memperhatikan perencanaan yang telah ditetapkan dan penyerapan anggaran
Maret	0%	0%	Belum ada KLB di BPOM Banyumas	Untuk penanganan KLB KP tetap dari Balai POM harus melakukan pemeriksaan walaupun sudah diperiksa oleh Dinas Kesehatan (tetap dianjurkan untuk turun lapangan).
April	0%	0%	Belum ada KLB di BPOM Banyumas	Tetap koordinasi dengan dinas kesehatan, mohon dipelajari DO terkait KLB dan bersurat ke Roren dan Unit Pengampu terkait meminta penjelasan mengenai IKU ini
Mei	100%	100%	Belum ada kendala	Pastikan bahwa data dukung yang dibutuhkan tersedia dengan jelas dan lengkap sebagai bukti pelaksanaan daripada kasus KLB. Ke depannya, tetap jalin koordinasi dengan Dinas Kesehatan terkait sampel KLB.
Juni	100%	100%	Pada bulan Juni tidak ada KLB di wilayah kerja Balai POM di Banyumas. Capaian 100% merupakan akumulasi dari adanya pencapaian pada bulan Mei 2026 sesuai dengan ketentuan Manual IKU.	Anggaran bisa dimaksimalkan agar mampu mencapai target yang telah direncanakan sampai akhir periode. Pelaporan tindaklanjut untuk diperhatikan agar sesuai dengan timeline.
Juli	100%	100%	Pada bulan Juli tidak ada KLB di wilayah kerja Balai POM di Banyumas. Capaian 100% merupakan akumulasi dari adanya pencapaian pada bulan Mei 2026 sesuai dengan ketentuan Manual IKU.	Tetap menjalankan agenda kegiatan sesuai dengan perencanaan dan jaga komunikasi dengan Dinas Kesehatan terkait ada atau tidaknya sampel KLB.
Agustus	100%	100%	Pada bulan Agustus tidak ada KLB di wilayah kerja Balai POM di Banyumas. Capaian 100% merupakan akumulasi dari adanya pencapaian pada bulan Mei 2026 sesuai dengan ketentuan Manual IKU.	Perhatikan koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait, update selalu informasi KLB setiap bulannya.
September	100%	100%	Belum ada kendala	Perkuat komunikasi dengan Dinas Kesehatan di dalam wilayah kerja Balai POM di Banyumas agar dapat selalu update terkait informasi KLB.

Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium Balai POM di Banyumas TW III 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	-	-	Standar peralatan masih rendah dan tidak ada alokasi anggaran pembelian alat pada TA 2026	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Februari	-	-	Standar peralatan masih rendah dan tidak ada alokasi anggaran pembelian alat pada TA 2026	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Maret	6	6.12	Standar peralatan masih rendah dan tidak ada alokasi anggaran pembelian alat pada TA 2026	Pastikan untuk SDM yang tersedia siap untuk melakukan pengujian apabila dibutuhkan.
April	6	6.12	Pemenuhan standar peralatan masih rendah dan tidak ada alokasi anggaran untuk pembelian alat laboratorium pada TA 2026	Dapat berkoordinasi dengan pihak eksternal daerah Banyumas untuk memperluas kegiatan pengujian dan dapat mempertimbangkan berbagai kegiatan pengembangan kompetensi yang disediakan oleh Pusat dengan disesuaikan oleh kemampuan laboratorium BPOM Banyumas.
Mei	6	6.12	Pemenuhan standar peralatan masih rendah dan tidak ada alokasi anggaran untuk pembelian alat laboratorium pada TA 2026	Untuk sementara menyesuaikan dengan kondisi yang dimiliki oleh Balai POM di Banyumas. Pastikan untuk terus saling berkoodinasi mengenai renovasi laboratorium. Terkait kegiatan foodsec pada Lapas dapat dikoordinasikan dan dibahas kemudian.
Juni	6.5	6.65	Pemenuhan standar peralatan masih rendah dan tidak ada alokasi anggaran untuk pembelian alat laboratorium pada TA 2026	Berkoordianasi dengan P3OMN agar mampu memenuhi peralatan yang sesuai dengan standar Balai. Siapkan perlengkapan untuk menjadi dasar justifikasi sehingga apabila ditanyakan sudah ada datanya.
Juli	6.5	6.65	Pemenuhan standar peralatan masih rendah dan tidak ada alokasi anggaran untuk pembelian alat laboratorium pada TA 2026	Pastikan capaian sesuai dengan target yang ditentukan, untuk peralatan lab tahun 2027 sudah ada yang disetujui oleh balai kalibrasi untuk dipastikan alat pendukungnya sesuai dengan kebutuhan sehingga alatnya bisa digunakan dengan baik.
Agustus	6.5	6.65	Pemenuhan standar peralatan masih rendah dan tidak ada alokasi anggaran untuk pembelian alat laboratorium pada TA 2026.	Mohon agar bersurat kepada Roren terkait pengajuan anggaran perbaikan gedung baru. Untuk sarana pendukung laboratorium, pengajuan anggaran tambahan

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
				akan kembali diajukan kepada Roren dan tetap dilaksanakan sesuai rencana. Pemanfaatan alat laboratorium yang tersedia perlu dimaksimalkan. Pengadaan alat laboratorium jangan sampai mengalami keterlambatan dan wajib direalisasikan paling lambat bulan Oktober agar proses pengadaan berjalan lancar.
September	7	7,17	Pemenuhan standar peralatan masih rendah karena tidak adanya alokasi anggaran untuk pembelian alat laboratorium pada TA 2026. Usulan anggaran untuk pengadaan alat lab 2027 sudah mendapatkan rekomendasi akan tetapi gedung laboratorium belum terasedia dan memadai	Tetap memperhatikan perencanaan untuk susunan tahun 2027 serta arahan dari P3OMN (fasilitas lab) dan Biro Umum (untuk sarana dan prasarana). Dilakukan penyesuaian sejalan dengan efisiensi anggaran dan situasi pemindahan ke kantor baru.

Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT Balai POM di Banyumas TW III 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0	Kegiatan KIE tatap muka diagendakan di akhir bulan, sehingga hanya dapat realisasi dari KIE melalui media	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Februari	0	0	Tidak terdapat kendala pelaksanaan	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Maret	89.25	90.38	Tidak terdapat kendala pelaksanaan	Mohon untuk capaian yang telah memenuhi target, untuk selalu dipertahankan. Perencanaan yang telah ditetapkan tiap bulan agar dilaksanakan secara optimal dengan efisiensi anggaran yang ada.
April	89.25	90.44	Tidak terdapat kendala di dalam pencapaian nilai Effektivitas KIE	Memaksimalkan KIE kepada masyarakat agar memasifkan edukasi dari BPOM. Diskominfo siap mendampingi apabila dibutuhkan. Ke depannya, dapat ditingkatkan koordinasi dengan pihak eksternal untuk melebarkan media yang biasa digunakan oleh pihak eksternal tersebut.
Mei	89.25	90.41	Tidak terdapat kendala di dalam pencapaian nilai Effektivitas KIE	1. Pastikan Balai POM di Banyumas untuk terus update KIE pada media sosial. Tim Media Sosial menyepakati bersama terkait higlight gambar dan skenario. Unggahan tersebut mana yang menjadi poin utamanya, gambar atau skenarionya dan dapat dibuat secara jelas. 2. Untuk dapat memberikan informasi kembali kepada masyarakat terkait MPP Balai POM di Banyumas termasuk MPP keliling yang dimiliki Balai POM di Banyumas sehingga masyarakat menyadari bahwa Balai POM di Banyumas terus hadir di tengah masyarakat dan pelaku usaha.
Juni	89.25	90.33	Tidak terdapat kendala di dalam pencapaian nilai Effektivitas KIE	Inovasi pelayanan publik dapat diperhatikan kembali dan tindaklanjutnya dapat dimaksimalkan. Isu-isu nasional dapat ditampilkan pada media sosial yang dimiliki Balai POM di Banyumas, terutama public warning.
Juli	89.25	90.41	Tidak terdapat kendala di dalam pencapaian nilai Effektivitas KIE	KIE tidak hanya tampak ke dalam namun tampak keluar, semua KIE yang telah dilaksanakan dicompile menjadi 1 dalam vidio durasi pendek,

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Agustus	89.25	90.36	Tidak ada kendala yang berarti dalam menjalankan tugas.	Kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) harus dimaksimalkan sehingga tidak terdapat penolakan akibat keterbatasan anggaran. KIE Pramuka perlu didukung secara penuh agar dapat terlaksana dengan baik serta menjadi sarana penyebaran informasi bahwa Balai POM di Banyumas telah memiliki SAKA POM.
September	89.25	90.36	Tidak ada kendala yang berarti.	Memanfaatkan media supaya kegiatan yang dijalankan oleh Balai POM di Banyumas agar tersebar secara luas kepada masyarakat. Perhatikan kembali media sosial, adakan pengawas untuk media sosial agar memastikan sosial media selalu *update* setiap harinya. Lakukan evaluasi secara konsisten.

Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar Balai POM di Banyumas TW III 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	50%	50%	Tidak ada kendala	Pertahankan capaian yang telah tercapai, mohon untuk selanjutnya dalam pelaksanaan dapat terus memperhatikan perencanaan yang telah ditetapkan
Februari	50%	50%	Tidak ada kendala	Pertahankan capaian yang telah tercapai, mohon untuk selanjutnya dalam pelaksanaan dapat terus memperhatikan perencanaan yang telah ditetapkan
Maret	50%	50%	Tidak ada kendala yang berarti	Mohon untuk capaian yang telah memenuhi target, untuk selalu dipertahankan. Perencanaan yang telah ditetapkan tiap bulan agar dilaksanakan secara optimal dengan efisiensi anggaran yang ada.
April	50%	50%	Tidak ada kendala yang berarti	Pertahankan capaian sampai akhir tahun pelaksanaan agar target terus tercapai hingga akhir tahun 2026.
Mei	50%	50%	Tidak ada kendala yang berarti	Dijalankan sesuai dengan hasil diskusi, perhatikan serapan anggaran yang mengikat IKU ini, pastikan untuk serapan anggaran dan capaian kinerja berjalan seimbang sesuai dengan perencanaan pelaksanaan yang telah disepakati.
Juni	50%	50%	Tidak ada kendala yang berarti dalam melaksanakan kegiatan.	Dibuatkan edukasi umum seperti infografis melalui media sosial terkait dengan obat setelan. Sesuaikan kegiatan sesuai dengan perencanaan.
Juli	50%	50%	Tidak ada kendala yang berarti dalam melaksanakan kegiatan.	Pelajari kerawanan kejahatan wilayah kerja agar laporan analisis kejahatan lebih implikasi, untuk laporan kegiatan cegah tangkal yang diduga menjual obat setelan diberikan edukasi melalui forum.
Agustus	50%	50%	Tidak ada kendala yang berarti dalam melaksanakan kegiatan.	Kegiatan analisis kejahatan disesuaikan dengan gambar/kondisi di wilayah kerja BPOM Banyumas, Koordinasikan dengan pihak-pihak terkait.
September	50%	50%	Tidak ada kendala.	Silahkan untuk menyelesaikan data laporan penggalangan pada bulan Oktober 2026

Indeks Pelayanan Publik UPT Balai POM di Banyumas TW III 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Indeks Pelayanan Publik UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0	Belum ada kendala	Setiap bulannya mohon untuk tetap perhatikan target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggarannya
Februari	0	0	Belum ada kendala	Setiap bulannya mohon untuk tetap perhatikan target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggarannya
Maret	0	0	Belum ada kendala yang berarti	Setiap bulannya untuk mohon dapat selalu di update, pastikan bahwa perencanaan, penyerapan anggaran dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
April	0	0	Belum ada kendala yang berarti	Memastikan bahwa nilai IPP akan tercapai pada akhir tahun nanti. Maksimalkan sumber daya yang dimiliki secara optimal.
Mei	0	0	Belum ada kendala yang berarti	1. Agar memperhatikan tahun depan jika berpindah gedung, diusahakan untuk memaksimalkan pelayanan yang lebih sesuai dengan ketentuan. Dapat dianggarkan terkait buku braille mengingat harganya cukup mahal. 2. Lakukan refreshment terkait bahasa isyarat, yang mudah saja seperti mempersilahkan masuk, terimakasih, dan semacamnya. 3. Per Juli dapat dilakukan pergeseran jadwal MPP luar kota seperti 1x dalam satu bulan.
Juni	0	0	Belum ada kendala yang berarti	Pelayanan publik dapat dikoordinasikan oleh fungsi Infokom agar mampu memenuhi nilai yang masih rendah sebelum akhir periode tahun 2026.
Juli	0	0	Belum ada kendala yang berarti	Tetap jalankan kegiatan yang telah direncanakan, pastikan untuk selalu memperhatikan capaian dan serapan anggaran.
Agustus	0	0	Realisasi melebihi target (sesuai dengan Berita Acara Survey PEKPPP tertanggal 13 Agustus 2026). Bisa dilakukan peningkatan untuk tahun depan, terutama pada aspek Standar Pelayanan	Silahkan untuk meningkatkan nilai yang rendah dari hasil penilaian. Perhatikan capaian RPD pelayanan publik dan dibuat sesuai dengan perencanaan. Dalam pelaksanaan pelayanan untuk mengedepankan 5S kepada masyarakat.
September	0	0	Tidak ada kendala dalam melaksanakan kegiatan.	Perhatikan hasil penilaian, silahkan untuk duduk bersama membahas kekurangan untuk menciptakan ruang pelayanan publik yang sesuai standar.

Nilai Pembangunan ZI Balai POM di Banyumas TW III 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0	Tidak ada kendala	Setiap bulannya mohon untuk tetap perhatikan target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggarannya
Februari	0	0	Tidak ada kendala	Setiap bulannya mohon untuk tetap perhatikan target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggarannya
Maret	0	0	Informasi kendala dari Auditor Internal. Narasi dalam LKE dan data dukung yang disampaikan tidak sesuai.	Setiap bulannya untuk mohon dapat selalu di update, pastikan bahwa perencanaan, penyerapan anggaran dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
April	0	Penilaian LKE sudah disampaikan ke inspektorat tanggal 10 April 2023. Tanggal 23 April, telah dilakukan desk ZI bersama inspektorat Tanggal 25 April, perbaikan desk ZI telah disampaikan kembali sesuai time line Status saat ini, menunggu penilaian inspektorat	Inovasi masih belum memiliki dampak terukur yang dirasakan langsung masyarakat SOP inovasi belum terintegrasi pada SOP Mikro Beberapa program kegiatan belum dilengkapi dengan data monitoring dan evaluasi	Melakukan pendetailan kegiatan hingga dampak yang dirasakan masyarakat dan melaksanakan tindak lanjut desk yang telah dilaksanakan.
Mei	0	Penilaian LKE sudah disampaikan ke inspektorat tanggal 10 April 2023. Tanggal 23 April, telah dilakukan desk ZI bersama inspektorat Tanggal 25 April, perbaikan desk ZI telah disampaikan kembali sesuai timeline Status saat ini, menunggu penilaian inspektorat	Inovasi masih belum memiliki dampak terukur yang dirasakan langsung masyarakat SOP inovasi belum terintegrasi pada SOP Mikro Beberapa program kegiatan belum dilengkapi dengan data monitoring dan evaluasi	Periksa kembali SOP yang berlaku pada masing-masing fungsi sehingga setiap individu atau pegawai paham dan mengerti SOP yang berjalan pada Balai POM di Banyumas sehingga proses bisnis sesuai dengan SOP yang telah dibuat.
Juni	0	Sesuai Nodin Sestama No. PI.06.06.7.06.26.317 tanggal 19 Juni 2026, Nilai ZI BPOM Banyumas **82,07 (Melebihi target)** Capaian Kinerja kategori C .	Inovasi terkait Pelayanan Publik belum optimal, belum terukur dan dianggap belum berdampak langsung bagi stakeholder. Belum semua pokja melakukan pemantauan program kerja yang ditetapkan dalam renja, sehingga ada program kerja yang tidak	Memperbaiki penilaian yang masih rendah dan mampu dilakukan untuk periode berikutnya.

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
		Detail penilaian tiap pokja belum di sampaikan dengan rinci, namun dalam keterangan disampaikan bahwa nilai area Pelayanan Publik < 60% Integrasi Inovasi ke dalam SOP sedang dalam progress. Saat ini seluruh fungsi sedang melakukan revisi SOP Mikro masing-masing. Progress saat ini (mas Tyo)	terlaksana sesuai schedule Belum semua SOP inovasi terintegrasi pada SOP Mikro. Fungsi yang belum update SOP Mikro dan kelengkapannya (Form perubahan dan evaluasi) yaitu: Fungsi Penindakan	
Juli	0	Sesuai Nodin Sestama No. PI.06.06.7.07.26.389 8 Juli perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI di BPOM Banyumas disampaikan hasil evaluasi ZI sebagai berikut: 5 Area perubahan memenuhi kriteria MS, 1 area perubahan (Yanblik) masih TMS. Capaian 4 Area perubahan sudah di atas 80%, 2 area perubahan masih dibawah 70 % yaitu Area Pengawasan 65% dan Yanblik 53% Seluruh Inovasi sudah diintegrasikan ke dalam SOP per 31 Juli 2026.	Inovasi terkait Pelayanan Publik belum optimal, belum terukur dan dianggap belum berdampak langsung bagi stakeholder. Belum semua pokja melakukan pemantauan program kerja yang ditetapkan dalam renja, sehingga ada program kerja yang tidak terlaksana sesuai schedule. Penetapan timeline renja tidak sesuai dengan realita sehingga perlu dilakukan penyesuaian/revisi time line Renja	Selesaikan apa yang harus ditindaklanjuti, perbaiki secara berkala hasil penilaian ZI oleh Inspektorat agar terdapat perbaikan berkelanjutan.
Agustus	0	Capain nilai ZI BPOM Banyumas 82.07 (melebihi target) Telah dilakukan pembahasan dan rencana tindak lanjut tanggal 26 Agustus 2026 atas Nodin Sestama No. PI.06.06.7.07.26.389 8 Juli perihal Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan ZI di BPOM Banyumas Usulan tindak lanjut telah dilakukan pembahasan dan disetujui pimpinan unit kerja	Belum semua pokja melakukan pemantauan program kerja yang ditetapkan dalam renja, sehingga ada program kerja yang tidak terlaksana sesuai schedule. Penetapan timeline renja tidak sesuai dengan realita sehingga perlu dilakukan penyesuaian/revisi time line Renja Usulan rencana Tindak Lanjut hasil penilaian Inspektorat belum semua dapat ditindaklanjuti tahun ini, karena program baru bisa diusulkan untuk tahun 2027,misalnya inovasi agen perubahan yang berdampak pada IKU unit serta mekanisme dan penetapan tim kerja	Selesaikan tindaklanjut dari penilaian ZI oleh Inspektorat, perjelas kembali data dukung dan pastikan diselesaikan sesuai dengan timeline. Monitoring secara ketat untuk semua Pokja agar tercapai secara maksimal.

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
September	0	0	Belum semua pokja melakukan pemantauan berkala terhadap renja kerja yang ditetapkan. Masih terdapat program yang tidak terlaksana sesuai target. Penetapan timeline renja tidak sesuai dengan realita sehingga perlu dilakukan penyesuaian/revisi timeline Renja Usulan rencana Tindak Lanjut hasil penilaian Inspektorat belum semua dapat ditindaklanjuti tahun ini, ,karena program baru bisa diusulkan untuk tahun 2027,misalnya inovasi agen perubahan yang berdampak pada IKU unit serta mekanisme dan penetapan tim kerja	Perhatikan hasil desk penilaian yang telah diberikan dari Inspektorat, evaluasi kembali kekuangan yang telah disampaikan dan lakukan tindaklanjutnya.

Nilai AKIP Balai POM di Banyumas TW III 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai AKIP UPT BPOM			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0	Tidak ada kendala	Setiap bulannya mohon untuk tetap perhatikan target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggarannya
Februari	0	0	Tidak ada kendala	Mohon untuk selalu berkomunikasi dengan roren untuk kelanjutan capaian kinerja dan output masing-masing IKU dan program kegiatan
Maret	0	0	1. Penghematan anggaran tidak di sertai dengan penyesuaian target 2. Kertas kerja penghitungan capaian kinerja belum ditetapkan dari pusat sehingga penghitunagn capaian belum bisa dilakukan sesuai pedoman	Mohon untuk selalu berkomunikasi dengan roren untuk kelanjutan capaian kinerja dan output masing-masing IKU dan program kegiatan
April	0	0	Hasil review SAKIP 2025 terdapat beberapa hal yang perlu perbaikan	Pelajari apa saja yang menjadi penilaian SAKIP, apabila perlu diskusi silahkan dibuatkan. Dibuatkan pelaporan monevnya, apa yang menjadi kendala dan perlu dievaluasi. Tiap bulan mohon dilihat ketepatan waktunya untuk pengumpulan dokumen.
Mei	0	0	Tidak ada kendala	Pastikan nilai AKIP akan tercapai pada tahun ini bahkan bisa menyentuh angka 80% sebagai standar Balai. Perhatikan untuk poin-poin yang harus ditingkatkan secara konsisten sehingga dapat mencapai target yang diinginkan.
Juni	0	0	beberapa target RAPK bulanan sudah tidak relevan dengan ketersediaan anggaran dan target tahunan setelah efisiensi, sehingga perlu dilakukan usulan perubahan target bulamnan	Koordinasi oleh seluruh tim kerja untuk melengkapi administrasi yang dibutuhkan. Dapat dibuatkan diskusi sebelum adanya desk dari Pusat.
Juli	0	0	Beberapa target RAPK tidak relevan lagi dengan capaian target output, sehingga perlu dilakukan penyeseuaian target bulanan (RAPK)	Perhatikan poin yang perlu ditingkatkan dari penilaian tahun lalu target di 80,01% atau lebih agar bebas dari potongan capaian sebesar 10%.
Agustus	0	0	Tidak ada kendala yang berarti	Pastikan untuk seluruh rangkaian perencanaan, monitoring dan pelaporan sesuai dengan ketentuan serta persiapkan dengan baik desk SAKIP yang akan dilaksanakan.
September	0	0	Telah dilaksanakan desk SAKIP dan data dukung tambahan telah diberikan sesuai dengan ketentuan pada 22 September 2026. terdapat beberapa catatan untuk perbaikan antara lain: 1. data kinerja belum dilengkapi dengan kertas kerja penghitungan data mentah capaian yang didokumentasikan dan mampu telusur dengan baik; 2. perlu dibuatkan kertas kerja review untuk sinkronisasi data laporan capaian tiap IKU pada setiap dokumen laporan kinerja	Perhatikan kembali data pelaporan yang telah diinput, menjadi sebuah tanggungjawab bagi seluruh pegawai tidak hanya di TU. Perencanaan, pelaksanaan, dan monev memanfaatkan inovasi KANGMAS agar terus update secara real-time.

Nilai Kinerja Anggaran Balai POM di Banyumas TW III 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0	Tidak ada kendala	Setiap bulannya mohon untuk tetap perhatikan target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggarannya
Februari	0	0	Pada KRO CBV (Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan) telah mengalokasikan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA pada bulan Desember sebesar Rp 3.832.946.000,-. Sehingga akan mempengaruhi penilaian target penyerapan anggaran triwulan yang ditetapkan untuk jenis Belanja modal Tw I = 10%, Tw II = 40%, Tw III = 70% dan Tw IV = 90%. Dengan adanya pencadangan anggaran yang berakibat pada hasil penilaian per Tw = 0 (nol).	Mohon untuk selalu menindaklanjuti dan aktif berkomunikasi dengan pusat terkait anggaran dan penyesuaian RPD yang sedang berjalan
Maret	0	0	Pada KRO CBV (Pembangunan/ renovasi gedung dan bangunan) telah mengalokasikan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA pada bulan Desember sebesar Rp 3.832.946.000,-. Sehingga akan mempengaruhi penilaian target penyerapan anggaran triwulan yang ditetapkan untuk jenis Belanja modal Tw I = 10%, Tw II = 40%, Tw III = 70% dan Tw IV = 90%. Dengan adanya pencadangan anggaran yang berakibat pada hasil penilaian per Tw = 0 (nol).	Mohon untuk selalu menindaklanjuti dan aktif berkomunikasi dengan pusat terkait anggaran dan penyesuaian RPD yang sedang berjalan
April	0	0	Penyerapan Anggaran tidak sesuai rencana yang ditetapkan oleh Kemenkeu. Paling besar komponen pada Belanja Modal. Pada KRO CBV (Pembangunan/renovasi gedung dan bangunan) telah mengalokasikan Rencana Penarikan Dana Halaman III DIPA pada bulan Desember sebesar Rp 3.832.946.000,-. Sehingga akan mempengaruhi penilaian target penyerapan anggaran triwulan yang ditetapkan untuk jenis Belanja modal Tw I = 10%,Tw II = 40%, Tw III = 70% dan Tw IV = 90% Dengan adanya pencadangan anggaran yang berakibat pada hasil penilaian per Tw = 0 (nol).	Menyediakan justifikasi pada tiap RO anggaran dan mohon diperkuat dengan data dukung yang tersedia. Monitoring perubahan anggaran agar tidak terjadi tambal sulam secara terus menerus. Masing-masing fungsi jelaskan perpindahan anggarannya untuk apa dan terkontrol.
Mei	0	0	Deviasi penyerapan anggaran bulan Mei lebih dari 5% diakrenakan, antara lain: > Banyaknya waktu libur pada bulan Mei, sehingga penyerapan belanja 52 tidak optimal (deviasi 15.10%). > Realisasi penyerapan pada pengadaan reagen dan glassware melalui e-katalog (inaproc) terdapat kendala administrasi dokumen BAST, adendum, nomor CAN pada kontrak sehingga menyebabkan penolakan oleh KPPN.	Bersurat kembali terkait anggaran laboratorium agar serapan anggaran dapat maksimal sesuai dengan perencanaan.

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Juni	0	0	Deviasi penyerapan anggaran lebih dari 5% dibandingkan dengan rencana penyerapan, hal ini disebabkabkan antara lain: 1. beberapa kegiatan terpadu tidak jadi dilaksankan secara Luring; 2. Belum tercapainya target penindakan sehingga kegiatan lanjutan belum bisa dilaksanakan	Perhatikan kembali serapan anggaran yang harus dicapai dan efektifkan kembali seluruh kegiatan hingga akhir periode sehingga mampu terserap secara maksimal.
Juli	0	0	Penyerapan realisasi anggaran rendah	Memperhatikan RPD dan merealisasikan kegiatan sesuai perencanaan, apabila terjadi pergerseran kegiatan bisa mengajukan revisi hal III DIPA.
Agustus	0	0	Kekurangan anggaran belanja pegawai. Penyerapan anggaran belanja modal rendah.	Pastikan untuk serapan anggaran ini berjalan optimal. Follow up kembali kekurangan gaji dan uang makan hingga waktu yang ditentukan. Catat pengeluaran uang operasional jika terdapat kekurangan terutama yang pengeluaran besar.
September	0	0	Beberapa anggaran minus dan perlu dilakukan revisi POK namun belum bisa dilakukan karena proses revisi DIPA pengalihan anggaran belanja modal untuk program prioritas Presiden belum selesai	Gunakan anggaran secara seefektif dan seefisien mungkin dengan memperhatikan capaian kegiatan secara maksimal. Sisir kembali serapan anggaran agar anggaran dan kinerja berjalan selaras.

Indeks Manajemen Risiko Balai POM di Banyumas TW III 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0	Tidak ada kendala	Setiap bulannya mohon untuk tetap perhatikan target yang telah ditetapkan dan penyerapan anggarannya
Februari	0	0	Tidak ada kendala	Segera melakukan tindaklanjut dan memenuhi hasil evaluasi maturitas risiko Balai POM di Banyumas
Maret	0	0	Dokumen peta resiko masih dalam proses penyusunan	Segera melakukan tindaklanjut dan memenuhi hasil evaluasi maturitas risiko Balai POM di Banyumas
April	0	0	Dokumen peta resiko masih dalam proses penyusunan	Masing-masing IKU mohon untuk diadakan mitigasi risikonya sehingga tiap IKU memiliki risiko
Mei	0	0	perlu dilakukan update analisis resiko indikator kinerja utama semester II	Setiap pegawai dapat mengusulkan risiko yang dihadapi dan dicantumkan ke dalam sebagai daftar risiko. Pastikan untuk setiap IKU terdapat risiko yang mengingatnya sehingga jika target capaian kinerja tercapai itu juga menandakan bahwa Balai POM di Banyumas mampu mengatasi risiko yang dapat terjadi sehingga capaian kinerja Balai POM di Banyumas lebih maksimal dan memuaskan.
Juni	0	0	update analisis resiko indikator kinerja utama semester II dalam proses penyusunan	Pembuatan risiko agar disesuaikan dengan kapabilitas agar mampu termitigasi.
Juli	0	0	Tidak terdapat kendala yang berarti	Lanjutkan rencana kegiatan yang telah disusun. Perhatikan dan dapat dibuatkan diskusi sebelum adanya desk maturitas risiko.
Agustus	0	0	Tidak ada kendala yang berarti	Pertahankan progress kegiatan agar tercapai secara optimal hingga akhir periode tahun 2026.

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
September	0	0	Terdapat masukan saat kegiatan Audit Internal terkait kertas kerja Manajemen Risiko yang belum menjelaskan penurunan/ stagnansi dari level risiko. Level risiko antara semester 1 dan semester 2 masih sama dengan keterangan pengendalian efektif.	Masing-masing pegawai memperhatikan manajemen risiko kembali karena berkaitan dengan SKP seluruh pegawai. Buatkan atribute pengendalian yang mampu diselesaikan oleh Balai POM di Banyumas. Untuk seluruh pegawai ikuti desknya dan lengkapi sesuai dengan ketentuan.

Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota Pangan Aman Balai POM di Banyumas TW III 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan-Des)	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota Pangan Aman					
	Target	Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0	0	0	Belum ada sosialisasi Tools penilaian tahun 2026	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Februari	0	0	0	0	1. Terdapat perubahan personil kunci program KKPA Balai POM di Banyumas. 2. Belum ada sosialisasi Tools penilaian tahun 2026 3. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme program. 4. Hambatan dalam proses penetapan usulan lokus.	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Maret	0	0	0	0	1. Terdapat perubahan personil kunci program KKPA Balai POM di Banyumas. 2. Belum ada sosialisasi Tools penilaian tahun 2026 3. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme program,. 4. Hambatan dalam proses penetapan usulan lokus.	Pastikan untuk selalu berkoordinasi dengan pihak yang berkaitan. Pastikan setiap bulan terdapat progress untuk mencapai target yang telah direncanakan.
April	0	0	0	0	Telah dilaksanakan advokasi di setiap wilayah kerja Balai POM di Banyumas yaitu pada bulan April 2026, dengan rincian sebagai berikut : Kab. Purbalingga (21 April 2026) Kab. Cilacap (22 April 2026)	Tetap membangun koordinasi dengan dinas terkait dan pihak eksternal terkait. Maksimalkan perencanaan kegiatan yang telah disusun secara optimal.

Bulan s.d. TW IV (Jan-Des)	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota Pangan Aman					
	Target	Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
					Kab. Banjarnegara (23 April 2026) Kab. Banyumas (27 April 2026) Kendala yang dihadapi yaitu : 1. Terdapat perubahan personil kunci program KKPA Balai POM di Banyumas. 2. Belum ada sosialisasi Tools penilaian tahun 2026 3. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme program,.	
Mei	0	0	0	0	Kendala yang dihadapi yaitu : 1. Terdapat perubahan personil kunci program KKPA Balai POM di Banyumas. 2. Belum ada sosialisasi Tools penilaian tahun 2026 3. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme program.	Memastikan pendampingan KKPA berjalan secara maksimal mengingat tahun lalu mendapatkan penghargaan. Kabupaten Banyumas yang sudah berhasil didampingi pada tahun lalu jangan sampai lupa terkait piagam penghargaannya agar tetap semangat menjalani pada tahun ini. Kemudian, mengingatkan kembali untuk pengisian kertas kerja jauh sebelum tenggat waktu yang telah ditetapkan oleh Pusat.
Juni	0	0	0	0	Kendala yang dihadapi yaitu : 1. Terdapat perubahan personil kunci program KKPA Balai POM di Banyumas.	Harapannya di tahun ini Kabupaten yang diampu mampu masuk peringkat seperti pendampingannya

Bulan s.d. TW IV (Jan-Des)	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota Pangan Aman					
	Target	Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
					2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme program.	yang tahun lalu mendapat penghargaan. Perhatikan koordinasi di dalam Kabupaten, keterlibatan Bupati, dan kerjasama petugas.
Juli	0	0	0	0	Kendala yang dihadapi yaitu : 1. Terdapat perubahan personil kunci program KKPA Balai POM di Banyumas. 2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme program.	Pastikan saat wawancara dapat didampingi secara maksimal. Setiap kabupaten yang didampingi untuk selalu berproses ke arah yang lebih baik.
Agustus	0	0	0	0	Kendala yang dihadapi yaitu : 1. Terdapat perubahan personil kunci program KKPA Balai POM di Banyumas. 2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme program.	Sebagai pendamping, Balai POM di Banyumas harus lebih aktif dibandingkan pihak Kabupaten yang didampingi. Seluruh kegiatan wajib dilaksanakan sesuai dengan timeline dan perencanaan yang telah disusun. Koordinasi antarpetugas perlu ditingkatkan agar kinerja dapat dicapai secara optimal.
September	0	0	0	0	Kendala yang dihadapi yaitu : 1. Terdapat perubahan personil kunci program KKPA Balai POM di Banyumas. 2. Kurangnya pemahaman pegawai terhadap mekanisme	Perkuat kembali koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait dari KKPA ini. Mari tetap mempertahankan prestasi Balai POM di Banyumas sebelumnya.

Bulan s.d. TW IV (Jan-Des)	Persentase Kabupaten Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten Kota Pangan Aman					
	Target	Jumlah Kab/Kota yang Berhasil Didampingi Sesuai Pedoman	Jumlah Kab/Kota di Wilayah Kerja UPT	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
					program.	

Fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke Balai POM di Banyumas TW III 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan-Des)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM					
	Target	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0	BIMTEK rencana akan dilakukan pada bulan Mei 2026	0	Tidak terdapat kendala	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Februari	0	0	BIMTEK rencana akan dilakukan pada bulan Mei 2026	0	Tidak terdapat kendala	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Maret	0	0	BIMTEK rencana akan dilakukan pada bulan Mei 2026	0	Tidak terdapat kendala	Setiap bulannya untuk mohon dapat selalu di update, pastikan bahwa perencanaan, penyerapan anggaran dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan
April	0	0	0	Rencana Bimtek telah dilakukan pembahasan internal dan dilakukan pembagian tugas	Kegiatan belum terlaksana, belum dapat diketahui kendalanya	Melaksanakan perencanaan yang telah disusun secara optimal baik dari kegiatan maupun anggaran.

Bulan s.d. TW IV (Jan-Des)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM					
	Target	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
				Bimtek dilakukan secara Hybrid dengan mengundang perwakilan saryanar (RS, klinik dan PKM) dari Banyumas, Cilacap. Purbalingga dan Banjarnegara Undangan Bimtek akan didistribusikan minggu I Mei 2026		
Mei	0	Sebanyak 1 Saryankes yang melapor ke e-meso 2.0 sampai akhir Mei 2026 yaitu (PKM Purwokerto Utara II)	45	Bimtek PV sudah terlaksana secara hybrid tanggal 21 Mei dengan mengundang 50 perwakilan Dinas Kesehatan, RS, PKM dan Klinik di area Banyumas, Banjarnegara, Purbalingga dan Cilacap. Seluruh undangan confirm hadir. Laporan dan	Beberapa Saryanfar telah bersedia melakukan pelaporan, namun perlu dilakukan pendampingan langsung terkait pengisian KTD/ESO karena aplikasi e-meso 2.0 sering error (transisi sistem baru)	Pastikan setiap kegiatan memiliki tindak lanjut yang jelas dan kegiatan yang dilaksanakan baik berupa koordinasi atau hal lainnya, baiknya bisa dilengkapi dengan notulensi sehingga terdapat bukti pelaksanaan kegiatan.--->

Bulan s.d. TW IV (Jan-Des)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM					
	Target	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
				notulen kegiatan sudah disampaikan via Srikandi, kegiatan telah dipublikasi di website BPOM Banyumas setelah kegiatan KIE selesai. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM adalah 8,23%		**Laporan KIE PV dan Notulensi telah disampaikan ke Pimpinan via Srikandi tanggal 4 Juni 2026** **Publikasi kegiatan KIE di website dan medsos BPOM Banyumas telah dilakukan pada tanggal 22 Mei 2026**
Juni	0	Jumlah kumulatif Saryankes yang telah melakukan pelaporan aplikasi e-meso sampai akhir bulan Juni adalah 20 Saryankes dengan data sebagai berikut 1. PKM Purwokerto Utara II (1 Laporan) 2. RS JIH Purwokerto (1 Laporan) 3. RS Khusus Mata Purwokerto (1 Laporan) 4. RS Goeteng (6 Laporan) 5. PKM Sumpiuh I (1 Laporan) 6. RS Emanuel Banjarnegara (3 Laporan) 7. Elisabeth Purwokerto (1 Laporan) 8. PKM Banjarnegara 2 (2 Laporan) 9. PKM Baturaden II (1 Laporan)	45	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM per Juli 2026 22/45 * 100% = 48,89 **% saryankes telah lapor (>>> target yang ditetapkan yaitu 27%) atau setara 181% dari target**	Seluruh terkendala terkait aplikasi error sudah dapat diatasi, Saryankes dapat menggunakan aplikasi dengan lancar dengan pendampingan petugas BPOM Banyumas Koordinasi PV dengan lintas	Pelaporan tetap dijalankan apa adanya namun bisa diperjelas saja justifikasi kenapa melampaui target tahunannya.

Bulan s.d. TW IV (Jan-Des)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM					
	Target	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
		10. PKM Purwokerto Utara I (1 Laporan) 11. PKM Cilacap Tengah 2 (1 Laporan) 12. Klinik Pratama Tanjung (1 Laporan) 13. PKM Madukara I (2 Laporan) 14. Klinik Masyitoh Cilacap (1 Laporan) 15. PKM Baturaden I (1 Laporan) 16. Klinik P UMP Tambaksari (1 Laporan) 17. PKM Karangkobar (2 Laporan) 18. PKM Kesugihan I (2 Laporan) 19. PKM Wanareja I (1 Laporan) 20. RSU Dadi Keluarga (2 Laporan) 21. Klinik Pratama Rajal Amanda (1 Laporan) 22. RS PKU Sampang (1 Laporan))		Telah dilakukan koordinasi PV dengan Lintas sektor yaitu KOMDA PP KIPI Banjarnegara dan Purbalingga. BPOM harus dilibatkan dalam penanganan penanggulangan KIPI yang ada di masing masing Kab/kota. Kegiaatn Koordinasi juga sudah dipublikasikan dalam website dan medsos BPOM Banyumas Koordinasi dengan KOMDA PP KIPI di Cilacap dan Banyumas, serta Asosiasi tenaga kesehatan lain akan diagendakan dalam kegiatan berikutnya.	sektor seperti KOMDA PP KIPI di masing-masing daerah terkendala dengan biaya, karena anggaran PV tidak punya anggaran perjadin.	

Bulan s.d. TW IV (Jan-Des)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM					
	Target	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Juli	27%	Jumlah kumulatif Saryankes yang telah melakukan pelaporan aplikasi e-meso sampai akhir bulan Juni adalah 25 Saryankes dengan data sebagai berikut 1. PKM Purwokerto Utara II (1 Laporan) 2. RS JIH Purwokerto (1 Laporan) 3. RS Khusus Mata Purwokerto (1 Laporan) 4. RS Goeteng (10 Laporan) 5. PKM Sumpiuh I (1 Laporan) 6. RS Emanuel Banjarnegara (3 Laporan) 7. Elisabeth Purwokerto (1 Laporan) 8. PKM Banjarnegara 2 (2 Laporan) 9. PKM Baturaden II (1 Laporan) 10. PKM Purwokerto Utara I (1 Laporan) 11. PKM Cilacap Tengah 2 (1 Laporan) 12. Klinik Pratama Tanjung (1 Laporan) 13. PKM Madukara I (2 Laporan) 14. Klinik Masyitoh Cilacap (1 Laporan) 15. PKM Baturaden I (1 Laporan) 16. Klinik P UMP Tambaksari (1 Laporan) 17. PKM Karangkobar (2 Laporan) 18. PKM Kesugihan I (2 Laporan) 19. PKM Wanareja I (1 Laporan) 20. RSU Dadi Keluarga (2 Laporan) 21. Klinik Pratama Rajal Amanda (1 Laporan) 22. RS PKU Sampang (1 Laporan) 23. RS Aprilia (1 Laporan) 24. RS Wiradadi Husada (2 Laporan)	45	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM per akhir Juli 2026 25/45 * 100% = 55,55 **% saryankes telah lapor (>>> target yang ditetapkan yaitu 27%) atau 205,76 % dari target** Telah dilakukan koordinasi PV dengan Lintas sektor yaitu KOMDA PP KIPI Banjarnegara dan Purbalingga. BPOM harus dilibatkan dalam penanganan penanggulangan KIPI yang ada di masing masing Kab/kota. Kegiatan Koordinasi juga sudah	Seluruh kendala terkait aplikasi error sudah dapat diatasi, Saryankes dapat menggunakan aplikasi dengan lancar dengan pendampingan petugas BPOM Banyumas Koordinasi PV dengan lintas sektor seperti KOMDA PP KIPI di masing-masing daerah terkendala dengan biaya, karena anggaran PV tidak punya anggaran perjadin.	Mengikuti arahan dan masukan dari Biro Perencanaan dan Keuangan Badan POM serta unit pengampu terkait perubahan target dengan memperhatikan kapabilitas yang dimiliki oleh Balai POM di Banyumas.

Bulan s.d. TW IV (Jan-Des)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM					
	Target	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
		25. Klinik UTama Amalia Bunda Cilacap (1 Laporan)		dipublikasikan dalam website dan medsos BPOM Banyumas Koordinasi dengan KOMDA PP KIPI di Cilacap dan Banyumas, serta Asosiasi tenaga kesehatan lain akan diagendakan dalam kegiatan berikutnya.		
Agustus	35%	Jumlah kumulatif Saryankes yang telah melakukan pelaporan aplikasi e-meso sampai akhir bulan Juni adalah 25 Saryankes dengan data sebagai berikut 1. PKM Purwokerto Utara II (1 Laporan) 2. RS JIH Purwokerto (1 Laporan) 3. RS Khusus Mata Purwokerto (1 Laporan) 4. RS Goeteng (10 Laporan) 5. PKM Sumpiuh I (1 Laporan) 6. RS Emanuel Banjarnegara (3 Laporan) 7. Elisabeth Purwokerto (1 Laporan) 8. PKM Banjarnegara 2 (2 Laporan) 9. PKM Baturaden II (1 Laporan) 10. PKM Purwokerto Utara I (1 Laporan) 11. PKM Cilacap Tengah 2 (1 Laporan)	45	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM per akhir Agustus 2026 25/45 * 100% = 55,55 **% saryankes telah lapor (>>> target yang ditetapkan yaitu 27%) atau 205,76 % dari target** Telah dilakukan koordinasi PV	Masih banyak miss persepsi tenaga kesehatan bahwa hanya KTD berat yang dilaporkan	Lakukan penyusunan surat sebagai bukti telah dilaksanakan koordinasi kepada pimpinan organisasi. Pada akhir tahun, apabila masih terdapat organisasi yang belum melaporkan KTD, segera bersurat kepada organisasi tersebut dengan

Bulan s.d. TW IV (Jan-Des)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM					
	Target	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
		12. Klinik Pratama Tanjung (1 Laporan) 13. PKM Madukara I (2 Laporan) 14. Klinik Masyitoh Cilacap (2 Laporan) 15. PKM Baturaden I (1 Laporan) 16. Klinik P UMP Tambaksari (1 Laporan) 17. PKM Karangkobar (2 Laporan) 18. PKM Kesugihan I (2 Laporan) 19. PKM Wanareja I (1 Laporan) 20. RSU Dadi Keluarga (2 Laporan) 21. Klinik Pratama Rajal Amanda (1 Laporan) 22. RS PKU Sampang (1 Laporan) 23. RS Aprilia (1 Laporan) 24. RS Wiradadi Husada (14 Laporan) 25. Klinik UTama Amalia Bunda Cilacap (1 Laporan)		dengan Lintas sektor yaitu KOMDA PP KIPI Banjarnegara dan Purbalingga. BPOM harus dilibatkan dalam penanganan penanggulangan KIPI yang ada di masing masing Kab/kota. Kegiatan Koordinasi juga sudah dipublikasikan dalam website dan medsos BPOM Banyumas Koordinasi dengan KOMDA PP KIPI di Cilacap dan Banyumas, serta Asosiasi tenaga kesehatan lain akan diagendakan dalam kegiatan berikutnya.		penekanan kembali terkait ketentuan pelaporan KTD/ESO. Selain itu, perlu dibentuk grup khusus bagi petugas (APJ) yang bertanggung jawab dalam pelaporan KTD/ESO.
September	35%	Jumlah kumulatif Saryankes yang telah melakukan pelaporan aplikasi e-meso sampai akhir bulan Juni adalah 11	45		Masih banyak miss persepsi tenaga kesehatan	Kembali melihat juknis dari KTD/ESO untuk

Bulan s.d. TW IV (Jan-Des)	Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM					
	Target	Jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO ke BPOM berdasarkan jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM pada tahun berjalan	jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans oleh UPT BPOM	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
		Saryankes dengan data sebagai berikut 1. PKM Purwokerto Utara II (1 Laporan) 2. RS JIH Purwokerto (1 Laporan) 3. RS Khusus Mata Purwokerto (1 Laporan) 4. RS Goeteng (10 Laporan) 5. PKM Sumpiuh I (1 Laporan) 6. RS Emanuel Banjarnegara (3 Laporan) 7. Elisabeth Purwokerto (1 Laporan) 8. PKM Banjarnegara 2 (2 Laporan) 9. PKM Baturaden II (1 Laporan) 10. PKM Purwokerto Utara I (1 Laporan) 11. PKM Cilacap Tengah 2 (1 Laporan)			bahwa hanya KTD berat yang dilaporkan	pencapaian dalam 5 tahun ke depan. Tetap mempertahankan koordinasi dengan sarana pelayanan kesehatan untuk dapat mencapai secara optimal dalam 5 tahun ke depan.

Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan Balai POM di Banyumas TW III 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan-Des)	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan					
	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	0	8	0	Tidak ada kegiatan inspeksi pada bulan Januari	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Februari	0	0	8	0	Tidak ada kegiatan inspeksi pada bulan Februari	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Maret	12.5	1	8	12.5	Belum ada kendala	Mohon untuk capaian yang telah memenuhi target, untuk selalu dipertahankan. Perencanaan yang telah ditetapkan tiap bulan agar dilaksanakan secara optimal dengan efisiensi anggaran yang ada.
April	37.5	3	8	37.5	Sarana tidak melakukan produksi sehingga tidak bisa dilakukan sampling produk di sarana produksi	Tetap pertahankan apa yang telah tercapai. Perhatikan capaian kegiatan dan serapan anggaran agar dapat tercapai secara optimal.
Mei	37.5	3	8	37.5	Sarana tidak melakukan produksi sehingga tidak bisa dilakukan sampling produk di sarana produksi	Ke depannya sesuaikan target baru yang telah diusulkan apabila sudah disetujui oleh Biro Perencanaan dan Keuangan. Tidak lupa untuk follow up terkait hal tersebut.
Juni	37.5	3	8	37.5	Belum ada kendala. Target sudah tercapai di	Anggaran bisa dimaksimalkan agar mampu mencapai target yang telah direncanakan sampai

Bulan s.d. TW IV (Jan-Des)	Persentase Cakupan Sarprod Fortifikasi yang Diperiksa dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan					
	Target	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	Jumlah Sarana Produksi Pangan Fortifikasi Keseluruhan yang berada di wilayah UPT	% Cakupan Sarprod Fortif	Kendala	Rekomendasi
					bulan April	akhir periode. Pelaporan tindaklanjut untuk diperhatikan agar sesuai dengan timeline.
Juli	33.3	3	9	33.33	Belum ada kendala. Target sudah tercapai di bulan April	Tetap perhatikan timeline yang sudah dirancang untuk pangan fortifikasi, pastikan untuk melaksanakan tindak lanjut sesuai kebutuhan.
Agustus	33.3	3	9	33.33	Belum ada kendala. Target sudah tercapai di bulan April	Mempertahankan capaian hingga akhir periode tahun 2026. Pastikan seluruh rangkaian kegiatan dan persuratan maupun dokumentasi tersimpan secara lengkap dan baik. Di samping itu, terus berkoordinasi dengan unit pengampu agar capaian optimal sampai akhir tahun.
September	33.3	3	9	33.33	Belum ada kendala. Target sudah tercapai di bulan April	Tetap perhatikan pelaporan yang harus dilaksanakan sampai dengan Triwulan IV 2026. Pastikan tidak melewati *timeline* dan berjalan sebagaimana mestinya.

Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah Balai POM di Banyumas TW III 2026

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
Januari	0	Penggunaan Tool pengawasan AMR	Tidak ada kendala	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Februari	0	Penggunaan Tool pengawasan AMR	Tidak menemukan kendala	Tetap perhatikan target yang telah ditetapkan
Maret	0	Penggunaan Tool pengawasan AMR Publikasi AMR di Maret 2026	Tidak terdapat kendala	Setiap bulannya untuk mohon dapat selalu di update, pastikan bahwa perencanaan, penyerapan anggaran dan pelaksanaan dilakukan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Apabila sedang turun di lapangan, silahkan untuk menyelipkan materi AMR.
April	0	Hingga 4 April 2026 telah tercapai Seluruh pemeriksaan sarana Apotek telah menggunakan Tool pengawasan AMR Pelaksanaan Publikasi AMR (Maret 2026), KIE AMR di April 2026	Tidak terdapat kendala Koordinasi dan advokasi AMR dengan lintas sektor diagendakan Mei 2026	Laksanakan apa yang telah direncanakan secara optimal baik dari pihak sarana, tempat, waktu kegiatan, dan anggaran.
Mei	0	Penggunaan tools AMR pada saat pemeriksaan Apotek (on going) Publikasi AMR tercapai setiap triwulan (TW berikutnya on going) Advokasi lintas sector tercapai, 2 kali advokais ke Dinkes Banjarnegara dan Dinkes Purbalingga (Selesai) KIE AMR kepada masyarakat telah terlaksana bulan April (Selesai)	Tidak terdapat kendala Sedang menunggu informasi dari Dinkes Banjarnegara da Purbalingga untuk kegiatan Bimtek AMR	Dimaksimalkan kembali rangkaian kegiatan yang belum terlaksana. Pastikan kegiatan berjalan sesuai dengan perencanaan baik dari segi waktu, pelaksanaan, dan serapan anggaran yang telah direncanakan.
Juni	0	Penggunaan tools AMR pada saat pemeriksaan Apotek (on going) Publikasi AMR tercapai setiap triwulan (TW I dan TW II terlaksana), Lanjut TW berikutnya	Tidak ada kendala terkait penggunaan tools AMR dalam pemeriksaan sarana, sudah dielaborasi dalam ceklist pemeriksaan rutin di Apotek	Maksimalkan kegiatan yang telah direncanakan, mungkin bisa dibarengi oleh kegiatan lainnya agar mampu efisien secara anggaran. KIE melalui media sosial bisa dioptimalkan kembali agar jangkauan bisa lebih luas kembali.

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
		Advokasi lintas sector tercapai, 2 kali terlaksana yaitu: A dvokasi dan koordinasi ke Dinkes Banjarnegara dan Dinkes Purbalingga (Selesai) KIE Bimtek AMR kepada masyarakat telah terlaksana bulan April (Selesai) BImtek AMR Apotek dijadwalkan 1 Juli 2026 dalam kegiatan Bimtek Apotek dan Toko Obat oleh Dinkes Cilacap dan Dinkes Purbalingga di W3	Publikasi AMR tidak ada terkendala, berjalan setiap triwulan sekali, di bulan Maret dan Juni Advokasi tidak ada kendala, terlaksana 2 kali, melebihi target yang ditetapkan 1 kali dalam setahun KIE AMR ke masyarakat dapat dilakukan dielaborasikan dalam kegiatan infokom pada saat penyuluhan/sosialiasi ke masyarakat BImtek AMR ke Apotek baru terlaksana di tanggal 1 Juli, kolabotrasi dengan Dinkes Cilacap pada acara Bimtek Apotek dan Toko Obat Bimtek AMR di Purbalingga, masih menunggu informasi Dinkes Purbalingga, dijadwalkan dalam W3 Juli 2026	
Juli	0	Penggunaan tools AMR pada saat pemeriksaan Apotek (on going) Publikasi AMR tercapai setiap triwulan (TW I dan TW II terlaksana), Lanjut TW berikutnya Advokasi lintas sector tercapai, 2 kali terlaksana yaitu: Advokasi dan koordinasi ke Dinkes Banjarnegara dan Dinkes Purbalingga (Selesai) KIE Bimtek AMR kepada masyarakat telah terlaksana bulan April (Selesai) Bimtek AMR telah terlaksana 2 kali yaitu Bimtek Apotek tanggal 1 Juli 2026 di Cilacap dan Bimtek Apotek 22 Juli 2026 di Purbalingga.	Tidak ada kendala terkait penggunaan tools AMR dalam pemeriksaan sarana, sudah dielaborasi dalam ceklist pemeriksaan rutin di Apotek Publikasi AMR tidak ada terkendala, berjalan setiap triwulan sekali, di bulan Maret dan Juni Advokasi tidak ada kendala, terlaksana 2 kali, melebihi target yang ditetapkan 1 kali dalam setahun KIE AMR ke masyarakat dapat dilakukan dielaborasikan dalam kegiatan infokom pada saat penyuluhan/sosialiasi ke masyarakat Tidak ada alokasi dana khusus AMR, Bimtek AMR dilaksanakan pada kegiatan Dinas	Maksimalkan kegiatan yang telah direncanakan, mungkin bisa dibarengi oleh kegiatan lainnya agar mampu efisien secara anggaran. KIE melalui media sosial bisa dioptimalkan kembali agar jangkauan bisa lebih luas kembali.

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
			Kesehatan CIlacap dan Purbalingga. Penjajakan dengan Dinkes lain sedang dalam proses.	
Agustus	0	Penggunaan tools AMR pada saat pemeriksaan Apotek (on going) Publikasi AMR tercapai setiap triwulan (TW I dan TW II terlaksana), Lanjut TW berikutnya Advokasi lintas sector tercapai, 2 kali terlaksana yaitu: Advokasi dan koordinasi ke Dinkes Banjarnegara dan Dinkes Purbalingga (Selesai) KIE Bimtek AMR kepada masyarakat telah terlaksana bulan April (Selesai) Bimtek AMR telah terlaksana 2 kali yaitu Bimtek Apotek tanggal 1 Juli 2026 di Cilacap dan Bimtek Apotek 22 Juli 2026 di Purbalingga.	Tidak ada kendala, 90% target sudah tercapai Target yang masih on going adalah penggunaan tools AMR dalam pemeriksaan sarana serta publikasi AMR setiap TW.	Untuk anggaran silahkan diajukan sesuai dengan kebutuhan pada tahun 2027 dengan memperhatikan porsi anggaran yang sesuai ketentuan berlaku.
September	0	Penggunaan tools AMR pada saat pemeriksaan Apotek (on going) Publikasi AMR tercapai setiap triwulan (TW I dan TW II terlaksana), Lanjut TW berikutnya Advokasi lintas sector tercapai, 2 kali terlaksana yaitu: Advokasi dan koordinasi ke Dinkes Banjarnegara dan Dinkes Purbalingga (Selesai) KIE Bimtek AMR kepada masyarakat telah terlaksana bulan April (Selesai) Bimtek AMR telah terlaksana 2 kali yaitu Bimtek Apotek tanggal 1 Juli 2026 di Cilacap dan Bimtek	Tidak ada kendala, 90% target sudah tercapai Target yang masih on going adalah penggunaan tools AMR dalam pemeriksaan sarana serta publikasi AMR setiap TW.	Jalankan kegiatan AMR sesuai dengan juknis dan perhatikan kembali serapan anggaran serta anggaran yang tersedia.

Bulan s.d. TW IV (Jan - Des)	Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT			
	Target	Realisasi	Kendala	Rekomendasi
		Apotek 22 Juli 2026 di Purbalingga.		